BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a	pendapatan		Rp1.264.668.588.709,20
b	belanja		Rp1.292.282.977.582,22
	surplus/defisit		Rp (27.614.388.873,02)
c	pembiayaan :		
	1. penerimaan	Rp	40.883.452.335,71
	2. pengeluaran	Rp	0,00
	3. pembiayaan netto	Rp	40.883.452.335,71

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp106.664.812.216,80 (seratus enam miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah delapan nol sen) dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.371.333.400.926,00
2.	realisasi	Rp1.264.668.588.709,20
	selisih lebih/kurang	Rp 106.664.812.216,80

b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp118.936.233.167,78 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.411.219.210.750,00
2.	realisasi	Rp1.292.282.977.582,22
	selisih lebih/kurang	Rp 118.936.233.167,78

c selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp997.642.511,71) (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah tujuh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	39.885.809.824,00
2.	realisasi	Rp	40.883.452.335,71
	selisih lebih/kurang	Rp	(997.642.511,71)

Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	40.882.706.881,96
b.	penggunaan sisa anggaran lebih sebagai pembiayaan tahun berjalan	Rp	40.883.452.335,71
c.	koreksi kesalahan pembukuan		

	tahun sebelumnya	Rp	745.453,75
d.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	13.269.063.462,69
	sisa anggaran lebih akhir	Rp	13.269.063.462,69

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp1.649.391.830.376,66
b.	jumlah kewajiban	Rp 170.059.407.954,75
c.	ekuitas	Rp1.479.332.422.421,91

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	pendapatan operasional	Rp1.273.375.732.232,22	
b.	beban	Rp1.200.290.336.566,06	
c.	surplus/defisit operasional	Rp	73.085.395.666,16
d.	surplus/defisit non operasional	Rp	(8.511.776.445,49)
e.	surplus/defisit setelah pos luar biasa	Rp	0,00
f.	surplus/defisit – laporan operasional	Rp	64.573.619.220,67

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	40.883.452.335,96
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp	183.631.272.982,29
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(211.245.661.855,31)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(745.454,00)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	13.269.063.462,69

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp1.417.352.886.340,64	
b.	surplus/defisit laporan operasional	Rp	64.573.619.220,67
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	(2.594.083.139,40)
d.	ekuitas akhir	Rp1.479.332.422.421,91	

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
   1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   3. Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : laporan operasional;
d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : neraca;
f. Lampiran VI : laporan arus kas;
g. Lampiran VII : catatatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 Agustus 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: 10, 39 / 2024)

DAFTAR ISI

Lampiran I LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran I.1 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran I.2 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I.3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Sekretariat Daerah
19. Sekretariat DPRD
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
21. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

22. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Riset dan Inovasi Daerah
24. Inspektorat
25. Kecamatan Bangli
26. Kecamatan Kintamani
27. Kecamatan Susut
28. Kecamatan Tembuku
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran I.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Lampiran II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Lampiran III	LAPORAN OPERASIONAL
Lampiran IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Lampiran V	NERACA
Lampiran VI	LAPORAN ARUS KAS
Lampiran VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Lampiran VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
Lampiran IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Lampiran X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
Lampiran XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVENSTASI) PEMERINTAH DAERAH
Lampiran XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
Lampiran XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
Lampiran XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
Lampiran XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
Lampiran XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
Lampiran XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Lampiran XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Lampiran XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
Lampiran XX	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.1 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.2 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	%	REALISASI TA 2022
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	1,371,333,400,926.00	1,264,668,588,709.20	92.22	1,105,440,499,468.50
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	255,527,244,826.00	219,918,641,353.81	86.06	144,005,842,858.50
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	49,239,015,000.00	52,316,682,159.00	106.25	36,707,060,479.07
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	69,550,144,000.00	57,401,453,950.00	82.53	36,328,299,166.20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5,522,360,500.00	5,887,399,995.08	106.61	5,597,430,541.18
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	131,215,725,326.00	104,313,105,249.73	79.50	65,373,052,672.05
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1,114,886,421,100.00	1,041,925,817,049.00	93.46	960,732,038,900.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	912,844,132,000.00	900,285,215,914.00	98.62	805,596,462,637.00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	821,876,334,000.00	809,317,417,914.00	98.47	739,520,744,637.00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	30,884,546,000.00	30,884,546,000.00	100.00	10,515,789,000.00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	60,083,252,000.00	60,083,252,000.00	100.00	55,559,929,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	202,042,289,100.00	141,640,601,135.00	70.10	155,135,576,263.00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	112,102,112,041.00	106,999,308,955.00	95.45	92,910,305,211.00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	89,940,177,059.00	34,641,292,180.00	38.52	62,225,271,052.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	919,735,000.00	2,824,130,306.39	307.06	702,617,710.00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	804,735,000.00	2,709,130,306.39	336.65	702,617,710.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	115,000,000.00	115,000,000.00	100.00	-
BELANJA DAERAH	5.1.2	1,411,219,210,750.00	1,292,282,977,582.22	91.57	1,239,853,052,692.60
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	951,563,767,487.00	914,648,663,716.91	96.12	802,381,255,582.79
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	565,287,279,009.00	543,502,784,759.00	96.15	515,867,247,541.00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	302,805,994,000.00	291,007,733,555.91	96.10	273,729,368,016.95
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4,637,465,040.00	4,504,678,363.00	97.14	3,297,019,892.57
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	78,570,333,438.00	75,439,846,039.00	96.02	9,234,589,134.27
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	262,696,000.00	193,621,000.00	73.71	253,030,998.00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	291,056,034,403.00	211,649,206,855.31	72.72	293,929,282,841.81
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	10,815,000,000.00	7,778,752,574.00	71.93	14,134,423,669.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	26,585,584,992.00	24,351,077,732.00	91.60	60,358,662,837.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	189,302,850,759.00	133,121,744,861.03	70.32	180,104,496,229.81
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	62,985,978,652.00	45,773,863,865.78	72.67	37,746,357,806.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	822,795,300.00	85,109,295.00	10.34	1,585,342,300.00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	543,824,700.00	538,658,527.50	99.05	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	2,102,258,760.00	-	-	2,430,457,000.00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	2,102,258,760.00	-	-	2,430,457,000.00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	166,497,150,100.00	165,985,107,010.00	99.69	141,112,057,268.00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	12,017,402,100.00	12,017,402,100.00	100.00	6,717,100,000.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	4,923,901,500.00	4,923,901,500.00	100.00	2,192,139,000.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	7,093,500,600.00	7,093,500,600.00	100.00	4,524,961,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	154,479,748,000.00	153,967,704,910.00	99.67	134,394,957,268.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.1	154,479,748,000.00	153,967,704,910.00	99.67	134,394,957,268.00
SURPLUS/(DEFISIT)		(39,885,809,824.00)	(27,614,388,873.02)	69.23	(134,412,553,224.10)
PEMBIAYAAN	5.1.3	39,885,809,824.00	40,883,452,335.71	102.50	175,295,260,106.06
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	40,882,706,879.00	40,883,452,335.71	100.00	178,295,260,106.06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	40,882,706,879.00	40,883,452,335.71	100.00	117,202,607,549.06
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	-	-	-	61,092,652,557.00

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	%	REALISASI TA 2022
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	996,897,055.00	-	-	3,000,000,000.00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	-	-	-	3,000,000,000.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	996,897,055.00	-	-	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	5.1.4	-	13,269,063,462.69	-	40,882,706,881.96

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.371.333.400.926,00	1.264.668.588.709,20	(106.664.812.216,80)	92,22
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	120.700.225.368,00	149.105.373.945,74	28.405.148.577,74	123,53
4.1.01	**PENDIDIKAN**	85.910.000,00	40.786.316.382,00	40.700.406.382,00	47.475,63
4.1.01.1-01.2-19.0-00.03	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	85.910.000,00	40.786.316.382,00	40.700.406.382,00	47.475,63
4.1.02	**KESEHATAN**	118.056.235.368,00	107.643.978.563,74	(10.412.256.804,26)	91,18
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	18.056.235.368,00	22.578.362.110,15	4.522.126.742,15	125,04
4.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	100.000.000.000,00	85.065.616.453,59	(14.934.383.546,41)	85,07
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	2.558.080.000,00	675.079.000,00	(1.883.001.000,00)	26,39
4.1.03.1-03.1-04.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.558.080.000,00	675.079.000,00	(1.883.001.000,00)	26,39
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.453.969.000,00	1.171.105.180,00	(282.863.820,00)	80,55
4.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	145.095.000,00	109.761.000,00	(35.334.000,00)	75,65
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	145.095.000,00	109.761.000,00	(35.334.000,00)	75,65
4.2.15	**PERHUBUNGAN**	1.115.080.000,00	795.029.180,00	(320.050.820,00)	71,30
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	1.115.080.000,00	795.029.180,00	(320.050.820,00)	71,30
4.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	193.794.000,00	266.315.000,00	72.521.000,00	137,42
4.2.16.2-16.2-21.2-20.03	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	193.794.000,00	266.315.000,00	72.521.000,00	137,42
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	65.587.605.000,00	56.958.892.175,00	(8.628.712.825,00)	86,84
4.3.26	**PARIWISATA**	55.148.779.000,00	52.936.886.000,00	(2.211.893.000,00)	95,99
4.3.26.3-26.2-22.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	55.148.779.000,00	52.936.886.000,00	(2.211.893.000,00)	95,99
4.3.27	**PERTANIAN**	500.322.000,00	261.001.100,00	(239.320.900,00)	52,17
4.3.27.3-27.3-25.2-09.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	500.322.000,00	261.001.100,00	(239.320.900,00)	52,17
4.3.31	**PERINDUSTRIAN**	9.938.504.000,00	3.761.005.075,00	(6.177.498.925,00)	37,84
4.3.31.3-31.3-30.0-00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.938.504.000,00	3.761.005.075,00	(6.177.498.925,00)	37,84
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	1.183.591.601.558,00	1.057.433.217.408,46	(126.158.384.149,54)	89,34
4.5.02	**KEUANGAN**	1.183.591.601.558,00	1.057.433.217.408,46	(126.158.384.149,54)	89,34
4.5.02.5-02.0-00.0-00.04	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.183.591.601.558,00	1.057.433.217.408,46	(126.158.384.149,54)	89,34
5	**BELANJA DAERAH**	1.411.219.210.750,00	1.292.282.977.582,22	(118.936.233.167,78)	91,57
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	709.969.496.877,00	634.335.615.687,34	(75.633.881.189,66)	89,35
5.1.01	**PENDIDIKAN**	305.918.577.439,00	284.690.494.270,95	(21.228.083.168,05)	93,06

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	305.918.577.439,00	284.690.494.270,95	(21.228.083.168,05)	93,06
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	272.855.038.389,00	255.943.748.732,95	(16.911.289.656,05)	93,80
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	218.269.532.284,00	201.312.446.905,00	(16.957.085.379,00)	92,23
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.161.860.105,00	47.345.054.079,95	183.193.974,95	100,39
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.05	Belanja Hibah	7.170.950.000,00	7.102.586.748,00	(68.363.252,00)	99,05
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.06	Belanja Bantuan Sosial	252.696.000,00	183.661.000,00	(69.035.000,00)	72,68
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2	BELANJA MODAL	33.063.539.050,00	28.746.745.538,00	(4.316.793.512,00)	86,94
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.01	Belanja Modal Tanah	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	(3.036.247.426,00)	71,93
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.455.732.750,00	5.968.174.023,00	(487.558.727,00)	92,45
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.978.736.000,00	14.915.559.646,00	(63.176.354,00)	99,58
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	814.070.300,00	84.259.295,00	(729.811.005,00)	10,35
5.1.02	**KESEHATAN**	287.131.049.115,00	259.305.061.236,39	(27.825.987.878,61)	90,31
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	**Dinas Kesehatan**	130.990.044.693,00	122.063.216.527,23	(8.926.828.165,77)	93,19
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	121.149.423.617,00	113.763.626.714,23	(7.385.796.902,77)	93,90
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	56.507.034.191,00	54.657.105.364,00	(1.849.928.827,00)	96,73
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.192.389.426,00	58.662.005.497,23	(5.530.383.928,77)	91,38
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	444.515.853,00	(5.484.147,00)	98,78
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	9.840.621.076,00	8.299.589.813,00	(1.541.031.263,00)	84,34
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.862.985.276,00	4.165.940.473,00	(697.044.803,00)	85,67
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.566.706.200,00	3.742.449.159,00	(824.257.041,00)	81,95
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	410.929.600,00	391.200.181,00	(19.729.419,00)	95,20
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	**Rumah Sakit Umum Daerah**	156.141.004.422,00	137.241.844.709,16	(18.899.159.712,84)	87,90
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	110.757.329.222,00	119.292.039.184,11	8.534.709.962,11	107,71
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	72.949.541.995,00	73.535.345.422,00	585.803.427,00	100,80
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.170.322.187,00	41.252.015.399,11	8.081.693.212,11	124,36
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.03	Belanja Bunga	4.637.465.040,00	4.504.678.363,00	(132.786.677,00)	97,14
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	45.383.675.200,00	17.949.805.525,05	(27.433.869.674,95)	39,55
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.763.675.200,00	3.689.458.135,00	(74.217.065,00)	98,03
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.500.000.000,00	14.235.580.390,05	(27.264.419.609,95)	34,30
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.000.000,00	24.767.000,00	(95.233.000,00)	20,64
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	89.928.682.252,00	64.064.700.076,00	(25.863.982.176,00)	71,24
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	89.928.682.252,00	64.064.700.076,00	(25.863.982.176,00)	71,24
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	21.966.109.705,00	19.416.706.665,00	(2.549.403.040,00)	88,39
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.796.284.505,00	11.660.236.628,00	(136.047.877,00)	98,85
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.009.825.200,00	7.597.110.037,00	(2.412.715.163,00)	75,90
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	159.360.000,00	(640.000,00)	99,60
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	67.962.572.547,00	44.647.993.411,00	(23.314.579.136,00)	65,69
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.388.900,00	150.842.910,00	(45.545.990,00)	76,81
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.010.000.000,00	8.081.271.833,00	(12.928.728.167,00)	38,46
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.445.333.647,00	36.108.984.884,00	(10.336.348.763,00)	77,75

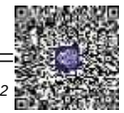

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	310.000.000,00	306.043.784,00	(3.956.216,00)	98,72
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	20.894.993.806,00	20.571.901.504,00	(323.092.302,00)	98,45
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	12.518.621.306,00	12.353.077.531,00	(165.543.775,00)	98,68
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	12.518.621.306,00	12.353.077.531,00	(165.543.775,00)	98,68
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.520.967.375,00	10.417.422.119,00	(103.545.256,00)	99,02
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.653.931,00	1.935.655.412,00	(61.998.519,00)	96,90
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**	8.376.372.500,00	8.218.823.973,00	(157.548.527,00)	98,12
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	8.028.405.500,00	7.882.698.673,00	(145.706.827,00)	98,19
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	6.175.059.000,00	6.156.033.309,00	(19.025.691,00)	99,69
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.346.500,00	1.726.665.364,00	(126.681.136,00)	93,16
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	347.967.000,00	336.125.300,00	(11.841.700,00)	96,60
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.967.000,00	298.950.000,00	(11.017.000,00)	96,45
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.000.000,00	37.175.300,00	(824.700,00)	97,83
5.1.06	**SOSIAL**	6.096.194.265,00	5.703.458.600,00	(392.735.665,00)	93,56
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	6.096.194.265,00	5.703.458.600,00	(392.735.665,00)	93,56
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	6.092.886.765,00	5.700.908.600,00	(391.978.165,00)	93,57
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	4.340.451.215,00	4.241.164.241,00	(99.286.974,00)	97,71
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.672.435.550,00	1.379.784.359,00	(292.651.191,00)	82,50
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.2	BELANJA MODAL	3.307.500,00	2.550.000,00	(757.500,00)	77,10
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.307.500,00	2.550.000,00	(757.500,00)	77,10
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	107.007.018.822,00	93.873.366.926,17	(13.133.651.895,83)	87,73
5.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	35.713.658.650,00	35.246.031.965,39	(467.626.684,61)	98,69
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	**Dinas Lingkungan Hidup**	35.713.658.650,00	35.246.031.965,39	(467.626.684,61)	98,69
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	32.836.229.650,00	32.402.318.445,50	(433.911.204,50)	98,68
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	25.196.847.600,00	25.100.686.137,00	(96.161.463,00)	99,62
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.589.382.050,00	7.251.632.308,50	(337.749.741,50)	95,55
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.877.429.000,00	2.843.713.519,89	(33.715.480,11)	98,83
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.657.694.000,00	1.635.100.000,00	(22.594.000,00)	98,64
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.219.735.000,00	1.208.613.519,89	(11.121.480,11)	99,09
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	6.117.415.589,00	5.836.886.607,00	(280.528.982,00)	95,41
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	6.117.415.589,00	5.836.886.607,00	(280.528.982,00)	95,41
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.032.885.589,00	5.759.476.607,00	(273.408.982,00)	95,47
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.544.280.150,00	4.378.225.989,00	(166.054.161,00)	96,35
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.488.605.439,00	1.381.250.618,00	(107.354.821,00)	92,79
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	84.530.000,00	77.410.000,00	(7.120.000,00)	91,58
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.530.000,00	77.410.000,00	(7.120.000,00)	91,58

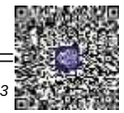

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	12.189.500.354,00	10.893.091.757,00	(1.296.408.597,00)	89,36
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	12.189.500.354,00	10.893.091.757,00	(1.296.408.597,00)	89,36
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	12.105.264.354,00	10.851.691.757,00	(1.253.572.597,00)	89,64
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	4.803.597.904,00	4.774.599.945,00	(28.997.959,00)	99,40
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.241.666.450,00	6.017.091.812,00	(1.224.574.638,00)	83,09
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.2	BELANJA MODAL	84.236.000,00	41.400.000,00	(42.836.000,00)	49,15
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.236.000,00	41.400.000,00	(42.836.000,00)	49,15
5.2.15	**PERHUBUNGAN**	12.816.515.850,00	12.425.436.154,78	(391.079.695,22)	96,95
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	**Dinas Perhubungan**	12.816.515.850,00	12.425.436.154,78	(391.079.695,22)	96,95
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.219.830.950,00	7.973.358.129,00	(246.472.821,00)	97,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.497.651.250,00	4.395.939.705,00	(101.711.545,00)	97,74
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.722.179.700,00	3.577.418.424,00	(144.761.276,00)	96,11
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.596.684.900,00	4.452.078.025,78	(144.606.874,22)	96,85
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.500.000,00	77.571.725,00	(5.928.275,00)	92,90
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.463.184.900,00	4.325.006.300,78	(138.178.599,22)	96,90
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	8.679.078.824,00	8.477.668.826,00	(201.409.998,00)	97,68
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	8.679.078.824,00	8.477.668.826,00	(201.409.998,00)	97,68
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.1	BELANJA OPERASI	8.523.644.574,00	8.323.678.826,00	(199.965.748,00)	97,65
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.1.01	Belanja Pegawai	4.035.599.074,00	3.960.867.526,00	(74.731.548,00)	98,15
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.488.045.500,00	4.362.811.300,00	(125.234.200,00)	97,21
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.2	BELANJA MODAL	155.434.250,00	153.990.000,00	(1.444.250,00)	99,07
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.709.550,00	31.790.000,00	(919.550,00)	97,19
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	122.724.700,00	122.200.000,00	(524.700,00)	99,57
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	14.796.647.000,00	14.210.206.695,00	(586.440.305,00)	96,04
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja**	14.796.647.000,00	14.210.206.695,00	(586.440.305,00)	96,04
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	6.322.391.000,00	6.117.264.800,00	(205.126.200,00)	96,76
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	4.911.545.000,00	4.789.848.136,00	(121.696.864,00)	97,52
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.846.000,00	1.327.416.664,00	(83.429.336,00)	94,09
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2	BELANJA MODAL	8.474.256.000,00	8.092.941.895,00	(381.314.105,00)	95,50
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.124.812.136,00	1.951.292.271,00	(173.519.865,00)	91,83
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.488.203.559,00	5.371.649.624,00	(116.553.935,00)	97,88
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	861.240.305,00	770.000.000,00	(91.240.305,00)	89,41
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	16.694.202.555,00	6.784.044.921,00	(9.910.157.634,00)	40,64
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	16.694.202.555,00	6.784.044.921,00	(9.910.157.634,00)	40,64
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.694.202.555,00	6.394.911.371,00	(299.291.184,00)	95,53
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.577.989.555,00	5.481.504.096,00	(96.485.459,00)	98,27
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.116.213.000,00	913.407.275,00	(202.805.725,00)	81,83
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	389.133.550,00	(9.610.866.450,00)	3,89

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	389.133.550,00	(9.610.866.450,00)	3,89
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	214.761.855.578,00	194.936.879.729,59	(19.824.975.848,41)	90,77
5.3.26	**PARIWISATA**	90.786.418.717,00	78.028.636.565,59	(12.757.782.151,41)	85,95
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	90.786.418.717,00	78.028.636.565,59	(12.757.782.151,41)	85,95
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	76.339.763.517,00	70.903.890.022,00	(5.435.873.495,00)	92,88
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.630.164.517,00	5.157.514.942,00	(472.649.575,00)	91,61
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.770.224.000,00	19.273.000.080,00	(2.497.223.920,00)	88,53
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	48.939.375.000,00	46.473.375.000,00	(2.466.000.000,00)	94,96
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	14.446.655.200,00	7.124.746.543,59	(7.321.908.656,41)	49,32
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.000,00	105.530.000,00	(40.835.000,00)	72,10
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.660.000.000,00	2.908.914.500,09	(751.085.499,91)	79,48
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.590.290.200,00	4.060.484.300,00	(6.529.805.900,00)	38,34
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.817.743,50	(182.256,50)	99,64
5.3.27	**PERTANIAN**	28.877.222.811,00	28.493.426.421,00	(383.796.390,00)	98,67
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	28.877.222.811,00	28.493.426.421,00	(383.796.390,00)	98,67
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1	BELANJA OPERASI	28.742.740.611,00	28.360.495.521,00	(382.245.090,00)	98,67
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1.01	Belanja Pegawai	24.816.633.657,00	24.630.299.172,00	(186.334.485,00)	99,25
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.901.106.954,00	3.705.196.349,00	(195.910.605,00)	94,98
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2	BELANJA MODAL	134.482.200,00	132.930.900,00	(1.551.300,00)	98,85
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.482.200,00	78.685.000,00	(797.200,00)	99,00
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.000.000,00	54.245.900,00	(754.100,00)	98,63
5.3.31	**PERINDUSTRIAN**	95.098.214.050,00	88.414.816.743,00	(6.683.397.307,00)	92,97
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	95.098.214.050,00	88.414.816.743,00	(6.683.397.307,00)	92,97
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	10.831.744.050,00	8.515.159.191,00	(2.316.584.859,00)	78,61
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	4.755.521.050,00	4.644.642.095,00	(110.878.955,00)	97,67
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.026.223.000,00	3.820.517.096,00	(2.205.705.904,00)	63,40
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2	BELANJA MODAL	84.266.470.000,00	79.899.657.552,00	(4.366.812.448,00)	94,82
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.048.900.000,00	2.722.097.795,00	(326.802.205,00)	89,28
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.204.470.000,00	77.164.462.757,00	(4.040.007.243,00)	95,02
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.100.000,00	11.097.000,00	(3.000,00)	99,97
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	129.109.288.354,00	124.089.832.756,00	(5.019.455.598,00)	96,11
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	84.621.970.588,00	81.022.195.702,00	(3.599.774.886,00)	95,75
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01	**Sekretariat Daerah**	84.621.970.588,00	81.022.195.702,00	(3.599.774.886,00)	95,75
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1	BELANJA OPERASI	76.770.581.308,00	73.944.823.410,00	(2.825.757.898,00)	96,32
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1.01	Belanja Pegawai	24.103.967.598,00	23.524.371.848,00	(579.595.750,00)	97,60
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.971.613.710,00	44.315.451.562,00	(1.656.162.148,00)	96,40
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1.05	Belanja Hibah	6.695.000.000,00	6.105.000.000,00	(590.000.000,00)	91,19

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2	BELANJA MODAL	7.851.389.280,00	7.077.372.292,00	(774.016.988,00)	90,14
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.018.514.280,00	2.816.176.400,00	(202.337.880,00)	93,30
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.825.000.000,00	4.261.195.892,00	(563.804.108,00)	88,31
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	0
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	44.487.317.766,00	43.067.637.054,00	(1.419.680.712,00)	96,81
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	**Sekretariat DPRD**	44.487.317.766,00	43.067.637.054,00	(1.419.680.712,00)	96,81
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	44.025.838.766,00	42.611.089.574,00	(1.414.749.192,00)	96,79
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	24.091.339.618,00	23.777.057.932,00	(314.281.686,00)	98,70
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.934.499.148,00	18.834.031.642,00	(1.100.467.506,00)	94,48
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	461.479.000,00	456.547.480,00	(4.931.520,00)	98,93
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.479.000,00	60.879.000,00	(600.000,00)	99,02
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	395.668.480,00	(4.331.520,00)	98,92
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	199.040.576.370,00	194.473.354.490,12	(4.567.221.879,88)	97,71
5.5.01	**PERENCANAAN**	6.286.901.433,00	6.075.658.888,12	(211.242.544,88)	96,64
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	6.286.901.433,00	6.075.658.888,12	(211.242.544,88)	96,64
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.201.908.433,00	6.052.308.888,12	(149.599.544,88)	97,59
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.455.432.283,00	4.403.367.548,00	(52.064.735,00)	98,83
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.476.150,00	1.648.941.340,12	(97.534.809,88)	94,42
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	84.993.000,00	23.350.000,00	(61.643.000,00)	27,47
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.993.000,00	23.350.000,00	(61.643.000,00)	27,47
5.5.02	**KEUANGAN**	185.506.474.861,00	181.603.254.239,00	(3.903.220.622,00)	97,90
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04	**Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**	185.506.474.861,00	181.603.254.239,00	(3.903.220.622,00)	97,90
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	16.882.866.001,00	15.595.347.229,00	(1.287.518.772,00)	92,37
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	10.917.696.701,00	10.560.541.012,00	(357.155.689,00)	96,73
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.965.169.300,00	5.034.806.217,00	(930.363.083,00)	84,40
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	24.200.000,00	22.800.000,00	(1.400.000,00)	94,21
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.200.000,00	22.800.000,00	(1.400.000,00)	94,21
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.4	BELANJA TRANSFER	166.497.150.100,00	165.985.107.010,00	(512.043.090,00)	99,69
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	0,00	100,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	(512.043.090,00)	99,67
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	6.595.456.860,00	6.228.820.203,00	(366.636.657,00)	94,44
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	6.595.456.860,00	6.228.820.203,00	(366.636.657,00)	94,44
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.438.161.860,00	6.080.407.203,00	(357.754.657,00)	94,44
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.977.327.360,00	4.945.359.768,00	(31.967.592,00)	99,36
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.834.500,00	1.135.047.435,00	(325.787.065,00)	77,70
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	157.295.000,00	148.413.000,00	(8.882.000,00)	94,35
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.295.000,00	49.218.000,00	(8.077.000,00)	85,90
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.195.000,00	(805.000,00)	99,20

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	651.743.216,00	565.621.160,00	(86.122.056,00)	86,79
5.5.05.5-05.0-00.0-00.02	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	651.743.216,00	565.621.160,00	(86.122.056,00)	86,79
5.5.05.5-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	619.411.716,00	534.271.160,00	(85.140.556,00)	86,25
5.5.05.5-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	109.404.116,00	94.322.800,00	(15.081.316,00)	86,22
5.5.05.5-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.007.600,00	439.948.360,00	(70.059.240,00)	86,26
5.5.05.5-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	32.331.500,00	31.350.000,00	(981.500,00)	96,96
5.5.05.5-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.331.500,00	31.350.000,00	(981.500,00)	96,96
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	9.511.724.900,00	9.309.406.456,00	(202.318.444,00)	97,87
5.6.01	**INSPEKTORAT**	9.511.724.900,00	9.309.406.456,00	(202.318.444,00)	97,87
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	**Inspektorat**	9.511.724.900,00	9.309.406.456,00	(202.318.444,00)	97,87
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.214.114.900,00	9.026.024.456,00	(188.090.444,00)	97,96
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.398.471.000,00	7.376.973.768,00	(21.497.232,00)	99,71
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.643.900,00	1.649.050.688,00	(166.593.212,00)	90,82
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	297.610.000,00	283.382.000,00	(14.228.000,00)	95,22
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.610.000,00	283.382.000,00	(14.228.000,00)	95,22
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	22.210.949.498,00	21.795.076.620,00	(415.872.878,00)	98,13
5.7.01	**KECAMATAN**	22.210.949.498,00	21.795.076.620,00	(415.872.878,00)	98,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	**Kecamatan Bangli**	10.629.015.905,00	10.368.978.718,00	(260.037.187,00)	97,55
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.421.802.905,00	10.169.648.208,00	(252.154.697,00)	97,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.484.496.155,00	6.347.849.132,00	(136.647.023,00)	97,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.937.306.750,00	3.821.799.076,00	(115.507.674,00)	97,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	207.213.000,00	199.330.510,00	(7.882.490,00)	96,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.213.000,00	49.830.000,00	(7.383.000,00)	87,10
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.500.510,00	(499.490,00)	99,67
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	**Kecamatan Kintamani**	4.114.488.400,00	4.059.464.236,00	(55.024.164,00)	98,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.114.488.400,00	4.059.464.236,00	(55.024.164,00)	98,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.414.269.050,00	3.364.952.388,00	(49.316.662,00)	98,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.219.350,00	694.511.848,00	(5.707.502,00)	99,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	**Kecamatan Susut**	3.173.800.293,00	3.117.320.449,00	(56.479.844,00)	98,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	3.166.313.793,00	3.109.920.449,00	(56.393.344,00)	98,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2.731.020.293,00	2.687.942.789,00	(43.077.504,00)	98,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.293.500,00	421.977.660,00	(13.315.840,00)	96,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	7.486.500,00	7.400.000,00	(86.500,00)	98,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.486.500,00	7.400.000,00	(86.500,00)	98,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	**Kecamatan Tembuku**	4.293.644.900,00	4.249.313.217,00	(44.331.683,00)	98,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	4.083.467.700,00	4.040.863.217,00	(42.604.483,00)	98,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	3.734.512.900,00	3.695.976.648,00	(38.536.252,00)	98,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.954.800,00	344.886.569,00	(4.068.231,00)	98,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	210.177.200,00	208.450.000,00	(1.727.200,00)	99,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.177.200,00	9.900.000,00	(277.200,00)	97,28

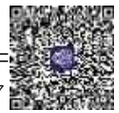

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.550.000,00	(1.450.000,00)	99,28
5.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	19.608.300.351,00	19.469.444.917,00	(138.855.434,00)	99,29
5.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	19.608.300.351,00	19.469.444.917,00	(138.855.434,00)	99,29
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	19.608.300.351,00	19.469.444.917,00	(138.855.434,00)	99,29
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	19.608.300.351,00	19.469.444.917,00	(138.855.434,00)	99,29
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.540.641.613,00	3.430.187.395,00	(110.454.218,00)	96,88
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.167.650.300,00	1.139.249.084,00	(28.401.216,00)	97,57
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	14.900.008.438,00	14.900.008.438,00	0,00	100,00
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	41.879.603.934,00	40.883.452.335,71	(996.151.598,29)	97,62
6.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	0,00	-0,25	(0,25)	0
6.1.01	**PENDIDIKAN**	0,00	-0,25	(0,25)	0
6.1.01.1-01.2-19.0-00.03	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	0,00	-0,25	(0,25)	0
6.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-0,25	(0,25)	0
6.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-0,25	(0,25)	0
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	41.879.603.934,00	40.883.452.335,96	(996.151.598,04)	97,62
6.5.02	**KEUANGAN**	41.879.603.934,00	40.883.452.335,96	(996.151.598,04)	97,62
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04	**Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**	41.879.603.934,00	40.883.452.335,96	(996.151.598,04)	97,62
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.882.706.879,00	40.883.452.335,96	745.456,96	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.882.706.879,00	40.883.452.335,96	745.456,96	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	996.897.055,00	0,00	(996.897.055,00)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	996.897.055,00	0,00	(996.897.055,00)	0

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

LAMPIRAN I.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.371.333.400.926,00	1.264.668.588.709,20	92,22	1.105.440.499.468,50
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	255.527.244.826,00	219.918.641.353,81	86,06	144.005.842.858,50
4.1.01	**Pajak Daerah**	49.239.015.000,00	52.316.682.159,00	106,25	36.707.060.479,07
4.1.02	**Retribusi Daerah**	69.550.144.000,00	57.401.453.950,00	82,53	36.328.299.166,20
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	5.522.360.500,00	5.887.399.995,08	106,61	5.597.430.541,18
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	131.215.725.326,00	104.313.105.249,73	79,50	65.373.052.672,05
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.114.886.421.100,00	1.041.925.817.049,00	93,46	960.732.038.900,00
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	912.844.132.000,00	900.285.215.914,00	98,62	805.596.462.637,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	821.876.334.000,00	809.317.417.914,00	98,47	739.520.744.637,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	30.884.546.000,00	30.884.546.000,00	100,00	10.515.789.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	60.083.252.000,00	60.083.252.000,00	100,00	55.559.929.000,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	202.042.289.100,00	141.640.601.135,00	70,10	155.135.576.263,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	112.102.112.041,00	106.999.308.955,00	95,45	92.910.305.211,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	89.940.177.059,00	34.641.292.180,00	38,52	62.225.271.052,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	919.735.000,00	2.824.130.306,39	307,06	702.617.710,00
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	804.735.000,00	2.709.130.306,39	336,65	702.617.710,00
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	1.411.219.210.750,00	1.292.282.977.582,22	91,57	1.239.853.052.692,60
5.1	**BELANJA OPERASI**	951.563.767.487,00	914.648.663.716,91	96,12	802.381.255.582,79
5.1.01	**Belanja Pegawai**	565.287.279.009,00	543.502.784.759,00	96,15	515.867.247.541,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	302.805.994.000,00	291.007.733.555,91	96,10	273.729.368.016,95
5.1.03	**Belanja Bunga**	4.637.465.040,00	4.504.678.363,00	97,14	3.297.019.892,57
5.1.05	**Belanja Hibah**	78.570.333.438,00	75.439.846.039,00	96,02	9.234.589.134,27
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	262.696.000,00	193.621.000,00	73,71	253.030.998,00
5.2	**BELANJA MODAL**	291.056.034.403,00	211.649.206.855,31	72,72	293.929.282.841,81
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	71,93	14.134.423.669,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	26.585.584.992,00	24.351.077.732,00	91,60	60.358.662.837,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	189.302.850.759,00	133.121.744.861,03	70,32	180.104.496.229,81
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	62.985.978.652,00	45.773.863.865,78	72,67	37.746.357.806,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	822.795.300,00	85.109.295,00	10,34	704.060.700,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	543.824.700,00	538.658.527,50	99,05	881.281.600,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	2.102.258.760,00	0,00	0,00	2.430.457.000,00
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	2.102.258.760,00	0,00	0,00	2.430.457.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	166.497.150.100,00	165.985.107.010,00	99,69	141.112.057.268,00
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	100,00	6.717.100.000,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	99,67	134.394.957.268,00
	SURPLUS / DEFISIT	(39.885.809.824,00)	(27.614.388.873,02)	0	(134.412.553.224,10)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	100,00	178.295.260.106,06
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	100,00	117.202.607.549,06
6.1.05	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	0,00	0,00	0	61.092.652.557,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	996.897.055,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	0,00	0,00	0	3.000.000.000,00
6.2.03	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	996.897.055,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.885.809.824,00	40.883.452.335,71	102,50	175.295.260.106,06
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**13.269.063.462,69**	**0**	**40.882.706.881,96**

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lampiran I.3: Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN

SKPD : 1-01.2-19.0-00.03 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	85.910.000,00	40.786.316.382,00	40.700.406.382,00	47.475,63		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	85.910.000,00	0,00	(85.910.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	85.910.000,00	0,00	(85.910.000,00)	0		
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	40.786.316.382,00	40.786.316.382,00	0		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	40.786.316.382,00	40.786.316.382,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	305.918.577.439,00	284.690.494.270,95	(21.228.083.168,05)	93,06		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	211.509.296.234,00	195.179.348.977,00	(16.329.947.257,00)	92,28		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	209.405.156.284,00	193.200.555.505,00	(16.204.600.779,00)	92,26		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	209.405.156.284,00	193.200.555.505,00	(16.204.600.779,00)	92,26		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	209.405.156.284,00	193.200.555.505,00	(16.204.600.779,00)	92,26		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	209.405.156.284,00	193.200.555.505,00	(16.204.600.779,00)	92,26		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.730.000,00	53.271.500,00	(7.458.500,00)	87,72		
01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	60.730.000,00	53.271.500,00	(7.458.500,00)	87,72		
01.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.730.000,00	53.271.500,00	(7.458.500,00)	87,72		
01.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.730.000,00	53.271.500,00	(7.458.500,00)	87,72		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.284.450,00	297.536.900,00	(52.747.550,00)	84,94		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.151.800,00	6.622.000,00	(1.529.800,00)	81,23		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.151.800,00	6.622.000,00	(1.529.800,00)	81,23		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.151.800,00	6.622.000,00	(1.529.800,00)	81,23		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.442.350,00	251.018.400,00	(22.423.950,00)	91,80		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	273.442.350,00	251.018.400,00	(22.423.950,00)	91,80		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	48.450.000,00	44.900.000,00	(3.550.000,00)	92,67		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.992.350,00	206.118.400,00	(18.873.950,00)	91,61		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.932.800,00	19.339.400,00	(28.593.400,00)	40,35		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	47.932.800,00	19.339.400,00	(28.593.400,00)	40,35		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.932.800,00	19.339.400,00	(28.593.400,00)	40,35		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.527.500,00	3.500.000,00	(27.500,00)	99,22		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.527.500,00	3.500.000,00	(27.500,00)	99,22		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.527.500,00	3.500.000,00	(27.500,00)	99,22		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.230.000,00	17.057.100,00	(172.900,00)	99,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.230.000,00	17.057.100,00	(172.900,00)	99,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.230.000,00	17.057.100,00	(172.900,00)	99,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.771.000,00	161.703.700,00	(21.067.300,00)	88,47		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.771.000,00	161.703.700,00	(21.067.300,00)	88,47		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	133.500.000,00	122.500.000,00	(11.000.000,00)	91,76		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.500.000,00	122.500.000,00	(11.000.000,00)	91,76		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	49.271.000,00	39.203.700,00	(10.067.300,00)	79,57		
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.271.000,00	39.203.700,00	(10.067.300,00)	79,57		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.640.000,00	1.124.355.247,00	(25.284.753,00)	97,80		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.790.000,00	22.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.790.000,00	22.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.790.000,00	22.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	147.615.247,00	(12.384.753,00)	92,26		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	147.615.247,00	(12.384.753,00)	92,26		
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	27.780.000,00	27.780.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.220.000,00	119.835.247,00	(12.384.753,00)	90,63		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	966.850.000,00	953.950.000,00	(12.900.000,00)	98,67		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	966.850.000,00	953.950.000,00	(12.900.000,00)	98,67		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	966.850.000,00	953.950.000,00	(12.900.000,00)	98,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.814.500,00	296.026.125,00	(18.788.375,00)	94,03		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.934.500,00	257.081.125,00	(9.853.375,00)	96,31		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	266.934.500,00	257.081.125,00	(9.853.375,00)	96,31		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	42.600.000,00	41.520.000,00	(1.080.000,00)	97,46		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.334.500,00	215.561.125,00	(8.773.375,00)	96,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.880.000,00	38.945.000,00	(8.935.000,00)	81,34		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	47.880.000,00	38.945.000,00	(8.935.000,00)	81,34		
01.2.09.06.5.1.01	Belanja Pegawai	8.490.000,00	4.630.000,00	(3.860.000,00)	54,53		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.390.000,00	34.315.000,00	(5.075.000,00)	87,12		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	77.031.568.705,00	75.278.961.995,95	(1.752.606.709,05)	97,72		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	45.613.738.819,00	44.974.183.585,34	(639.555.233,66)	98,60		
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.284.650.000,00	2.284.650.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.284.650.000,00	2.284.650.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.284.650.000,00	2.284.650.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.118.328.000,00	1.118.328.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.118.328.000,00	1.118.328.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.118.328.000,00	1.118.328.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	242.158.000,00	242.158.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	242.158.000,00	242.158.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.158.000,00	242.158.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.482.386.000,00	1.468.997.968,00	(13.388.032,00)	99,10		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	475.900.000,00	475.275.000,00	(625.000,00)	99,87		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.900.000,00	475.275.000,00	(625.000,00)	99,87		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.006.486.000,00	993.722.968,00	(12.763.032,00)	98,73		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.006.486.000,00	993.722.968,00	(12.763.032,00)	98,73		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.437.115.250,00	1.428.723.018,00	(8.392.232,00)	99,42		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1.437.115.250,00	1.428.723.018,00	(8.392.232,00)	99,42		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.437.115.250,00	1.428.723.018,00	(8.392.232,00)	99,42		
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	148.665.000,00	148.665.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	148.665.000,00	148.665.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.665.000,00	148.665.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	173.305.750,00	170.073.794,00	(3.231.956,00)	98,14		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	173.305.750,00	170.073.794,00	(3.231.956,00)	98,14		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.305.750,00	170.073.794,00	(3.231.956,00)	98,14		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	33.261.000,00	(55.435.000,00)	37,50		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	88.696.000,00	33.261.000,00	(55.435.000,00)	37,50		
02.2.01.21.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	88.696.000,00	33.261.000,00	(55.435.000,00)	37,50		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.250.000.000,00	1.001.115.000,00	(248.885.000,00)	80,09		
02.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00	1.001.115.000,00	(248.885.000,00)	80,09		
02.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.000.000,00	1.001.115.000,00	(248.885.000,00)	80,09		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.445.750,00	10.105.000,00	(340.750,00)	96,74		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	10.445.750,00	10.105.000,00	(340.750,00)	96,74		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.445.750,00	10.105.000,00	(340.750,00)	96,74		

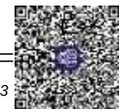

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.944.250.000,00	8.933.750.000,00	(10.500.000,00)	99,88		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	8.944.250.000,00	8.933.750.000,00	(10.500.000,00)	99,88		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.944.250.000,00	8.933.750.000,00	(10.500.000,00)	99,88		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	57.200.000,00	53.540.000,00	(3.660.000,00)	93,60		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	57.200.000,00	53.540.000,00	(3.660.000,00)	93,60		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	53.540.000,00	(3.660.000,00)	93,60		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.519.889.069,00	24.224.166.805,34	(295.722.263,66)	98,79		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	20.709.889.782,00	20.784.518.752,34	74.628.970,34	100,36		
02.2.01.29.5.1.01	Belanja Pegawai	4.672.240.000,00	4.296.344.900,00	(375.895.100,00)	91,95		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.037.649.782,00	16.488.173.852,34	450.524.070,34	102,81		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	3.809.999.287,00	3.439.648.053,00	(370.351.234,00)	90,28		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.361.180.287,00	3.419.648.053,00	58.467.766,00	101,74		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	448.819.000,00	20.000.000,00	(428.819.000,00)	4,46		
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.856.650.000,00	3.856.650.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	3.856.650.000,00	3.856.650.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.856.650.000,00	3.856.650.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.495.519.886,00	23.440.328.518,61	(1.055.191.367,39)	95,69		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	532.720.000,00	532.720.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	532.720.000,00	532.720.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	532.720.000,00	532.720.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.053.232.000,00	1.053.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	1.053.232.000,00	1.053.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.053.232.000,00	1.053.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.804.184.000,00	1.793.188.462,00	(10.995.538,00)	99,39		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	129.660.000,00	128.565.000,00	(1.095.000,00)	99,16		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.660.000,00	128.565.000,00	(1.095.000,00)	99,16		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.674.524.000,00	1.664.623.462,00	(9.900.538,00)	99,41		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.674.524.000,00	1.664.623.462,00	(9.900.538,00)	99,41		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	318.891.000,00	302.462.536,00	(16.428.464,00)	94,85		
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	318.891.000,00	302.462.536,00	(16.428.464,00)	94,85		
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.891.000,00	302.462.536,00	(16.428.464,00)	94,85		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	164.000.000,00	150.400.000,00	(13.600.000,00)	91,71		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	164.000.000,00	150.400.000,00	(13.600.000,00)	91,71		
02.2.02.32.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	164.000.000,00	150.400.000,00	(13.600.000,00)	91,71		
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	21.280.000,00	21.250.000,00	(30.000,00)	99,86		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	21.280.000,00	21.250.000,00	(30.000,00)	99,86		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.280.000,00	21.250.000,00	(30.000,00)	99,86		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.954.250.000,00	4.954.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	4.954.250.000,00	4.954.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.954.250.000,00	4.954.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.626.963.086,00	14.613.846.520,61	(1.013.116.565,39)	93,52		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	13.576.554.287,00	13.161.571.219,61	(414.983.067,39)	96,94		
02.2.02.42.5.1.01	Belanja Pegawai	3.982.886.000,00	3.620.526.500,00	(362.359.500,00)	90,90		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.593.668.287,00	9.541.044.719,61	(52.623.567,39)	99,45		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	2.050.408.799,00	1.452.275.301,00	(598.133.498,00)	70,83		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.685.157.499,00	1.388.016.006,00	(297.141.493,00)	82,37		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	365.251.300,00	64.259.295,00	(300.992.005,00)	17,59		
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.999.800,00	18.979.000,00	(1.020.800,00)	94,90		
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	19.999.800,00	18.979.000,00	(1.020.800,00)	94,90		
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800,00	18.979.000,00	(1.020.800,00)	94,90		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.812.560.000,00	6.799.699.892,00	(12.860.108,00)	99,81		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	569.271.000,00	568.238.892,00	(1.032.108,00)	99,82		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.970.000,00	41.674.000,00	(296.000,00)	99,29		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.970.000,00	41.674.000,00	(296.000,00)	99,29		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	527.301.000,00	526.564.892,00	(736.108,00)	99,86		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	527.301.000,00	526.564.892,00	(736.108,00)	99,86		
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	357.439.000,00	357.439.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	357.439.000,00	357.439.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	357.439.000,00	357.439.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.522.600.000,00	2.522.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.363.205.036,00	2.363.205.036,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.905.036,00	361.905.036,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.1.05	Belanja Hibah	2.001.300.000,00	2.001.300.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	159.394.964,00	159.394.964,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.394.964,00	159.394.964,00	0,00	100,00		
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.323.250.000,00	3.314.500.000,00	(8.750.000,00)	99,74		
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.323.250.000,00	3.314.500.000,00	(8.750.000,00)	99,74		
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.250.000,00	3.314.500.000,00	(8.750.000,00)	99,74		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	40.000.000,00	36.922.000,00	(3.078.000,00)	92,31		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	36.922.000,00	(3.078.000,00)	92,31		
02.2.03.18.5.1.01	Belanja Pegawai	15.120.000,00	13.260.000,00	(1.860.000,00)	87,70		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	23.662.000,00	(1.218.000,00)	95,10		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	109.750.000,00	64.750.000,00	(45.000.000,00)	59,00		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	109.750.000,00	64.750.000,00	(45.000.000,00)	59,00		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	109.750.000,00	64.750.000,00	(45.000.000,00)	59,00		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	86.650.000,00	41.650.000,00	(45.000.000,00)	48,07		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	129.000.000,00	128.694.600,00	(305.400,00)	99,76		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.000.000,00	128.694.600,00	(305.400,00)	99,76		
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	129.000.000,00	128.694.600,00	(305.400,00)	99,76		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	128.694.600,00	(305.400,00)	99,76		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.694.600,00	(305.400,00)	98,95		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	16.957.192.500,00	13.818.913.698,00	(3.138.278.802,00)	81,49		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	305.400.000,00	305.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	305.400.000,00	305.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	305.400.000,00	305.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.400.000,00	941.103.000,00	(12.297.000,00)	98,71		
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	953.400.000,00	941.103.000,00	(12.297.000,00)	98,71		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	953.400.000,00	941.103.000,00	(12.297.000,00)	98,71		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	31.410.000,00	31.410.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	873.990.000,00	861.693.000,00	(12.297.000,00)	98,59		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4.500.000.000,00	4.478.636.748,00	(21.363.252,00)	99,53		
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	4.500.000.000,00	4.478.636.748,00	(21.363.252,00)	99,53		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000.000,00	4.478.636.748,00	(21.363.252,00)	99,53		
03.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	4.500.000.000,00	4.478.636.748,00	(21.363.252,00)	99,53		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	11.198.392.500,00	8.093.773.950,00	(3.104.618.550,00)	72,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	10.946.000.000,00	7.885.691.474,00	(3.060.308.526,00)	72,04		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	131.000.000,00	106.938.900,00	(24.061.100,00)	81,63		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	106.938.900,00	(24.061.100,00)	81,63		
03.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	(3.036.247.426,00)	71,93		
03.2.05.01.5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	(3.036.247.426,00)	71,93		
03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	252.392.500,00	208.082.476,00	(44.310.024,00)	82,44		
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	54.392.500,00	11.739.200,00	(42.653.300,00)	21,58		
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.392.500,00	11.739.200,00	(42.653.300,00)	21,58		
03.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	198.000.000,00	196.343.276,00	(1.656.724,00)	99,16		
03.2.05.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	196.343.276,00	(1.656.724,00)	99,16		
04	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**	96.520.000,00	94.500.000,00	(2.020.000,00)	97,91		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	96.520.000,00	94.500.000,00	(2.020.000,00)	97,91		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	68.260.000,00	66.240.000,00	(2.020.000,00)	97,04		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.260.000,00	66.240.000,00	(2.020.000,00)	97,04		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	4.040.000,00	(2.020.000,00)	66,67		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	45.000.000,00	42.075.000,00	(2.925.000,00)	93,50		
06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	42.075.000,00	(2.925.000,00)	93,50		
06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	42.075.000,00	(2.925.000,00)	93,50		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	42.075.000,00	(2.925.000,00)	93,50		
06.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	23.280.000,00	21.420.000,00	(1.860.000,00)	92,01		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.720.000,00	20.655.000,00	(1.065.000,00)	95,10		
	SURPLUS / DEFISIT	(305.832.667.439,00)	(243.904.177.888,95)	61.928.489.550,05	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	0,00	-0,25	(0,25)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-0,25	(0,25)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(0,25)	(0,25)	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(305.832.667.439,00)**	**(243.904.177.889,20)**	**61.928.489.549,80**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

I Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	18.056.235.368,00	22.578.362.110,15	4.522.126.742,15	125,04		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	18.056.235.368,00	14.910.569.210,15	(3.145.666.157,85)	82,58		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.249.442.000,00	22.874.000,00	(1.226.568.000,00)	1,83		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.806.793.368,00	14.887.695.210,15	(1.919.098.157,85)	88,58		
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	7.667.792.900,00	7.667.792.900,00	0		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	7.667.792.900,00	7.667.792.900,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	130.990.044.693,00	122.063.216.527,23	(8.926.828.165,77)	93,19		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	63.067.507.593,00	60.495.559.129,23	(2.571.948.463,77)	95,92		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.989.000,00	46.670.000,00	(4.319.000,00)	91,53		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.360.000,00	7.340.000,00	(20.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.360.000,00	7.340.000,00	(20.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	7.340.000,00	(20.000,00)	99,73		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.629.000,00	39.330.000,00	(4.299.000,00)	90,15		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	43.629.000,00	39.330.000,00	(4.299.000,00)	90,15		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.629.000,00	39.330.000,00	(4.299.000,00)	90,15		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.078.689.377,00	44.396.500.349,00	(682.189.028,00)	98,49		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.999.171.377,00	44.317.115.849,00	(682.055.528,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.999.171.377,00	44.317.115.849,00	(682.055.528,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	44.999.171.377,00	44.317.115.849,00	(682.055.528,00)	98,48		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	79.518.000,00	79.384.500,00	(133.500,00)	99,83		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	79.518.000,00	79.384.500,00	(133.500,00)	99,83		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.518.000,00	79.384.500,00	(133.500,00)	99,83		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	217.530.000,00	168.207.500,00	(49.322.500,00)	77,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.530.000,00	1.507.500,00	(22.500,00)	98,53		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.530.000,00	1.507.500,00	(22.500,00)	98,53		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.507.500,00	(22.500,00)	98,53		
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	216.000.000,00	166.700.000,00	(49.300.000,00)	77,18		
01.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	166.700.000,00	(49.300.000,00)	77,18		
01.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.160.000,00	126.860.000,00	(49.300.000,00)	72,01		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.200.000,00	44.805.000,00	(15.395.000,00)	74,43		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.000.000,00	1.800.000,00	(9.200.000,00)	16,36		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	1.800.000,00	(9.200.000,00)	16,36		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	1.800.000,00	(9.200.000,00)	16,36		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.200.000,00	43.005.000,00	(6.195.000,00)	87,41		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	49.200.000,00	43.005.000,00	(6.195.000,00)	87,41		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	43.005.000,00	(6.195.000,00)	87,41		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.764.600,00	472.745.100,00	(60.019.500,00)	88,73		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.003.300,00	5.998.000,00	(5.300,00)	99,91		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.003.300,00	5.998.000,00	(5.300,00)	99,91		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.003.300,00	5.998.000,00	(5.300,00)	99,91		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.316.000,00	19.561.000,00	(2.755.000,00)	87,65		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.316.000,00	19.561.000,00	(2.755.000,00)	87,65		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.316.000,00	19.561.000,00	(2.755.000,00)	87,65		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	423.363.900,00	383.049.900,00	(40.314.000,00)	90,48		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	423.363.900,00	383.049.900,00	(40.314.000,00)	90,48		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.363.900,00	383.049.900,00	(40.314.000,00)	90,48		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.561.400,00	58.691.200,00	(16.870.200,00)	77,67		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.561.400,00	58.691.200,00	(16.870.200,00)	77,67		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.561.400,00	58.691.200,00	(16.870.200,00)	77,67		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	5.445.000,00	(75.000,00)	98,64		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.520.000,00	5.445.000,00	(75.000,00)	98,64		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.445.000,00	(75.000,00)	98,64		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.244.000,00	99.697.000,00	(9.547.000,00)	91,26		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.244.000,00	99.697.000,00	(9.547.000,00)	91,26		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	109.244.000,00	99.697.000,00	(9.547.000,00)	91,26		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.244.000,00	99.697.000,00	(9.547.000,00)	91,26		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.459.000,00	621.744.817,00	(76.714.183,00)	89,02		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.999.000,00	264.284.817,00	(76.714.183,00)	77,50		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	340.999.000,00	264.284.817,00	(76.714.183,00)	77,50		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.999.000,00	264.284.817,00	(76.714.183,00)	77,50		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.460.000,00	347.460.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	347.460.000,00	347.460.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	78.360.000,00	78.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.100.000,00	269.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.782.500,00	281.532.639,00	(126.249.861,00)	69,04		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.482.500,00	274.312.639,00	(126.169.861,00)	68,50		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.482.500,00	274.312.639,00	(126.169.861,00)	68,50		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.482.500,00	274.312.639,00	(126.169.861,00)	68,50		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	7.220.000,00	(80.000,00)	98,90		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.220.000,00	(80.000,00)	98,90		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.220.000,00	(80.000,00)	98,90		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	15.911.849.116,00	14.363.656.724,23	(1.548.192.391,77)	90,27		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.911.849.116,00	14.363.656.724,23	(1.548.192.391,77)	90,27		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.138.309.840,00	12.235.310.788,23	(902.999.051,77)	93,13		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.002.450.814,00	9.584.672.976,00	(417.777.838,00)	95,82		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.135.859.026,00	2.650.637.812,23	(485.221.213,77)	84,53		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	2.773.539.276,00	2.128.345.936,00	(645.193.340,00)	76,74		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.760.539.276,00	2.128.345.936,00	(632.193.340,00)	77,10		
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0		
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	65.353.210.100,00	59.369.466.198,00	(5.983.743.902,00)	90,84		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.756.101.800,00	8.171.207.010,00	(1.584.894.790,00)	83,75		
02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.371.706.200,00	3.549.014.159,00	(822.692.041,00)	81,18		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	4.371.706.200,00	3.549.014.159,00	(822.692.041,00)	81,18		
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.371.706.200,00	3.549.014.159,00	(822.692.041,00)	81,18		
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	203.160.000,00	200.755.000,00	(2.405.000,00)	98,82		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	7.320.000,00	(840.000,00)	89,71		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	7.320.000,00	(840.000,00)	89,71		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	195.000.000,00	193.435.000,00	(1.565.000,00)	99,20		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	193.435.000,00	(1.565.000,00)	99,20		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	781.131.600,00	764.362.181,00	(16.769.419,00)	97,85		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	781.131.600,00	764.362.181,00	(16.769.419,00)	97,85		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.202.000,00	373.162.000,00	(10.040.000,00)	97,38		
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	397.929.600,00	391.200.181,00	(6.729.419,00)	98,31		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.612.106.000,00	1.566.277.408,00	(45.828.592,00)	97,16		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.106.000,00	1.541.871,00	(564.129,00)	73,21		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.000,00	1.541.871,00	(564.129,00)	73,21		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.610.000.000,00	1.564.735.537,00	(45.264.463,00)	97,19		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.610.000.000,00	1.564.735.537,00	(45.264.463,00)	97,19		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	825.620.000,00	493.848.808,00	(331.771.192,00)	59,82		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	825.620.000,00	493.848.808,00	(331.771.192,00)	59,82		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.620.000,00	493.848.808,00	(331.771.192,00)	59,82		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.830.059.000,00	1.467.559.154,00	(362.499.846,00)	80,19		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.830.059.000,00	1.467.559.154,00	(362.499.846,00)	80,19		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.059.000,00	1.467.559.154,00	(362.499.846,00)	80,19		
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	9.329.550,00	(670.450,00)	93,30		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.329.550,00	(670.450,00)	93,30		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.329.550,00	(670.450,00)	93,30		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.319.000,00	120.060.750,00	(2.258.250,00)	98,15		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	122.319.000,00	120.060.750,00	(2.258.250,00)	98,15		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.319.000,00	120.060.750,00	(2.258.250,00)	98,15		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.504.333.300,00	51.118.642.688,00	(4.385.690.612,00)	92,10		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	831.235.000,00	582.588.500,00	(248.646.500,00)	70,09		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	831.235.000,00	582.588.500,00	(248.646.500,00)	70,09		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.235.000,00	582.588.500,00	(248.646.500,00)	70,09		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	81.000.000,00	77.800.000,00	(3.200.000,00)	96,05		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	77.800.000,00	(3.200.000,00)	96,05		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	77.800.000,00	(3.200.000,00)	96,05		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	29.862.500,00	20.148.000,00	(9.714.500,00)	67,47		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.862.500,00	20.148.000,00	(9.714.500,00)	67,47		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.862.500,00	20.148.000,00	(9.714.500,00)	67,47		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	779.820.000,00	527.492.000,00	(252.328.000,00)	67,64		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	779.820.000,00	527.492.000,00	(252.328.000,00)	67,64		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.820.000,00	527.492.000,00	(252.328.000,00)	67,64		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	250.754.000,00	166.030.000,00	(84.724.000,00)	66,21		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	250.754.000,00	166.030.000,00	(84.724.000,00)	66,21		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.754.000,00	166.030.000,00	(84.724.000,00)	66,21		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	156.497.500,00	97.300.000,00	(59.197.500,00)	62,17		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	156.497.500,00	97.300.000,00	(59.197.500,00)	62,17		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.497.500,00	97.300.000,00	(59.197.500,00)	62,17		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	175.870.000,00	124.958.000,00	(50.912.000,00)	71,05		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	175.870.000,00	124.958.000,00	(50.912.000,00)	71,05		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.870.000,00	124.958.000,00	(50.912.000,00)	71,05		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	57.870.000,00	37.870.000,00	(20.000.000,00)	65,44		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	57.870.000,00	37.870.000,00	(20.000.000,00)	65,44		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.870.000,00	37.870.000,00	(20.000.000,00)	65,44		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	87.700.000,00	57.950.000,00	(29.750.000,00)	66,08		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	87.700.000,00	57.950.000,00	(29.750.000,00)	66,08		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.700.000,00	57.950.000,00	(29.750.000,00)	66,08		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.058.000,00	30.708.000,00	(42.350.000,00)	42,03		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	73.058.000,00	30.708.000,00	(42.350.000,00)	42,03		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.058.000,00	30.708.000,00	(42.350.000,00)	42,03		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	450.000.000,00	444.515.853,00	(5.484.147,00)	98,78		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	444.515.853,00	(5.484.147,00)	98,78		
02.2.02.14.5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	444.515.853,00	(5.484.147,00)	98,78		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.202.431.000,00	429.273.301,00	(1.773.157.699,00)	19,49		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	2.202.431.000,00	429.273.301,00	(1.773.157.699,00)	19,49		
02.2.02.15.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	15.280.000,00	(7.640.000,00)	66,67		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.179.511.000,00	413.993.301,00	(1.765.517.699,00)	18,99		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	63.117.500,00	52.541.000,00	(10.576.500,00)	83,24		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	63.117.500,00	52.541.000,00	(10.576.500,00)	83,24		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.117.500,00	52.541.000,00	(10.576.500,00)	83,24		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	303.745.000,00	224.222.725,00	(79.522.275,00)	73,82		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	303.745.000,00	224.222.725,00	(79.522.275,00)	73,82		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.745.000,00	224.222.725,00	(79.522.275,00)	73,82		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	197.152.500,00	145.734.500,00	(51.418.000,00)	73,92		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	197.152.500,00	145.734.500,00	(51.418.000,00)	73,92		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.152.500,00	145.734.500,00	(51.418.000,00)	73,92		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	688.375.000,00	585.369.000,00	(103.006.000,00)	85,04		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	688.375.000,00	585.369.000,00	(103.006.000,00)	85,04		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.375.000,00	585.369.000,00	(103.006.000,00)	85,04		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	16.500.000,00	11.000.000,00	(5.500.000,00)	66,67		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	11.000.000,00	(5.500.000,00)	66,67		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	11.000.000,00	(5.500.000,00)	66,67		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.462.371.000,00	1.024.046.000,00	(438.325.000,00)	70,03		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.462.371.000,00	1.024.046.000,00	(438.325.000,00)	70,03		
02.2.02.25.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.439.451.000,00	1.001.126.000,00	(438.325.000,00)	69,55		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	44.577.403.400,00	44.446.688.900,00	(130.714.500,00)	99,71		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	44.577.403.400,00	44.446.688.900,00	(130.714.500,00)	99,71		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.537.563.400,00	44.406.848.900,00	(130.714.500,00)	99,71		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.225.000,00	2.350.000,00	(9.875.000,00)	19,22		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	12.225.000,00	2.350.000,00	(9.875.000,00)	19,22		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	2.350.000,00	(9.875.000,00)	19,22		
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	145.515.000,00	128.901.500,00	(16.613.500,00)	88,58		
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	145.515.000,00	128.901.500,00	(16.613.500,00)	88,58		
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.515.000,00	128.901.500,00	(16.613.500,00)	88,58		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.261.607.000,00	1.388.294.839,00	(873.312.161,00)	61,39		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	2.261.607.000,00	1.388.294.839,00	(873.312.161,00)	61,39		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.301.532.000,00	559.076.539,00	(742.455.461,00)	42,96		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.075.000,00	829.218.300,00	(130.856.700,00)	86,37		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	426.658.900,00	394.875.570,00	(31.783.330,00)	92,55		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	426.658.900,00	394.875.570,00	(31.783.330,00)	92,55		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.658.900,00	394.875.570,00	(31.783.330,00)	92,55		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	51.300.000,00	32.750.000,00	(18.550.000,00)	63,84		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	51.300.000,00	32.750.000,00	(18.550.000,00)	63,84		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	32.750.000,00	(18.550.000,00)	63,84		
02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	15.285.000,00	15.065.000,00	(220.000,00)	98,56		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	15.285.000,00	15.065.000,00	(220.000,00)	98,56		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.285.000,00	15.065.000,00	(220.000,00)	98,56		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	24.675.000,00	15.950.000,00	(8.725.000,00)	64,64		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	15.950.000,00	(8.725.000,00)	64,64		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	15.950.000,00	(8.725.000,00)	64,64		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	18.225.000,00	10.200.000,00	(8.025.000,00)	55,97		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	18.225.000,00	10.200.000,00	(8.025.000,00)	55,97		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.225.000,00	10.200.000,00	(8.025.000,00)	55,97		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	10.880.000,00	4.076.500,00	(6.803.500,00)	37,47		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.880.000,00	4.076.500,00	(6.803.500,00)	37,47		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.880.000,00	4.076.500,00	(6.803.500,00)	37,47		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	4.076.500,00	(6.803.500,00)	37,47		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.895.000,00	75.540.000,00	(6.355.000,00)	92,24		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	81.895.000,00	75.540.000,00	(6.355.000,00)	92,24		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.895.000,00	75.540.000,00	(6.355.000,00)	92,24		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.895.000,00	75.540.000,00	(6.355.000,00)	92,24		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.693.360.000,00	1.386.060.000,00	(307.300.000,00)	81,85		
03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	48.270.000,00	48.130.000,00	(140.000,00)	99,71		
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	48.270.000,00	48.130.000,00	(140.000,00)	99,71		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.270.000,00	48.130.000,00	(140.000,00)	99,71		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.270.000,00	48.130.000,00	(140.000,00)	99,71		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	896.020.000,00	817.580.000,00	(78.440.000,00)	91,25		
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.520.000,00	3.280.000,00	(240.000,00)	93,18		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.520.000,00	3.280.000,00	(240.000,00)	93,18		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	3.280.000,00	(240.000,00)	93,18		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	892.500.000,00	814.300.000,00	(78.200.000,00)	91,24		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	892.500.000,00	814.300.000,00	(78.200.000,00)	91,24		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.500.000,00	814.300.000,00	(78.200.000,00)	91,24		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	749.070.000,00	520.350.000,00	(228.720.000,00)	69,47		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	749.070.000,00	520.350.000,00	(228.720.000,00)	69,47		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	749.070.000,00	520.350.000,00	(228.720.000,00)	69,47		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.070.000,00	520.350.000,00	(228.720.000,00)	69,47		
04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	27.700.000,00	25.870.000,00	(1.830.000,00)	93,39		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	27.700.000,00	25.870.000,00	(1.830.000,00)	93,39		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	27.700.000,00	25.870.000,00	(1.830.000,00)	93,39		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.700.000,00	25.870.000,00	(1.830.000,00)	93,39		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	25.870.000,00	(1.830.000,00)	93,39		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	848.267.000,00	786.261.200,00	(62.005.800,00)	92,69		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.144.000,00	56.386.000,00	(19.758.000,00)	74,05		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	76.144.000,00	56.386.000,00	(19.758.000,00)	74,05		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.144.000,00	56.386.000,00	(19.758.000,00)	74,05		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.144.000,00	56.386.000,00	(19.758.000,00)	74,05		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.241.000,00	120.465.000,00	(2.776.000,00)	97,75		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	123.241.000,00	120.465.000,00	(2.776.000,00)	97,75		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	123.241.000,00	120.465.000,00	(2.776.000,00)	97,75		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.241.000,00	120.465.000,00	(2.776.000,00)	97,75		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.882.000,00	609.410.200,00	(39.471.800,00)	93,92		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	648.882.000,00	609.410.200,00	(39.471.800,00)	93,92		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	648.882.000,00	609.410.200,00	(39.471.800,00)	93,92		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.882.000,00	609.410.200,00	(39.471.800,00)	93,92		
	SURPLUS / DEFISIT	(112.933.809.325,00)	(99.484.854.417,08)	13.448.954.907,92	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(112.933.809.325,00)**	**(99.484.854.417,08)**	**13.448.954.907,92**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	100.000.000.000,00	85.065.616.453,59	(14.934.383.546,41)	85,07		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	100.000.000.000,00	85.065.616.453,59	(14.934.383.546,41)	85,07		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000.000,00	85.065.616.453,59	(14.934.383.546,41)	85,07		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	156.141.004.422,00	137.241.844.709,16	(18.899.159.712,84)	87,90		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	108.782.864.182,00	117.350.507.926,16	8.567.643.744,16	107,88		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.553.502.875,00	43.219.515.763,00	(333.987.112,00)	99,23		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.553.502.875,00	43.219.515.763,00	(333.987.112,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.553.502.875,00	43.219.515.763,00	(333.987.112,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	43.553.502.875,00	43.219.515.763,00	(333.987.112,00)	99,23		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	65.229.361.307,00	74.130.992.163,16	8.901.630.856,16	113,65		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	65.229.361.307,00	74.130.992.163,16	8.901.630.856,16	113,65		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.969.361.307,00	71.021.845.058,11	9.052.483.751,11	114,61		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	29.396.039.120,00	30.315.829.659,00	919.790.539,00	103,13		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.573.322.187,00	40.706.015.399,11	8.132.693.212,11	124,97		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	3.260.000.000,00	3.109.147.105,05	(150.852.894,95)	95,37		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.640.000.000,00	1.570.576.135,00	(69.423.865,00)	95,77		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.513.803.970,05	13.803.970,05	100,92		
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.000.000,00	24.767.000,00	(95.233.000,00)	20,64		
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	47.358.140.240,00	19.891.336.783,00	(27.466.803.457,00)	42,00		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47.358.140.240,00	19.891.336.783,00	(27.466.803.457,00)	42,00		
02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	44.688.465.040,00	17.226.454.783,00	(27.462.010.257,00)	38,55		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.688.465.040,00	4.504.678.363,00	(183.786.677,00)	96,08		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	0		
02.2.01.01.5.1.03	Belanja Bunga	4.637.465.040,00	4.504.678.363,00	(132.786.677,00)	97,14		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000.000,00	12.721.776.420,00	(27.278.223.580,00)	31,80		
02.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000.000,00	12.721.776.420,00	(27.278.223.580,00)	31,80		
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.123.675.200,00	1.121.000.000,00	(2.675.200,00)	99,76		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	1.123.675.200,00	1.121.000.000,00	(2.675.200,00)	99,76		
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.123.675.200,00	1.121.000.000,00	(2.675.200,00)	99,76		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.546.000.000,00	1.543.882.000,00	(2.118.000,00)	99,86		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	546.000.000,00	546.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.000.000,00	546.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	997.882.000,00	(2.118.000,00)	99,79		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	997.882.000,00	(2.118.000,00)	99,79		
	SURPLUS / DEFISIT	(56.141.004.422,00)	(52.176.228.255,57)	3.964.776.166,43	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(56.141.004.422,00)**	**(52.176.228.255,57)**	**3.964.776.166,43**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 ahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1-03.1-04.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.558.080.000,00	675.079.000,00	(1.883.001.000,00)	26,39		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.558.080.000,00	675.079.000,00	(1.883.001.000,00)	26,39		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.558.080.000,00	675.079.000,00	(1.883.001.000,00)	26,39		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	89.928.682.252,00	64.064.700.076,00	(25.863.982.176,00)	71,24		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.309.446.505,00	12.955.667.475,00	(353.779.030,00)	97,34		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.582.934.505,00	11.446.886.628,00	(136.047.877,00)	98,83		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.582.934.505,00	11.446.886.628,00	(136.047.877,00)	98,83		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.582.934.505,00	11.446.886.628,00	(136.047.877,00)	98,83		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.582.934.505,00	11.446.886.628,00	(136.047.877,00)	98,83		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	837.682.000,00	792.536.800,00	(45.145.200,00)	94,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.380.000,00	3.760.000,00	(620.000,00)	85,84		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000,00	3.760.000,00	(620.000,00)	85,84		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	3.760.000,00	(620.000,00)	85,84		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.038.900,00	79.998.000,00	(11.040.900,00)	87,87		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	91.038.900,00	79.998.000,00	(11.040.900,00)	87,87		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.038.900,00	79.998.000,00	(11.040.900,00)	87,87		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	696.853.100,00	672.199.100,00	(24.654.000,00)	96,46		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	696.853.100,00	672.199.100,00	(24.654.000,00)	96,46		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	82.880.000,00	82.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.973.100,00	589.319.100,00	(24.654.000,00)	95,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.690.000,00	32.859.700,00	(8.830.300,00)	78,82		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.690.000,00	32.859.700,00	(8.830.300,00)	78,82		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.690.000,00	32.859.700,00	(8.830.300,00)	78,82		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.648.500,00	69.160.026,00	(9.488.474,00)	87,94		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.630.000,00	37.748.686,00	(6.881.314,00)	84,58		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.630.000,00	37.748.686,00	(6.881.314,00)	84,58		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.630.000,00	37.748.686,00	(6.881.314,00)	84,58		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.338.500,00	13.731.340,00	(2.607.160,00)	84,04		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.338.500,00	12.184.000,00	(2.154.500,00)	84,97		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.338.500,00	12.184.000,00	(2.154.500,00)	84,97		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	1.547.340,00	(452.660,00)	77,37		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.547.340,00	(452.660,00)	77,37		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.181.500,00	647.084.021,00	(163.097.479,00)	79,87		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.600.000,00	37.173.240,00	(6.426.760,00)	85,26		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.600.000,00	37.173.240,00	(6.426.760,00)	85,26		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	37.173.240,00	(6.426.760,00)	85,26		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.941.500,00	317.262.361,00	(52.679.139,00)	85,76		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	369.941.500,00	317.262.361,00	(52.679.139,00)	85,76		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	17.190.000,00	17.190.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.751.500,00	300.072.361,00	(52.679.139,00)	85,07		
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	365.000.000,00	261.821.420,00	(103.178.580,00)	71,73		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	257.150.000,00	184.741.250,00	(72.408.750,00)	71,84		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.150.000,00	184.741.250,00	(72.408.750,00)	71,84		
01.2.09.03.5.2	BELANJA MODAL	107.850.000,00	77.080.170,00	(30.769.830,00)	71,47		
01.2.09.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.350.000,00	59.697.570,00	(29.652.430,00)	66,81		
01.2.09.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.500.000,00	17.382.600,00	(1.117.400,00)	93,96		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.640.000,00	30.827.000,00	(813.000,00)	97,43		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	31.640.000,00	30.827.000,00	(813.000,00)	97,43		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.640.000,00	30.827.000,00	(813.000,00)	97,43		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	283.990.000,00	281.700.000,00	(2.290.000,00)	99,19		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	283.990.000,00	281.700.000,00	(2.290.000,00)	99,19		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	283.990.000,00	281.700.000,00	(2.290.000,00)	99,19		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	233.200.000,00	232.200.000,00	(1.000.000,00)	99,57		
02.2.02.14.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.740.000,00	223.740.000,00	(1.000.000,00)	99,56		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	50.790.000,00	49.500.000,00	(1.290.000,00)	97,46		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.790.000,00	49.500.000,00	(1.290.000,00)	97,46		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	600.000.000,00	396.849.000,00	(203.151.000,00)	66,14		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	396.849.000,00	(203.151.000,00)	66,14		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	50.000.000,00	49.742.000,00	(258.000,00)	99,48		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.742.000,00	(258.000,00)	99,48		
03.2.01.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.742.000,00	(258.000,00)	99,48		
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.000,00	297.107.000,00	(202.893.000,00)	59,42		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	297.107.000,00	(202.893.000,00)	59,42		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	297.107.000,00	(202.893.000,00)	59,42		
03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.19.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	1.144.040.000,00	1.142.417.784,00	(1.622.216,00)	99,86		
03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	144.890.000,00	144.417.000,00	(473.000,00)	99,67		
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	80.000.000,00	79.527.000,00	(473.000,00)	99,41		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	79.527.000,00	(473.000,00)	99,41		
03.2.01.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	79.527.000,00	(473.000,00)	99,41		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	130.000.000,00	129.197.784,00	(802.216,00)	99,38		
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	60.000.000,00	59.642.520,00	(357.480,00)	99,40		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	59.642.520,00	(357.480,00)	99,40		
03.2.02.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	59.642.520,00	(357.480,00)	99,40		
03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	70.000.000,00	69.555.264,00	(444.736,00)	99,36		
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.555.264,00	(444.736,00)	99,36		
03.2.02.08.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	69.555.264,00	(444.736,00)	99,36		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	869.150.000,00	868.803.000,00	(347.000,00)	99,96		
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	869.150.000,00	868.803.000,00	(347.000,00)	99,96		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	869.150.000,00	868.803.000,00	(347.000,00)	99,96		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.150.000,00	868.803.000,00	(347.000,00)	99,96		
05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00		
08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	5.926.160.000,00	984.405.700,00	(4.941.754.300,00)	16,61		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.926.160.000,00	984.405.700,00	(4.941.754.300,00)	16,61		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	416.160.000,00	378.752.700,00	(37.407.300,00)	91,01		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	416.160.000,00	378.752.700,00	(37.407.300,00)	91,01		
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	47.280.000,00	47.280.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.880.000,00	331.472.700,00	(37.407.300,00)	89,86		
08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.510.000.000,00	605.653.000,00	(4.904.347.000,00)	10,99		
08.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	5.510.000.000,00	605.653.000,00	(4.904.347.000,00)	10,99		
08.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.510.000.000,00	605.653.000,00	(4.904.347.000,00)	10,99		
09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	17.284.580.000,00	7.958.554.833,00	(9.326.025.167,00)	46,04		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	17.284.580.000,00	7.958.554.833,00	(9.326.025.167,00)	46,04		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	17.284.580.000,00	7.958.554.833,00	(9.326.025.167,00)	46,04		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.784.580.000,00	482.936.000,00	(1.301.644.000,00)	27,06		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.580.000,00	373.576.000,00	(1.301.004.000,00)	22,31		
09.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	110.000.000,00	109.360.000,00	(640.000,00)	99,42		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	15.500.000.000,00	7.475.618.833,00	(8.024.381.167,00)	48,23		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.500.000.000,00	7.475.618.833,00	(8.024.381.167,00)	48,23		
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	50.461.400.747,00	39.441.218.784,00	(11.020.181.963,00)	78,16		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50.461.400.747,00	39.441.218.784,00	(11.020.181.963,00)	78,16		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	46.717.853.647,00	36.381.429.284,00	(10.336.424.363,00)	77,87		
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	291.810.000,00	291.750.000,00	(60.000,00)	99,98		
10.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	33.960.000,00	33.960.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.850.000,00	257.790.000,00	(60.000,00)	99,98		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	46.426.043.647,00	36.089.679.284,00	(10.336.364.363,00)	77,74		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.376.043.647,00	36.042.102.284,00	(10.333.941.363,00)	77,72		
10.2.01.08.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	47.577.000,00	(2.423.000,00)	95,15		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.743.547.100,00	3.059.789.500,00	(683.757.600,00)	81,74		
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.729.547.100,00	3.050.189.500,00	(679.357.600,00)	81,78		
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.729.547.100,00	3.050.189.500,00	(679.357.600,00)	81,78		
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	9.600.000,00	(4.400.000,00)	68,57		
10.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	9.600.000,00	(4.400.000,00)	68,57		
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	259.065.000,00	243.886.500,00	(15.178.500,00)	94,14		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	33.090.000,00	33.090.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.090.000,00	33.090.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	122.175.000,00	107.107.500,00	(15.067.500,00)	87,67		
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	122.175.000,00	107.107.500,00	(15.067.500,00)	87,67		
12.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	122.175.000,00	107.107.500,00	(15.067.500,00)	87,67		
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.175.000,00	107.107.500,00	(15.067.500,00)	87,67		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.889.000,00	(111.000,00)	99,89		
12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	99.889.000,00	(111.000,00)	99,89		
12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.889.000,00	(111.000,00)	99,89		
12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.889.000,00	(111.000,00)	99,89		
	SURPLUS / DEFISIT	(87.370.602.252,00)	(63.389.621.076,00)	23.980.981.176,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(87.370.602.252,00)**	**(63.389.621.076,00)**	**23.980.981.176,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	12.518.621.306,00	12.353.077.531,00	(165.543.775,00)	98,68		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.799.716.875,00	10.681.308.531,00	(118.408.344,00)	98,90		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.585.000,00	125.946.750,00	(638.250,00)	99,50		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.125.000,00	123.746.750,00	(378.250,00)	99,70		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	124.125.000,00	123.746.750,00	(378.250,00)	99,70		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	66.480.000,00	66.480.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.645.000,00	57.266.750,00	(378.250,00)	99,34		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.460.000,00	2.200.000,00	(260.000,00)	89,43		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.460.000,00	2.200.000,00	(260.000,00)	89,43		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.200.000,00	(260.000,00)	89,43		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.388.007.375,00	10.284.462.119,00	(103.545.256,00)	99,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.388.007.375,00	10.284.462.119,00	(103.545.256,00)	99,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.388.007.375,00	10.284.462.119,00	(103.545.256,00)	99,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.388.007.375,00	10.284.462.119,00	(103.545.256,00)	99,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.574.150,00	78.772.200,00	(5.801.950,00)	93,14		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.641.300,00	1.497.000,00	(144.300,00)	91,21		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.641.300,00	1.497.000,00	(144.300,00)	91,21		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.300,00	1.497.000,00	(144.300,00)	91,21		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.529.600,00	2.500.000,00	(1.029.600,00)	70,83		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.529.600,00	2.500.000,00	(1.029.600,00)	70,83		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.529.600,00	2.500.000,00	(1.029.600,00)	70,83		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.223.250,00	71.595.200,00	(4.628.050,00)	93,93		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	76.223.250,00	71.595.200,00	(4.628.050,00)	93,93		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.303.250,00	54.675.200,00	(4.628.050,00)	92,20		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.434.500,00	13.977.945,00	(4.456.555,00)	75,82		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.434.500,00	9.977.945,00	(4.456.555,00)	69,13		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.434.500,00	9.977.945,00	(4.456.555,00)	69,13		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.434.500,00	9.977.945,00	(4.456.555,00)	69,13		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.115.850,00	178.149.517,00	(3.966.333,00)	97,82		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.125.850,00	173.749.517,00	(3.376.333,00)	98,09		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	177.125.850,00	173.749.517,00	(3.376.333,00)	98,09		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.125.850,00	173.749.517,00	(3.376.333,00)	98,09		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.400.000,00	(590.000,00)	88,18		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.990.000,00	4.400.000,00	(590.000,00)	88,18		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.400.000,00	(590.000,00)	88,18		
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	1.718.904.431,00	1.671.769.000,00	(47.135.431,00)	97,26		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.404.177.500,00	1.358.781.250,00	(45.396.250,00)	96,77		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.379.968.300,00	1.335.496.650,00	(44.471.650,00)	96,78		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.379.968.300,00	1.335.496.650,00	(44.471.650,00)	96,78		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.048.300,00	1.312.576.650,00	(44.471.650,00)	96,72		
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12.209.200,00	11.493.600,00	(715.600,00)	94,14		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.209.200,00	11.493.600,00	(715.600,00)	94,14		

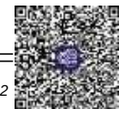

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.209.200,00	11.493.600,00	(715.600,00)	94,14		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,00	11.791.000,00	(209.000,00)	98,26		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.791.000,00	(209.000,00)	98,26		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.791.000,00	(209.000,00)	98,26		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	292.606.931,00	291.004.250,00	(1.602.681,00)	99,45		
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18.588.000,00	18.473.200,00	(114.800,00)	99,38		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.588.000,00	18.473.200,00	(114.800,00)	99,38		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.588.000,00	18.473.200,00	(114.800,00)	99,38		
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	274.018.931,00	272.531.050,00	(1.487.881,00)	99,46		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	274.018.931,00	272.531.050,00	(1.487.881,00)	99,46		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.498.931,00	258.011.050,00	(1.487.881,00)	99,43		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	22.120.000,00	21.983.500,00	(136.500,00)	99,38		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	22.120.000,00	21.983.500,00	(136.500,00)	99,38		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.120.000,00	21.983.500,00	(136.500,00)	99,38		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.863.500,00	(136.500,00)	98,64		
	SURPLUS / DEFISIT	(12.518.621.306,00)	(12.353.077.531,00)	165.543.775,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(12.518.621.306,00)**	**(12.353.077.531,00)**	**165.543.775,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.09 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	8.376.372.500,00	8.218.823.973,00	(157.548.527,00)	98,12		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.985.092.450,00	6.884.404.773,00	(100.687.677,00)	98,56		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.052.899.000,00	6.034.473.309,00	(18.425.691,00)	99,70		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.052.899.000,00	6.034.473.309,00	(18.425.691,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.052.899.000,00	6.034.473.309,00	(18.425.691,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.052.899.000,00	6.034.473.309,00	(18.425.691,00)	99,70		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.321.500,00	92.459.700,00	(20.861.800,00)	81,59		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.300.700,00	1.254.000,00	(46.700,00)	96,41		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.700,00	1.254.000,00	(46.700,00)	96,41		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.700,00	1.254.000,00	(46.700,00)	96,41		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.328.800,00	2.240.500,00	(88.300,00)	96,21		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.328.800,00	2.240.500,00	(88.300,00)	96,21		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.328.800,00	2.240.500,00	(88.300,00)	96,21		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.592.000,00	67.272.600,00	(11.319.400,00)	85,60		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	78.592.000,00	67.272.600,00	(11.319.400,00)	85,60		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.592.000,00	67.272.600,00	(11.319.400,00)	85,60		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.600.000,00	19.592.600,00	(6.007.400,00)	76,53		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.600.000,00	19.592.600,00	(6.007.400,00)	76,53		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	19.592.600,00	(6.007.400,00)	76,53		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.067.000,00	273.800.000,00	(10.267.000,00)	96,39		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	76.167.000,00	69.400.000,00	(6.767.000,00)	91,12		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	76.167.000,00	69.400.000,00	(6.767.000,00)	91,12		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.167.000,00	69.400.000,00	(6.767.000,00)	91,12		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.900.000,00	204.400.000,00	(3.500.000,00)	98,32		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	207.900.000,00	204.400.000,00	(3.500.000,00)	98,32		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.900.000,00	204.400.000,00	(3.500.000,00)	98,32		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.180.000,00	182.582.859,00	(11.597.141,00)	94,03		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.400.000,00	(200.000,00)	96,97		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.400.000,00	(200.000,00)	96,97		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.400.000,00	(200.000,00)	96,97		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	28.602.859,00	(9.797.141,00)	74,49		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	28.602.859,00	(9.797.141,00)	74,49		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	28.602.859,00	(9.797.141,00)	74,49		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.180.000,00	147.580.000,00	(1.600.000,00)	98,93		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	149.180.000,00	147.580.000,00	(1.600.000,00)	98,93		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.300.000,00	90.700.000,00	(1.600.000,00)	98,27		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.624.950,00	301.088.905,00	(39.536.045,00)	88,39		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.434.950,00	288.887.905,00	(37.547.045,00)	88,50		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	326.434.950,00	288.887.905,00	(37.547.045,00)	88,50		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.434.950,00	288.887.905,00	(37.547.045,00)	88,50		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.140.000,00	12.201.000,00	(939.000,00)	92,85		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.140.000,00	12.201.000,00	(939.000,00)	92,85		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	12.201.000,00	(939.000,00)	92,85		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0		
03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	735.410.050,00	711.589.400,00	(23.820.650,00)	96,76		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	13.905.000,00	6.060.000,00	(7.845.000,00)	43,58		
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	13.905.000,00	6.060.000,00	(7.845.000,00)	43,58		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.905.000,00	6.060.000,00	(7.845.000,00)	43,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.845.000,00	0,00	(7.845.000,00)	0		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	638.045.000,00	623.125.500,00	(14.919.500,00)	97,66		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	21.175.000,00	19.815.000,00	(1.360.000,00)	93,58		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.175.000,00	19.815.000,00	(1.360.000,00)	93,58		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.115.000,00	13.755.000,00	(1.360.000,00)	91,00		
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	616.870.000,00	603.310.500,00	(13.559.500,00)	97,80		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	616.870.000,00	603.310.500,00	(13.559.500,00)	97,80		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.550.000,00	583.990.500,00	(13.559.500,00)	97,73		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	83.460.050,00	82.403.900,00	(1.056.150,00)	98,73		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	83.460.050,00	82.403.900,00	(1.056.150,00)	98,73		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	83.460.050,00	82.403.900,00	(1.056.150,00)	98,73		
03.2.04.06.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	13.920.000,00	(600.000,00)	95,87		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.940.050,00	68.483.900,00	(456.150,00)	99,34		
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	655.870.000,00	622.829.800,00	(33.040.200,00)	94,96		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	645.670.000,00	612.779.800,00	(32.890.200,00)	94,91		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	572.186.000,00	541.584.500,00	(30.601.500,00)	94,65		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	572.186.000,00	541.584.500,00	(30.601.500,00)	94,65		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.866.000,00	522.264.500,00	(30.601.500,00)	94,46		
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2.584.000,00	2.584.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.584.000,00	2.584.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.584.000,00	2.584.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	70.900.000,00	68.611.300,00	(2.288.700,00)	96,77		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.286.000,00	(714.000,00)	89,80		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.286.000,00	(714.000,00)	89,80		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	63.900.000,00	62.325.300,00	(1.574.700,00)	97,54		

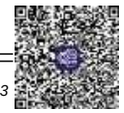

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.900.000,00	25.150.000,00	(750.000,00)	97,10		
04.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.000.000,00	37.175.300,00	(824.700,00)	97,83		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.200.000,00	10.050.000,00	(150.000,00)	98,53		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10.200.000,00	10.050.000,00	(150.000,00)	98,53		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.050.000,00	(150.000,00)	98,53		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.050.000,00	(150.000,00)	98,53		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.376.372.500,00)	(8.218.823.973,00)	157.548.527,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(8.376.372.500,00)**	**(8.218.823.973,00)**	**157.548.527,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL

SKPD : 1-06.2-08.0-00.02 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.096.194.265,00	5.703.458.600,00	(392.735.665,00)	93,56		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.936.716.565,00	4.795.816.010,00	(140.900.555,00)	97,15		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.253.191.215,00	4.155.314.241,00	(97.876.974,00)	97,70		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.253.191.215,00	4.155.314.241,00	(97.876.974,00)	97,70		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.253.191.215,00	4.155.314.241,00	(97.876.974,00)	97,70		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.253.191.215,00	4.155.314.241,00	(97.876.974,00)	97,70		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.494.350,00	351.870.216,00	(23.624.134,00)	93,71		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.647.700,00	5.502.700,00	(145.000,00)	97,43		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.647.700,00	5.502.700,00	(145.000,00)	97,43		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.647.700,00	5.502.700,00	(145.000,00)	97,43		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.136.650,00	307.609.916,00	(16.526.734,00)	94,90		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	324.136.650,00	307.609.916,00	(16.526.734,00)	94,90		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.336.650,00	254.809.916,00	(16.526.734,00)	93,91		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.492.700,00	15.214.600,00	(2.278.100,00)	86,98		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.492.700,00	15.214.600,00	(2.278.100,00)	86,98		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.492.700,00	15.214.600,00	(2.278.100,00)	86,98		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.840.000,00	9.675.000,00	(3.165.000,00)	75,35		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.840.000,00	9.675.000,00	(3.165.000,00)	75,35		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	9.675.000,00	(3.165.000,00)	75,35		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.448.300,00	2.059.000,00	(1.389.300,00)	59,71		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.448.300,00	2.059.000,00	(1.389.300,00)	59,71		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.448.300,00	2.059.000,00	(1.389.300,00)	59,71		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.307.500,00	2.550.000,00	(757.500,00)	77,10		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.307.500,00	2.550.000,00	(757.500,00)	77,10		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	3.307.500,00	2.550.000,00	(757.500,00)	77,10		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.307.500,00	2.550.000,00	(757.500,00)	77,10		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000,00	64.502.055,00	(7.497.945,00)	89,59		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.150.000,00	6.000.000,00	(150.000,00)	97,56		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.150.000,00	6.000.000,00	(150.000,00)	97,56		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.000.000,00	(150.000,00)	97,56		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.550.000,00	22.202.055,00	(7.347.945,00)	75,13		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.550.000,00	22.202.055,00	(7.347.945,00)	75,13		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.550.000,00	22.202.055,00	(7.347.945,00)	75,13		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.723.500,00	221.579.498,00	(11.144.002,00)	95,21		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.408.500,00	190.024.498,00	(8.384.002,00)	95,77		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	198.408.500,00	190.024.498,00	(8.384.002,00)	95,77		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.408.500,00	190.024.498,00	(8.384.002,00)	95,77		
01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000,00	26.240.000,00	(2.760.000,00)	90,48		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	26.240.000,00	(2.760.000,00)	90,48		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	26.240.000,00	(2.760.000,00)	90,48		
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	103.000.000,00	101.459.400,00	(1.540.600,00)	98,50		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	103.000.000,00	101.459.400,00	(1.540.600,00)	98,50		
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33.984.000,00	33.297.600,00	(686.400,00)	97,98		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.984.000,00	33.297.600,00	(686.400,00)	97,98		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.284.000,00	30.597.600,00	(686.400,00)	97,81		
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.296.000,00	33.754.000,00	(542.000,00)	98,42		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.296.000,00	33.754.000,00	(542.000,00)	98,42		
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.276.000,00	31.734.000,00	(542.000,00)	98,32		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34.720.000,00	34.407.800,00	(312.200,00)	99,10		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.720.000,00	34.407.800,00	(312.200,00)	99,10		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	32.387.800,00	(312.200,00)	99,05		
02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	146.960.000,00	146.166.300,00	(793.700,00)	99,46		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	76.960.000,00	76.166.300,00	(793.700,00)	98,97		
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	76.960.000,00	76.166.300,00	(793.700,00)	98,97		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.960.000,00	76.166.300,00	(793.700,00)	98,97		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.940.000,00	74.146.300,00	(793.700,00)	98,94		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	114.319.000,00	16.805.000,00	(97.514.000,00)	14,70		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	114.319.000,00	16.805.000,00	(97.514.000,00)	14,70		
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.319.000,00	16.805.000,00	(97.514.000,00)	14,70		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.319.000,00	16.805.000,00	(97.514.000,00)	14,70		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.679.000,00	11.165.000,00	(97.514.000,00)	10,27		
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	90.374.200,00	79.235.650,00	(11.138.550,00)	87,68		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	57.890.000,00	57.391.750,00	(498.250,00)	99,14		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	8.285.000,00	8.143.750,00	(141.250,00)	98,30		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.285.000,00	8.143.750,00	(141.250,00)	98,30		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	7.133.750,00	(141.250,00)	98,06		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	10.320.000,00	10.215.000,00	(105.000,00)	98,98		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.320.000,00	10.215.000,00	(105.000,00)	98,98		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	255.000,00	(65.000,00)	79,69		
04.2.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.285.000,00	39.033.000,00	(252.000,00)	99,36		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	39.285.000,00	39.033.000,00	(252.000,00)	99,36		
04.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.905.000,00	35.653.000,00	(252.000,00)	99,30		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	32.484.200,00	21.843.900,00	(10.640.300,00)	67,24		
04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	8.074.200,00	0,00	(8.074.200,00)	0		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.074.200,00	0,00	(8.074.200,00)	0		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.074.200,00	0,00	(8.074.200,00)	0		
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	24.410.000,00	21.843.900,00	(2.566.100,00)	89,49		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.410.000,00	21.843.900,00	(2.566.100,00)	89,49		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.410.000,00	21.843.900,00	(2.566.100,00)	89,49		
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	270.016.500,00	269.610.000,00	(406.500,00)	99,85		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	270.016.500,00	269.610.000,00	(406.500,00)	99,85		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	270.016.500,00	269.610.000,00	(406.500,00)	99,85		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	270.016.500,00	269.610.000,00	(406.500,00)	99,85		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.016.500,00	269.610.000,00	(406.500,00)	99,85		
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	31.153.000,00	30.668.000,00	(485.000,00)	98,44		
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	31.153.000,00	30.668.000,00	(485.000,00)	98,44		
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	31.153.000,00	30.668.000,00	(485.000,00)	98,44		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.153.000,00	30.668.000,00	(485.000,00)	98,44		

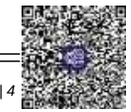

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.463.000,00	28.978.000,00	(485.000,00)	98,35		
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	62.254.000,00	58.781.000,00	(3.473.000,00)	94,42		
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	62.254.000,00	58.781.000,00	(3.473.000,00)	94,42		
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.594.000,00	35.783.000,00	(1.811.000,00)	95,18		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.594.000,00	35.783.000,00	(1.811.000,00)	95,18		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.904.000,00	34.093.000,00	(1.811.000,00)	94,96		
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.660.000,00	22.998.000,00	(1.662.000,00)	93,26		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.660.000,00	22.998.000,00	(1.662.000,00)	93,26		
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	21.988.000,00	(1.662.000,00)	92,97		
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	341.401.000,00	204.917.240,00	(136.483.760,00)	60,02		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.520.000,00	86.130.000,00	(26.390.000,00)	76,55		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.520.000,00	86.130.000,00	(26.390.000,00)	76,55		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.520.000,00	86.130.000,00	(26.390.000,00)	76,55		
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.700.000,00	83.310.000,00	(26.390.000,00)	75,94		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.465.000,00	48.470.000,00	(102.995.000,00)	32,00		
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	151.465.000,00	48.470.000,00	(102.995.000,00)	32,00		
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.465.000,00	48.470.000,00	(102.995.000,00)	32,00		
07.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.640.000,00	4.230.000,00	(1.410.000,00)	75,00		
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.825.000,00	44.240.000,00	(101.585.000,00)	30,34		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000,00	70.317.240,00	(7.098.760,00)	90,83		
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000,00	70.317.240,00	(7.098.760,00)	90,83		
07.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.416.000,00	70.317.240,00	(7.098.760,00)	90,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
07.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.596.000,00	67.497.240,00	(7.098.760,00)	90,48		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.096.194.265,00)	(5.703.458.600,00)	392.735.665,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.096.194.265,00)**	**(5.703.458.600,00)**	**392.735.665,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	145.095.000,00	109.761.000,00	(35.334.000,00)	75,65		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	145.095.000,00	109.761.000,00	(35.334.000,00)	75,65		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	145.095.000,00	109.761.000,00	(35.334.000,00)	75,65		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	35.713.658.650,00	35.246.031.965,39	(467.626.684,61)	98,69		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	25.888.952.800,00	25.687.931.280,00	(201.021.520,00)	99,22		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.180.000,00	5.046.600,00	(1.133.400,00)	81,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.700.000,00	4.234.600,00	(465.400,00)	90,10		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.234.600,00	(465.400,00)	90,10		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.234.600,00	(465.400,00)	90,10		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.480.000,00	812.000,00	(668.000,00)	54,86		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	812.000,00	(668.000,00)	54,86		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	812.000,00	(668.000,00)	54,86		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.051.922.600,00	24.955.596.137,00	(96.326.463,00)	99,62		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.051.197.600,00	24.955.036.137,00	(96.161.463,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.051.197.600,00	24.955.036.137,00	(96.161.463,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	25.051.197.600,00	24.955.036.137,00	(96.161.463,00)	99,62		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	725.000,00	560.000,00	(165.000,00)	77,24		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	725.000,00	560.000,00	(165.000,00)	77,24		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	560.000,00	(165.000,00)	77,24		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.211.200,00	314.127.900,00	(45.083.300,00)	87,45		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.115.000,00	4.975.500,00	(139.500,00)	97,27		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.115.000,00	4.975.500,00	(139.500,00)	97,27		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	4.975.500,00	(139.500,00)	97,27		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.398.800,00	20.002.000,00	(396.800,00)	98,05		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.398.800,00	20.002.000,00	(396.800,00)	98,05		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.398.800,00	20.002.000,00	(396.800,00)	98,05		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	304.932.400,00	262.394.400,00	(42.538.000,00)	86,05		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	304.932.400,00	262.394.400,00	(42.538.000,00)	86,05		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.332.400,00	195.794.400,00	(42.538.000,00)	82,15		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.665.000,00	15.056.000,00	(1.609.000,00)	90,35		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.665.000,00	15.056.000,00	(1.609.000,00)	90,35		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.665.000,00	15.056.000,00	(1.609.000,00)	90,35		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	99,57		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	99,57		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	99,57		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	99,57		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.170.000,00	88.690.263,00	(10.479.737,00)	89,43		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.570.000,00	59.090.263,00	(10.479.737,00)	84,94		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.570.000,00	59.090.263,00	(10.479.737,00)	84,94		
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.730.000,00	19.250.263,00	(10.479.737,00)	64,75		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.469.000,00	301.570.380,00	(47.898.620,00)	86,29		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.379.000,00	286.940.380,00	(47.438.620,00)	85,81		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	334.379.000,00	286.940.380,00	(47.438.620,00)	85,81		

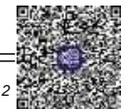

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.379.000,00	286.940.380,00	(47.438.620,00)	85,81		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.090.000,00	14.630.000,00	(460.000,00)	96,95		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.090.000,00	14.630.000,00	(460.000,00)	96,95		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.090.000,00	14.630.000,00	(460.000,00)	96,95		
02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	168.000.000,00	167.206.742,50	(793.257,50)	99,53		
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	168.000.000,00	167.206.742,50	(793.257,50)	99,53		
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	168.000.000,00	167.206.742,50	(793.257,50)	99,53		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	168.000.000,00	167.206.742,50	(793.257,50)	99,53		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	167.206.742,50	(793.257,50)	99,53		
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	1.559.314.800,00	1.536.186.700,00	(23.128.100,00)	98,52		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.416.360.000,00	1.393.979.700,00	(22.380.300,00)	98,42		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.416.360.000,00	1.393.979.700,00	(22.380.300,00)	98,42		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.360.000,00	14.979.700,00	(1.380.300,00)	91,56		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	13.069.700,00	(1.380.300,00)	90,45		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.400.000.000,00	1.379.000.000,00	(21.000.000,00)	98,50		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.000.000,00	1.379.000.000,00	(21.000.000,00)	98,50		
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	142.954.800,00	142.207.000,00	(747.800,00)	99,48		
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	142.954.800,00	142.207.000,00	(747.800,00)	99,48		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.954.800,00	142.207.000,00	(747.800,00)	99,48		
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.744.800,00	140.997.000,00	(747.800,00)	99,47		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	2.458.482.850,00	2.367.967.680,89	(90.515.169,11)	96,32		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.458.482.850,00	2.367.967.680,89	(90.515.169,11)	96,32		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.458.482.850,00	2.367.967.680,89	(90.515.169,11)	96,32		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.238.747.850,00	1.159.354.161,00	(79.393.689,00)	93,59		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.747.850,00	1.109.354.161,00	(79.393.689,00)	93,32		
04.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.219.735.000,00	1.208.613.519,89	(11.121.480,11)	99,09		
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.219.735.000,00	1.208.613.519,89	(11.121.480,11)	99,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	22.287.750,00	22.063.500,00	(224.250,00)	98,99		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	22.287.750,00	22.063.500,00	(224.250,00)	98,99		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	22.287.750,00	22.063.500,00	(224.250,00)	98,99		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.287.750,00	22.063.500,00	(224.250,00)	98,99		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.287.750,00	22.063.500,00	(224.250,00)	98,99		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	81.465.000,00	81.130.000,00	(335.000,00)	99,59		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.465.000,00	81.130.000,00	(335.000,00)	99,59		
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.465.000,00	81.130.000,00	(335.000,00)	99,59		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.465.000,00	81.130.000,00	(335.000,00)	99,59		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.625.000,00	76.290.000,00	(335.000,00)	99,56		
09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	46.665.000,00	45.640.800,00	(1.024.200,00)	97,81		
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.665.000,00	45.640.800,00	(1.024.200,00)	97,81		
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46.665.000,00	45.640.800,00	(1.024.200,00)	97,81		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.665.000,00	45.640.800,00	(1.024.200,00)	97,81		
09.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.655.000,00	44.630.800,00	(1.024.200,00)	97,76		
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	21.950.000,00	21.750.000,00	(200.000,00)	99,09		
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	21.950.000,00	21.750.000,00	(200.000,00)	99,09		
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	21.950.000,00	21.750.000,00	(200.000,00)	99,09		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.950.000,00	21.750.000,00	(200.000,00)	99,09		

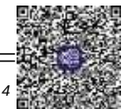

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	21.750.000,00	(200.000,00)	99,09		
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	5.466.540.450,00	5.316.155.262,00	(150.385.188,00)	97,25		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.466.540.450,00	5.316.155.262,00	(150.385.188,00)	97,25		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.154.719.050,00	5.039.109.984,00	(115.609.066,00)	97,76		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.154.719.050,00	5.039.109.984,00	(115.609.066,00)	97,76		
11.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.124.479.050,00	5.008.869.984,00	(115.609.066,00)	97,74		
11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0		
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	278.821.400,00	277.045.278,00	(1.776.122,00)	99,36		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	44.127.400,00	43.845.278,00	(282.122,00)	99,36		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.127.400,00	43.845.278,00	(282.122,00)	99,36		
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	234.694.000,00	233.200.000,00	(1.494.000,00)	99,36		
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.694.000,00	233.200.000,00	(1.494.000,00)	99,36		
	SURPLUS / DEFISIT	(35.568.563.650,00)	(35.136.270.965,39)	432.292.684,61	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(35.568.563.650,00)**	**(35.136.270.965,39)**	**432.292.684,61**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

I Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.117.415.589,00	5.836.886.607,00	(280.528.982,00)	95,41		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.113.853.850,00	4.871.049.167,00	(242.804.683,00)	95,25		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.000,00	5.705.800,00	(584.200,00)	90,71		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.290.000,00	5.705.800,00	(584.200,00)	90,71		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.290.000,00	5.705.800,00	(584.200,00)	90,71		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.290.000,00	5.705.800,00	(584.200,00)	90,71		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.462.190.150,00	4.302.075.989,00	(160.114.161,00)	96,41		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.462.190.150,00	4.302.075.989,00	(160.114.161,00)	96,41		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.462.190.150,00	4.302.075.989,00	(160.114.161,00)	96,41		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.462.190.150,00	4.302.075.989,00	(160.114.161,00)	96,41		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.405.900,00	115.168.000,00	(9.237.900,00)	92,57		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.895.900,00	103.886.000,00	(9.009.900,00)	92,02		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	112.895.900,00	103.886.000,00	(9.009.900,00)	92,02		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.025.900,00	94.016.000,00	(9.009.900,00)	91,25		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.850.000,00	4.652.000,00	(198.000,00)	95,92		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.850.000,00	4.652.000,00	(198.000,00)	95,92		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.652.000,00	(198.000,00)	95,92		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.010.000,00	(30.000,00)	98,53		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.530.000,00	67.460.000,00	(7.070.000,00)	90,51		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.530.000,00	67.460.000,00	(7.070.000,00)	90,51		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	74.530.000,00	67.460.000,00	(7.070.000,00)	90,51		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.530.000,00	67.460.000,00	(7.070.000,00)	90,51		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.616.000,00	282.811.278,00	(42.804.722,00)	86,85		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.845.000,00	7.411.278,00	(1.433.722,00)	83,79		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.845.000,00	7.411.278,00	(1.433.722,00)	83,79		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.845.000,00	7.411.278,00	(1.433.722,00)	83,79		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.271.000,00	267.900.000,00	(41.371.000,00)	86,62		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	309.271.000,00	267.900.000,00	(41.371.000,00)	86,62		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	48.040.000,00	42.100.000,00	(5.940.000,00)	87,64		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.231.000,00	225.800.000,00	(35.431.000,00)	86,44		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.821.800,00	97.828.100,00	(22.993.700,00)	80,97		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.161.000,00	60.329.300,00	(17.831.700,00)	77,19		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.161.000,00	60.329.300,00	(17.831.700,00)	77,19		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.161.000,00	60.329.300,00	(17.831.700,00)	77,19		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.660.800,00	37.498.800,00	(5.162.000,00)	87,90		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.660.800,00	27.548.800,00	(5.112.000,00)	84,35		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.660.800,00	27.548.800,00	(5.112.000,00)	84,35		
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	569.761.450,00	537.271.000,00	(32.490.450,00)	94,30		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.562.500,00	4.383.500,00	(179.000,00)	96,08		
02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4.562.500,00	4.383.500,00	(179.000,00)	96,08		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.562.500,00	4.383.500,00	(179.000,00)	96,08		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.562.500,00	4.383.500,00	(179.000,00)	96,08		
02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	299.165.000,00	294.196.000,00	(4.969.000,00)	98,34		
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	299.165.000,00	294.196.000,00	(4.969.000,00)	98,34		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	299.165.000,00	294.196.000,00	(4.969.000,00)	98,34		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.705.000,00	285.736.000,00	(4.969.000,00)	98,29		
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	266.033.950,00	238.691.500,00	(27.342.450,00)	89,72		
02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80		
02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	256.033.950,00	228.811.500,00	(27.222.450,00)	89,37		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	256.033.950,00	228.811.500,00	(27.222.450,00)	89,37		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.033.950,00	228.811.500,00	(27.222.450,00)	89,37		
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	252.890.289,00	248.488.340,00	(4.401.949,00)	98,26		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	153.905.350,00	149.602.340,00	(4.303.010,00)	97,20		
03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	153.905.350,00	149.602.340,00	(4.303.010,00)	97,20		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	153.905.350,00	149.602.340,00	(4.303.010,00)	97,20		
03.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.445.350,00	141.142.340,00	(4.303.010,00)	97,04		
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	98.984.939,00	98.886.000,00	(98.939,00)	99,90		
03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	98.984.939,00	98.886.000,00	(98.939,00)	99,90		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	98.984.939,00	98.886.000,00	(98.939,00)	99,90		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.984.939,00	98.886.000,00	(98.939,00)	99,90		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	155.910.000,00	155.328.100,00	(581.900,00)	99,63		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	20.075.000,00	19.779.000,00	(296.000,00)	98,53		
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.050.000,00	16.940.000,00	(110.000,00)	99,35		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.050.000,00	16.940.000,00	(110.000,00)	99,35		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	16.940.000,00	(110.000,00)	99,35		
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.025.000,00	2.839.000,00	(186.000,00)	93,85		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.025.000,00	2.839.000,00	(186.000,00)	93,85		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	2.839.000,00	(186.000,00)	93,85		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.475.000,00	126.305.600,00	(169.400,00)	99,87		
04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.475.000,00	126.305.600,00	(169.400,00)	99,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	126.475.000,00	126.305.600,00	(169.400,00)	99,87		
04.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.215.000,00	119.045.600,00	(169.400,00)	99,86		
04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.360.000,00	9.243.500,00	(116.500,00)	98,76		
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.360.000,00	9.243.500,00	(116.500,00)	98,76		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.360.000,00	9.243.500,00	(116.500,00)	98,76		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	9.243.500,00	(116.500,00)	98,76		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00		
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00		
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.117.415.589,00)	(5.836.886.607,00)	280.528.982,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.117.415.589,00)**	**(5.836.886.607,00)**	**280.528.982,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2-13.2-14.0-00.09 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	12.189.500.354,00	10.893.091.757,00	(1.296.408.597,00)	89,36		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.461.005.354,00	5.277.136.380,00	(183.868.974,00)	96,63		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.681.237.904,00	4.654.259.945,00	(26.977.959,00)	99,42		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.237.904,00	4.654.259.945,00	(26.977.959,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.681.237.904,00	4.654.259.945,00	(26.977.959,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.681.237.904,00	4.654.259.945,00	(26.977.959,00)	99,42		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.530.950,00	300.721.500,00	(44.809.450,00)	87,03		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.919.500,00	(80.500,00)	95,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.919.500,00	(80.500,00)	95,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.919.500,00	(80.500,00)	95,98		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	26.679.000,00	(2.321.000,00)	92,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	26.679.000,00	(2.321.000,00)	92,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	26.679.000,00	(2.321.000,00)	92,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.579.750,00	245.753.400,00	(39.826.350,00)	86,05		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	285.579.750,00	245.753.400,00	(39.826.350,00)	86,05		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	62.760.000,00	62.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.819.750,00	182.993.400,00	(39.826.350,00)	82,13		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.011.200,00	17.429.600,00	(2.581.600,00)	87,10		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.011.200,00	17.429.600,00	(2.581.600,00)	87,10		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.011.200,00	17.429.600,00	(2.581.600,00)	87,10		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.836.000,00	41.400.000,00	(2.436.000,00)	94,44		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.836.000,00	41.400.000,00	(2.436.000,00)	94,44		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	43.836.000,00	41.400.000,00	(2.436.000,00)	94,44		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.836.000,00	41.400.000,00	(2.436.000,00)	94,44		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.100.000,00	35.621.459,00	(33.478.541,00)	51,55		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.980.000,00	18.501.459,00	(33.478.541,00)	35,59		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.980.000,00	18.501.459,00	(33.478.541,00)	35,59		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.980.000,00	18.501.459,00	(33.478.541,00)	35,59		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.300.500,00	245.133.476,00	(76.167.024,00)	76,29		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.940.500,00	221.808.476,00	(76.132.024,00)	74,45		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	297.940.500,00	221.808.476,00	(76.132.024,00)	74,45		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.940.500,00	221.808.476,00	(76.132.024,00)	74,45		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.360.000,00	23.325.000,00	(35.000,00)	99,85		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.360.000,00	23.325.000,00	(35.000,00)	99,85		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.360.000,00	23.325.000,00	(35.000,00)	99,85		
02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	13.052.500,00	12.557.000,00	(495.500,00)	96,20		
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	13.052.500,00	12.557.000,00	(495.500,00)	96,20		
02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	7.217.500,00	7.056.000,00	(161.500,00)	97,76		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.217.500,00	7.056.000,00	(161.500,00)	97,76		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.217.500,00	7.056.000,00	(161.500,00)	97,76		
02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5.835.000,00	5.501.000,00	(334.000,00)	94,28		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.835.000,00	5.501.000,00	(334.000,00)	94,28		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.835.000,00	5.501.000,00	(334.000,00)	94,28		
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	782.270.000,00	727.955.500,00	(54.314.500,00)	93,06		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	782.270.000,00	727.955.500,00	(54.314.500,00)	93,06		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	59.775.500,00	(4.424.500,00)	93,11		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	59.775.500,00	(4.424.500,00)	93,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	59.775.500,00	(4.424.500,00)	93,11		
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	548.650.000,00	504.800.000,00	(43.850.000,00)	92,01		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	548.650.000,00	504.800.000,00	(43.850.000,00)	92,01		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.650.000,00	504.800.000,00	(43.850.000,00)	92,01		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	91.420.000,00	85.380.000,00	(6.040.000,00)	93,39		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	91.420.000,00	85.380.000,00	(6.040.000,00)	93,39		
02.2.02.13.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	66.060.000,00	(6.040.000,00)	91,62		
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	1.871.947.000,00	1.106.718.010,00	(765.228.990,00)	59,12		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	506.450.000,00	453.271.010,00	(53.178.990,00)	89,50		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	58.180.000,00	(21.820.000,00)	72,73		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	58.180.000,00	(21.820.000,00)	72,73		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	58.180.000,00	(21.820.000,00)	72,73		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	134.291.000,00	(15.709.000,00)	89,53		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	134.291.000,00	(15.709.000,00)	89,53		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	134.291.000,00	(15.709.000,00)	89,53		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	47.147.500,00	(4.852.500,00)	90,67		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	47.147.500,00	(4.852.500,00)	90,67		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	47.147.500,00	(4.852.500,00)	90,67		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	134.768.510,00	(9.681.490,00)	93,30		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	144.450.000,00	134.768.510,00	(9.681.490,00)	93,30		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.450.000,00	134.768.510,00	(9.681.490,00)	93,30		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	78.884.000,00	(1.116.000,00)	98,61		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.884.000,00	(1.116.000,00)	98,61		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.884.000,00	(1.116.000,00)	98,61		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	196.000.000,00	146.800.000,00	(49.200.000,00)	74,90		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	52.000.000,00	2.800.000,00	(49.200.000,00)	5,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	2.800.000,00	(49.200.000,00)	5,38		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	2.800.000,00	(49.200.000,00)	5,38		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	896.997.000,00	324.988.000,00	(572.009.000,00)	36,23		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.900.000,00	33.897.000,00	(12.003.000,00)	73,85		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.900.000,00	33.897.000,00	(12.003.000,00)	73,85		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	33.897.000,00	(12.003.000,00)	73,85		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	825.597.000,00	266.570.000,00	(559.027.000,00)	32,29		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	785.197.000,00	266.570.000,00	(518.627.000,00)	33,95		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.197.000,00	266.570.000,00	(518.627.000,00)	33,95		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	40.400.000,00	0,00	(40.400.000,00)	0		
03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.400.000,00	0,00	(40.400.000,00)	0		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.500.000,00	24.521.000,00	(979.000,00)	96,16		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	24.521.000,00	(979.000,00)	96,16		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	24.521.000,00	(979.000,00)	96,16		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	272.500.000,00	181.659.000,00	(90.841.000,00)	66,66		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.775.000,00	(225.000,00)	97,50		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.775.000,00	(225.000,00)	97,50		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.775.000,00	(225.000,00)	97,50		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	263.500.000,00	172.884.000,00	(90.616.000,00)	65,61		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	263.500.000,00	172.884.000,00	(90.616.000,00)	65,61		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.500.000,00	172.884.000,00	(90.616.000,00)	65,61		
04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	347.749.500,00	329.549.567,00	(18.199.933,00)	94,77		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	347.749.500,00	329.549.567,00	(18.199.933,00)	94,77		
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	95.812.500,00	93.155.000,00	(2.657.500,00)	97,23		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.812.500,00	93.155.000,00	(2.657.500,00)	97,23		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.352.500,00	84.695.000,00	(2.657.500,00)	96,96		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	38.927.500,00	38.340.000,00	(587.500,00)	98,49		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.927.500,00	38.340.000,00	(587.500,00)	98,49		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.927.500,00	38.340.000,00	(587.500,00)	98,49		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	132.560.000,00	121.208.000,00	(11.352.000,00)	91,44		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	132.560.000,00	121.208.000,00	(11.352.000,00)	91,44		
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.100.000,00	112.748.000,00	(11.352.000,00)	90,85		
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	39.484.500,00	37.109.500,00	(2.375.000,00)	93,98		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	39.484.500,00	37.109.500,00	(2.375.000,00)	93,98		
04.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	2.020.000,00	(2.020.000,00)	50,00		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.444.500,00	35.089.500,00	(355.000,00)	99,00		
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	28.440.000,00	27.785.567,00	(654.433,00)	97,70		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	28.440.000,00	27.785.567,00	(654.433,00)	97,70		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.440.000,00	27.785.567,00	(654.433,00)	97,70		
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12.525.000,00	11.951.500,00	(573.500,00)	95,42		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	12.525.000,00	11.951.500,00	(573.500,00)	95,42		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.525.000,00	11.951.500,00	(573.500,00)	95,42		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	1.650.020.000,00	1.460.440.000,00	(189.580.000,00)	88,51		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.650.020.000,00	1.460.440.000,00	(189.580.000,00)	88,51		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	377.000.000,00	251.890.000,00	(125.110.000,00)	66,81		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	377.000.000,00	251.890.000,00	(125.110.000,00)	66,81		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.000.000,00	251.890.000,00	(125.110.000,00)	66,81		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.273.020.000,00	1.208.550.000,00	(64.470.000,00)	94,94		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.273.020.000,00	1.208.550.000,00	(64.470.000,00)	94,94		
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.700.000,00	1.189.230.000,00	(64.470.000,00)	94,86		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	2.063.456.000,00	1.978.735.300,00	(84.720.700,00)	95,89		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.063.456.000,00	1.978.735.300,00	(84.720.700,00)	95,89		
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	953.506.000,00	939.853.000,00	(13.653.000,00)	98,57		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	953.506.000,00	939.853.000,00	(13.653.000,00)	98,57		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.506.000,00	939.853.000,00	(13.653.000,00)	98,57		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35.655.000,00	35.229.000,00	(426.000,00)	98,81		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.655.000,00	35.229.000,00	(426.000,00)	98,81		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.655.000,00	35.229.000,00	(426.000,00)	98,81		
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	31.485.500,00	31.229.000,00	(256.500,00)	99,19		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	31.485.500,00	31.229.000,00	(256.500,00)	99,19		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.485.500,00	31.229.000,00	(256.500,00)	99,19		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.042.809.500,00	972.424.300,00	(70.385.200,00)	93,25		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.042.809.500,00	972.424.300,00	(70.385.200,00)	93,25		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.809.500,00	912.424.300,00	(70.385.200,00)	92,84		
05.2.01.09.5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(12.189.500.354,00)	(10.893.091.757,00)	1.296.408.597,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(12.189.500.354,00)**	**(10.893.091.757,00)**	**1.296.408.597,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN

SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.115.080.000,00	795.029.180,00	(320.050.820,00)	71,30		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.115.080.000,00	795.029.180,00	(320.050.820,00)	71,30		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.115.080.000,00	759.795.500,00	(355.284.500,00)	68,14		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	35.233.680,00	35.233.680,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	12.816.515.850,00	12.425.436.154,78	(391.079.695,22)	96,95		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.214.013.350,00	5.063.792.479,00	(150.220.871,00)	97,12		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.327.611.250,00	4.225.899.705,00	(101.711.545,00)	97,65		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.327.611.250,00	4.225.899.705,00	(101.711.545,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.327.611.250,00	4.225.899.705,00	(101.711.545,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.327.611.250,00	4.225.899.705,00	(101.711.545,00)	97,65		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.181.100,00	338.441.850,00	(24.739.250,00)	93,19		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.923.300,00	1.923.300,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.923.300,00	1.923.300,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.923.300,00	1.923.300,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.229.600,00	7.317.200,00	(912.400,00)	88,91		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.229.600,00	7.317.200,00	(912.400,00)	88,91		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.229.600,00	7.317.200,00	(912.400,00)	88,91		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.296.600,00	181.053.400,00	(2.243.200,00)	98,78		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	183.296.600,00	181.053.400,00	(2.243.200,00)	98,78		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.776.600,00	154.533.400,00	(2.243.200,00)	98,57		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.564.600,00	34.561.950,00	(2.650,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.564.600,00	34.561.950,00	(2.650,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.564.600,00	34.561.950,00	(2.650,00)	99,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	4.200.000,00	(1.020.000,00)	80,46		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.220.000,00	4.200.000,00	(1.020.000,00)	80,46		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	4.200.000,00	(1.020.000,00)	80,46		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129.947.000,00	109.386.000,00	(20.561.000,00)	84,18		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	129.947.000,00	109.386.000,00	(20.561.000,00)	84,18		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.947.000,00	109.386.000,00	(20.561.000,00)	84,18		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.000.000,00	201.195.274,00	(9.804.726,00)	95,35		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.300.000,00	31.495.274,00	(9.804.726,00)	76,26		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.300.000,00	31.495.274,00	(9.804.726,00)	76,26		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	31.495.274,00	(9.804.726,00)	76,26		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.700.000,00	161.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	161.700.000,00	161.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.300.000,00	123.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.221.000,00	298.255.650,00	(13.965.350,00)	95,53		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.761.000,00	276.840.650,00	(13.920.350,00)	95,21		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	290.761.000,00	276.840.650,00	(13.920.350,00)	95,21		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.441.000,00	257.520.650,00	(13.920.350,00)	94,87		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.460.000,00	21.415.000,00	(45.000,00)	99,79		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	21.460.000,00	21.415.000,00	(45.000,00)	99,79		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.460.000,00	21.415.000,00	(45.000,00)	99,79		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	7.538.382.500,00	7.297.527.875,78	(240.854.624,22)	96,80		
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	863.290.000,00	862.787.000,00	(503.000,00)	99,94		
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	863.290.000,00	862.787.000,00	(503.000,00)	99,94		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	834.290.000,00	834.260.000,00	(30.000,00)	100,00		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.970.000,00	814.940.000,00	(30.000,00)	100,00		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	29.000.000,00	28.527.000,00	(473.000,00)	98,37		
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	28.527.000,00	(473.000,00)	98,37		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.123.891.300,00	5.932.633.870,78	(191.257.429,22)	96,88		
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6.123.891.300,00	5.932.633.870,78	(191.257.429,22)	96,88		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.706.400,00	1.570.080.345,00	(50.626.055,00)	96,88		
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.597.786.400,00	1.547.160.345,00	(50.626.055,00)	96,83		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	4.503.184.900,00	4.362.553.525,78	(140.631.374,22)	96,88		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	37.547.225,00	(2.452.775,00)	93,87		
02.2.02.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.463.184.900,00	4.325.006.300,78	(138.178.599,22)	96,90		
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	108.816.000,00	87.330.200,00	(21.485.800,00)	80,25		
02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.816.000,00	87.330.200,00	(21.485.800,00)	80,25		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.816.000,00	87.330.200,00	(21.485.800,00)	80,25		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.816.000,00	87.330.200,00	(21.485.800,00)	80,25		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	330.880.200,00	303.451.805,00	(27.428.395,00)	91,71		
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	330.880.200,00	303.451.805,00	(27.428.395,00)	91,71		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	268.880.200,00	244.951.805,00	(23.928.395,00)	91,10		
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.960.200,00	228.031.805,00	(23.928.395,00)	90,50		
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	62.000.000,00	58.500.000,00	(3.500.000,00)	94,35		
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00		
02.2.05.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00		
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	52.370.000,00	52.194.000,00	(176.000,00)	99,66		
02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	52.370.000,00	52.194.000,00	(176.000,00)	99,66		
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.370.000,00	52.194.000,00	(176.000,00)	99,66		
02.2.07.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.850.000,00	37.674.000,00	(176.000,00)	99,54		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.135.000,00	59.131.000,00	(4.000,00)	99,99		
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.135.000,00	59.131.000,00	(4.000,00)	99,99		
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	59.135.000,00	59.131.000,00	(4.000,00)	99,99		
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.135.000,00	59.131.000,00	(4.000,00)	99,99		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	64.120.000,00	64.115.800,00	(4.200,00)	99,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	64.120.000,00	64.115.800,00	(4.200,00)	99,99		
03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	64.120.000,00	64.115.800,00	(4.200,00)	99,99		
03.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.620.000,00	61.618.300,00	(1.700,00)	100,00		
03.2.05.02.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.498.300,00	(1.700,00)	100,00		
03.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.497.500,00	(2.500,00)	99,90		
03.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.497.500,00	(2.500,00)	99,90		
	SURPLUS / DEFISIT	(11.701.435.850,00)	(11.630.406.974,78)	71.028.875,22	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(11.701.435.850,00)**	**(11.630.406.974,78)**	**71.028.875,22**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SKPD : 2-16.2-21.2-20.03 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	193.794.000,00	266.315.000,00	72.521.000,00	137,42		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	193.794.000,00	266.315.000,00	72.521.000,00	137,42		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	193.794.000,00	266.315.000,00	72.521.000,00	137,42		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	8.679.078.824,00	8.477.668.826,00	(201.409.998,00)	97,68		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.173.129.074,00	4.086.082.380,00	(87.046.694,00)	97,91		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.125.000,00	(375.000,00)	89,29		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.125.000,00	(375.000,00)	89,29		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.125.000,00	(375.000,00)	89,29		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.125.000,00	(375.000,00)	89,29		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.933.959.074,00	3.859.227.526,00	(74.731.548,00)	98,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.933.959.074,00	3.859.227.526,00	(74.731.548,00)	98,10		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.933.959.074,00	3.859.227.526,00	(74.731.548,00)	98,10		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.933.959.074,00	3.859.227.526,00	(74.731.548,00)	98,10		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.035.000,00	26.853.800,00	(4.181.200,00)	86,53		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.340.000,00	1.280.000,00	(60.000,00)	95,52		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.340.000,00	1.280.000,00	(60.000,00)	95,52		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	1.280.000,00	(60.000,00)	95,52		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.083.700,00	998.700,00	(85.000,00)	92,16		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.083.700,00	998.700,00	(85.000,00)	92,16		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.700,00	998.700,00	(85.000,00)	92,16		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.465.000,00	23.447.900,00	(4.017.100,00)	85,37		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.465.000,00	23.447.900,00	(4.017.100,00)	85,37		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.465.000,00	23.447.900,00	(4.017.100,00)	85,37		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.146.300,00	1.127.200,00	(19.100,00)	98,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.146.300,00	1.127.200,00	(19.100,00)	98,33		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.300,00	1.127.200,00	(19.100,00)	98,33		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.048.000,00	145.920.924,00	(4.127.076,00)	97,25		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	5.218.000,00	(32.000,00)	99,39		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.218.000,00	(32.000,00)	99,39		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.218.000,00	(32.000,00)	99,39		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.518.000,00	79.422.924,00	(4.095.076,00)	95,10		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.518.000,00	79.422.924,00	(4.095.076,00)	95,10		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.518.000,00	79.422.924,00	(4.095.076,00)	95,10		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.280.000,00	61.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.280.000,00	61.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.587.000,00	50.955.130,00	(3.631.870,00)	93,35		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.087.000,00	41.760.130,00	(3.326.870,00)	92,62		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.087.000,00	41.760.130,00	(3.326.870,00)	92,62		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.087.000,00	41.760.130,00	(3.326.870,00)	92,62		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.500.000,00	9.195.000,00	(305.000,00)	96,79		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.195.000,00	(305.000,00)	96,79		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.195.000,00	(305.000,00)	96,79		
02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	1.230.971.300,00	1.147.457.161,00	(83.514.139,00)	93,22		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.230.971.300,00	1.147.457.161,00	(83.514.139,00)	93,22		
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.161.717.000,00	1.091.656.661,00	(70.060.339,00)	93,97		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.083.717.000,00	1.014.206.661,00	(69.510.339,00)	93,59		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.797.000,00	991.286.661,00	(69.510.339,00)	93,45		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	78.000.000,00	77.450.000,00	(550.000,00)	99,29		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.950.000,00	(50.000,00)	98,33		
02.2.01.05.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.500.000,00	(500.000,00)	99,33		
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	39.061.800,00	31.300.500,00	(7.761.300,00)	80,13		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	34.221.800,00	26.460.500,00	(7.761.300,00)	77,32		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.221.800,00	26.460.500,00	(7.761.300,00)	77,32		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	30.192.500,00	24.500.000,00	(5.692.500,00)	81,15		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	30.192.500,00	24.500.000,00	(5.692.500,00)	81,15		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.192.500,00	24.500.000,00	(5.692.500,00)	81,15		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	33.043.250,00	22.248.000,00	(10.795.250,00)	67,33		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.043.250,00	22.248.000,00	(10.795.250,00)	67,33		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	33.043.250,00	22.248.000,00	(10.795.250,00)	67,33		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.043.250,00	22.248.000,00	(10.795.250,00)	67,33		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.043.250,00	22.248.000,00	(10.795.250,00)	67,33		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	195.552.500,00	184.310.105,00	(11.242.395,00)	94,25		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	155.782.500,00	145.409.705,00	(10.372.795,00)	93,34		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.292.500,00	36.081.200,00	(211.300,00)	99,42		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.292.500,00	36.081.200,00	(211.300,00)	99,42		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.292.500,00	36.081.200,00	(211.300,00)	99,42		
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	8.000.000,00	(800.000,00)	90,91		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.000.000,00	(800.000,00)	90,91		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.000.000,00	(800.000,00)	90,91		
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	88.000.000,00	84.000.000,00	(4.000.000,00)	95,45		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	84.000.000,00	(4.000.000,00)	95,45		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	84.000.000,00	(4.000.000,00)	95,45		
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.690.000,00	17.328.505,00	(5.361.495,00)	76,37		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.690.000,00	17.328.505,00	(5.361.495,00)	76,37		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.690.000,00	17.328.505,00	(5.361.495,00)	76,37		
02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	39.770.000,00	38.900.400,00	(869.600,00)	97,81		
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.770.000,00	38.900.400,00	(869.600,00)	97,81		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.900.450,00	14.900.400,00	(50,00)	100,00		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.450,00	380.400,00	(50,00)	99,99		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	24.869.550,00	24.000.000,00	(869.550,00)	96,50		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.869.550,00	24.000.000,00	(869.550,00)	96,50		
03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	3.046.382.700,00	3.037.571.180,00	(8.811.520,00)	99,71		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.915.170.000,00	1.909.768.180,00	(5.401.820,00)	99,72		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.915.170.000,00	1.909.768.180,00	(5.401.820,00)	99,72		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.915.170.000,00	1.909.768.180,00	(5.401.820,00)	99,72		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.915.170.000,00	1.909.768.180,00	(5.401.820,00)	99,72		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.131.212.700,00	1.127.803.000,00	(3.409.700,00)	99,70		
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	247.724.700,00	245.700.000,00	(2.024.700,00)	99,18		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00		
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	47.724.700,00	47.700.000,00	(24.700,00)	99,95		
03.2.02.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	47.724.700,00	47.700.000,00	(24.700,00)	99,95		
03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	679.540.000,00	678.155.000,00	(1.385.000,00)	99,80		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	679.540.000,00	678.155.000,00	(1.385.000,00)	99,80		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.540.000,00	678.155.000,00	(1.385.000,00)	99,80		
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.228.000,00	2.228.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.228.000,00	2.228.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.228.000,00	2.228.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	201.720.000,00	201.720.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	201.720.000,00	201.720.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.10.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.485.284.824,00)	(8.211.353.826,00)	273.930.998,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(8.485.284.824,00)**	**(8.211.353.826,00)**	**273.930.998,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.2-07.0-00.06 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	14.796.647.000,00	14.210.206.695,00	(586.440.305,00)	96,04		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.185.972.000,00	5.041.566.900,00	(144.405.100,00)	97,22		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.851.465.000,00	4.729.768.136,00	(121.696.864,00)	97,49		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.851.465.000,00	4.729.768.136,00	(121.696.864,00)	97,49		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.851.465.000,00	4.729.768.136,00	(121.696.864,00)	97,49		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.851.465.000,00	4.729.768.136,00	(121.696.864,00)	97,49		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.396.000,00	162.263.650,00	(3.132.350,00)	98,11		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.043.100,00	1.030.500,00	(12.600,00)	98,79		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.043.100,00	1.030.500,00	(12.600,00)	98,79		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.100,00	1.030.500,00	(12.600,00)	98,79		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.043.000,00	1.021.000,00	(22.000,00)	97,89		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.043.000,00	1.021.000,00	(22.000,00)	97,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.000,00	1.021.000,00	(22.000,00)	97,89		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.965.200,00	136.402.850,00	(562.350,00)	99,59		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	136.965.200,00	136.402.850,00	(562.350,00)	99,59		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.425.200,00	117.862.850,00	(562.350,00)	99,53		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.144.700,00	13.009.300,00	(2.135.400,00)	85,90		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.144.700,00	13.009.300,00	(2.135.400,00)	85,90		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.144.700,00	13.009.300,00	(2.135.400,00)	85,90		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.446.500,00	79.531.267,00	(16.915.233,00)	82,46		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.346.500,00	50.431.267,00	(16.915.233,00)	74,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.346.500,00	50.431.267,00	(16.915.233,00)	74,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.346.500,00	50.431.267,00	(16.915.233,00)	74,88		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.664.500,00	70.003.847,00	(2.660.653,00)	96,34		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.034.500,00	62.448.847,00	(2.585.653,00)	96,02		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.034.500,00	62.448.847,00	(2.585.653,00)	96,02		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.034.500,00	62.448.847,00	(2.585.653,00)	96,02		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.630.000,00	7.555.000,00	(75.000,00)	99,02		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.630.000,00	7.555.000,00	(75.000,00)	99,02		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	7.555.000,00	(75.000,00)	99,02		
03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	45.243.750,00	44.395.000,00	(848.750,00)	98,12		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	15.000.000,00	14.685.500,00	(314.500,00)	97,90		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	15.000.000,00	14.685.500,00	(314.500,00)	97,90		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.685.500,00	(314.500,00)	97,90		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.685.500,00	(314.500,00)	97,90		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.243.750,00	29.709.500,00	(534.250,00)	98,23		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.243.750,00	29.709.500,00	(534.250,00)	98,23		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.243.750,00	29.709.500,00	(534.250,00)	98,23		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.223.750,00	27.689.500,00	(534.250,00)	98,11		
04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	50.051.750,00	49.753.500,00	(298.250,00)	99,40		
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.051.750,00	49.753.500,00	(298.250,00)	99,40		
04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	50.051.750,00	49.753.500,00	(298.250,00)	99,40		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.051.750,00	49.753.500,00	(298.250,00)	99,40		
04.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.031.750,00	47.733.500,00	(298.250,00)	99,38		
05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	42.680.000,00	41.938.000,00	(742.000,00)	98,26		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.680.000,00	41.938.000,00	(742.000,00)	98,26		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	42.680.000,00	41.938.000,00	(742.000,00)	98,26		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.680.000,00	41.938.000,00	(742.000,00)	98,26		
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	38.908.000,00	(742.000,00)	98,13		
05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	136.000.000,00	134.239.000,00	(1.761.000,00)	98,71		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	136.000.000,00	134.239.000,00	(1.761.000,00)	98,71		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	136.000.000,00	134.239.000,00	(1.761.000,00)	98,71		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.000.000,00	134.239.000,00	(1.761.000,00)	98,71		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	134.239.000,00	(1.761.000,00)	98,71		
06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	149.620.000,00	149.354.900,00	(265.100,00)	99,82		
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.620.000,00	149.354.900,00	(265.100,00)	99,82		
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.620.000,00	149.354.900,00	(265.100,00)	99,82		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	149.620.000,00	149.354.900,00	(265.100,00)	99,82		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.390.000,00	145.124.900,00	(265.100,00)	99,82		
07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	292.420.000,00	289.057.000,00	(3.363.000,00)	98,85		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	292.420.000,00	289.057.000,00	(3.363.000,00)	98,85		
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	18.250.000,00	18.097.000,00	(153.000,00)	99,16		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.250.000,00	18.097.000,00	(153.000,00)	99,16		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.097.000,00	(153.000,00)	99,16		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.170.000,00	270.960.000,00	(3.210.000,00)	98,83		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	274.170.000,00	270.960.000,00	(3.210.000,00)	98,83		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.170.000,00	270.960.000,00	(3.210.000,00)	98,83		
08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	8.894.659.500,00	8.459.902.395,00	(434.757.105,00)	95,11		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.894.659.500,00	8.459.902.395,00	(434.757.105,00)	95,11		
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.894.659.500,00	8.459.902.395,00	(434.757.105,00)	95,11		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	420.403.500,00	366.960.500,00	(53.443.000,00)	87,29		
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.163.500,00	336.720.500,00	(53.443.000,00)	86,30		
08.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	8.474.256.000,00	8.092.941.895,00	(381.314.105,00)	95,50		
08.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.124.812.136,00	1.951.292.271,00	(173.519.865,00)	91,83		
08.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.488.203.559,00	5.371.649.624,00	(116.553.935,00)	97,88		
08.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	861.240.305,00	770.000.000,00	(91.240.305,00)	89,41		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.796.647.000,00)	(14.210.206.695,00)	586.440.305,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(14.796.647.000,00)**	**(14.210.206.695,00)**	**586.440.305,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lampiran I. 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	16.694.202.555,00	6.784.044.921,00	(9.910.157.634,00)	40,64		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	15.930.156.755,00	6.180.514.921,00	(9.749.641.834,00)	38,80		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.520.849.555,00	5.424.364.096,00	(96.485.459,00)	98,25		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.520.849.555,00	5.424.364.096,00	(96.485.459,00)	98,25		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.520.849.555,00	5.424.364.096,00	(96.485.459,00)	98,25		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.520.849.555,00	5.424.364.096,00	(96.485.459,00)	98,25		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.207.200,00	65.458.600,00	(11.748.600,00)	84,78		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	839.800,00	545.800,00	(294.000,00)	64,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	839.800,00	545.800,00	(294.000,00)	64,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.800,00	545.800,00	(294.000,00)	64,99		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.944.700,00	1.398.000,00	(546.700,00)	71,89		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.944.700,00	1.398.000,00	(546.700,00)	71,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.944.700,00	1.398.000,00	(546.700,00)	71,89		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.353.200,00	56.166.200,00	(10.187.000,00)	84,65		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.353.200,00	56.166.200,00	(10.187.000,00)	84,65		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.353.200,00	56.166.200,00	(10.187.000,00)	84,65		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.287.000,00	4.612.600,00	(674.400,00)	87,24		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.287.000,00	4.612.600,00	(674.400,00)	87,24		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.287.000,00	4.612.600,00	(674.400,00)	87,24		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.076.000,00	(24.000,00)	98,86		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.076.000,00	(24.000,00)	98,86		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.076.000,00	(24.000,00)	98,86		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	682.500,00	660.000,00	(22.500,00)	96,70		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	682.500,00	660.000,00	(22.500,00)	96,70		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.500,00	660.000,00	(22.500,00)	96,70		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.114.135.000,00	499.093.550,00	(9.615.041.450,00)	4,93		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.114.135.000,00	499.093.550,00	(9.615.041.450,00)	4,93		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	114.135.000,00	109.960.000,00	(4.175.000,00)	96,34		
01.2.07.09.5.1.01	Belanja Pegawai	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.375.000,00	101.200.000,00	(4.175.000,00)	96,04		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	389.133.550,00	(9.610.866.450,00)	3,89		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	389.133.550,00	(9.610.866.450,00)	3,89		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.922.500,00	127.828.971,00	(7.093.529,00)	94,74		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.542.500,00	23.448.971,00	(7.093.529,00)	76,77		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.542.500,00	23.448.971,00	(7.093.529,00)	76,77		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.542.500,00	23.448.971,00	(7.093.529,00)	76,77		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.980.000,00	101.980.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	101.980.000,00	101.980.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	38.280.000,00	38.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.042.500,00	63.769.704,00	(19.272.796,00)	76,79		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.482.500,00	55.319.704,00	(19.162.796,00)	74,27		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.482.500,00	55.319.704,00	(19.162.796,00)	74,27		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.482.500,00	55.319.704,00	(19.162.796,00)	74,27		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	8.450.000,00	(110.000,00)	98,71		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.560.000,00	8.450.000,00	(110.000,00)	98,71		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	8.450.000,00	(110.000,00)	98,71		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	69.825.900,00	68.438.200,00	(1.387.700,00)	98,01		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.235.900,00	13.103.200,00	(1.132.700,00)	92,04		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.500.000,00	8.953.000,00	(547.000,00)	94,24		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	8.953.000,00	(547.000,00)	94,24		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	8.953.000,00	(547.000,00)	94,24		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.735.900,00	4.150.200,00	(585.700,00)	87,63		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.735.900,00	4.150.200,00	(585.700,00)	87,63		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.735.900,00	4.150.200,00	(585.700,00)	87,63		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	55.590.000,00	55.335.000,00	(255.000,00)	99,54		
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	55.590.000,00	55.335.000,00	(255.000,00)	99,54		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.590.000,00	55.335.000,00	(255.000,00)	99,54		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.580.000,00	54.325.000,00	(255.000,00)	99,53		
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	46.869.000,00	46.698.000,00	(171.000,00)	99,64		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.869.000,00	46.698.000,00	(171.000,00)	99,64		
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	925.000,00	842.000,00	(83.000,00)	91,03		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	925.000,00	842.000,00	(83.000,00)	91,03		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.000,00	842.000,00	(83.000,00)	91,03		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	45.944.000,00	45.856.000,00	(88.000,00)	99,81		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.944.000,00	45.856.000,00	(88.000,00)	99,81		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.934.000,00	44.846.000,00	(88.000,00)	99,80		
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	202.690.900,00	196.007.200,00	(6.683.700,00)	96,70		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	202.690.900,00	196.007.200,00	(6.683.700,00)	96,70		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	95.430.100,00	89.165.800,00	(6.264.300,00)	93,44		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.430.100,00	89.165.800,00	(6.264.300,00)	93,44		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.380.100,00	84.115.800,00	(6.264.300,00)	93,07		
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	58.700.300,00	58.527.400,00	(172.900,00)	99,71		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.700.300,00	58.527.400,00	(172.900,00)	99,71		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.690.300,00	57.517.400,00	(172.900,00)	99,70		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	48.560.500,00	48.314.000,00	(246.500,00)	99,49		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.560.500,00	48.314.000,00	(246.500,00)	99,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.550.500,00	47.304.000,00	(246.500,00)	99,48		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	440.910.000,00	288.641.600,00	(152.268.400,00)	65,46		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	440.910.000,00	288.641.600,00	(152.268.400,00)	65,46		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	226.260.650,00	170.468.600,00	(55.792.050,00)	75,34		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	226.260.650,00	170.468.600,00	(55.792.050,00)	75,34		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.260.650,00	170.468.600,00	(55.792.050,00)	75,34		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	214.649.350,00	118.173.000,00	(96.476.350,00)	55,05		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	214.649.350,00	118.173.000,00	(96.476.350,00)	55,05		
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.639.350,00	117.163.000,00	(96.476.350,00)	54,84		
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,87		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,87		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,87		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,87		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,87		
	SURPLUS / DEFISIT	(16.694.202.555,00)	(6.784.044.921,00)	9.910.157.634,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(16.694.202.555,00)**	**(6.784.044.921,00)**	**9.910.157.634,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA

SKPD : 3-26.2-22.0-00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	55.148.779.000,00	52.936.886.000,00	(2.211.893.000,00)	95,99		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	55.148.779.000,00	52.936.886.000,00	(2.211.893.000,00)	95,99		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	55.148.779.000,00	52.936.886.000,00	(2.211.893.000,00)	95,99		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	90.786.418.717,00	78.028.636.565,59	(12.757.782.151,41)	85,95		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.414.180.017,00	5.815.989.122,00	(598.190.895,00)	90,67		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.988.000,00	16.834.800,00	(1.153.200,00)	93,59		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.598.000,00	1.362.000,00	(236.000,00)	85,23		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.598.000,00	1.362.000,00	(236.000,00)	85,23		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.000,00	1.362.000,00	(236.000,00)	85,23		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.390.000,00	15.472.800,00	(917.200,00)	94,40		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.390.000,00	15.472.800,00	(917.200,00)	94,40		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.390.000,00	15.472.800,00	(917.200,00)	94,40		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.406.939.517,00	4.939.584.942,00	(467.354.575,00)	91,36		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.405.944.517,00	4.938.714.942,00	(467.229.575,00)	91,36		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.405.944.517,00	4.938.714.942,00	(467.229.575,00)	91,36		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.405.944.517,00	4.938.714.942,00	(467.229.575,00)	91,36		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	995.000,00	870.000,00	(125.000,00)	87,44		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	995.000,00	870.000,00	(125.000,00)	87,44		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.000,00	870.000,00	(125.000,00)	87,44		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.012.800,00	445.991.540,00	(58.021.260,00)	88,49		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.873.600,00	2.790.000,00	(83.600,00)	97,09		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.873.600,00	2.790.000,00	(83.600,00)	97,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.873.600,00	2.790.000,00	(83.600,00)	97,09		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.781.100,00	2.683.500,00	(97.600,00)	96,49		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.781.100,00	2.683.500,00	(97.600,00)	96,49		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.781.100,00	2.683.500,00	(97.600,00)	96,49		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	383.018.100,00	340.791.600,00	(42.226.500,00)	88,98		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	383.018.100,00	340.791.600,00	(42.226.500,00)	88,98		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.018.100,00	340.791.600,00	(42.226.500,00)	88,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.260.000,00	46.038.440,00	(8.221.560,00)	84,85		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	54.260.000,00	46.038.440,00	(8.221.560,00)	84,85		
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	43.318.440,00	(8.221.560,00)	84,05		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	1.328.000,00	(672.000,00)	66,40		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.328.000,00	(672.000,00)	66,40		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.328.000,00	(672.000,00)	66,40		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	48.280.000,00	(6.720.000,00)	87,78		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	48.280.000,00	(6.720.000,00)	87,78		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	48.280.000,00	(6.720.000,00)	87,78		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	54.000.000,00	(6.000.000,00)	90,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	54.000.000,00	(6.000.000,00)	90,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	54.000.000,00	(6.000.000,00)	90,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	54.000.000,00	(6.000.000,00)	90,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.268.700,00	270.330.128,00	(38.938.572,00)	87,41		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.970.000,00	41.970.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.970.000,00	41.970.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.970.000,00	41.970.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.498.700,00	172.660.128,00	(37.838.572,00)	82,02		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	204.843.500,00	169.374.528,00	(35.468.972,00)	82,68		
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	97.440.000,00	97.440.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.403.500,00	71.934.528,00	(35.468.972,00)	66,98		
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	5.655.200,00	3.285.600,00	(2.369.600,00)	58,10		
01.2.08.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.655.200,00	3.285.600,00	(2.369.600,00)	58,10		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.800.000,00	55.700.000,00	(1.100.000,00)	98,06		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.800.000,00	55.700.000,00	(1.100.000,00)	98,06		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	55.700.000,00	(1.100.000,00)	98,06		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.971.000,00	89.247.712,00	(26.723.288,00)	76,96		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.001.000,00	80.427.712,00	(26.573.288,00)	75,17		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.001.000,00	80.427.712,00	(26.573.288,00)	75,17		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.001.000,00	80.427.712,00	(26.573.288,00)	75,17		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.970.000,00	8.820.000,00	(150.000,00)	98,33		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.970.000,00	8.820.000,00	(150.000,00)	98,33		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000,00	8.820.000,00	(150.000,00)	98,33		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	45.143.545.000,00	42.821.967.100,00	(2.321.577.900,00)	94,86		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	475.100.000,00	447.021.100,00	(28.078.900,00)	94,09		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	475.100.000,00	447.021.100,00	(28.078.900,00)	94,09		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	461.600.000,00	447.021.100,00	(14.578.900,00)	96,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.600.000,00	227.021.100,00	(4.578.900,00)	98,02		
02.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	220.000.000,00	(10.000.000,00)	95,65		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.668.445.000,00	42.374.946.000,00	(2.293.499.000,00)	94,87		
02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	44.668.445.000,00	42.374.946.000,00	(2.293.499.000,00)	94,87		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.615.980.000,00	42.343.216.000,00	(2.272.764.000,00)	94,91		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	48.000.000,00	46.640.000,00	(1.360.000,00)	97,17		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.605.000,00	260.201.000,00	(3.404.000,00)	98,71		
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	44.304.375.000,00	42.036.375.000,00	(2.268.000.000,00)	94,88		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	52.465.000,00	31.730.000,00	(20.735.000,00)	60,48		
02.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.465.000,00	31.730.000,00	(20.735.000,00)	60,48		
02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	31.840.880.700,00	22.625.628.600,09	(9.215.252.099,91)	71,06		
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.678.483.200,00	15.293.200.400,00	(1.385.282.800,00)	91,69		
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.678.483.200,00	15.293.200.400,00	(1.385.282.800,00)	91,69		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.678.483.200,00	15.293.200.400,00	(1.385.282.800,00)	91,69		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.678.483.200,00	15.293.200.400,00	(1.385.282.800,00)	91,69		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.162.397.500,00	7.332.428.200,09	(7.829.969.299,91)	48,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.162.397.500,00	7.332.428.200,09	(7.829.969.299,91)	48,36		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	897.362.500,00	346.515.000,00	(550.847.500,00)	38,61		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	754.162.500,00	203.315.000,00	(550.847.500,00)	26,96		
02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	14.265.035.000,00	6.985.913.200,09	(7.279.121.799,91)	48,97		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.400.000,00	19.800.000,00	(600.000,00)	97,06		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.660.000.000,00	2.908.914.500,09	(751.085.499,91)	79,48		
02.2.03.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.584.635.000,00	4.057.198.700,00	(6.527.436.300,00)	38,33		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	5.990.800.000,00	5.800.450.000,00	(190.350.000,00)	96,82		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.990.800.000,00	5.800.450.000,00	(190.350.000,00)	96,82		
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5.990.800.000,00	5.800.450.000,00	(190.350.000,00)	96,82		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.990.800.000,00	5.800.450.000,00	(190.350.000,00)	96,82		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.662.400.000,00	1.660.050.000,00	(2.350.000,00)	99,86		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	4.305.000.000,00	4.117.000.000,00	(188.000.000,00)	95,63		
03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	244.093.000,00	238.247.243,50	(5.845.756,50)	97,61		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	244.093.000,00	238.247.243,50	(5.845.756,50)	97,61		
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	138.073.000,00	134.217.743,50	(3.855.256,50)	97,21		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	88.073.000,00	84.400.000,00	(3.673.000,00)	95,83		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	0,00	(3.380.000,00)	0		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.693.000,00	84.400.000,00	(293.000,00)	99,65		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.817.743,50	(182.256,50)	99,64		
03.2.01.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.817.743,50	(182.256,50)	99,64		
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	106.020.000,00	104.029.500,00	(1.990.500,00)	98,12		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	106.020.000,00	104.029.500,00	(1.990.500,00)	98,12		
03.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.080.000,00	5.400.000,00	(680.000,00)	88,82		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	98.629.500,00	(1.310.500,00)	98,69		
05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	100.000.000,00	85.294.500,00	(14.705.500,00)	85,29		
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	85.294.500,00	(14.705.500,00)	85,29		
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000,00	85.294.500,00	(14.705.500,00)	85,29		

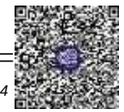

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	85.294.500,00	(14.705.500,00)	85,29		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	85.294.500,00	(14.705.500,00)	85,29		
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	1.052.920.000,00	641.060.000,00	(411.860.000,00)	60,88		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.052.920.000,00	641.060.000,00	(411.860.000,00)	60,88		
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.052.920.000,00	641.060.000,00	(411.860.000,00)	60,88		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.052.920.000,00	641.060.000,00	(411.860.000,00)	60,88		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.920.000,00	641.060.000,00	(411.860.000,00)	60,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(35.637.639.717,00)	(25.091.750.565,59)	10.545.889.151,41	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(35.637.639.717,00)**	**(25.091.750.565,59)**	**10.545.889.151,41**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN

SKPD : 3-27.3-25.2-09.01 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	500.322.000,00	261.001.100,00	(239.320.900,00)	52,17		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	500.322.000,00	261.001.100,00	(239.320.900,00)	52,17		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	500.322.000,00	257.672.500,00	(242.649.500,00)	51,50		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.328.600,00	3.328.600,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	28.877.222.811,00	28.493.426.421,00	(383.796.390,00)	98,67		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	25.508.733.657,00	25.310.287.217,00	(198.446.440,00)	99,22		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.300.000,00	24.268.000,00	(32.000,00)	99,87		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.300.000,00	24.268.000,00	(32.000,00)	99,87		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	24.268.000,00	(32.000,00)	99,87		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	24.268.000,00	(32.000,00)	99,87		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.655.883.657,00	24.469.549.172,00	(186.334.485,00)	99,24		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.655.883.657,00	24.469.549.172,00	(186.334.485,00)	99,24		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.655.883.657,00	24.469.549.172,00	(186.334.485,00)	99,24		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	24.655.883.657,00	24.469.549.172,00	(186.334.485,00)	99,24		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.164.500,00	375.693.900,00	(5.470.600,00)	98,56		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.456.000,00	10.320.000,00	(136.000,00)	98,70		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.456.000,00	10.320.000,00	(136.000,00)	98,70		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.456.000,00	10.320.000,00	(136.000,00)	98,70		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.034.600,00	59.908.000,00	(126.600,00)	99,79		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.434.600,00	29.403.000,00	(31.600,00)	99,89		
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.114.600,00	13.083.000,00	(31.600,00)	99,76		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	30.600.000,00	30.505.000,00	(95.000,00)	99,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.600.000,00	30.505.000,00	(95.000,00)	99,69		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	289.044.900,00	284.082.000,00	(4.962.900,00)	98,28		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	289.044.900,00	284.082.000,00	(4.962.900,00)	98,28		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.804.900,00	265.842.000,00	(4.962.900,00)	98,17		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.289.000,00	16.043.900,00	(245.100,00)	98,50		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.289.000,00	16.043.900,00	(245.100,00)	98,50		
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.289.000,00	10.043.900,00	(245.100,00)	97,62		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.290.000,00	140.300.445,00	(4.989.555,00)	96,57		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.490.000,00	137.500.445,00	(4.989.555,00)	96,50		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.490.000,00	137.500.445,00	(4.989.555,00)	96,50		
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.650.000,00	121.660.445,00	(4.989.555,00)	96,06		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.095.500,00	300.475.700,00	(1.619.800,00)	99,46		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.075.500,00	243.455.700,00	(1.619.800,00)	99,34		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	245.075.500,00	243.455.700,00	(1.619.800,00)	99,34		
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.035.500,00	208.415.700,00	(1.619.800,00)	99,23		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.020.000,00	57.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.020.000,00	57.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.020.000,00	57.020.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	588.296.654,00	541.029.010,00	(47.267.644,00)	91,97		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	261.166.654,00	216.986.900,00	(44.179.754,00)	83,08		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	208.996.654,00	168.806.700,00	(40.189.954,00)	80,77		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	208.996.654,00	168.806.700,00	(40.189.954,00)	80,77		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.156.654,00	163.966.700,00	(40.189.954,00)	80,31		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	52.170.000,00	48.180.200,00	(3.989.800,00)	92,35		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.170.000,00	48.180.200,00	(3.989.800,00)	92,35		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.110.000,00	42.120.200,00	(3.989.800,00)	91,35		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	327.130.000,00	324.042.110,00	(3.087.890,00)	99,06		
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	327.130.000,00	324.042.110,00	(3.087.890,00)	99,06		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	327.130.000,00	324.042.110,00	(3.087.890,00)	99,06		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.440.000,00	311.352.110,00	(3.087.890,00)	99,02		
03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	299.662.500,00	298.455.700,00	(1.206.800,00)	99,60		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100.662.500,00	99.853.200,00	(809.300,00)	99,20		
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	27.987.500,00	27.678.400,00	(309.100,00)	98,90		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.987.500,00	27.678.400,00	(309.100,00)	98,90		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.577.500,00	26.268.400,00	(309.100,00)	98,84		
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	72.675.000,00	72.174.800,00	(500.200,00)	99,31		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.675.000,00	72.174.800,00	(500.200,00)	99,31		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.265.000,00	70.764.800,00	(500.200,00)	99,30		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	199.000.000,00	198.602.500,00	(397.500,00)	99,80		
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	199.000.000,00	198.602.500,00	(397.500,00)	99,80		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	199.000.000,00	198.602.500,00	(397.500,00)	99,80		
03.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.590.000,00	197.192.500,00	(397.500,00)	99,80		
03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	35.075.000,00	34.298.000,00	(777.000,00)	97,78		
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	35.075.000,00	34.298.000,00	(777.000,00)	97,78		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	35.075.000,00	34.298.000,00	(777.000,00)	97,78		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.075.000,00	34.298.000,00	(777.000,00)	97,78		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.665.000,00	32.888.000,00	(777.000,00)	97,69		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	1.175.418.000,00	1.130.902.094,00	(44.515.906,00)	96,21		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.175.418.000,00	1.130.902.094,00	(44.515.906,00)	96,21		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.500.000,00	119.765.444,00	(1.734.556,00)	98,57		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.514.800,00	88.885.444,00	(1.629.356,00)	98,20		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.514.800,00	88.885.444,00	(1.629.356,00)	98,20		
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	30.985.200,00	30.880.000,00	(105.200,00)	99,66		
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.985.200,00	30.880.000,00	(105.200,00)	99,66		
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.121.000,00	103.581.000,00	(8.540.000,00)	92,38		
04.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.224.000,00	92.281.000,00	(7.943.000,00)	92,07		
04.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.224.000,00	92.281.000,00	(7.943.000,00)	92,07		
04.2.04.04.5.2	BELANJA MODAL	11.897.000,00	11.300.000,00	(597.000,00)	94,98		
04.2.04.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.897.000,00	11.300.000,00	(597.000,00)	94,98		
04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	941.797.000,00	907.555.650,00	(34.241.350,00)	96,36		
04.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	880.797.000,00	847.309.750,00	(33.487.250,00)	96,20		
04.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.797.000,00	847.309.750,00	(33.487.250,00)	96,20		
04.2.04.06.5.2	BELANJA MODAL	61.000.000,00	60.245.900,00	(754.100,00)	98,76		
04.2.04.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.000.000,00	54.245.900,00	(754.100,00)	98,63		
04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	539.855.000,00	486.533.200,00	(53.321.800,00)	90,12		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	238.705.000,00	238.683.500,00	(21.500,00)	99,99		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	238.705.000,00	238.683.500,00	(21.500,00)	99,99		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	238.705.000,00	238.683.500,00	(21.500,00)	99,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.075.000,00	235.053.500,00	(21.500,00)	99,99		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.150.000,00	247.849.700,00	(53.300.300,00)	82,30		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301.150.000,00	247.849.700,00	(53.300.300,00)	82,30		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	301.150.000,00	247.849.700,00	(53.300.300,00)	82,30		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.150.000,00	247.849.700,00	(53.300.300,00)	82,30		
05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	35.635.000,00	35.215.500,00	(419.500,00)	98,82		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.635.000,00	35.215.500,00	(419.500,00)	98,82		
05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.635.000,00	35.215.500,00	(419.500,00)	98,82		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.635.000,00	35.215.500,00	(419.500,00)	98,82		
05.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.225.000,00	33.805.500,00	(419.500,00)	98,77		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	45.375.000,00	45.218.300,00	(156.700,00)	99,65		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	45.375.000,00	45.218.300,00	(156.700,00)	99,65		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	45.375.000,00	45.218.300,00	(156.700,00)	99,65		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.375.000,00	45.218.300,00	(156.700,00)	99,65		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.315.000,00	39.158.300,00	(156.700,00)	99,60		
06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	350.731.000,00	316.051.700,00	(34.679.300,00)	90,11		
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20.000.000,00	15.577.300,00	(4.422.700,00)	77,89		
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20.000.000,00	15.577.300,00	(4.422.700,00)	77,89		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	15.577.300,00	(4.422.700,00)	77,89		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.577.300,00	(4.422.700,00)	77,89		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	330.731.000,00	300.474.400,00	(30.256.600,00)	90,85		
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	330.731.000,00	300.474.400,00	(30.256.600,00)	90,85		
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	330.731.000,00	300.474.400,00	(30.256.600,00)	90,85		
06.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		

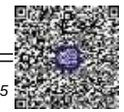

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.811.000,00	277.554.400,00	(30.256.600,00)	90,17		
07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	273.441.000,00	270.435.700,00	(3.005.300,00)	98,90		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	273.441.000,00	270.435.700,00	(3.005.300,00)	98,90		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	57.500.000,00	56.865.500,00	(634.500,00)	98,90		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	57.500.000,00	56.865.500,00	(634.500,00)	98,90		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	56.865.500,00	(634.500,00)	98,90		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	75.606.000,00	73.461.100,00	(2.144.900,00)	97,16		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.606.000,00	73.461.100,00	(2.144.900,00)	97,16		
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.576.000,00	70.431.100,00	(2.144.900,00)	97,04		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	140.335.000,00	140.109.100,00	(225.900,00)	99,84		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	140.335.000,00	140.109.100,00	(225.900,00)	99,84		
07.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.305.000,00	137.079.100,00	(225.900,00)	99,84		
	SURPLUS / DEFISIT	(28.376.900.811,00)	(28.232.425.321,00)	144.475.490,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(28.376.900.811,00)**	**(28.232.425.321,00)**	**144.475.490,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN

SKPD : 3-31.3-30.0-00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	9.938.504.000,00	3.761.005.075,00	(6.177.498.925,00)	37,84		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	9.938.504.000,00	3.761.005.075,00	(6.177.498.925,00)	37,84		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	8.553.642.000,00	2.369.236.050,00	(6.184.405.950,00)	27,70		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.384.862.000,00	1.391.769.025,00	6.907.025,00	100,50		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	95.098.214.050,00	88.414.816.743,00	(6.683.397.307,00)	92,97		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.433.895.800,00	5.225.016.491,00	(208.879.309,00)	96,16		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.369.500,00	27.268.500,00	(101.000,00)	99,63		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.369.500,00	27.268.500,00	(101.000,00)	99,63		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.369.500,00	27.268.500,00	(101.000,00)	99,63		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.500,00	748.500,00	(101.000,00)	88,11		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.854.025,00	4.473.769.095,00	(111.084.930,00)	97,58		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.548.641.050,00	4.437.762.095,00	(110.878.955,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.548.641.050,00	4.437.762.095,00	(110.878.955,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.548.641.050,00	4.437.762.095,00	(110.878.955,00)	97,56		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.212.975,00	36.007.000,00	(205.975,00)	99,43		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	36.212.975,00	36.007.000,00	(205.975,00)	99,43		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.212.975,00	36.007.000,00	(205.975,00)	99,43		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.483.775,00	289.967.700,00	(20.516.075,00)	93,39		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.104.000,00	4.630.000,00	(474.000,00)	90,71		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.104.000,00	4.630.000,00	(474.000,00)	90,71		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.104.000,00	4.630.000,00	(474.000,00)	90,71		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.323.000,00	1.215.000,00	(108.000,00)	91,84		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.323.000,00	1.215.000,00	(108.000,00)	91,84		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.000,00	1.215.000,00	(108.000,00)	91,84		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.059.000,00	248.670.200,00	(13.388.800,00)	94,89		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	262.059.000,00	248.670.200,00	(13.388.800,00)	94,89		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	83.640.000,00	83.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.419.000,00	165.030.200,00	(13.388.800,00)	92,50		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.677.775,00	29.467.500,00	(6.210.275,00)	82,59		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.677.775,00	29.467.500,00	(6.210.275,00)	82,59		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.677.775,00	29.467.500,00	(6.210.275,00)	82,59		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.310.000,00	(310.000,00)	93,29		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.620.000,00	4.310.000,00	(310.000,00)	93,29		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.310.000,00	(310.000,00)	93,29		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.700.000,00	1.675.000,00	(25.000,00)	98,53		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.675.000,00	(25.000,00)	98,53		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.675.000,00	(25.000,00)	98,53		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.108.500,00	370.707.973,00	(63.400.527,00)	85,40		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.377.500,00	228.307.973,00	(51.069.527,00)	81,72		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	279.377.500,00	228.307.973,00	(51.069.527,00)	81,72		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.377.500,00	228.307.973,00	(51.069.527,00)	81,72		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.731.000,00	133.400.000,00	(12.331.000,00)	91,54		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	145.731.000,00	133.400.000,00	(12.331.000,00)	91,54		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.731.000,00	133.400.000,00	(12.331.000,00)	91,54		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.080.000,00	63.303.223,00	(13.776.777,00)	82,13		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.040.000,00	51.248.223,00	(11.791.777,00)	81,29		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.040.000,00	51.248.223,00	(11.791.777,00)	81,29		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.040.000,00	51.248.223,00	(11.791.777,00)	81,29		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.040.000,00	12.055.000,00	(1.985.000,00)	85,86		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.040.000,00	12.055.000,00	(1.985.000,00)	85,86		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	12.055.000,00	(1.985.000,00)	85,86		
02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	13.331.807.000,00	10.956.649.402,00	(2.375.157.598,00)	82,18		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	13.331.807.000,00	10.956.649.402,00	(2.375.157.598,00)	82,18		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.500.000.000,00	1.508.491.800,00	(1.991.508.200,00)	43,10		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000.000,00	1.508.491.800,00	(1.991.508.200,00)	43,10		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000,00	1.508.491.800,00	(1.991.508.200,00)	43,10		
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9.765.447.000,00	9.381.817.602,00	(383.629.398,00)	96,07		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	317.977.000,00	298.045.000,00	(19.932.000,00)	93,73		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.937.000,00	263.005.000,00	(19.932.000,00)	92,96		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	9.447.470.000,00	9.083.772.602,00	(363.697.398,00)	96,15		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.988.900.000,00	2.663.805.795,00	(325.094.205,00)	89,12		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.447.470.000,00	6.408.869.807,00	(38.600.193,00)	99,40		
02.2.01.04.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.100.000,00	11.097.000,00	(3.000,00)	99,97		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	66.360.000,00	66.340.000,00	(20.000,00)	99,97		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.360.000,00	66.340.000,00	(20.000,00)	99,97		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.360.000,00	66.340.000,00	(20.000,00)	99,97		
03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	76.159.560.000,00	72.064.963.150,00	(4.094.596.850,00)	94,62		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75.372.260.000,00	71.281.764.850,00	(4.090.495.150,00)	94,57		
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	75.372.260.000,00	71.281.764.850,00	(4.090.495.150,00)	94,57		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	613.260.000,00	524.171.900,00	(89.088.100,00)	85,47		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	49.560.000,00	49.560.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.700.000,00	424.611.900,00	(89.088.100,00)	82,66		
03.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	74.759.000.000,00	70.757.592.950,00	(4.001.407.050,00)	94,65		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.757.000.000,00	70.755.592.950,00	(4.001.407.050,00)	94,65		
03.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	787.300.000,00	783.198.300,00	(4.101.700,00)	99,48		
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	787.300.000,00	783.198.300,00	(4.101.700,00)	99,48		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	787.300.000,00	783.198.300,00	(4.101.700,00)	99,48		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.300.000,00	783.198.300,00	(4.101.700,00)	99,48		
04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	13.414.250,00	13.096.500,00	(317.750,00)	97,63		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	13.414.250,00	13.096.500,00	(317.750,00)	97,63		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13.414.250,00	13.096.500,00	(317.750,00)	97,63		

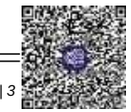

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.414.250,00	13.096.500,00	(317.750,00)	97,63		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.414.250,00	13.096.500,00	(317.750,00)	97,63		
06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	159.537.000,00	155.091.200,00	(4.445.800,00)	97,21		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	159.537.000,00	155.091.200,00	(4.445.800,00)	97,21		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	159.537.000,00	155.091.200,00	(4.445.800,00)	97,21		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	99.537.000,00	96.799.200,00	(2.737.800,00)	97,25		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.417.000,00	84.679.200,00	(2.737.800,00)	96,87		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	58.292.000,00	(1.708.000,00)	97,15		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	58.292.000,00	(1.708.000,00)	97,15		
	SURPLUS / DEFISIT	(85.159.710.050,00)	(84.653.811.668,00)	505.898.382,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(85.159.710.050,00)**	**(84.653.811.668,00)**	**505.898.382,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : 4-01.2-23.2-24.01 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	84.621.970.588,00	81.022.195.702,00	(3.599.774.886,00)	95,75		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	54.639.720.538,00	52.523.118.552,00	(2.116.601.986,00)	96,13		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.080.000,00	274.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	274.080.000,00	274.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	274.080.000,00	274.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	234.480.000,00	234.480.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.804.307.598,00	22.280.548.068,00	(523.759.530,00)	97,70		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.804.307.598,00	22.280.548.068,00	(523.759.530,00)	97,70		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.804.307.598,00	22.280.548.068,00	(523.759.530,00)	97,70		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.804.307.598,00	22.280.548.068,00	(523.759.530,00)	97,70		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.047.268.450,00	12.641.643.478,00	(405.624.972,00)	96,89		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.857.300,00	9.617.500,00	(239.800,00)	97,57		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.857.300,00	9.617.500,00	(239.800,00)	97,57		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.857.300,00	9.617.500,00	(239.800,00)	97,57		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.137.470,00	204.339.500,00	(107.797.970,00)	65,46		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.971.970,00	14.059.500,00	(912.470,00)	93,91		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.971.970,00	14.059.500,00	(912.470,00)	93,91		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	297.165.500,00	190.280.000,00	(106.885.500,00)	64,03		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.165.500,00	190.280.000,00	(106.885.500,00)	64,03		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.334.405.830,00	1.187.023.600,00	(147.382.230,00)	88,96		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.332.886.050,00	1.185.548.600,00	(147.337.450,00)	88,95		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.886.050,00	1.185.548.600,00	(147.337.450,00)	88,95		
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	1.519.780,00	1.475.000,00	(44.780,00)	97,05		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.519.780,00	1.475.000,00	(44.780,00)	97,05		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.867.850,00	98.820.900,00	(12.046.950,00)	89,13		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	110.867.850,00	98.820.900,00	(12.046.950,00)	89,13		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.867.850,00	98.820.900,00	(12.046.950,00)	89,13		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.072.000.000,00	1.034.647.600,00	(37.352.400,00)	96,52		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.072.000.000,00	1.034.647.600,00	(37.352.400,00)	96,52		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.000.000,00	1.034.647.600,00	(37.352.400,00)	96,52		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.208.000.000,00	10.107.194.378,00	(100.805.622,00)	99,01		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.208.000.000,00	10.107.194.378,00	(100.805.622,00)	99,01		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.208.000.000,00	10.107.194.378,00	(100.805.622,00)	99,01		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.400.000.000,00	2.335.734.182,00	(64.265.818,00)	97,32		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.200.000.000,00	2.141.000.000,00	(59.000.000,00)	97,32		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	2.200.000.000,00	2.141.000.000,00	(59.000.000,00)	97,32		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000,00	2.141.000.000,00	(59.000.000,00)	97,32		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	194.734.182,00	(5.265.818,00)	97,37		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	194.734.182,00	(5.265.818,00)	97,37		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	194.734.182,00	(5.265.818,00)	97,37		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.706.534.640,00	2.416.171.487,00	(290.363.153,00)	89,27		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.320.000,00	39.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.320.000,00	39.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.320.000,00	39.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	812.000.000,00	733.642.487,00	(78.357.513,00)	90,35		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	812.000.000,00	733.642.487,00	(78.357.513,00)	90,35		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.000.000,00	733.642.487,00	(78.357.513,00)	90,35		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	580.050.000,00	547.484.000,00	(32.566.000,00)	94,39		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	580.050.000,00	547.484.000,00	(32.566.000,00)	94,39		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.050.000,00	547.484.000,00	(32.566.000,00)	94,39		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.275.164.640,00	1.095.725.000,00	(179.439.640,00)	85,93		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.164.640,00	1.095.725.000,00	(179.439.640,00)	85,93		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.164.640,00	945.725.000,00	(179.439.640,00)	84,05		
01.2.08.04.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.622.498.500,00	5.957.338.717,00	(665.159.783,00)	89,96		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429.885.000,00	402.088.144,00	(27.796.856,00)	93,53		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	429.885.000,00	402.088.144,00	(27.796.856,00)	93,53		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.885.000,00	402.088.144,00	(27.796.856,00)	93,53		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	732.303.500,00	692.690.613,00	(39.612.887,00)	94,59		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	732.303.500,00	692.690.613,00	(39.612.887,00)	94,59		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.303.500,00	692.690.613,00	(39.612.887,00)	94,59		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.000,00	29.454.000,00	(3.136.000,00)	90,38		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.590.000,00	29.454.000,00	(3.136.000,00)	90,38		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.590.000,00	29.454.000,00	(3.136.000,00)	90,38		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.427.720.000,00	4.833.105.960,00	(594.614.040,00)	89,04		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	802.720.000,00	766.644.250,00	(36.075.750,00)	95,51		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	16.320.000,00	15.776.000,00	(544.000,00)	96,67		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786.400.000,00	750.868.250,00	(35.531.750,00)	95,48		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	4.625.000.000,00	4.066.461.710,00	(558.538.290,00)	87,92		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.625.000.000,00	4.066.461.710,00	(558.538.290,00)	87,92		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	851.480.000,00	801.407.780,00	(50.072.220,00)	94,12		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.480.000,00	776.607.780,00	(48.872.220,00)	94,08		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	825.480.000,00	776.607.780,00	(48.872.220,00)	94,08		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	825.480.000,00	776.607.780,00	(48.872.220,00)	94,08		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.000.000,00	24.800.000,00	(1.200.000,00)	95,38		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	24.800.000,00	(1.200.000,00)	95,38		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	24.800.000,00	(1.200.000,00)	95,38		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	1.677.839.000,00	(22.161.000,00)	98,70		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	960.970.000,00	(19.030.000,00)	98,06		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	980.000.000,00	960.970.000,00	(19.030.000,00)	98,06		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.000.000,00	960.970.000,00	(19.030.000,00)	98,06		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	716.869.000,00	(3.131.000,00)	99,57		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000,00	716.869.000,00	(3.131.000,00)	99,57		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	716.869.000,00	(3.131.000,00)	99,57		
01.2.13	Penataan Organisasi	342.787.450,00	281.029.040,00	(61.758.410,00)	81,98		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	71.637.600,00	61.548.400,00	(10.089.200,00)	85,92		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	71.637.600,00	61.548.400,00	(10.089.200,00)	85,92		
01.2.13.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	5.640.000,00	(2.820.000,00)	66,67		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.177.600,00	55.908.400,00	(7.269.200,00)	88,49		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.474.100,00	54.687.500,00	(13.786.600,00)	79,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.474.100,00	54.687.500,00	(13.786.600,00)	79,87		
01.2.13.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.314.100,00	46.527.500,00	(13.786.600,00)	77,14		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	202.675.750,00	164.793.140,00	(37.882.610,00)	81,31		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	192.675.750,00	159.243.140,00	(33.432.610,00)	82,65		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.675.750,00	159.243.140,00	(33.432.610,00)	82,65		
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	5.550.000,00	(4.450.000,00)	55,50		
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	5.550.000,00	(4.450.000,00)	55,50		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.890.763.900,00	3.857.326.800,00	(33.437.100,00)	99,14		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.087.060.600,00	2.081.636.700,00	(5.423.900,00)	99,74		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.087.060.600,00	2.081.636.700,00	(5.423.900,00)	99,74		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.087.060.600,00	2.081.636.700,00	(5.423.900,00)	99,74		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	418.310.000,00	411.130.000,00	(7.180.000,00)	98,28		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	418.310.000,00	411.130.000,00	(7.180.000,00)	98,28		
01.2.14.02.5.1.01	Belanja Pegawai	34.680.000,00	34.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.630.000,00	376.450.000,00	(7.180.000,00)	98,13		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.385.393.300,00	1.364.560.100,00	(20.833.200,00)	98,50		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.335.393.300,00	1.317.755.100,00	(17.638.200,00)	98,68		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.393.300,00	1.317.755.100,00	(17.638.200,00)	98,68		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	46.805.000,00	(3.195.000,00)	93,61		
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	46.805.000,00	(3.195.000,00)	93,61		
02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	111.046.750,00	110.919.800,00	(126.950,00)	99,89		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.046.750,00	110.919.800,00	(126.950,00)	99,89		
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	3.554.750,00	3.454.700,00	(100.050,00)	97,19		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.554.750,00	3.454.700,00	(100.050,00)	97,19		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.554.750,00	3.454.700,00	(100.050,00)	97,19		
02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	106.980.000,00	106.953.200,00	(26.800,00)	99,97		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	106.980.000,00	106.953.200,00	(26.800,00)	99,97		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.980.000,00	106.953.200,00	(26.800,00)	99,97		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	512.000,00	511.900,00	(100,00)	99,98		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	512.000,00	511.900,00	(100,00)	99,98		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.000,00	511.900,00	(100,00)	99,98		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	3.489.500,00	3.224.500,00	(265.000,00)	92,41		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	3.489.500,00	3.224.500,00	(265.000,00)	92,41		
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.984.500,00	1.834.500,00	(150.000,00)	92,44		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.984.500,00	1.834.500,00	(150.000,00)	92,44		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.984.500,00	1.834.500,00	(150.000,00)	92,44		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.505.000,00	1.390.000,00	(115.000,00)	92,36		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.505.000,00	1.390.000,00	(115.000,00)	92,36		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	1.390.000,00	(115.000,00)	92,36		
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	28.350.413.550,00	26.993.410.500,00	(1.357.003.050,00)	95,21		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.116.575.800,00	945.659.950,00	(170.915.850,00)	84,69		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.060.199.000,00	895.013.150,00	(165.185.850,00)	84,42		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.009.744.000,00	845.935.750,00	(163.808.250,00)	83,78		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.584.000,00	837.775.750,00	(163.808.250,00)	83,65		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.455.000,00	49.077.400,00	(1.377.600,00)	97,27		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.455.000,00	49.077.400,00	(1.377.600,00)	97,27		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	56.376.800,00	50.646.800,00	(5.730.000,00)	89,84		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.376.800,00	50.646.800,00	(5.730.000,00)	89,84		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	19.320.000,00	(3.600.000,00)	84,29		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.456.800,00	31.326.800,00	(2.130.000,00)	93,63		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.966.734.600,00	24.809.830.550,00	(1.156.904.050,00)	95,54		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25.910.491.100,00	24.756.422.800,00	(1.154.068.300,00)	95,55		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.810.491.100,00	24.663.422.800,00	(1.147.068.300,00)	95,56		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.222.291.100,00	18.665.222.800,00	(557.068.300,00)	97,10		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	6.545.000.000,00	5.955.000.000,00	(590.000.000,00)	90,99		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	93.000.000,00	(7.000.000,00)	93,00		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	93.000.000,00	(7.000.000,00)	93,00		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	31.745.500,00	30.659.000,00	(1.086.500,00)	96,58		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.745.500,00	30.659.000,00	(1.086.500,00)	96,58		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.745.500,00	30.659.000,00	(1.086.500,00)	96,58		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	24.498.000,00	22.748.750,00	(1.749.250,00)	92,86		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.498.000,00	22.748.750,00	(1.749.250,00)	92,86		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.498.000,00	22.748.750,00	(1.749.250,00)	92,86		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.248.591.000,00	1.219.920.000,00	(28.671.000,00)	97,70		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	268.615.000,00	261.440.000,00	(7.175.000,00)	97,33		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	268.615.000,00	261.440.000,00	(7.175.000,00)	97,33		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.615.000,00	261.440.000,00	(7.175.000,00)	97,33		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	770.421.000,00	753.141.000,00	(17.280.000,00)	97,76		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	770.421.000,00	753.141.000,00	(17.280.000,00)	97,76		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.661.000,00	748.381.000,00	(17.280.000,00)	97,74		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	209.555.000,00	205.339.000,00	(4.216.000,00)	97,99		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	182.720.000,00	179.320.000,00	(3.400.000,00)	98,14		
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.400.000,00	153.000.000,00	(3.400.000,00)	97,83		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	26.835.000,00	26.019.000,00	(816.000,00)	96,96		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.835.000,00	26.019.000,00	(816.000,00)	96,96		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	18.512.150,00	18.000.000,00	(512.150,00)	97,23		
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.512.150,00	18.000.000,00	(512.150,00)	97,23		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.512.150,00	18.000.000,00	(512.150,00)	97,23		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.512.150,00	18.000.000,00	(512.150,00)	97,23		
03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	3.877.500,00	3.747.000,00	(130.500,00)	96,63		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	3.877.500,00	3.747.000,00	(130.500,00)	96,63		
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3.877.500,00	3.747.000,00	(130.500,00)	96,63		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.877.500,00	3.747.000,00	(130.500,00)	96,63		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.877.500,00	3.747.000,00	(130.500,00)	96,63		
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	2.383.400,00	2.232.200,00	(151.200,00)	93,66		
03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	2.383.400,00	2.232.200,00	(151.200,00)	93,66		
03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	2.383.400,00	2.232.200,00	(151.200,00)	93,66		
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.383.400,00	2.232.200,00	(151.200,00)	93,66		
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.383.400,00	2.232.200,00	(151.200,00)	93,66		
03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	179.775.000,00	170.404.750,00	(9.370.250,00)	94,79		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.775.000,00	170.404.750,00	(9.370.250,00)	94,79		
03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	179.775.000,00	170.404.750,00	(9.370.250,00)	94,79		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	179.775.000,00	170.404.750,00	(9.370.250,00)	94,79		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.775.000,00	170.404.750,00	(9.370.250,00)	94,79		
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1.331.264.350,00	1.215.138.400,00	(116.125.950,00)	91,28		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	369.820.000,00	360.988.600,00	(8.831.400,00)	97,61		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	303.867.500,00	302.943.100,00	(924.400,00)	99,70		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	303.867.500,00	302.943.100,00	(924.400,00)	99,70		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.827.500,00	300.903.100,00	(924.400,00)	99,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10.100.000,00	9.700.000,00	(400.000,00)	96,04		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	9.700.000,00	(400.000,00)	96,04		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	9.700.000,00	(400.000,00)	96,04		
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	55.852.500,00	48.345.500,00	(7.507.000,00)	86,56		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	55.852.500,00	48.345.500,00	(7.507.000,00)	86,56		
03.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.332.500,00	33.825.500,00	(7.507.000,00)	81,84		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	416.191.850,00	363.221.300,00	(52.970.550,00)	87,27		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.819.900,00	44.474.200,00	(345.700,00)	99,23		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.819.900,00	44.474.200,00	(345.700,00)	99,23		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.819.900,00	44.474.200,00	(345.700,00)	99,23		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	224.009.950,00	177.837.100,00	(46.172.850,00)	79,39		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	224.009.950,00	177.837.100,00	(46.172.850,00)	79,39		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.009.950,00	177.837.100,00	(46.172.850,00)	79,39		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	147.362.000,00	140.910.000,00	(6.452.000,00)	95,62		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.065.000,00	81.610.000,00	(5.455.000,00)	93,73		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.985.000,00	56.530.000,00	(5.455.000,00)	91,20		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	60.297.000,00	59.300.000,00	(997.000,00)	98,35		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.297.000,00	59.300.000,00	(997.000,00)	98,35		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	537.305.000,00	483.199.500,00	(54.105.500,00)	89,93		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	316.705.000,00	285.434.000,00	(31.271.000,00)	90,13		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.960.000,00	97.064.000,00	(12.896.000,00)	88,27		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.960.000,00	97.064.000,00	(12.896.000,00)	88,27		
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	206.745.000,00	188.370.000,00	(18.375.000,00)	91,11		
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.745.000,00	188.370.000,00	(18.375.000,00)	91,11		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	69.622.000,00	61.483.000,00	(8.139.000,00)	88,31		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.250.000,00	46.183.000,00	(67.000,00)	99,86		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000,00	46.183.000,00	(67.000,00)	99,86		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	23.372.000,00	15.300.000,00	(8.072.000,00)	65,46		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.497.000,00	15.300.000,00	(197.000,00)	98,73		
03.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	0		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.978.000,00	136.282.500,00	(14.695.500,00)	90,27		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.978.000,00	136.282.500,00	(14.695.500,00)	90,27		
03.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.898.000,00	111.202.500,00	(14.695.500,00)	88,33		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	7.947.500,00	7.729.000,00	(218.500,00)	97,25		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	7.947.500,00	7.729.000,00	(218.500,00)	97,25		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.947.500,00	7.729.000,00	(218.500,00)	97,25		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.947.500,00	7.729.000,00	(218.500,00)	97,25		
	SURPLUS / DEFISIT	(84.621.970.588,00)	(81.022.195.702,00)	3.599.774.886,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(84.621.970.588,00)**	**(81.022.195.702,00)**	**3.599.774.886,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

SEKRETARIAT DPRD

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	44.487.317.766,00	43.067.637.054,00	(1.419.680.712,00)	96,81		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	38.704.116.118,00	37.885.263.723,00	(818.852.395,00)	97,88		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.826.481.568,00	3.795.730.726,00	(30.750.842,00)	99,20		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.826.481.568,00	3.795.730.726,00	(30.750.842,00)	99,20		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.826.481.568,00	3.795.730.726,00	(30.750.842,00)	99,20		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.826.481.568,00	3.795.730.726,00	(30.750.842,00)	99,20		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.660.000,00	187.710.000,00	(19.950.000,00)	90,39		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	207.660.000,00	187.710.000,00	(19.950.000,00)	90,39		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	207.660.000,00	187.710.000,00	(19.950.000,00)	90,39		
01.2.05.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.500.000,00	179.550.000,00	(19.950.000,00)	90,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.750.000,00	941.715.354,00	(126.034.646,00)	88,20		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	0		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	0		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	0		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.689.000,00	298.949.150,00	(51.739.850,00)	85,25		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	350.689.000,00	298.949.150,00	(51.739.850,00)	85,25		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.689.000,00	298.949.150,00	(51.739.850,00)	85,25		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.235.000,00	56.489.454,00	(11.745.546,00)	82,79		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	68.235.000,00	56.489.454,00	(11.745.546,00)	82,79		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.235.000,00	56.489.454,00	(11.745.546,00)	82,79		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.600.000,00	480.584.250,00	(33.015.750,00)	93,57		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	513.600.000,00	480.584.250,00	(33.015.750,00)	93,57		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.600.000,00	480.584.250,00	(33.015.750,00)	93,57		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	131.376.000,00	105.692.500,00	(25.683.500,00)	80,45		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	131.376.000,00	105.692.500,00	(25.683.500,00)	80,45		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.376.000,00	105.692.500,00	(25.683.500,00)	80,45		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.479.000,00	60.879.000,00	(600.000,00)	99,02		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.479.000,00	60.879.000,00	(600.000,00)	99,02		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	61.479.000,00	60.879.000,00	(600.000,00)	99,02		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.479.000,00	60.879.000,00	(600.000,00)	99,02		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.735.519.500,00	1.558.794.728,00	(176.724.772,00)	89,82		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.799.500,00	115.474.728,00	(151.324.772,00)	43,28		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	266.799.500,00	115.474.728,00	(151.324.772,00)	43,28		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.799.500,00	115.474.728,00	(151.324.772,00)	43,28		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.443.720.000,00	1.418.320.000,00	(25.400.000,00)	98,24		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.443.720.000,00	1.418.320.000,00	(25.400.000,00)	98,24		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	69.120.000,00	69.120.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.374.600.000,00	1.349.200.000,00	(25.400.000,00)	98,15		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.022.000,00	510.758.452,00	(83.263.548,00)	85,98		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.392.000,00	95.454.972,00	(61.937.028,00)	60,65		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.392.000,00	95.454.972,00	(61.937.028,00)	60,65		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.392.000,00	95.454.972,00	(61.937.028,00)	60,65		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.630.000,00	19.635.000,00	(16.995.000,00)	53,60		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	36.630.000,00	19.635.000,00	(16.995.000,00)	53,60		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.630.000,00	19.635.000,00	(16.995.000,00)	53,60		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00	395.668.480,00	(4.331.520,00)	98,92		
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	395.668.480,00	(4.331.520,00)	98,92		
01.2.09.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	395.668.480,00	(4.331.520,00)	98,92		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.137.418.050,00	19.853.887.206,00	(283.530.844,00)	98,59		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.137.418.050,00	19.853.887.206,00	(283.530.844,00)	98,59		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.137.418.050,00	19.853.887.206,00	(283.530.844,00)	98,59		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	20.137.418.050,00	19.853.887.206,00	(283.530.844,00)	98,59		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	11.073.786.000,00	10.975.788.257,00	(97.997.743,00)	99,12		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	21.225.000,00	0,00	(21.225.000,00)	0		
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.225.000,00	0,00	(21.225.000,00)	0		
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.225.000,00	0,00	(21.225.000,00)	0		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.052.561.000,00	10.975.788.257,00	(76.772.743,00)	99,31		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.052.561.000,00	10.975.788.257,00	(76.772.743,00)	99,31		
01.2.16.03.5.1.01	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	100,00		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.017.521.000,00	10.940.748.257,00	(76.772.743,00)	99,30		
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	5.783.201.648,00	5.182.373.331,00	(600.828.317,00)	89,61		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	111.050.000,00	101.380.000,00	(9.670.000,00)	91,29		
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	111.050.000,00	101.380.000,00	(9.670.000,00)	91,29		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	111.050.000,00	101.380.000,00	(9.670.000,00)	91,29		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.050.000,00	101.380.000,00	(9.670.000,00)	91,29		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.394.031.648,00	4.170.718.331,00	(223.313.317,00)	94,92		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.198.494.148,00	3.180.913.331,00	(17.580.817,00)	99,45		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.198.494.148,00	3.180.913.331,00	(17.580.817,00)	99,45		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.198.494.148,00	3.180.913.331,00	(17.580.817,00)	99,45		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.175.500.000,00	979.500.000,00	(196.000.000,00)	83,33		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.175.500.000,00	979.500.000,00	(196.000.000,00)	83,33		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.500.000,00	979.500.000,00	(196.000.000,00)	83,33		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20.037.500,00	10.305.000,00	(9.732.500,00)	51,43		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.037.500,00	10.305.000,00	(9.732.500,00)	51,43		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.037.500,00	10.305.000,00	(9.732.500,00)	51,43		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.278.120.000,00	910.275.000,00	(367.845.000,00)	71,22		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.278.120.000,00	910.275.000,00	(367.845.000,00)	71,22		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.278.120.000,00	910.275.000,00	(367.845.000,00)	71,22		
02.2.05.03.5.1.01	Belanja Pegawai	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.000.000,00	895.155.000,00	(367.845.000,00)	70,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(44.487.317.766,00)	(43.067.637.054,00)	1.419.680.712,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(44.487.317.766,00)**	**(43.067.637.054,00)**	**1.419.680.712,00**	**0**		

Bangli, Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.286.901.433,00	6.075.658.888,12	(211.242.544,88)	96,64		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.969.107.433,00	4.797.469.086,00	(171.638.347,00)	96,55		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.465.000,00	2.160.000,00	(305.000,00)	87,63		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.465.000,00	2.160.000,00	(305.000,00)	87,63		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.465.000,00	2.160.000,00	(305.000,00)	87,63		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.465.000,00	2.160.000,00	(305.000,00)	87,63		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.372.592.283,00	4.320.327.548,00	(52.264.735,00)	98,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.351.392.283,00	4.299.327.548,00	(52.064.735,00)	98,80		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.351.392.283,00	4.299.327.548,00	(52.064.735,00)	98,80		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.351.392.283,00	4.299.327.548,00	(52.064.735,00)	98,80		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.200.000,00	21.000.000,00	(200.000,00)	99,06		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.200.000,00	21.000.000,00	(200.000,00)	99,06		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.000.000,00	(200.000,00)	99,06		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.245.150,00	220.456.225,00	(31.788.925,00)	87,40		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.170.500,00	1.142.500,00	(28.000,00)	97,61		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.170.500,00	1.142.500,00	(28.000,00)	97,61		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.500,00	1.142.500,00	(28.000,00)	97,61		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	705.000,00	582.500,00	(122.500,00)	82,62		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	705.000,00	582.500,00	(122.500,00)	82,62		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.000,00	582.500,00	(122.500,00)	82,62		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.008.550,00	86.250.425,00	(20.758.125,00)	80,60		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	107.008.550,00	86.250.425,00	(20.758.125,00)	80,60		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.848.550,00	78.090.425,00	(20.758.125,00)	79,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.261.100,00	11.850.800,00	(9.410.300,00)	55,74		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.261.100,00	11.850.800,00	(9.410.300,00)	55,74		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.261.100,00	11.850.800,00	(9.410.300,00)	55,74		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	118.530.000,00	(1.470.000,00)	98,78		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.530.000,00	(1.470.000,00)	98,78		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.530.000,00	(1.470.000,00)	98,78		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.993.000,00	23.350.000,00	(61.643.000,00)	27,47		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.993.000,00	23.350.000,00	(61.643.000,00)	27,47		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	84.993.000,00	23.350.000,00	(61.643.000,00)	27,47		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.993.000,00	23.350.000,00	(61.643.000,00)	27,47		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.255.000,00	118.959.766,00	(7.295.234,00)	94,22		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.835.000,00	15.939.766,00	(3.895.234,00)	80,36		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.835.000,00	15.939.766,00	(3.895.234,00)	80,36		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.835.000,00	15.939.766,00	(3.895.234,00)	80,36		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.920.000,00	94.520.000,00	(3.400.000,00)	96,53		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	97.920.000,00	94.520.000,00	(3.400.000,00)	96,53		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	45.800.000,00	(3.400.000,00)	93,09		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.557.000,00	112.215.547,00	(18.341.453,00)	85,95		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.457.000,00	101.405.547,00	(18.051.453,00)	84,89		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	119.457.000,00	101.405.547,00	(18.051.453,00)	84,89		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.457.000,00	101.405.547,00	(18.051.453,00)	84,89		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.100.000,00	10.810.000,00	(290.000,00)	97,39		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.100.000,00	10.810.000,00	(290.000,00)	97,39		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	10.810.000,00	(290.000,00)	97,39		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	1.086.784.000,00	1.056.973.167,00	(29.810.833,00)	97,26		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	872.797.000,00	856.292.967,00	(16.504.033,00)	98,11		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	406.700.000,00	405.062.500,00	(1.637.500,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	406.700.000,00	405.062.500,00	(1.637.500,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.700.000,00	405.062.500,00	(1.637.500,00)	99,60		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	10.400.000,00	9.427.500,00	(972.500,00)	90,65		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	9.427.500,00	(972.500,00)	90,65		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	9.427.500,00	(972.500,00)	90,65		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	13.772.000,00	12.290.500,00	(1.481.500,00)	89,24		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.772.000,00	12.290.500,00	(1.481.500,00)	89,24		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.772.000,00	12.290.500,00	(1.481.500,00)	89,24		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	441.925.000,00	429.512.467,00	(12.412.533,00)	97,19		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	441.925.000,00	429.512.467,00	(12.412.533,00)	97,19		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.925.000,00	429.512.467,00	(12.412.533,00)	97,19		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	123.400.000,00	115.954.200,00	(7.445.800,00)	93,97		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	97.725.000,00	96.310.200,00	(1.414.800,00)	98,55		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.725.000,00	96.310.200,00	(1.414.800,00)	98,55		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.725.000,00	96.310.200,00	(1.414.800,00)	98,55		
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25.675.000,00	19.644.000,00	(6.031.000,00)	76,51		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.675.000,00	19.644.000,00	(6.031.000,00)	76,51		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.675.000,00	19.644.000,00	(6.031.000,00)	76,51		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90.587.000,00	84.726.000,00	(5.861.000,00)	93,53		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	45.362.000,00	39.756.000,00	(5.606.000,00)	87,64		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.362.000,00	39.756.000,00	(5.606.000,00)	87,64		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.362.000,00	39.756.000,00	(5.606.000,00)	87,64		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.225.000,00	44.970.000,00	(255.000,00)	99,44		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.225.000,00	44.970.000,00	(255.000,00)	99,44		
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.305.000,00	22.050.000,00	(255.000,00)	98,86		
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	231.010.000,00	221.216.635,12	(9.793.364,88)	95,76		

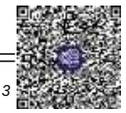

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	181.640.000,00	178.866.635,12	(2.773.364,88)	98,47		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	154.680.000,00	151.961.135,12	(2.718.864,88)	98,24		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	154.680.000,00	151.961.135,12	(2.718.864,88)	98,24		
03.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.620.000,00	145.901.135,12	(2.718.864,88)	98,17		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.960.000,00	26.905.500,00	(54.500,00)	99,80		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	26.960.000,00	26.905.500,00	(54.500,00)	99,80		
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	20.845.500,00	(54.500,00)	99,74		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8.630.000,00	5.175.500,00	(3.454.500,00)	59,97		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.630.000,00	5.175.500,00	(3.454.500,00)	59,97		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.630.000,00	5.175.500,00	(3.454.500,00)	59,97		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	2.145.500,00	(3.454.500,00)	38,31		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	40.740.000,00	37.174.500,00	(3.565.500,00)	91,25		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.605.000,00	24.563.000,00	(42.000,00)	99,83		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.605.000,00	24.563.000,00	(42.000,00)	99,83		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.575.000,00	21.533.000,00	(42.000,00)	99,81		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.345.000,00	2.315.500,00	(29.500,00)	98,74		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.345.000,00	2.315.500,00	(29.500,00)	98,74		
03.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	295.500,00	(29.500,00)	90,92		
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.790.000,00	10.296.000,00	(3.494.000,00)	74,66		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.790.000,00	10.296.000,00	(3.494.000,00)	74,66		
03.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00		

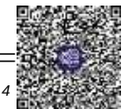

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	6.256.000,00	(3.494.000,00)	64,16		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.286.901.433,00)	(6.075.658.888,12)	211.242.544,88	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.286.901.433,00)**	**(6.075.658.888,12)**	**211.242.544,88**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

KEUANGAN

BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

SKPD : 5-02.0-00.0-00.04 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.183.591.601.558,00	1.057.433.217.408,46	(126.158.384.149,54)	89,34		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	67.785.445.458,00	61.137.379.335,07	(6.648.066.122,93)	90,19		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	49.239.015.000,00	52.316.682.159,00	3.077.667.159,00	106,25		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.834.900,00	3.834.900,00	0		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.522.360.500,00	5.887.399.995,08	365.039.495,08	106,61		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.024.069.958,00	2.929.462.280,99	(10.094.607.677,01)	22,49		
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.114.886.421.100,00	993.471.707.767,00	(121.414.713.333,00)	89,11		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912.844.132.000,00	851.831.106.632,00	(61.013.025.368,00)	93,32		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.042.289.100,00	141.640.601.135,00	(60.401.687.965,00)	70,10		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	919.735.000,00	2.824.130.306,39	1.904.395.306,39	307,06		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	804.735.000,00	2.709.130.306,39	1.904.395.306,39	336,65		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	185.506.474.861,00	181.603.254.239,00	(3.903.220.622,00)	97,90		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	12.141.656.351,00	11.627.695.654,00	(513.960.697,00)	95,77		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.554.136.701,00	10.196.981.012,00	(357.155.689,00)	96,62		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.554.136.701,00	10.196.981.012,00	(357.155.689,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.554.136.701,00	10.196.981.012,00	(357.155.689,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.554.136.701,00	10.196.981.012,00	(357.155.689,00)	96,62		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	982.258.150,00	909.633.500,00	(72.624.650,00)	92,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.211.400,00	21.643.000,00	(568.400,00)	97,44		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.211.400,00	21.643.000,00	(568.400,00)	97,44		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.211.400,00	21.643.000,00	(568.400,00)	97,44		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.508.000,00	5.953.500,00	(554.500,00)	91,48		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.508.000,00	5.953.500,00	(554.500,00)	91,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.508.000,00	5.953.500,00	(554.500,00)	91,48		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	874.408.700,00	811.959.500,00	(62.449.200,00)	92,86		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	874.408.700,00	811.959.500,00	(62.449.200,00)	92,86		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	252.840.000,00	252.840.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.568.700,00	559.119.500,00	(62.449.200,00)	89,95		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.850.050,00	51.447.500,00	(7.402.550,00)	87,42		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	58.850.050,00	51.447.500,00	(7.402.550,00)	87,42		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.850.050,00	51.447.500,00	(7.402.550,00)	87,42		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.480.000,00	13.830.000,00	(1.650.000,00)	89,34		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.480.000,00	13.830.000,00	(1.650.000,00)	89,34		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	13.830.000,00	(1.650.000,00)	89,34		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.200.000,00	22.800.000,00	(1.400.000,00)	94,21		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	17.000.000,00	16.000.000,00	(1.000.000,00)	94,12		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	16.000.000,00	(1.000.000,00)	94,12		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	16.000.000,00	(1.000.000,00)	94,12		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	6.800.000,00	(400.000,00)	94,44		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	7.200.000,00	6.800.000,00	(400.000,00)	94,44		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.200.000,00	6.800.000,00	(400.000,00)	94,44		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.960.500,00	246.057.897,00	(38.902.603,00)	86,35		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.870.000,00	18.465.000,00	(1.405.000,00)	92,93		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.870.000,00	18.465.000,00	(1.405.000,00)	92,93		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.870.000,00	18.465.000,00	(1.405.000,00)	92,93		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.989.500,00	64.672.897,00	(23.316.603,00)	73,50		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.989.500,00	64.672.897,00	(23.316.603,00)	73,50		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.989.500,00	64.672.897,00	(23.316.603,00)	73,50		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.101.000,00	162.920.000,00	(14.181.000,00)	91,99		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	177.101.000,00	162.920.000,00	(14.181.000,00)	91,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.101.000,00	162.920.000,00	(14.181.000,00)	91,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.101.000,00	252.223.245,00	(43.877.755,00)	85,18		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.731.000,00	208.718.245,00	(43.012.755,00)	82,91		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	251.731.000,00	208.718.245,00	(43.012.755,00)	82,91		

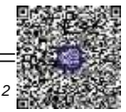

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.731.000,00	208.718.245,00	(43.012.755,00)	82,91		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.370.000,00	43.505.000,00	(865.000,00)	98,05		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.370.000,00	43.505.000,00	(865.000,00)	98,05		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.370.000,00	43.505.000,00	(865.000,00)	98,05		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	170.662.438.310,00	167.705.646.485,00	(2.956.791.825,00)	98,27		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.122.883.600,00	933.589.300,00	(189.294.300,00)	83,14		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	262.945.000,00	225.774.500,00	(37.170.500,00)	85,86		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	262.945.000,00	225.774.500,00	(37.170.500,00)	85,86		
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.025.000,00	202.854.500,00	(37.170.500,00)	84,51		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	70.358.600,00	63.318.000,00	(7.040.600,00)	89,99		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	70.358.600,00	63.318.000,00	(7.040.600,00)	89,99		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.358.600,00	63.318.000,00	(7.040.600,00)	89,99		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	148.200.000,00	117.882.800,00	(30.317.200,00)	79,54		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	148.200.000,00	117.882.800,00	(30.317.200,00)	79,54		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.200.000,00	117.882.800,00	(30.317.200,00)	79,54		
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	641.380.000,00	526.614.000,00	(114.766.000,00)	82,11		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	641.380.000,00	526.614.000,00	(114.766.000,00)	82,11		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.380.000,00	526.614.000,00	(114.766.000,00)	82,11		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	320.920.000,00	309.885.000,00	(11.035.000,00)	96,56		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	320.920.000,00	309.885.000,00	(11.035.000,00)	96,56		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	320.920.000,00	309.885.000,00	(11.035.000,00)	96,56		
02.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.400.000,00	295.365.000,00	(11.035.000,00)	96,40		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	291.365.850,00	257.569.175,00	(33.796.675,00)	88,40		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	39.655.850,00	17.180.300,00	(22.475.550,00)	43,32		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.655.850,00	17.180.300,00	(22.475.550,00)	43,32		
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.635.850,00	15.160.300,00	(22.475.550,00)	40,28		

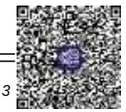

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	251.710.000,00	240.388.875,00	(11.321.125,00)	95,50		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	251.710.000,00	240.388.875,00	(11.321.125,00)	95,50		
02.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.610.000,00	228.288.875,00	(11.321.125,00)	95,28		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	168.599.408.860,00	165.985.107.010,00	(2.614.301.850,00)	98,45		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	(512.043.090,00)	99,67		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	(512.043.090,00)	99,67		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	(512.043.090,00)	99,67		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	0,00	100,00		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	0,00	100,00		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	0,00	100,00		
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	327.860.000,00	219.496.000,00	(108.364.000,00)	66,95		
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	327.860.000,00	219.496.000,00	(108.364.000,00)	66,95		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	327.860.000,00	219.496.000,00	(108.364.000,00)	66,95		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.860.000,00	219.496.000,00	(108.364.000,00)	66,95		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	881.361.000,00	630.326.400,00	(251.034.600,00)	71,52		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	881.361.000,00	630.326.400,00	(251.034.600,00)	71,52		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	168.330.000,00	166.537.000,00	(1.793.000,00)	98,93		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	168.330.000,00	166.537.000,00	(1.793.000,00)	98,93		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.500.000,00	161.707.000,00	(1.793.000,00)	98,90		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.290.000,00	17.830.000,00	(460.000,00)	97,48		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.290.000,00	17.830.000,00	(460.000,00)	97,48		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.070.000,00	14.610.000,00	(460.000,00)	96,95		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	216.204.500,00	169.039.000,00	(47.165.500,00)	78,18		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	216.204.500,00	169.039.000,00	(47.165.500,00)	78,18		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.204.500,00	169.039.000,00	(47.165.500,00)	78,18		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	131.839.000,00	129.270.000,00	(2.569.000,00)	98,05		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	131.839.000,00	129.270.000,00	(2.569.000,00)	98,05		
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.569.000,00	118.000.000,00	(2.569.000,00)	97,87		
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	256.550.000,00	86.552.000,00	(169.998.000,00)	33,74		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	256.550.000,00	86.552.000,00	(169.998.000,00)	33,74		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.550.000,00	86.552.000,00	(169.998.000,00)	33,74		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.147.500,00	61.098.400,00	(29.049.100,00)	67,78		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	90.147.500,00	61.098.400,00	(29.049.100,00)	67,78		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.147.500,00	61.098.400,00	(29.049.100,00)	67,78		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	1.821.019.200,00	1.639.585.700,00	(181.433.500,00)	90,04		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.821.019.200,00	1.639.585.700,00	(181.433.500,00)	90,04		
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	237.216.500,00	119.662.000,00	(117.554.500,00)	50,44		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	237.216.500,00	119.662.000,00	(117.554.500,00)	50,44		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.216.500,00	119.662.000,00	(117.554.500,00)	50,44		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	504.541.700,00	492.622.200,00	(11.919.500,00)	97,64		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	504.541.700,00	492.622.200,00	(11.919.500,00)	97,64		
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.621.700,00	475.702.200,00	(11.919.500,00)	97,56		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.079.261.000,00	1.027.301.500,00	(51.959.500,00)	95,19		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.079.261.000,00	1.027.301.500,00	(51.959.500,00)	95,19		
04.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.341.000,00	1.004.381.500,00	(51.959.500,00)	95,08		
	SURPLUS / DEFISIT	998.085.126.697,00	875.829.963.169,46	(122.255.163.527,54)	87,75		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	40.882.706.879,00	40.883.452.335,96	745.456,96	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.882.706.879,00	40.883.452.335,96	745.456,96	100,00		
00.0.00.00.6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	996.897.055,00	0,00	(996.897.055,00)	0		
00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	996.897.055,00	0,00	(996.897.055,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	39.885.809.824,00	40.883.452.335,96	997.642.511,96	102,50		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**1.037.970.936.521,00**	**916.713.415.505,42**	**(121.257.521.015,58)**	**88,32**		

23

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.595.456.860,00	6.228.820.203,00	(366.636.657,00)	94,44		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.505.236.410,00	5.430.474.103,00	(74.762.307,00)	98,64		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.864.767.360,00	4.833.809.768,00	(30.957.592,00)	99,36		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.864.767.360,00	4.833.809.768,00	(30.957.592,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.864.767.360,00	4.833.809.768,00	(30.957.592,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.864.767.360,00	4.833.809.768,00	(30.957.592,00)	99,36		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.124.050,00	28.880.730,00	(1.243.320,00)	95,87		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.124.050,00	28.880.730,00	(1.243.320,00)	95,87		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	30.124.050,00	28.880.730,00	(1.243.320,00)	95,87		
01.2.05.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.104.050,00	26.860.730,00	(1.243.320,00)	95,58		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.599.000,00	193.012.300,00	(13.586.700,00)	93,42		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	698.400,00	687.500,00	(10.900,00)	98,44		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	698.400,00	687.500,00	(10.900,00)	98,44		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.400,00	687.500,00	(10.900,00)	98,44		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.114.000,00	871.400,00	(242.600,00)	78,22		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.114.000,00	871.400,00	(242.600,00)	78,22		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.000,00	871.400,00	(242.600,00)	78,22		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.442.100,00	53.021.700,00	(1.420.400,00)	97,39		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	54.442.100,00	53.021.700,00	(1.420.400,00)	97,39		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.922.100,00	38.501.700,00	(1.420.400,00)	96,44		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.979.500,00	3.681.700,00	(297.800,00)	92,52		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.979.500,00	3.681.700,00	(297.800,00)	92,52		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.979.500,00	3.681.700,00	(297.800,00)	92,52		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.025.000,00	129.410.000,00	(11.615.000,00)	91,76		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	141.025.000,00	129.410.000,00	(11.615.000,00)	91,76		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.025.000,00	129.410.000,00	(11.615.000,00)	91,76		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.295.000,00	49.218.000,00	(8.077.000,00)	85,90		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.295.000,00	49.218.000,00	(8.077.000,00)	85,90		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	57.295.000,00	49.218.000,00	(8.077.000,00)	85,90		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.295.000,00	49.218.000,00	(8.077.000,00)	85,90		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.040.000,00	157.540.605,00	(12.499.395,00)	92,65		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.460.000,00	21.960.605,00	(6.499.395,00)	77,16		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.460.000,00	21.960.605,00	(6.499.395,00)	77,16		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.460.000,00	21.960.605,00	(6.499.395,00)	77,16		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.180.000,00	132.180.000,00	(6.000.000,00)	95,66		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	138.180.000,00	132.180.000,00	(6.000.000,00)	95,66		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.300.000,00	75.300.000,00	(6.000.000,00)	92,62		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.411.000,00	168.012.700,00	(8.398.300,00)	95,24		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.491.000,00	65.967.700,00	(7.523.300,00)	89,76		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.491.000,00	65.967.700,00	(7.523.300,00)	89,76		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.491.000,00	65.967.700,00	(7.523.300,00)	89,76		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	2.850.000,00	(70.000,00)	97,60		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.850.000,00	(70.000,00)	97,60		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.850.000,00	(70.000,00)	97,60		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.195.000,00	(805.000,00)	99,20		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.195.000,00	(805.000,00)	99,20		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.195.000,00	(805.000,00)	99,20		
02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	462.900.250,00	391.338.600,00	(71.561.650,00)	84,54		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	122.964.950,00	115.590.720,00	(7.374.230,00)	94,00		
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	56.118.750,00	52.371.750,00	(3.747.000,00)	93,32		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.118.750,00	52.371.750,00	(3.747.000,00)	93,32		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.098.750,00	50.351.750,00	(3.747.000,00)	93,07		
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	10.372.100,00	8.319.860,00	(2.052.240,00)	80,21		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.372.100,00	8.319.860,00	(2.052.240,00)	80,21		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.332.100,00	4.279.860,00	(2.052.240,00)	67,59		
02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	24.384.500,00	24.371.250,00	(13.250,00)	99,95		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	24.384.500,00	24.371.250,00	(13.250,00)	99,95		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.384.500,00	24.371.250,00	(13.250,00)	99,95		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.999.900,00	22.771.340,00	(228.560,00)	99,01		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.999.900,00	22.771.340,00	(228.560,00)	99,01		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.999.900,00	22.771.340,00	(228.560,00)	99,01		
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.069.800,00	4.975.180,00	(94.620,00)	98,13		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.069.800,00	4.975.180,00	(94.620,00)	98,13		
02.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.049.800,00	2.955.180,00	(94.620,00)	96,90		
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4.019.900,00	2.781.340,00	(1.238.560,00)	69,19		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.019.900,00	2.781.340,00	(1.238.560,00)	69,19		
02.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	1.010.000,00	(1.010.000,00)	50,00		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	1.771.340,00	(228.560,00)	88,57		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	88.464.050,00	72.029.350,00	(16.434.700,00)	81,42		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	29.810.000,00	17.925.850,00	(11.884.150,00)	60,13		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.810.000,00	17.925.850,00	(11.884.150,00)	60,13		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	11.865.850,00	(11.884.150,00)	49,96		
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	38.501.550,00	35.073.000,00	(3.428.550,00)	91,10		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.501.550,00	35.073.000,00	(3.428.550,00)	91,10		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.441.550,00	29.013.000,00	(3.428.550,00)	89,43		
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	20.152.500,00	19.030.500,00	(1.122.000,00)	94,43		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.152.500,00	19.030.500,00	(1.122.000,00)	94,43		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.742.500,00	17.620.500,00	(1.122.000,00)	94,01		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	229.421.450,00	187.325.850,00	(42.095.600,00)	81,65		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	95.004.100,00	87.802.850,00	(7.201.250,00)	92,42		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.004.100,00	87.802.850,00	(7.201.250,00)	92,42		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.004.100,00	87.802.850,00	(7.201.250,00)	92,42		
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	24.107.350,00	14.483.000,00	(9.624.350,00)	60,08		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.107.350,00	14.483.000,00	(9.624.350,00)	60,08		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.107.350,00	14.483.000,00	(9.624.350,00)	60,08		
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	110.310.000,00	85.040.000,00	(25.270.000,00)	77,09		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	110.310.000,00	85.040.000,00	(25.270.000,00)	77,09		
02.2.03.14.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.850.000,00	76.580.000,00	(25.270.000,00)	75,19		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.049.800,00	16.392.680,00	(5.657.120,00)	74,34		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.999.900,00	1.771.340,00	(228.560,00)	88,57		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.999.900,00	1.771.340,00	(228.560,00)	88,57		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	1.771.340,00	(228.560,00)	88,57		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	20.049.900,00	14.621.340,00	(5.428.560,00)	72,92		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.049.900,00	14.621.340,00	(5.428.560,00)	72,92		
02.2.04.07.5.1.01	Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.999.900,00	7.571.340,00	(5.428.560,00)	58,24		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	627.320.200,00	407.007.500,00	(220.312.700,00)	64,88		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	627.320.200,00	407.007.500,00	(220.312.700,00)	64,88		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	627.320.200,00	407.007.500,00	(220.312.700,00)	64,88		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	627.320.200,00	407.007.500,00	(220.312.700,00)	64,88		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.320.200,00	407.007.500,00	(220.312.700,00)	64,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.595.456.860,00)	(6.228.820.203,00)	366.636.657,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.595.456.860,00)**	**(6.228.820.203,00)**	**366.636.657,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

I Sang Nyoman Sedana Arta,SE

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SKPD : 5-05.0-00.0-00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	651.743.216,00	565.621.160,00	(86.122.056,00)	86,79		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	254.097.216,00	208.487.360,00	(45.609.856,00)	82,05		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.765.000,00	1.742.100,00	(2.022.900,00)	46,27		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.765.000,00	1.742.100,00	(2.022.900,00)	46,27		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.765.000,00	1.742.100,00	(2.022.900,00)	46,27		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.765.000,00	1.742.100,00	(2.022.900,00)	46,27		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.509.116,00	48.842.800,00	(15.666.316,00)	75,71		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.444.116,00	45.362.800,00	(15.081.316,00)	75,05		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.444.116,00	45.362.800,00	(15.081.316,00)	75,05		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	60.444.116,00	45.362.800,00	(15.081.316,00)	75,05		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.065.000,00	3.480.000,00	(585.000,00)	85,61		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.065.000,00	3.480.000,00	(585.000,00)	85,61		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.065.000,00	3.480.000,00	(585.000,00)	85,61		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.938.100,00	59.916.600,00	(7.021.500,00)	89,51		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.290.900,00	1.289.400,00	(1.500,00)	99,88		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.290.900,00	1.289.400,00	(1.500,00)	99,88		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.900,00	1.289.400,00	(1.500,00)	99,88		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.854.500,00	10.415.000,00	(439.500,00)	95,95		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.018.000,00	1.015.000,00	(3.000,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.000,00	1.015.000,00	(3.000,00)	99,71		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	9.836.500,00	9.400.000,00	(436.500,00)	95,56		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.836.500,00	9.400.000,00	(436.500,00)	95,56		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.792.700,00	38.612.200,00	(6.180.500,00)	86,20		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.792.700,00	38.612.200,00	(6.180.500,00)	86,20		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.632.700,00	30.452.200,00	(6.180.500,00)	83,13		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.495.000,00	21.950.000,00	(545.000,00)	97,58		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.495.000,00	21.950.000,00	(545.000,00)	97,58		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	22.495.000,00	21.950.000,00	(545.000,00)	97,58		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.495.000,00	21.950.000,00	(545.000,00)	97,58		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.400.000,00	52.321.860,00	(8.078.140,00)	86,63		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	7.321.860,00	(4.678.140,00)	61,02		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	7.321.860,00	(4.678.140,00)	61,02		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	7.321.860,00	(4.678.140,00)	61,02		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.900.000,00	42.500.000,00	(3.400.000,00)	92,59		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.900.000,00	42.500.000,00	(3.400.000,00)	92,59		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	1.700.000,00	(3.400.000,00)	33,33		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.990.000,00	23.714.000,00	(12.276.000,00)	65,89		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000,00	20.249.000,00	(10.751.000,00)	65,32		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	20.249.000,00	(10.751.000,00)	65,32		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	20.249.000,00	(10.751.000,00)	65,32		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	3.465.000,00	(1.525.000,00)	69,44		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.990.000,00	3.465.000,00	(1.525.000,00)	69,44		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	3.465.000,00	(1.525.000,00)	69,44		
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	397.646.000,00	357.133.800,00	(40.512.200,00)	89,81		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	368.192.000,00	338.267.800,00	(29.924.200,00)	91,87		
02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	368.192.000,00	338.267.800,00	(29.924.200,00)	91,87		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	368.192.000,00	338.267.800,00	(29.924.200,00)	91,87		

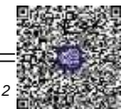

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.192.000,00	338.267.800,00	(29.924.200,00)	91,87		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29.454.000,00	18.866.000,00	(10.588.000,00)	64,05		
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	29.454.000,00	18.866.000,00	(10.588.000,00)	64,05		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.454.000,00	18.866.000,00	(10.588.000,00)	64,05		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.454.000,00	18.866.000,00	(10.588.000,00)	64,05		
	SURPLUS / DEFISIT	(651.743.216,00)	(565.621.160,00)	86.122.056,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(651.743.216,00)**	**(565.621.160,00)**	**86.122.056,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT

SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	9.511.724.900,00	9.309.406.456,00	(202.318.444,00)	97,87		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	8.580.344.900,00	8.497.908.456,00	(82.436.444,00)	99,04		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.311.231.000,00	7.289.733.768,00	(21.497.232,00)	99,71		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.311.231.000,00	7.289.733.768,00	(21.497.232,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.311.231.000,00	7.289.733.768,00	(21.497.232,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.311.231.000,00	7.289.733.768,00	(21.497.232,00)	99,71		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.496.000,00	206.989.000,00	(16.507.000,00)	92,61		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	223.496.000,00	206.989.000,00	(16.507.000,00)	92,61		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	223.496.000,00	206.989.000,00	(16.507.000,00)	92,61		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.496.000,00	206.989.000,00	(16.507.000,00)	92,61		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.075.800,00	411.617.150,00	(19.458.650,00)	95,49		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	381.057.300,00	365.211.650,00	(15.845.650,00)	95,84		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	381.057.300,00	365.211.650,00	(15.845.650,00)	95,84		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.457.300,00	304.611.650,00	(15.845.650,00)	95,06		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.562.000,00	22.785.500,00	(2.776.500,00)	89,14		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.562.000,00	22.785.500,00	(2.776.500,00)	89,14		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.562.000,00	22.785.500,00	(2.776.500,00)	89,14		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.836.500,00	19.000.000,00	(836.500,00)	95,78		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	19.836.500,00	19.000.000,00	(836.500,00)	95,78		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.836.500,00	19.000.000,00	(836.500,00)	95,78		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.610.000,00	283.382.000,00	(14.228.000,00)	95,22		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	35.320.000,00	31.000.000,00	(4.320.000,00)	87,77		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	35.320.000,00	31.000.000,00	(4.320.000,00)	87,77		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.320.000,00	31.000.000,00	(4.320.000,00)	87,77		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.290.000,00	252.382.000,00	(9.908.000,00)	96,22		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	262.290.000,00	252.382.000,00	(9.908.000,00)	96,22		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.290.000,00	252.382.000,00	(9.908.000,00)	96,22		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.366.100,00	99.338.214,00	(7.027.886,00)	93,39		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	6.000.000,00	(500.000,00)	92,31		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.000.000,00	(500.000,00)	92,31		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.000.000,00	(500.000,00)	92,31		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.750.000,00	16.700.214,00	(6.049.786,00)	73,41		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.750.000,00	16.700.214,00	(6.049.786,00)	73,41		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	16.700.214,00	(6.049.786,00)	73,41		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.116.100,00	76.638.000,00	(478.100,00)	99,38		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	77.116.100,00	76.638.000,00	(478.100,00)	99,38		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.116.100,00	76.638.000,00	(478.100,00)	99,38		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.566.000,00	206.848.324,00	(3.717.676,00)	98,23		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.396.000,00	175.898.324,00	(2.497.676,00)	98,60		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	178.396.000,00	175.898.324,00	(2.497.676,00)	98,60		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.396.000,00	175.898.324,00	(2.497.676,00)	98,60		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.170.000,00	30.950.000,00	(1.220.000,00)	96,21		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.170.000,00	30.950.000,00	(1.220.000,00)	96,21		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.170.000,00	30.950.000,00	(1.220.000,00)	96,21		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	400.690.000,00	299.668.000,00	(101.022.000,00)	74,79		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	392.520.000,00	298.718.000,00	(93.802.000,00)	76,10		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	332.040.000,00	275.150.000,00	(56.890.000,00)	82,87		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	332.040.000,00	275.150.000,00	(56.890.000,00)	82,87		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.920.000,00	263.030.000,00	(56.890.000,00)	82,22		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	11.570.000,00	1.920.000,00	(9.650.000,00)	16,59		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.570.000,00	1.920.000,00	(9.650.000,00)	16,59		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	1.920.000,00	(9.650.000,00)	16,59		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48.910.000,00	21.648.000,00	(27.262.000,00)	44,26		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	48.910.000,00	21.648.000,00	(27.262.000,00)	44,26		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.910.000,00	21.648.000,00	(27.262.000,00)	44,26		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8.170.000,00	950.000,00	(7.220.000,00)	11,63		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8.170.000,00	950.000,00	(7.220.000,00)	11,63		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.170.000,00	950.000,00	(7.220.000,00)	11,63		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	950.000,00	(7.220.000,00)	11,63		
03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	530.690.000,00	511.830.000,00	(18.860.000,00)	96,45		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	530.690.000,00	511.830.000,00	(18.860.000,00)	96,45		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	497.690.000,00	478.830.000,00	(18.860.000,00)	96,21		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	497.690.000,00	478.830.000,00	(18.860.000,00)	96,21		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.170.000,00	464.310.000,00	(18.860.000,00)	96,10		
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.511.724.900,00)	(9.309.406.456,00)	202.318.444,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(9.511.724.900,00)**	**(9.309.406.456,00)**	**202.318.444,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

KECAMATAN BANGLI

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Bangli

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.629.015.905,00	10.368.978.718,00	(260.037.187,00)	97,55		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	8.986.651.955,00	8.782.552.418,00	(204.099.537,00)	97,73		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.460.000,00	35.370.000,00	(90.000,00)	99,75		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.460.000,00	35.370.000,00	(90.000,00)	99,75		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.460.000,00	35.370.000,00	(90.000,00)	99,75		
01.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.380.000,00	27.290.000,00	(90.000,00)	99,67		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.335.576.155,00	6.204.569.132,00	(131.007.023,00)	97,93		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.335.576.155,00	6.204.569.132,00	(131.007.023,00)	97,93		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.335.576.155,00	6.204.569.132,00	(131.007.023,00)	97,93		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.335.576.155,00	6.204.569.132,00	(131.007.023,00)	97,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.207.300,00	777.357.650,00	(32.849.650,00)	95,95		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	719.987.950,00	691.202.000,00	(28.785.950,00)	96,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	719.987.950,00	691.202.000,00	(28.785.950,00)	96,00		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.587.950,00	663.802.000,00	(28.785.950,00)	95,84		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.233.350,00	16.654.400,00	(2.578.950,00)	86,59		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.233.350,00	16.654.400,00	(2.578.950,00)	86,59		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.233.350,00	16.654.400,00	(2.578.950,00)	86,59		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.586.000,00	58.101.250,00	(1.484.750,00)	97,51		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	59.586.000,00	58.101.250,00	(1.484.750,00)	97,51		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.586.000,00	58.101.250,00	(1.484.750,00)	97,51		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.213.000,00	44.900.000,00	(7.313.000,00)	85,99		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.213.000,00	44.900.000,00	(7.313.000,00)	85,99		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	52.213.000,00	44.900.000,00	(7.313.000,00)	85,99		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.213.000,00	44.900.000,00	(7.313.000,00)	85,99		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.477.848.000,00	1.449.958.176,00	(27.889.824,00)	98,11		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.462.000,00	34.564.176,00	(21.897.824,00)	61,22		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.462.000,00	34.564.176,00	(21.897.824,00)	61,22		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.462.000,00	34.564.176,00	(21.897.824,00)	61,22		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.409.566.000,00	1.403.574.000,00	(5.992.000,00)	99,57		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.409.566.000,00	1.403.574.000,00	(5.992.000,00)	99,57		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	24.920.000,00	24.920.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.646.000,00	1.378.654.000,00	(5.992.000,00)	99,57		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.347.500,00	270.397.460,00	(4.950.040,00)	98,20		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.797.500,00	89.996.950,00	(2.800.550,00)	96,98		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	92.797.500,00	89.996.950,00	(2.800.550,00)	96,98		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.797.500,00	89.996.950,00	(2.800.550,00)	96,98		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000,00	30.900.000,00	(1.650.000,00)	94,93		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.550.000,00	25.970.000,00	(1.580.000,00)	94,26		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	25.970.000,00	(1.580.000,00)	94,26		
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60		
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.500.510,00	(499.490,00)	99,67		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.500.510,00	(499.490,00)	99,67		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.500.510,00	(499.490,00)	99,67		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	32.330.000,00	28.199.600,00	(4.130.400,00)	87,22		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.330.000,00	28.199.600,00	(4.130.400,00)	87,22		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.330.000,00	28.199.600,00	(4.130.400,00)	87,22		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.330.000,00	28.199.600,00	(4.130.400,00)	87,22		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	20.119.600,00	(4.130.400,00)	82,97		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1.294.736.800,00	1.251.689.200,00	(43.047.600,00)	96,68		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	533.071.300,00	512.536.700,00	(20.534.600,00)	96,15		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	533.071.300,00	512.536.700,00	(20.534.600,00)	96,15		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	533.071.300,00	512.536.700,00	(20.534.600,00)	96,15		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.071.300,00	487.536.700,00	(20.534.600,00)	95,96		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	761.665.500,00	739.152.500,00	(22.513.000,00)	97,04		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.704.500,00	25.427.500,00	(2.277.000,00)	91,78		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.704.500,00	25.427.500,00	(2.277.000,00)	91,78		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.344.500,00	24.067.500,00	(2.277.000,00)	91,36		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	625.300.000,00	607.780.000,00	(17.520.000,00)	97,20		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	625.300.000,00	607.780.000,00	(17.520.000,00)	97,20		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	35.200.000,00	29.560.000,00	(5.640.000,00)	83,98		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.100.000,00	578.220.000,00	(11.880.000,00)	97,99		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.210.000,00	11.010.000,00	(200.000,00)	98,22		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.210.000,00	11.010.000,00	(200.000,00)	98,22		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	9.650.000,00	(200.000,00)	97,97		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	97.451.000,00	94.935.000,00	(2.516.000,00)	97,42		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	97.451.000,00	94.935.000,00	(2.516.000,00)	97,42		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.451.000,00	94.935.000,00	(2.516.000,00)	97,42		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	117.209.000,00	114.022.500,00	(3.186.500,00)	97,28		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.209.000,00	114.022.500,00	(3.186.500,00)	97,28		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.209.000,00	114.022.500,00	(3.186.500,00)	97,28		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.209.000,00	114.022.500,00	(3.186.500,00)	97,28		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.769.000,00	104.582.500,00	(3.186.500,00)	97,04		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	198.088.150,00	192.515.000,00	(5.573.150,00)	97,19		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	198.088.150,00	192.515.000,00	(5.573.150,00)	97,19		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	198.088.150,00	192.515.000,00	(5.573.150,00)	97,19		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	198.088.150,00	192.515.000,00	(5.573.150,00)	97,19		
05.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.008.150,00	184.435.000,00	(5.573.150,00)	97,07		
	SURPLUS / DEFISIT	(10.629.015.905,00)	(10.368.978.718,00)	260.037.187,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(10.629.015.905,00)**	**(10.368.978.718,00)**	**260.037.187,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

KECAMATAN KINTAMANI

Lampiran I.3: Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Kintamani

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	4.114.488.400,00	4.059.464.236,00	(55.024.164,00)	98,66		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.857.030.800,00	3.803.051.136,00	(53.979.664,00)	98,60		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.377.400,00	7.375.800,00	(1.600,00)	99,98		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	745.400,00	744.000,00	(1.400,00)	99,81		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	745.400,00	744.000,00	(1.400,00)	99,81		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	745.400,00	744.000,00	(1.400,00)	99,81		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.632.000,00	6.631.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.632.000,00	6.631.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.000,00	571.800,00	(200,00)	99,97		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.354.449.050,00	3.305.132.388,00	(49.316.662,00)	98,53		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.354.449.050,00	3.305.132.388,00	(49.316.662,00)	98,53		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.354.449.050,00	3.305.132.388,00	(49.316.662,00)	98,53		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.354.449.050,00	3.305.132.388,00	(49.316.662,00)	98,53		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.949.000,00	264.825.200,00	(3.123.800,00)	98,83		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	797.000,00	793.000,00	(4.000,00)	99,50		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	797.000,00	793.000,00	(4.000,00)	99,50		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.000,00	793.000,00	(4.000,00)	99,50		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.072.000,00	262.952.200,00	(3.119.800,00)	98,83		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	266.072.000,00	262.952.200,00	(3.119.800,00)	98,83		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.012.000,00	256.892.200,00	(3.119.800,00)	98,80		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.559.000,00	107.958.948,00	(600.052,00)	99,45		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.009.000,00	17.408.948,00	(600.052,00)	96,67		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.009.000,00	17.408.948,00	(600.052,00)	96,67		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.009.000,00	17.408.948,00	(600.052,00)	96,67		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.640.000,00	87.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	87.640.000,00	87.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	23.460.000,00	23.460.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.180.000,00	64.180.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.696.350,00	117.758.800,00	(937.550,00)	99,21		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.046.350,00	114.213.800,00	(832.550,00)	99,28		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	115.046.350,00	114.213.800,00	(832.550,00)	99,28		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.046.350,00	114.213.800,00	(832.550,00)	99,28		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000,00	3.545.000,00	(105.000,00)	97,12		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.545.000,00	(105.000,00)	97,12		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.545.000,00	(105.000,00)	97,12		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	117.976.550,00	117.795.200,00	(181.350,00)	99,85		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73.826.550,00	73.670.700,00	(155.850,00)	99,79		
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.781.000,00	21.725.200,00	(55.800,00)	99,74		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.781.000,00	21.725.200,00	(55.800,00)	99,74		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.781.000,00	21.725.200,00	(55.800,00)	99,74		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.045.550,00	51.945.500,00	(100.050,00)	99,81		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.045.550,00	51.945.500,00	(100.050,00)	99,81		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.985.550,00	45.885.500,00	(100.050,00)	99,78		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.150.000,00	44.124.500,00	(25.500,00)	99,94		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.150.000,00	44.124.500,00	(25.500,00)	99,94		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.150.000,00	44.124.500,00	(25.500,00)	99,94		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	44.124.500,00	(25.500,00)	99,94		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	52.261.000,00	52.052.000,00	(209.000,00)	99,60		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.261.000,00	52.052.000,00	(209.000,00)	99,60		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.040.000,00	5.940.000,00	(100.000,00)	98,34		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.040.000,00	5.940.000,00	(100.000,00)	98,34		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	5.940.000,00	(100.000,00)	98,34		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.221.000,00	46.112.000,00	(109.000,00)	99,76		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.221.000,00	46.112.000,00	(109.000,00)	99,76		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.161.000,00	40.052.000,00	(109.000,00)	99,73		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	30.243.500,00	30.084.000,00	(159.500,00)	99,47		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.243.500,00	30.084.000,00	(159.500,00)	99,47		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.243.500,00	30.084.000,00	(159.500,00)	99,47		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.243.500,00	30.084.000,00	(159.500,00)	99,47		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.183.500,00	24.024.000,00	(159.500,00)	99,34		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	56.976.550,00	56.481.900,00	(494.650,00)	99,13		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.976.550,00	56.481.900,00	(494.650,00)	99,13		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	56.976.550,00	56.481.900,00	(494.650,00)	99,13		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.976.550,00	56.481.900,00	(494.650,00)	99,13		
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.916.550,00	50.421.900,00	(494.650,00)	99,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.114.488.400,00)	(4.059.464.236,00)	55.024.164,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(4.114.488.400,00)**	**(4.059.464.236,00)**	**55.024.164,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

KECAMATAN SUSUT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Susut

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.173.800.293,00	3.117.320.449,00	(56.479.844,00)	98,22		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.041.230.293,00	2.986.901.449,00	(54.328.844,00)	98,21		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.688.840.293,00	2.645.762.789,00	(43.077.504,00)	98,40		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.688.840.293,00	2.645.762.789,00	(43.077.504,00)	98,40		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.688.840.293,00	2.645.762.789,00	(43.077.504,00)	98,40		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.688.840.293,00	2.645.762.789,00	(43.077.504,00)	98,40		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.421.500,00	253.876.700,00	(8.544.800,00)	96,74		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.279.000,00	1.642.000,00	(637.000,00)	72,05		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.279.000,00	1.642.000,00	(637.000,00)	72,05		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	1.642.000,00	(637.000,00)	72,05		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.986.500,00	229.415.200,00	(6.571.300,00)	97,22		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	235.986.500,00	229.415.200,00	(6.571.300,00)	97,22		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.986.500,00	205.415.200,00	(6.571.300,00)	96,90		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.810.000,00	6.892.500,00	(917.500,00)	88,25		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.810.000,00	6.892.500,00	(917.500,00)	88,25		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	6.892.500,00	(917.500,00)	88,25		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.246.000,00	13.827.000,00	(419.000,00)	97,06		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.246.000,00	13.827.000,00	(419.000,00)	97,06		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.246.000,00	13.827.000,00	(419.000,00)	97,06		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.486.500,00	7.400.000,00	(86.500,00)	98,84		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.486.500,00	7.400.000,00	(86.500,00)	98,84		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	7.486.500,00	7.400.000,00	(86.500,00)	98,84		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.486.500,00	7.400.000,00	(86.500,00)	98,84		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.448.000,00	12.513.460,00	(934.540,00)	93,05		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.248.000,00	9.313.460,00	(934.540,00)	90,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.248.000,00	9.313.460,00	(934.540,00)	90,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.248.000,00	9.313.460,00	(934.540,00)	90,88		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.034.000,00	67.348.500,00	(1.685.500,00)	97,56		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.384.000,00	63.698.500,00	(1.685.500,00)	97,42		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.384.000,00	63.698.500,00	(1.685.500,00)	97,42		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.354.000,00	60.668.500,00	(1.685.500,00)	97,30		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	6.150.000,00	6.069.000,00	(81.000,00)	98,68		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.150.000,00	6.069.000,00	(81.000,00)	98,68		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.150.000,00	6.069.000,00	(81.000,00)	98,68		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.150.000,00	6.069.000,00	(81.000,00)	98,68		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.039.000,00	(81.000,00)	97,40		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	61.968.000,00	61.386.000,00	(582.000,00)	99,06		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.968.000,00	61.386.000,00	(582.000,00)	99,06		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.090.000,00	3.655.000,00	(435.000,00)	89,36		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.090.000,00	3.655.000,00	(435.000,00)	89,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	3.655.000,00	(435.000,00)	89,36		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.878.000,00	57.731.000,00	(147.000,00)	99,75		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	57.878.000,00	57.731.000,00	(147.000,00)	99,75		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.848.000,00	54.701.000,00	(147.000,00)	99,73		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	50.398.000,00	49.941.000,00	(457.000,00)	99,09		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.398.000,00	49.941.000,00	(457.000,00)	99,09		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.398.000,00	49.941.000,00	(457.000,00)	99,09		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.398.000,00	49.941.000,00	(457.000,00)	99,09		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.368.000,00	46.911.000,00	(457.000,00)	99,04		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	7.174.000,00	6.643.000,00	(531.000,00)	92,60		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.174.000,00	6.643.000,00	(531.000,00)	92,60		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.174.000,00	6.643.000,00	(531.000,00)	92,60		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.174.000,00	6.643.000,00	(531.000,00)	92,60		
05.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.144.000,00	3.613.000,00	(531.000,00)	87,19		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	6.880.000,00	6.380.000,00	(500.000,00)	92,73		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.880.000,00	6.380.000,00	(500.000,00)	92,73		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.880.000,00	6.380.000,00	(500.000,00)	92,73		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	6.380.000,00	(500.000,00)	92,73		
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.350.000,00	(500.000,00)	87,01		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.173.800.293,00)	(3.117.320.449,00)	56.479.844,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(3.173.800.293,00)**	**(3.117.320.449,00)**	**56.479.844,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

KECAMATAN TEMBUKU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Tembuku

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	4.293.644.900,00	4.249.313.217,00	(44.331.683,00)	98,97		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.205.692.900,00	4.162.179.717,00	(43.513.183,00)	98,97		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.691.212.900,00	3.652.676.648,00	(38.536.252,00)	98,96		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.691.212.900,00	3.652.676.648,00	(38.536.252,00)	98,96		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.691.212.900,00	3.652.676.648,00	(38.536.252,00)	98,96		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.691.212.900,00	3.652.676.648,00	(38.536.252,00)	98,96		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.116.300,00	166.199.100,00	(917.200,00)	99,45		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.636.000,00	2.592.000,00	(44.000,00)	98,33		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.636.000,00	2.592.000,00	(44.000,00)	98,33		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.636.000,00	2.592.000,00	(44.000,00)	98,33		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.001.500,00	4.001.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.001.500,00	4.001.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.001.500,00	4.001.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.627.500,00	150.788.500,00	(839.000,00)	99,45		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	151.627.500,00	150.788.500,00	(839.000,00)	99,45		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.627.500,00	150.788.500,00	(839.000,00)	99,45		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.521.300,00	3.521.100,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.521.300,00	3.521.100,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.521.300,00	3.521.100,00	(200,00)	99,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.250.000,00	4.216.000,00	(34.000,00)	99,20		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.250.000,00	4.216.000,00	(34.000,00)	99,20		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.216.000,00	(34.000,00)	99,20		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.177.200,00	9.900.000,00	(277.200,00)	97,28		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.177.200,00	5.900.000,00	(277.200,00)	95,51		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	6.177.200,00	5.900.000,00	(277.200,00)	95,51		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.177.200,00	5.900.000,00	(277.200,00)	95,51		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.966.500,00	57.189.112,00	(777.388,00)	98,66		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.816.500,00	14.039.112,00	(777.388,00)	94,75		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.816.500,00	14.039.112,00	(777.388,00)	94,75		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.816.500,00	14.039.112,00	(777.388,00)	94,75		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.220.000,00	271.214.857,00	(3.005.143,00)	98,90		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.570.000,00	69.014.857,00	(1.555.143,00)	97,80		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.570.000,00	69.014.857,00	(1.555.143,00)	97,80		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.570.000,00	69.014.857,00	(1.555.143,00)	97,80		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.550.000,00	(1.450.000,00)	99,28		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.550.000,00	(1.450.000,00)	99,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.550.000,00	(1.450.000,00)	99,28		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	33.068.000,00	32.994.500,00	(73.500,00)	99,78		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.068.000,00	32.994.500,00	(73.500,00)	99,78		
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.038.000,00	8.964.500,00	(73.500,00)	99,19		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.038.000,00	8.964.500,00	(73.500,00)	99,19		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	4.924.500,00	(73.500,00)	98,53		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	46.064.000,00	45.486.000,00	(578.000,00)	98,75		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.064.000,00	45.486.000,00	(578.000,00)	98,75		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.064.000,00	45.486.000,00	(578.000,00)	98,75		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.064.000,00	45.486.000,00	(578.000,00)	98,75		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.004.000,00	39.426.000,00	(578.000,00)	98,56		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	4.410.000,00	4.360.000,00	(50.000,00)	98,87		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.410.000,00	4.360.000,00	(50.000,00)	98,87		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.410.000,00	4.360.000,00	(50.000,00)	98,87		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.410.000,00	4.360.000,00	(50.000,00)	98,87		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.350.000,00	(50.000,00)	98,53		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	4.410.000,00	4.293.000,00	(117.000,00)	97,35		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.410.000,00	4.293.000,00	(117.000,00)	97,35		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.410.000,00	4.293.000,00	(117.000,00)	97,35		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	4.410.000,00	4.293.000,00	(117.000,00)	97,35		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.283.000,00	(117.000,00)	96,56		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.293.644.900,00)	(4.249.313.217,00)	44.331.683,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(4.293.644.900,00)**	**(4.249.313.217,00)**	**44.331.683,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	19.608.300.351,00	19.469.444.917,00	(138.855.434,00)	99,29		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.735.187.363,00	3.611.101.979,00	(124.085.384,00)	96,68		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.534.634.263,00	3.424.011.095,00	(110.623.168,00)	96,87		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.771.613,00	3.349.317.395,00	(110.454.218,00)	96,81		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.459.771.613,00	3.349.317.395,00	(110.454.218,00)	96,81		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.459.771.613,00	3.349.317.395,00	(110.454.218,00)	96,81		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	74.862.650,00	74.693.700,00	(168.950,00)	99,77		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	74.862.650,00	74.693.700,00	(168.950,00)	99,77		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.382.650,00	20.213.700,00	(168.950,00)	99,17		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.084.100,00	54.178.500,00	(2.905.600,00)	94,91		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.144.400,00	1.138.000,00	(6.400,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.144.400,00	1.138.000,00	(6.400,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.144.400,00	1.138.000,00	(6.400,00)	99,44		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.069.600,00	1.050.000,00	(19.600,00)	98,17		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.069.600,00	1.050.000,00	(19.600,00)	98,17		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.600,00	1.050.000,00	(19.600,00)	98,17		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.160.100,00	42.960.500,00	(2.199.600,00)	95,13		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.160.100,00	42.960.500,00	(2.199.600,00)	95,13		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.160.100,00	42.960.500,00	(2.199.600,00)	95,13		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.230.000,00	5.550.000,00	(680.000,00)	89,09		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.230.000,00	5.550.000,00	(680.000,00)	89,09		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	5.550.000,00	(680.000,00)	89,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.220.000,00	12.794.484,00	(5.425.516,00)	70,22		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	6.574.484,00	(5.425.516,00)	54,79		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	6.574.484,00	(5.425.516,00)	54,79		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.574.484,00	(5.425.516,00)	54,79		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.249.000,00	120.117.900,00	(5.131.100,00)	95,90		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.499.000,00	109.867.900,00	(4.631.100,00)	95,96		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.499.000,00	109.867.900,00	(4.631.100,00)	95,96		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.499.000,00	109.867.900,00	(4.631.100,00)	95,96		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	10.250.000,00	(500.000,00)	95,35		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.750.000,00	10.250.000,00	(500.000,00)	95,35		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.250.000,00	(500.000,00)	95,35		
02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	678.691.100,00	667.889.600,00	(10.801.500,00)	98,41		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	678.691.100,00	667.889.600,00	(10.801.500,00)	98,41		
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	619.796.100,00	609.139.600,00	(10.656.500,00)	98,28		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	619.796.100,00	609.139.600,00	(10.656.500,00)	98,28		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.136.100,00	599.479.600,00	(10.656.500,00)	98,25		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	58.895.000,00	58.750.000,00	(145.000,00)	99,75		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	58.895.000,00	58.750.000,00	(145.000,00)	99,75		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.675.000,00	55.530.000,00	(145.000,00)	99,74		
03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	14.916.728.438,00	14.913.473.438,00	(3.255.000,00)	99,98		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	14.916.728.438,00	14.913.473.438,00	(3.255.000,00)	99,98		
03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14.027.541.200,00	14.027.541.200,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.027.541.200,00	14.027.541.200,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	14.027.541.200,00	14.027.541.200,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	772.467.238,00	772.467.238,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	772.467.238,00	772.467.238,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	772.467.238,00	772.467.238,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.760.000,00	5.655.000,00	(3.105.000,00)	64,55		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.760.000,00	5.655.000,00	(3.105.000,00)	64,55		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	5.655.000,00	(3.105.000,00)	64,55		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	107.960.000,00	107.810.000,00	(150.000,00)	99,86		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	107.960.000,00	107.810.000,00	(150.000,00)	99,86		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.920.000,00	102.770.000,00	(150.000,00)	99,85		
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	125.315.000,00	125.175.000,00	(140.000,00)	99,89		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	125.315.000,00	125.175.000,00	(140.000,00)	99,89		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.315.000,00	25.175.000,00	(140.000,00)	99,45		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.315.000,00	25.175.000,00	(140.000,00)	99,45		
05.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.895.000,00	22.755.000,00	(140.000,00)	99,39		
06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	152.378.450,00	151.804.900,00	(573.550,00)	99,62		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	152.378.450,00	151.804.900,00	(573.550,00)	99,62		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.061.750,00	78.806.000,00	(255.750,00)	99,68		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.061.750,00	78.806.000,00	(255.750,00)	99,68		
06.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.431.750,00	75.176.000,00	(255.750,00)	99,66		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	73.316.700,00	72.998.900,00	(317.800,00)	99,57		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	73.316.700,00	72.998.900,00	(317.800,00)	99,57		
06.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.896.700,00	70.578.900,00	(317.800,00)	99,55		
	SURPLUS / DEFISIT	(19.608.300.351,00)	(19.469.444.917,00)	138.855.434,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(19.608.300.351,00)**	**(19.469.444.917,00)**	**138.855.434,00**	**0**		

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

LAMPIRAN I.4

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	546.479.688.004,00	145.588.682.373,00	0,00	0,00
		527.805.624.112,29	92.007.713.737,05	0,00	0,00
1.01	**PENDIDIKAN**	266.631.845.889,00	22.050.539.050,00	0,00	0,00
		249.823.236.284,95	20.771.649.688,00	0,00	0,00
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	211.460.025.234,00	49.271.000,00	0,00	0,00
		195.140.145.277,00	39.203.700,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	209.405.156.284,00	0,00	0,00	0,00
		193.200.555.505,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	209.405.156.284,00	0,00	0,00	0,00
		193.200.555.505,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.271.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	60.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.271.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.284.450,00	0,00	0,00	0,00
		297.536.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.151.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.622.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.442.350,00	0,00	0,00	0,00
		251.018.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.932.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.339.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.527.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.057.100,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.500.000,00	49.271.000,00	0,00	0,00
		122.500.000,00	39.203.700,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.500.000,00	49.271.000,00	0,00	0,00
		122.500.000,00	39.203.700,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.124.355.247,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.790.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.615.247,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	966.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		953.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.814.500,00	0,00	0,00	0,00
		296.026.125,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.934.500,00	0,00	0,00	0,00
		257.081.125,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.945.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	55.030.300.655,00	22.001.268.050,00	0,00	0,00
		54.546.516.007,95	20.732.445.988,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.286.381.532,00	15.327.357.287,00	0,00	0,00
		30.290.449.752,34	14.683.733.833,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	2.284.650.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.284.650.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	1.118.328.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.118.328.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	242.158.000,00	0,00	0,00
		0,00	242.158.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	475.900.000,00	1.006.486.000,00	0,00	0,00
		475.275.000,00	993.722.968,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	1.437.115.250,00	0,00	0,00
		0,00	1.428.723.018,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	148.665.000,00	0,00	0,00
		0,00	148.665.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	173.305.750,00	0,00	0,00
		0,00	170.073.794,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.261.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.001.115.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.445.750,00	0,00	0,00	0,00
		10.105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.944.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.933.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	57.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.709.889.782,00	3.809.999.287,00	0,00	0,00
		20.784.518.752,34	3.439.648.053,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	3.856.650.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.856.650.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.865.744.087,00	5.629.775.799,00	0,00	0,00
		18.435.015.219,61	5.005.313.299,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	532.720.000,00	0,00	0,00
		0,00	532.720.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	1.053.232.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.053.232.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	129.660.000,00	1.674.524.000,00	0,00	0,00
		128.565.000,00	1.664.623.462,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	318.891.000,00	0,00	0,00
		0,00	302.462.536,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	164.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	21.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.954.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.954.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.576.554.287,00	2.050.408.799,00	0,00	0,00
		13.161.571.219,61	1.452.275.301,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		18.979.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.768.425.036,00	1.044.134.964,00	0,00	0,00
		5.756.301.036,00	1.043.398.856,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	41.970.000,00	527.301.000,00	0,00	0,00
		41.674.000,00	526.564.892,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	357.439.000,00	0,00	0,00
		0,00	357.439.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.363.205.036,00	159.394.964,00	0,00	0,00
		2.363.205.036,00	159.394.964,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.323.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.314.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.922.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	109.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	109.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**	96.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	96.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	28.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.260.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	68.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.075.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02	**KESEHATAN**	231.906.752.839,00	55.224.296.276,00	0,00	0,00
		233.055.665.898,34	26.249.395.338,05	0,00	0,00
1.02.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	165.707.588.499,00	6.142.783.276,00	0,00	0,00
		172.508.877.014,34	5.337.190.041,05	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.989.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.340.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.629.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.330.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.632.192.252,00	0,00	0,00	0,00
		87.616.016.112,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.552.674.252,00	0,00	0,00	0,00
		87.536.631.612,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	79.518.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.384.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	217.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		168.207.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.507.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.805.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.005.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.764.600,00	0,00	0,00	0,00
		472.745.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.003.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.998.000,00	0,00	0,00	0,00

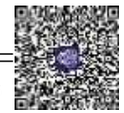

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.316.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.561.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	423.363.900,00	0,00	0,00	0,00
		383.049.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.561.400,00	0,00	0,00	0,00
		58.691.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.445.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	109.244.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.697.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	109.244.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.697.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		621.744.817,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.999.000,00	0,00	0,00	0,00
		264.284.817,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		347.460.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.782.500,00	0,00	0,00	0,00
		281.532.639,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.482.500,00	0,00	0,00	0,00
		274.312.639,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	75.107.671.147,00	6.033.539.276,00	0,00	0,00
		83.257.155.846,34	5.237.493.041,05	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.107.671.147,00	6.033.539.276,00	0,00	0,00
		83.257.155.846,34	5.237.493.041,05	0,00	0,00

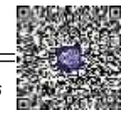

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	63.629.837.340,00	49.081.513.000,00	0,00	0,00
		58.348.597.684,00	20.912.205.297,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.032.729.040,00	49.081.513.000,00	0,00	0,00
		7.150.338.496,00	20.912.205.297,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.688.465.040,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
		4.504.678.363,00	12.721.776.420,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	4.371.706.200,00	0,00	0,00
		0,00	3.549.014.159,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	8.160.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00
		7.320.000,00	193.435.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.123.675.200,00	0,00	0,00
		0,00	1.121.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	781.131.600,00	0,00	0,00
		0,00	764.362.181,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	548.106.000,00	2.610.000.000,00	0,00	0,00
		547.541.871,00	2.562.617.537,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	825.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		493.848.808,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.830.059.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.467.559.154,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.329.550,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.060.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.504.333.300,00	0,00	0,00	0,00
		51.118.642.688,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	831.235.000,00	0,00	0,00	0,00
		582.588.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	29.862.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.148.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	779.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		527.492.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	250.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.030.000,00	0,00	0,00	0,00

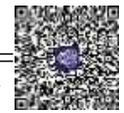

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	156.497.500,00	0,00	0,00	0,00
		97.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	175.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.958.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	57.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	87.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.058.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.708.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		444.515.853,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.202.431.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.273.301,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	63.117.500,00	0,00	0,00	0,00
		52.541.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	303.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		224.222.725,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	197.152.500,00	0,00	0,00	0,00
		145.734.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	688.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		585.369.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.462.371.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.024.046.000,00	0,00	0,00	0,00

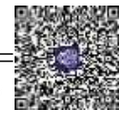

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	44.577.403.400,00	0,00	0,00	0,00
		44.446.688.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	145.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.901.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.261.607.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.388.294.839,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	426.658.900,00	0,00	0,00	0,00
		394.875.570,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	15.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.065.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	24.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	18.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.076.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.076.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	81.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.693.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.386.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	48.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	48.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	896.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		817.580.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	892.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		814.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	749.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		520.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	749.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		520.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	848.267.000,00	0,00	0,00	0,00
		786.261.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.386.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	76.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.386.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.241.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.465.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	123.241.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.465.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		609.410.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	648.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		609.410.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	20.372.069.705,00	67.752.572.547,00	0,00	0,00
		17.823.013.665,00	44.439.268.627,00	0,00	0,00

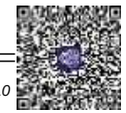

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.108.557.605,00	200.888.900,00	0,00	0,00
		12.797.041.965,00	158.625.510,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.582.934.505,00	0,00	0,00	0,00
		11.446.886.628,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.582.934.505,00	0,00	0,00	0,00
		11.446.886.628,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.643.100,00	91.038.900,00	0,00	0,00
		712.538.800,00	79.998.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.760.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	91.038.900,00	0,00	0,00
		0,00	79.998.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	696.853.100,00	0,00	0,00	0,00
		672.199.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.859.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.648.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		67.612.686,00	1.547.340,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.748.686,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.338.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		12.184.000,00	1.547.340,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.331.500,00	107.850.000,00	0,00	0,00
		570.003.851,00	77.080.170,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.173.240,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.941.500,00	0,00	0,00	0,00
		317.262.361,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	257.150.000,00	107.850.000,00	0,00	0,00
		184.741.250,00	77.080.170,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.827.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	233.200.000,00	50.790.000,00	0,00	0,00
		232.200.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	233.200.000,00	50.790.000,00	0,00	0,00
		232.200.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	233.200.000,00	50.790.000,00	0,00	0,00
		232.200.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	550.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		347.107.000,00	49.742.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		347.107.000,00	49.742.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.742.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		297.107.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	416.160.000,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00
		378.752.700,00	605.653.000,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	416.160.000,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00
		378.752.700,00	605.653.000,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	416.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		378.752.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	605.653.000,00	0,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	1.784.580.000,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00
		482.936.000,00	7.475.618.833,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.784.580.000,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00
		482.936.000,00	7.475.618.833,00	0,00	0,00

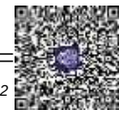

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.784.580.000,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00
		482.936.000,00	7.475.618.833,00	0,00	0,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	4.021.357.100,00	46.440.043.647,00	0,00	0,00
		3.341.939.500,00	36.099.279.284,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.021.357.100,00	46.440.043.647,00	0,00	0,00
		3.341.939.500,00	36.099.279.284,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	291.810.000,00	46.426.043.647,00	0,00	0,00
		291.750.000,00	36.089.679.284,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.729.547.100,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		3.050.189.500,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	258.215.000,00	850.000,00	0,00	0,00
		243.036.500,00	850.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	36.040.000,00	850.000,00	0,00	0,00
		36.040.000,00	850.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	33.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.090.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	2.950.000,00	850.000,00	0,00	0,00
		2.950.000,00	850.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	122.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.107.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	122.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.107.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.889.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.889.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	1.594.040.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
		1.593.693.000,00	208.724.784,00	0,00	0,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	934.040.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
		933.693.000,00	208.724.784,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	64.890.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		64.890.000,00	79.527.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	79.527.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	64.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.890.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	129.197.784,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	59.642.520,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	69.555.264,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	869.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		868.803.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	869.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		868.803.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	20.547.026.806,00	347.967.000,00	0,00	0,00
		20.235.776.204,00	336.125.300,00	0,00	0,00
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	17.500.742.325,00	284.067.000,00	0,00	0,00
		17.291.913.304,00	273.800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.946.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.746.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.440.906.375,00	0,00	0,00	0,00
		16.318.935.428,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.440.906.375,00	0,00	0,00	0,00
		16.318.935.428,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.895.650,00	0,00	0,00	0,00
		171.231.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.942.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.751.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.858.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.740.500,00	0,00	0,00	0,00

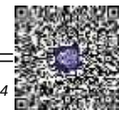

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.815.250,00	0,00	0,00	0,00
		138.867.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.592.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	284.067.000,00	0,00	0,00
		0,00	273.800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	76.167.000,00	0,00	0,00
		0,00	69.400.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	207.900.000,00	0,00	0,00
		0,00	204.400.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.614.500,00	0,00	0,00	0,00
		196.560.804,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.834.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.580.804,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.580.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.740.800,00	0,00	0,00	0,00
		479.238.422,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	503.560.800,00	0,00	0,00	0,00
		462.637.422,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.601.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	1.718.904.431,00	0,00	0,00	0,00
		1.671.769.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.404.177.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.358.781.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.379.968.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.335.496.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12.209.200,00	0,00	0,00	0,00
		11.493.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.791.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	292.606.931,00	0,00	0,00	0,00
		291.004.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18.588.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.473.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	274.018.931,00	0,00	0,00	0,00
		272.531.050,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	22.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.983.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	22.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.983.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	735.410.050,00	0,00	0,00	0,00
		711.589.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	13.905.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	13.905.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	638.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		623.125.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	21.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.815.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	616.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		603.310.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	83.460.050,00	0,00	0,00	0,00
		82.403.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	83.460.050,00	0,00	0,00	0,00
		82.403.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	591.970.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00
		560.504.500,00	62.325.300,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	581.770.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00
		550.454.500,00	62.325.300,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	572.186.000,00	0,00	0,00	0,00
		541.584.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2.584.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.584.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7.000.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00
		6.286.000,00	62.325.300,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**SOSIAL**	5.427.952.765,00	3.307.500,00	0,00	0,00
		5.274.239.060,00	2.550.000,00	0,00	0,00
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.933.409.065,00	3.307.500,00	0,00	0,00
		4.793.266.010,00	2.550.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.253.191.215,00	0,00	0,00	0,00
		4.155.314.241,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.253.191.215,00	0,00	0,00	0,00
		4.155.314.241,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.494.350,00	0,00	0,00	0,00
		351.870.216,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.929.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.929.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.647.700,00	0,00	0,00	0,00
		5.502.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.136.650,00	0,00	0,00	0,00
		307.609.916,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.492.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.214.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.675.000,00	0,00	0,00	0,00

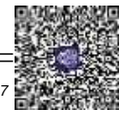

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.448.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.059.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	3.307.500,00	0,00	0,00
		0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.307.500,00	0,00	0,00
		0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.502.055,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.202.055,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.723.500,00	0,00	0,00	0,00
		221.579.498,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.408.500,00	0,00	0,00	0,00
		190.024.498,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.315.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.459.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.459.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33.984.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.297.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.754.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.407.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	90.374.200,00	0,00	0,00	0,00
		79.235.650,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	57.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.391.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	8.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.143.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.215.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	32.484.200,00	0,00	0,00	0,00
		21.843.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	8.074.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.843.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	270.016.500,00	0,00	0,00	0,00
		269.610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	270.016.500,00	0,00	0,00	0,00
		269.610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	270.016.500,00	0,00	0,00	0,00
		269.610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	31.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.668.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	31.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.668.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	31.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.668.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	139.282.124.822,00	37.351.535.150,00	0,00	0,00
		133.533.956.223,50	24.057.492.840,67	0,00	0,00
2.07	**TENAGA KERJA**	137.975.500,00	0,00	0,00	0,00
		136.086.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	45.243.750,00	0,00	0,00	0,00
		44.395.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.685.500,00	0,00	0,00	0,00

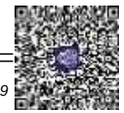

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.685.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.243.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.709.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.243.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.709.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	50.051.750,00	0,00	0,00	0,00
		49.753.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.051.750,00	0,00	0,00	0,00
		49.753.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	50.051.750,00	0,00	0,00	0,00
		49.753.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	42.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.938.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.938.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	42.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.938.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	664.934.000,00	0,00	0,00	0,00
		426.669.540,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	146.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.166.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	76.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.166.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	76.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.166.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	114.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.805.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	114.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.805.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.805.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	62.254.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.781.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	62.254.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.781.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.594.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.783.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.998.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	341.401.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.917.240,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.470.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	151.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.470.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.317.240,00	0,00	0,00	0,00

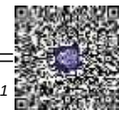

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.317.240,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**PANGAN**	370.372.500,00	0,00	0,00	0,00
		367.969.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	299.662.500,00	0,00	0,00	0,00
		298.455.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100.662.500,00	0,00	0,00	0,00
		99.853.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	27.987.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.678.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	72.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.174.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.602.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.602.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	35.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	35.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	35.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	35.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.215.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.215.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.215.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	32.836.229.650,00	2.877.429.000,00	0,00	0,00
		32.402.318.445,50	2.843.713.519,89	0,00	0,00
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	25.865.952.800,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		25.665.031.280,00	22.900.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.046.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.234.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		812.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.051.922.600,00	0,00	0,00	0,00
		24.955.596.137,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.051.197.600,00	0,00	0,00	0,00
		24.955.036.137,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	725.000,00	0,00	0,00	0,00
		560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.211.200,00	0,00	0,00	0,00
		314.127.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.115.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.975.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.398.800,00	0,00	0,00	0,00
		20.002.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	304.932.400,00	0,00	0,00	0,00
		262.394.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.665.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.056.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	22.900.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	22.900.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.690.263,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.090.263,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.469.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.570.380,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.379.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.940.380,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.630.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	168.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.206.742,50	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	168.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.206.742,50	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	168.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.206.742,50	0,00	0,00	0,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	159.314.800,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
		157.186.700,00	1.379.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	16.360.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
		14.979.700,00	1.379.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16.360.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
		14.979.700,00	1.379.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	142.954.800,00	0,00	0,00	0,00
		142.207.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	142.954.800,00	0,00	0,00	0,00
		142.207.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	1.238.747.850,00	1.219.735.000,00	0,00	0,00
		1.159.354.161,00	1.208.613.519,89	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.238.747.850,00	1.219.735.000,00	0,00	0,00
		1.159.354.161,00	1.208.613.519,89	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.238.747.850,00	1.219.735.000,00	0,00	0,00
		1.159.354.161,00	1.208.613.519,89	0,00	0,00
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	22.287.750,00	0,00	0,00	0,00
		22.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	22.287.750,00	0,00	0,00	0,00
		22.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	22.287.750,00	0,00	0,00	0,00
		22.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	81.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.130.000,00	0,00	0,00	0,00

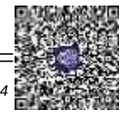

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	46.665.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.640.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.665.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.640.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46.665.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.640.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	21.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	21.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	21.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	5.231.846.450,00	234.694.000,00	0,00	0,00
		5.082.955.262,00	233.200.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.231.846.450,00	234.694.000,00	0,00	0,00
		5.082.955.262,00	233.200.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.154.719.050,00	0,00	0,00	0,00
		5.039.109.984,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.127.400,00	234.694.000,00	0,00	0,00
		43.845.278,00	233.200.000,00	0,00	0,00
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	6.032.885.589,00	84.530.000,00	0,00	0,00
		5.759.476.607,00	77.410.000,00	0,00	0,00
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.029.323.850,00	84.530.000,00	0,00	0,00
		4.793.639.167,00	77.410.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.705.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.705.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.462.190.150,00	0,00	0,00	0,00
		4.302.075.989,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.462.190.150,00	0,00	0,00	0,00
		4.302.075.989,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.405.900,00	0,00	0,00	0,00
		115.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.895.900,00	0,00	0,00	0,00
		103.886.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.652.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	74.530.000,00	0,00	0,00
		0,00	67.460.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	74.530.000,00	0,00	0,00
		0,00	67.460.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.616.000,00	0,00	0,00	0,00
		282.811.278,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.845.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.411.278,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.271.000,00	0,00	0,00	0,00
		267.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.821.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		87.878.100,00	9.950.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.161.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.329.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.660.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		27.548.800,00	9.950.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	569.761.450,00	0,00	0,00	0,00
		537.271.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.562.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.383.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4.562.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.383.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	299.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.196.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	299.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.196.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	266.033.950,00	0,00	0,00	0,00
		238.691.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	256.033.950,00	0,00	0,00	0,00
		228.811.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	252.890.289,00	0,00	0,00	0,00
		248.488.340,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	153.905.350,00	0,00	0,00	0,00
		149.602.340,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	153.905.350,00	0,00	0,00	0,00
		149.602.340,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	98.984.939,00	0,00	0,00	0,00
		98.886.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	98.984.939,00	0,00	0,00	0,00
		98.886.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	155.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.328.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	20.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.779.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.839.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.305.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.305.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.243.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.243.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	7.841.427.354,00	43.836.000,00	0,00	0,00
		7.556.578.247,00	41.400.000,00	0,00	0,00
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.417.169.354,00	43.836.000,00	0,00	0,00
		5.235.736.380,00	41.400.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.681.237.904,00	0,00	0,00	0,00
		4.654.259.945,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.237.904,00	0,00	0,00	0,00
		4.654.259.945,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.530.950,00	0,00	0,00	0,00
		300.721.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.919.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.679.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.579.750,00	0,00	0,00	0,00
		245.753.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.011.200,00	0,00	0,00	0,00
		17.429.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	43.836.000,00	0,00	0,00
		0,00	41.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	43.836.000,00	0,00	0,00
		0,00	41.400.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.621.459,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.520.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.501.459,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.300.500,00	0,00	0,00	0,00
		245.133.476,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.940.500,00	0,00	0,00	0,00
		221.808.476,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.325.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	13.052.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.557.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	13.052.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.557.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	7.217.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.056.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.501.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	347.749.500,00	0,00	0,00	0,00
		329.549.567,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	347.749.500,00	0,00	0,00	0,00
		329.549.567,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	95.812.500,00	0,00	0,00	0,00
		93.155.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	38.927.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	132.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.208.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	39.484.500,00	0,00	0,00	0,00
		37.109.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	28.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.785.567,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12.525.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.951.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	2.063.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.978.735.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.063.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.978.735.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	953.506.000,00	0,00	0,00	0,00
		939.853.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35.655.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.229.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	31.485.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.229.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.042.809.500,00	0,00	0,00	0,00
		972.424.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	4.263.837.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00
		3.295.113.510,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	782.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		727.955.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	782.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		727.955.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.775.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	548.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		504.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	91.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	1.831.547.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00
		1.106.718.010,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	506.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		453.271.010,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.291.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.147.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.768.510,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.884.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	196.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	856.597.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00
		324.988.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.897.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	785.197.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00
		266.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.521.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	272.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.659.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	263.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		172.884.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	1.650.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.460.440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.650.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.460.440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.890.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.273.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.208.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**PERHUBUNGAN**	8.219.830.950,00	4.596.684.900,00	0,00	0,00
		7.973.358.129,00	4.452.078.025,78	0,00	0,00
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.214.013.350,00	0,00	0,00	0,00
		5.063.792.479,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.327.611.250,00	0,00	0,00	0,00
		4.225.899.705,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.327.611.250,00	0,00	0,00	0,00
		4.225.899.705,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.181.100,00	0,00	0,00	0,00
		338.441.850,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.923.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.923.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.229.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.317.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.296.600,00	0,00	0,00	0,00
		181.053.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.564.600,00	0,00	0,00	0,00
		34.561.950,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129.947.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.386.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.195.274,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.495.274,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.221.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.255.650,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.761.000,00	0,00	0,00	0,00
		276.840.650,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.415.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	2.944.197.600,00	4.594.184.900,00	0,00	0,00
		2.847.947.350,00	4.449.580.525,78	0,00	0,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	834.290.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
		834.260.000,00	28.527.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	834.290.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
		834.260.000,00	28.527.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.620.706.400,00	4.503.184.900,00	0,00	0,00
		1.570.080.345,00	4.362.553.525,78	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.620.706.400,00	4.503.184.900,00	0,00	0,00
		1.570.080.345,00	4.362.553.525,78	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	108.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.330.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.330.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	268.880.200,00	62.000.000,00	0,00	0,00
		244.951.805,00	58.500.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	268.880.200,00	62.000.000,00	0,00	0,00
		244.951.805,00	58.500.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	52.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.194.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	52.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.194.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.135.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.135.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	61.620.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		61.618.300,00	2.497.500,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	61.620.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		61.618.300,00	2.497.500,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	61.620.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		61.618.300,00	2.497.500,00	0,00	0,00
2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	8.319.918.374,00	130.564.700,00	0,00	0,00
		8.141.120.721,00	129.990.000,00	0,00	0,00
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.173.129.074,00	0,00	0,00	0,00
		4.086.082.380,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.933.959.074,00	0,00	0,00	0,00
		3.859.227.526,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.933.959.074,00	0,00	0,00	0,00
		3.859.227.526,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.035.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.853.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.083.700,00	0,00	0,00	0,00
		998.700,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.447.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.146.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.127.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.048.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.920.924,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.518.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.422.924,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.955.130,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.087.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.760.130,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.195.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	1.148.131.300,00	82.840.000,00	0,00	0,00
		1.065.167.161,00	82.290.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.148.131.300,00	82.840.000,00	0,00	0,00
		1.065.167.161,00	82.290.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.083.717.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00
		1.014.206.661,00	77.450.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	34.221.800,00	4.840.000,00	0,00	0,00
		26.460.500,00	4.840.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	30.192.500,00	0,00	0,00	0,00
		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	2.998.658.000,00	47.724.700,00	0,00	0,00
		2.989.871.180,00	47.700.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.915.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.909.768.180,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.915.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.909.768.180,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.083.488.000,00	47.724.700,00	0,00	0,00
		1.080.103.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000,00	47.724.700,00	0,00	0,00
		198.000.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	679.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		678.155.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.228.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.228.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	201.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	6.184.415.500,00	8.474.256.000,00	0,00	0,00
		5.981.178.300,00	8.092.941.895,00	0,00	0,00
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.185.972.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.041.566.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.851.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.729.768.136,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.851.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.729.768.136,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.263.650,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.043.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.030.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.965.200,00	0,00	0,00	0,00
		136.402.850,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.144.700,00	0,00	0,00	0,00
		13.009.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.446.500,00	0,00	0,00	0,00
		79.531.267,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.346.500,00	0,00	0,00	0,00
		50.431.267,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.664.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.003.847,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.034.500,00	0,00	0,00	0,00
		62.448.847,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.555.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.239.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.239.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.239.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	149.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.354.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.354.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.354.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	292.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.057.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	292.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.057.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.097.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	420.403.500,00	8.474.256.000,00	0,00	0,00
		366.960.500,00	8.092.941.895,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	420.403.500,00	8.474.256.000,00	0,00	0,00
		366.960.500,00	8.092.941.895,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	420.403.500,00	8.474.256.000,00	0,00	0,00
		366.960.500,00	8.092.941.895,00	0,00	0,00

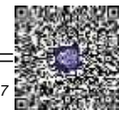

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18	**PENANAMAN MODAL**	6.694.202.555,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
		6.394.911.371,00	389.133.550,00	0,00	0,00
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.930.156.755,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
		5.791.381.371,00	389.133.550,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.520.849.555,00	0,00	0,00	0,00
		5.424.364.096,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.520.849.555,00	0,00	0,00	0,00
		5.424.364.096,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.207.200,00	0,00	0,00	0,00
		65.458.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	839.800,00	0,00	0,00	0,00
		545.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.944.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.398.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.353.200,00	0,00	0,00	0,00
		56.166.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.612.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.076.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	682.500,00	0,00	0,00	0,00
		660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.135.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
		109.960.000,00	389.133.550,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.135.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
		109.960.000,00	389.133.550,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.922.500,00	0,00	0,00	0,00
		127.828.971,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.542.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.448.971,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.042.500,00	0,00	0,00	0,00
		63.769.704,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.482.500,00	0,00	0,00	0,00
		55.319.704,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	69.825.900,00	0,00	0,00	0,00
		68.438.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.235.900,00	0,00	0,00	0,00
		13.103.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.953.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.735.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.150.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	55.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.335.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	55.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.335.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	46.869.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.698.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.869.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.698.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	925.000,00	0,00	0,00	0,00
		842.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	45.944.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.856.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	202.690.900,00	0,00	0,00	0,00
		196.007.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	202.690.900,00	0,00	0,00	0,00
		196.007.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	95.430.100,00	0,00	0,00	0,00
		89.165.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	58.700.300,00	0,00	0,00	0,00
		58.527.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	48.560.500,00	0,00	0,00	0,00
		48.314.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	440.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		288.641.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	440.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		288.641.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	226.260.650,00	0,00	0,00	0,00
		170.468.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	214.649.350,00	0,00	0,00	0,00
		118.173.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	6.223.192.500,00	11.013.000.000,00	0,00	0,00
		6.120.512.448,00	7.975.095.850,00	0,00	0,00
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.694.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.694.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.694.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	5.944.192.500,00	11.013.000.000,00	0,00	0,00
		5.843.817.848,00	7.975.095.850,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	305.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		305.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	305.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		305.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		941.103.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	953.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		941.103.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.478.636.748,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.478.636.748,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	185.392.500,00	11.013.000.000,00	0,00	0,00
		118.678.100,00	7.975.095.850,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	131.000.000,00	10.815.000.000,00	0,00	0,00
		106.938.900,00	7.778.752.574,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	54.392.500,00	198.000.000,00	0,00	0,00
		11.739.200,00	196.343.276,00	0,00	0,00
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**STATISTIK**	33.043.250,00	0,00	0,00	0,00
		22.248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	33.043.250,00	0,00	0,00	0,00
		22.248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.043.250,00	0,00	0,00	0,00
		22.248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	33.043.250,00	0,00	0,00	0,00
		22.248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.21	**PERSANDIAN**	170.682.950,00	24.869.550,00	0,00	0,00
		160.310.105,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	170.682.950,00	24.869.550,00	0,00	0,00
		160.310.105,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	155.782.500,00	0,00	0,00	0,00
		145.409.705,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.292.500,00	0,00	0,00	0,00
		36.081.200,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.328.505,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.900.450,00	24.869.550,00	0,00	0,00
		14.900.400,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.900.450,00	24.869.550,00	0,00	0,00
		14.900.400,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.22	**KEBUDAYAAN**	51.168.380.000,00	65.965.000,00	0,00	0,00
		48.675.981.600,00	31.730.000,00	0,00	0,00
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	45.077.580.000,00	65.965.000,00	0,00	0,00
		42.790.237.100,00	31.730.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	461.600.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
		447.021.100,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	461.600.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
		447.021.100,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.615.980.000,00	52.465.000,00	0,00	0,00
		42.343.216.000,00	31.730.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	44.615.980.000,00	52.465.000,00	0,00	0,00
		42.343.216.000,00	31.730.000,00	0,00	0,00
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	5.990.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.990.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5.990.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.294.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.294.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.294.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23	**PERPUSTAKAAN**	114.924.250,00	0,00	0,00	0,00
		114.666.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	111.046.750,00	0,00	0,00	0,00
		110.919.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.046.750,00	0,00	0,00	0,00
		110.919.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	3.554.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.454.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	106.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.953.200,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	512.000,00	0,00	0,00	0,00
		511.900,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	3.877.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.747.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	3.877.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.747.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3.877.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.747.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24	**KEARSIPAN**	5.872.900,00	0,00	0,00	0,00
		5.456.700,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.224.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.224.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.984.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.834.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	2.383.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.232.200,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	2.383.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.232.200,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	2.383.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.232.200,00	0,00	0,00	0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	64.555.270.678,00	98.781.642.400,00	0,00	0,00
		58.905.998.684,00	87.125.604.995,59	0,00	0,00
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	1.422.266.800,00	103.882.200,00	0,00	0,00
		1.344.527.894,00	102.425.900,00	0,00	0,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	1.071.535.800,00	103.882.200,00	0,00	0,00
		1.028.476.194,00	102.425.900,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.071.535.800,00	103.882.200,00	0,00	0,00
		1.028.476.194,00	102.425.900,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.514.800,00	30.985.200,00	0,00	0,00
		88.885.444,00	30.880.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.224.000,00	11.897.000,00	0,00	0,00
		92.281.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	880.797.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00
		847.309.750,00	60.245.900,00	0,00	0,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	350.731.000,00	0,00	0,00	0,00
		316.051.700,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.577.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.577.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	330.731.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.474.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	330.731.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.474.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26	**PARIWISATA**	25.171.383.517,00	14.380.690.200,00	0,00	0,00
		22.227.908.422,00	7.093.016.543,59	0,00	0,00
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.348.524.817,00	65.655.200,00	0,00	0,00
		5.758.703.522,00	57.285.600,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.988.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.834.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.362.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.472.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.406.939.517,00	0,00	0,00	0,00
		4.939.584.942,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.405.944.517,00	0,00	0,00	0,00
		4.938.714.942,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	995.000,00	0,00	0,00	0,00
		870.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.012.800,00	0,00	0,00	0,00
		445.991.540,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.790.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.781.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.683.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	383.018.100,00	0,00	0,00	0,00
		340.791.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.038.440,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.328.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	54.000.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	54.000.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.613.500,00	5.655.200,00	0,00	0,00
		267.044.528,00	3.285.600,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.970.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.843.500,00	5.655.200,00	0,00	0,00
		169.374.528,00	3.285.600,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.971.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.247.712,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.427.712,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.820.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	17.575.845.700,00	14.265.035.000,00	0,00	0,00
		15.639.715.400,00	6.985.913.200,09	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.678.483.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.293.200.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.678.483.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.293.200.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	897.362.500,00	14.265.035.000,00	0,00	0,00
		346.515.000,00	6.985.913.200,09	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	897.362.500,00	14.265.035.000,00	0,00	0,00
		346.515.000,00	6.985.913.200,09	0,00	0,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	194.093.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		188.429.500,00	49.817.743,50	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	194.093.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		188.429.500,00	49.817.743,50	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	88.073.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		84.400.000,00	49.817.743,50	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	106.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.029.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	1.052.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		641.060.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.052.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		641.060.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.052.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		641.060.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27	**PERTANIAN**	26.950.101.311,00	30.600.000,00	0,00	0,00
		26.647.998.427,00	30.505.000,00	0,00	0,00
3.27.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.328.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.328.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.328.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	25.478.133.657,00	30.600.000,00	0,00	0,00
		25.276.453.617,00	30.505.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.268.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.268.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.655.883.657,00	0,00	0,00	0,00
		24.466.220.572,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.655.883.657,00	0,00	0,00	0,00
		24.466.220.572,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.564.500,00	30.600.000,00	0,00	0,00
		345.188.900,00	30.505.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.434.600,00	30.600.000,00	0,00	0,00
		29.403.000,00	30.505.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	289.044.900,00	0,00	0,00	0,00
		284.082.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.289.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.043.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.300.445,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.500.445,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.095.500,00	0,00	0,00	0,00
		300.475.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.075.500,00	0,00	0,00	0,00
		243.455.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.020.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	588.296.654,00	0,00	0,00	0,00
		541.029.010,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	261.166.654,00	0,00	0,00	0,00
		216.986.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	208.996.654,00	0,00	0,00	0,00
		168.806.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	52.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.180.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	327.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.042.110,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	327.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.042.110,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	539.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		486.533.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	238.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		238.683.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	238.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		238.683.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		247.849.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		247.849.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	45.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.218.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	45.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.218.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	45.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.218.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	273.441.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.435.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	273.441.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.435.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.865.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	75.606.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.461.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	140.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.109.100,00	0,00	0,00	0,00
3.30	**PERDAGANGAN**	1.513.511.250,00	74.819.000.000,00	0,00	0,00
		1.417.265.900,00	70.815.884.950,00	0,00	0,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	1.400.560.000,00	74.759.000.000,00	0,00	0,00
		1.307.370.200,00	70.757.592.950,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	613.260.000,00	74.759.000.000,00	0,00	0,00
		524.171.900,00	70.757.592.950,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	613.260.000,00	74.759.000.000,00	0,00	0,00
		524.171.900,00	70.757.592.950,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	787.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		783.198.300,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	787.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		783.198.300,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	13.414.250,00	0,00	0,00	0,00
		13.096.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	13.414.250,00	0,00	0,00	0,00
		13.096.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13.414.250,00	0,00	0,00	0,00
		13.096.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	99.537.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		96.799.200,00	58.292.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	99.537.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		96.799.200,00	58.292.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	99.537.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		96.799.200,00	58.292.000,00	0,00	0,00
3.31	**PERINDUSTRIAN**	9.318.232.800,00	9.447.470.000,00	0,00	0,00
		7.097.893.291,00	9.083.772.602,00	0,00	0,00
3.31.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.433.895.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.225.016.491,00	0,00	0,00	0,00

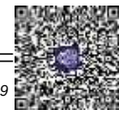

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.369.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.268.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.369.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.268.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.854.025,00	0,00	0,00	0,00
		4.473.769.095,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.548.641.050,00	0,00	0,00	0,00
		4.437.762.095,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.212.975,00	0,00	0,00	0,00
		36.007.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.483.775,00	0,00	0,00	0,00
		289.967.700,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.104.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.630.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.059.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.670.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.677.775,00	0,00	0,00	0,00
		29.467.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.675.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.108.500,00	0,00	0,00	0,00
		370.707.973,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.377.500,00	0,00	0,00	0,00
		228.307.973,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.731.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.303.223,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.248.223,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.055.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	3.884.337.000,00	9.447.470.000,00	0,00	0,00
		1.872.876.800,00	9.083.772.602,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.884.337.000,00	9.447.470.000,00	0,00	0,00
		1.872.876.800,00	9.083.772.602,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.508.491.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	317.977.000,00	9.447.470.000,00	0,00	0,00
		298.045.000,00	9.083.772.602,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	66.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**TRANSMIGRASI**	179.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.404.750,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	179.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.404.750,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.404.750,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	179.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.404.750,00	0,00	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	120.495.847.924,00	8.312.868.280,00	0,00	0,00
		116.265.384.734,00	7.533.919.772,00	0,00	0,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	76.470.009.158,00	7.851.389.280,00	0,00	0,00
		73.654.295.160,00	7.077.372.292,00	0,00	0,00
4.01.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	47.256.035.258,00	7.383.685.280,00	0,00	0,00
		45.876.812.660,00	6.646.305.892,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		274.080.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	274.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		274.080.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.804.307.598,00	0,00	0,00	0,00
		22.280.548.068,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.804.307.598,00	0,00	0,00	0,00
		22.280.548.068,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.748.583.170,00	298.685.280,00	0,00	0,00
		12.449.888.478,00	191.755.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.857.300,00	0,00	0,00	0,00
		9.617.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.971.970,00	297.165.500,00	0,00	0,00
		14.059.500,00	190.280.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.332.886.050,00	1.519.780,00	0,00	0,00
		1.185.548.600,00	1.475.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.867.850,00	0,00	0,00	0,00
		98.820.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.072.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.034.647.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.208.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.107.194.378,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.335.734.182,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.141.000.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	194.734.182,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.706.534.640,00	0,00	0,00	0,00
		2.416.171.487,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	812.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		733.642.487,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	580.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		547.484.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.275.164.640,00	0,00	0,00	0,00
		1.095.725.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.997.498.500,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00
		1.890.877.007,00	4.066.461.710,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429.885.000,00	0,00	0,00	0,00
		402.088.144,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	732.303.500,00	0,00	0,00	0,00
		692.690.613,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.454.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	802.720.000,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00
		766.644.250,00	4.066.461.710,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	851.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		801.407.780,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		776.607.780,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.677.839.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		960.970.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		716.869.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	332.787.450,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		275.479.040,00	5.550.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	71.637.600,00	0,00	0,00	0,00
		61.548.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.474.100,00	0,00	0,00	0,00
		54.687.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	192.675.750,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		159.243.140,00	5.550.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.840.763.900,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		3.810.521.800,00	46.805.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.087.060.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.081.636.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	418.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		411.130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.335.393.300,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		1.317.755.100,00	46.805.000,00	0,00	0,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	28.173.123.550,00	177.290.000,00	0,00	0,00
		26.825.314.100,00	168.096.400,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.066.120.800,00	50.455.000,00	0,00	0,00
		896.582.550,00	49.077.400,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.009.744.000,00	50.455.000,00	0,00	0,00
		845.935.750,00	49.077.400,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	56.376.800,00	0,00	0,00	0,00
		50.646.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.866.734.600,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		24.716.830.550,00	93.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25.810.491.100,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		24.663.422.800,00	93.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	31.745.500,00	0,00	0,00	0,00
		30.659.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	24.498.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.748.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.221.756.000,00	26.835.000,00	0,00	0,00
		1.193.901.000,00	26.019.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	268.615.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.440.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	770.421.000,00	0,00	0,00	0,00
		753.141.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	182.720.000,00	26.835.000,00	0,00	0,00
		179.320.000,00	26.019.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	18.512.150,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.512.150,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1.040.850.350,00	290.414.000,00	0,00	0,00
		952.168.400,00	262.970.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	369.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		360.988.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	303.867.500,00	0,00	0,00	0,00
		302.943.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	55.852.500,00	0,00	0,00	0,00
		48.345.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	355.894.850,00	60.297.000,00	0,00	0,00
		303.921.300,00	59.300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.819.900,00	0,00	0,00	0,00
		44.474.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	224.009.950,00	0,00	0,00	0,00
		177.837.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	87.065.000,00	60.297.000,00	0,00	0,00
		81.610.000,00	59.300.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	307.188.000,00	230.117.000,00	0,00	0,00
		279.529.500,00	203.670.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	109.960.000,00	206.745.000,00	0,00	0,00
		97.064.000,00	188.370.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	46.250.000,00	23.372.000,00	0,00	0,00
		46.183.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.978.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.282.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	7.947.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.729.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	7.947.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.729.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	44.025.838.766,00	461.479.000,00	0,00	0,00
		42.611.089.574,00	456.547.480,00	0,00	0,00
4.02.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	38.242.637.118,00	461.479.000,00	0,00	0,00
		37.428.716.243,00	456.547.480,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.826.481.568,00	0,00	0,00	0,00
		3.795.730.726,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.826.481.568,00	0,00	0,00	0,00
		3.795.730.726,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		187.710.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	207.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		187.710.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		941.715.354,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.689.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.949.150,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.235.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.489.454,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		480.584.250,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	131.376.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.692.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	61.479.000,00	0,00	0,00
		0,00	60.879.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	61.479.000,00	0,00	0,00
		0,00	60.879.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.735.519.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.558.794.728,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.799.500,00	0,00	0,00	0,00
		115.474.728,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.443.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.418.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.022.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
		115.089.972,00	395.668.480,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.454.972,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.635.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	395.668.480,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.137.418.050,00	0,00	0,00	0,00
		19.853.887.206,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.137.418.050,00	0,00	0,00	0,00
		19.853.887.206,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	11.073.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.975.788.257,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	21.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.052.561.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.975.788.257,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	5.783.201.648,00	0,00	0,00	0,00
		5.182.373.331,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	111.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	111.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.394.031.648,00	0,00	0,00	0,00
		4.170.718.331,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.198.494.148,00	0,00	0,00	0,00
		3.180.913.331,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.175.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		979.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20.037.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.278.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		910.275.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.278.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		910.275.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	30.142.348.010,00	298.819.500,00	2.102.258.760,00	166.497.150.100,00
		28.262.334.480,12	225.913.000,00	0,00	165.985.107.010,00
5.01	**PERENCANAAN**	6.201.908.433,00	84.993.000,00	0,00	0,00
		6.052.308.888,12	23.350.000,00	0,00	0,00
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.884.114.433,00	84.993.000,00	0,00	0,00
		4.774.119.086,00	23.350.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.372.592.283,00	0,00	0,00	0,00
		4.320.327.548,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.351.392.283,00	0,00	0,00	0,00
		4.299.327.548,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00

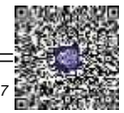

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.245.150,00	0,00	0,00	0,00
		220.456.225,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.170.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.142.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	705.000,00	0,00	0,00	0,00
		582.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.008.550,00	0,00	0,00	0,00
		86.250.425,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.261.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.850.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.530.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	84.993.000,00	0,00	0,00
		0,00	23.350.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	84.993.000,00	0,00	0,00
		0,00	23.350.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.255.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.959.766,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.939.766,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.557.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.215.547,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.457.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.405.547,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.810.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	1.086.784.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.056.973.167,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	872.797.000,00	0,00	0,00	0,00
		856.292.967,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	406.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		405.062.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.427.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	13.772.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.290.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	441.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.512.467,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	123.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.954.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	97.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.310.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.644.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.726.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	45.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.756.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.970.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	231.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.216.635,12	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	181.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.866.635,12	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	154.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.961.135,12	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.905.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.175.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.175.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	40.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.174.500,00	0,00	0,00	0,00

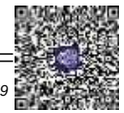

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.563.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.315.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.296.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	**KEUANGAN**	16.882.866.001,00	24.200.000,00	2.102.258.760,00	166.497.150.100,00
		15.595.347.229,00	22.800.000,00	0,00	165.985.107.010,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	12.117.456.351,00	24.200.000,00	0,00	0,00
		11.604.895.654,00	22.800.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.554.136.701,00	0,00	0,00	0,00
		10.196.981.012,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.554.136.701,00	0,00	0,00	0,00
		10.196.981.012,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	982.258.150,00	0,00	0,00	0,00
		909.633.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.211.400,00	0,00	0,00	0,00
		21.643.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.953.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	874.408.700,00	0,00	0,00	0,00
		811.959.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.850.050,00	0,00	0,00	0,00
		51.447.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.830.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	22.800.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.800.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.960.500,00	0,00	0,00	0,00
		246.057.897,00	0,00	0,00	0,00

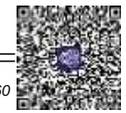

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.465.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.989.500,00	0,00	0,00	0,00
		64.672.897,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.101.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.101.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.223.245,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.731.000,00	0,00	0,00	0,00
		208.718.245,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.505.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	2.063.029.450,00	0,00	2.102.258.760,00	166.497.150.100,00
		1.720.539.475,00	0,00	0,00	165.985.107.010,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.122.883.600,00	0,00	0,00	0,00
		933.589.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	262.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		225.774.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	70.358.600,00	0,00	0,00	0,00
		63.318.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	148.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.882.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	641.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		526.614.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	320.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.885.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	320.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.885.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	291.365.850,00	0,00	0,00	0,00
		257.569.175,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	39.655.850,00	0,00	0,00	0,00
		17.180.300,00	0,00	0,00	0,00

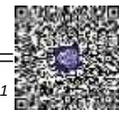

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	251.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.388.875,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	2.102.258.760,00	166.497.150.100,00
		0,00	0,00	0,00	165.985.107.010,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	154.479.748.000,00
		0,00	0,00	0,00	153.967.704.910,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	2.102.258.760,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	12.017.402.100,00
		0,00	0,00	0,00	12.017.402.100,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	327.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.496.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	327.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.496.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	881.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		630.326.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	881.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		630.326.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	168.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.537.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.830.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	216.204.500,00	0,00	0,00	0,00
		169.039.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	131.839.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	256.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.552.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.147.500,00	0,00	0,00	0,00
		61.098.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	1.821.019.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.639.585.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.821.019.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.639.585.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	237.216.500,00	0,00	0,00	0,00
		119.662.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	504.541.700,00	0,00	0,00	0,00
		492.622.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.079.261.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.027.301.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03	**KEPEGAWAIAN**	5.810.841.660,00	157.295.000,00	0,00	0,00
		5.673.399.703,00	148.413.000,00	0,00	0,00
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.347.941.410,00	157.295.000,00	0,00	0,00
		5.282.061.103,00	148.413.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.864.767.360,00	0,00	0,00	0,00
		4.833.809.768,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.864.767.360,00	0,00	0,00	0,00
		4.833.809.768,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.124.050,00	0,00	0,00	0,00
		28.880.730,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.124.050,00	0,00	0,00	0,00
		28.880.730,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.599.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.012.300,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	698.400,00	0,00	0,00	0,00
		687.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00
		871.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.442.100,00	0,00	0,00	0,00
		53.021.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.979.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.681.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.410.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	57.295.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.218.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	57.295.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.218.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.540.605,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.960.605,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.180.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.411.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		68.817.700,00	99.195.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.491.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.967.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.195.000,00	0,00	0,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	462.900.250,00	0,00	0,00	0,00
		391.338.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	122.964.950,00	0,00	0,00	0,00
		115.590.720,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	56.118.750,00	0,00	0,00	0,00
		52.371.750,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	10.372.100,00	0,00	0,00	0,00
		8.319.860,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	24.384.500,00	0,00	0,00	0,00
		24.371.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.999.900,00	0,00	0,00	0,00
		22.771.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.069.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.975.180,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4.019.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.781.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	88.464.050,00	0,00	0,00	0,00
		72.029.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	29.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.925.850,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	38.501.550,00	0,00	0,00	0,00
		35.073.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	20.152.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.030.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	229.421.450,00	0,00	0,00	0,00
		187.325.850,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	95.004.100,00	0,00	0,00	0,00
		87.802.850,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	24.107.350,00	0,00	0,00	0,00
		14.483.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	110.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.040.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.049.800,00	0,00	0,00	0,00
		16.392.680,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.771.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	20.049.900,00	0,00	0,00	0,00
		14.621.340,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	627.320.200,00	0,00	0,00	0,00
		407.007.500,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	627.320.200,00	0,00	0,00	0,00
		407.007.500,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	627.320.200,00	0,00	0,00	0,00
		407.007.500,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	627.320.200,00	0,00	0,00	0,00
		407.007.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	619.411.716,00	32.331.500,00	0,00	0,00
		534.271.160,00	31.350.000,00	0,00	0,00
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	221.765.716,00	32.331.500,00	0,00	0,00
		177.137.360,00	31.350.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.742.100,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.742.100,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.509.116,00	0,00	0,00	0,00
		48.842.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.444.116,00	0,00	0,00	0,00
		45.362.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.065.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.480.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.101.600,00	9.836.500,00	0,00	0,00
		50.516.600,00	9.400.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.290.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.289.400,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.018.000,00	9.836.500,00	0,00	0,00
		1.015.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.792.700,00	0,00	0,00	0,00
		38.612.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	22.495.000,00	0,00	0,00
		0,00	21.950.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	22.495.000,00	0,00	0,00
		0,00	21.950.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.321.860,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.321.860,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.714.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.249.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.465.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	397.646.000,00	0,00	0,00	0,00
		357.133.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	368.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		338.267.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	368.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		338.267.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29.454.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.866.000,00	0,00	0,00	0,00

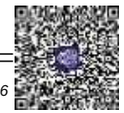

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	29.454.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.866.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	9.214.114.900,00	297.610.000,00	0,00	0,00
		9.026.024.456,00	283.382.000,00	0,00	0,00
6.01	**INSPEKTORAT**	9.214.114.900,00	297.610.000,00	0,00	0,00
		9.026.024.456,00	283.382.000,00	0,00	0,00
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	8.282.734.900,00	297.610.000,00	0,00	0,00
		8.214.526.456,00	283.382.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.311.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.289.733.768,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.311.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.289.733.768,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.989.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	223.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.989.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.075.800,00	0,00	0,00	0,00
		411.617.150,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	381.057.300,00	0,00	0,00	0,00
		365.211.650,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.562.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.785.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.836.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	297.610.000,00	0,00	0,00
		0,00	283.382.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	35.320.000,00	0,00	0,00
		0,00	31.000.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	262.290.000,00	0,00	0,00
		0,00	252.382.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.366.100,00	0,00	0,00	0,00
		99.338.214,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.700.214,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.116.100,00	0,00	0,00	0,00
		76.638.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.566.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.848.324,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.898.324,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	400.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		299.668.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	392.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.718.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	332.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		275.150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	11.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.648.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	530.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		511.830.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	530.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		511.830.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

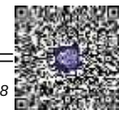

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	497.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		478.830.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	21.786.072.798,00	424.876.700,00	0,00	0,00
		21.379.896.110,00	415.180.510,00	0,00	0,00
7.01	**KECAMATAN**	21.786.072.798,00	424.876.700,00	0,00	0,00
		21.379.896.110,00	415.180.510,00	0,00	0,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	19.665.729.248,00	424.876.700,00	0,00	0,00
		19.319.504.210,00	415.180.510,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.837.400,00	0,00	0,00	0,00
		42.745.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	745.400,00	0,00	0,00	0,00
		744.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.092.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.001.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.070.078.398,00	0,00	0,00	0,00
		15.808.140.957,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.070.078.398,00	0,00	0,00	0,00
		15.808.140.957,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.507.694.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.462.258.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.592.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.077.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.436.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.373.673.950,00	0,00	0,00	0,00
		1.334.357.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.564.650,00	0,00	0,00	0,00
		27.068.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.660.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.082.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.144.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.876.700,00	0,00	0,00
		0,00	62.200.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	6.177.200,00	0,00	0,00
		0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	63.699.500,00	0,00	0,00
		0,00	56.300.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.821.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.627.619.696,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.130.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.535.500,00	0,00	0,00	0,00
		75.325.696,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.537.156.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.164.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.297.850,00	355.000.000,00	0,00	0,00
		373.739.107,00	352.980.510,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.797.850,00	0,00	0,00	0,00
		336.924.107,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.850.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		33.270.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	348.050.510,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.545.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	189.524.550,00	0,00	0,00	0,00
		185.058.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	145.374.550,00	0,00	0,00	0,00
		140.933.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.781.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.725.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.030.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.563.550,00	0,00	0,00	0,00
		95.178.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.124.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.124.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1.455.029.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.410.613.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	693.364.300,00	0,00	0,00	0,00
		671.460.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.595.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	683.234.300,00	0,00	0,00	0,00
		661.865.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	761.665.500,00	0,00	0,00	0,00
		739.152.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.704.500,00	0,00	0,00	0,00
		25.427.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	625.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		607.780.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.010.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	97.451.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.935.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	202.260.500,00	0,00	0,00	0,00
		198.407.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	202.260.500,00	0,00	0,00	0,00
		198.407.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	202.260.500,00	0,00	0,00	0,00
		198.407.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	205.262.150,00	0,00	0,00	0,00
		199.158.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	205.262.150,00	0,00	0,00	0,00
		199.158.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	205.262.150,00	0,00	0,00	0,00
		199.158.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	68.266.550,00	0,00	0,00	0,00
		67.154.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.266.550,00	0,00	0,00	0,00
		67.154.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63.856.550,00	0,00	0,00	0,00
		62.861.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.293.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	19.608.300.351,00	0,00	0,00	0,00
		19.469.444.917,00	0,00	0,00	0,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	19.608.300.351,00	0,00	0,00	0,00
		19.469.444.917,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.735.187.363,00	0,00	0,00	0,00
		3.611.101.979,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.534.634.263,00	0,00	0,00	0,00
		3.424.011.095,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.771.613,00	0,00	0,00	0,00
		3.349.317.395,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	74.862.650,00	0,00	0,00	0,00
		74.693.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.084.100,00	0,00	0,00	0,00
		54.178.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.144.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.138.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.069.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.160.100,00	0,00	0,00	0,00
		42.960.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	480.000,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.794.484,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.220.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.574.484,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.249.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.117.900,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.499.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.867.900,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	678.691.100,00	0,00	0,00	0,00
		667.889.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	678.691.100,00	0,00	0,00	0,00
		667.889.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	619.796.100,00	0,00	0,00	0,00
		609.139.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	58.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.750.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	14.916.728.438,00	0,00	0,00	0,00
		14.913.473.438,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	14.916.728.438,00	0,00	0,00	0,00
		14.913.473.438,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14.027.541.200,00	0,00	0,00	0,00
		14.027.541.200,00	0,00	0,00	0,00

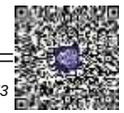

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	772.467.238,00	0,00	0,00	0,00
		772.467.238,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.655.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	107.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.810.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	125.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.175.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	125.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.175.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.175.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	152.378.450,00	0,00	0,00	0,00
		151.804.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	152.378.450,00	0,00	0,00	0,00
		151.804.900,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.061.750,00	0,00	0,00	0,00
		78.806.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	73.316.700,00	0,00	0,00	0,00
		72.998.900,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		951.563.767.487,00	291.056.034.403,00	2.102.258.760,00	166.497.150.100,00
		914.648.663.716,91	211.649.206.855,31	0,00	165.985.107.010,00

Bangli, 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI

Sang Nyoman Sedana Arta,SE

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	40,882,706,881.96	117,208,560,191.51
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	40,883,452,335.71	117,202,607,549.06
Subtotal		(745,453.75)	5,952,642.45
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	13,269,063,462.69	40,882,706,881.96
Subtotal		13,268,318,008.94	40,888,659,524.41
KOREKSI KESALAHAN +/(-) PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	745,453.75	(5,952,642.45)
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	13,269,063,462.69	40,882,706,881.96

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	1,273,375,732,232.22	1,095,624,789,264.36	177,750,942,967.86	16.22
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	224,538,377,625.81	162,362,768,249.39	62,175,609,376.42	38.29
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	52,258,679,314.70	38,308,122,487.60	13,950,556,827.10	36.42
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	57,336,019,486.85	36,421,180,795.00	20,914,838,691.85	57.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	11,541,445,733.08	8,088,493,469.20	3,452,952,263.88	42.69
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	103,402,233,091.18	79,544,971,497.59	23,857,261,593.59	29.99
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	1,037,629,190,840.00	916,646,787,691.00	120,982,403,149.00	13.20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	840,351,874,182.00	759,593,691,037.00	80,758,183,145.00	10.63
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.1	809,467,328,182.00	749,077,902,037.00	60,389,426,145.00	8.06
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.2.1.2	30,884,546,000.00	10,515,789,000.00	20,368,757,000.00	193.70
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	197,277,316,658.00	157,053,096,654.00	40,224,220,004.00	25.61
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2.1	116,348,672,248.00	94,827,825,602.00	21,520,846,646.00	22.69
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2.2	80,928,644,410.00	62,225,271,052.00	18,703,373,358.00	30.06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	11,208,163,766.41	16,615,233,323.97	(5,407,069,557.56)	(32.54)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	11,093,163,766.41	16,615,233,323.97	(5,522,069,557.56)	(33.23)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	115,000,000.00	-	115,000,000.00	100.00
BEBAN DAERAH	5.4.2	1,200,290,336,566.06	1,023,137,809,771.11	177,152,526,794.95	17.31
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	1,094,379,404,556.06	937,591,585,503.11	156,787,819,052.95	16.72
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	559,382,406,026.00	516,014,432,127.00	43,367,973,899.00	8.40
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	313,759,357,924.33	279,439,427,417.05	34,319,930,507.28	12.28
Beban Bunga	5.4.2.1.3	4,504,678,363.00	3,672,260,844.57	832,417,518.43	22.67
Beban Hibah	5.4.2.1.4	76,173,559,922.00	8,067,691,302.07	68,105,868,619.93	844.18
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	193,621,000.00	253,030,998.00	(59,409,998.00)	(23.48)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	1,304,748,088.93	2,532,893,519.88	(1,228,145,430.95)	(48.49)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	139,061,033,231.80	126,736,069,106.70	12,324,964,125.10	9.72
Beban Lain-lain	5.4.2.1.8	-	875,780,187.84	(875,780,187.84)	(100.00)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	105,910,932,010.00	85,546,224,268.00	20,364,707,742.00	23.81
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	12,017,359,100.00	6,711,196,000.00	5,306,163,100.00	79.06
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	93,893,572,910.00	78,835,028,268.00	15,058,544,642.00	19.10
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		73,085,395,666.16	72,486,979,493.25	598,416,172.91	0.83
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3	1,770,595,875.00	66,642,290,115.50	(64,871,694,240.50)	(97.34)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		149,172,500.00	66,642,290,115.50	(66,493,117,615.50)	(99.78)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		1,621,423,375.00	-	1,621,423,375.00	-
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	10,282,372,320.49	65,459,168,059.49	(55,176,795,739.00)	(84.29)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		7,181,719,478.00	64,571,319,049.96	(57,389,599,571.96)	(88.88)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		3,100,652,842.49	887,849,009.53	2,212,803,832.96	249.23
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8,511,776,445.49)	1,183,122,056.01	(9,694,898,501.50)	(819.43)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		64,573,619,220.67	73,670,101,549.26	(9,096,482,328.59)	(12.35)
POS LUAR BIASA		-	(41,000,000.00)	41,000,000.00	(100.00)
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	5.4.5	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa-LO		-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	5.4.6	-	41,000,000.00	(41,000,000.00)	(100.00)
Beban Luar Biasa		-	41,000,000.00	(41,000,000.00)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.4.7	64,573,619,220.67	73,629,101,549.26	(9,055,482,328.59)	(12.30)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
EKUITAS AWAL	5.6.1	1,417,352,886,340.64	1,336,079,836,287.24
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.6.2	64,573,619,220.67	73,629,101,549.26
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(2,594,083,139.40)	7,643,948,504.14
Koreksi Ekuitas - Kas		4,040,999.75	1,596,447,184.83
Koreksi Ekuitas - Piutang		(99,331,712.75)	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		243,274,293.22	58,202,704.18
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka		-	-
Koreksi Ekuitas - Persediaan		0.40	145,411,110.40
Koreksi Ekuitas - Investasi		(300,292,486.13)	21,775,103.84
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		(828,102,925.56)	5,672,464,728.89
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(18,103,333.33)	(56,515,416.00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban		(1,595,567,975.00)	206,163,088.00
Koreksi Ekuitas - Lainnya		-	-
Koreksi Nilai Pendapatan LO		-	-
Lain-Lain		-	-
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1,479,332,422,421.91	1,417,352,886,340.64

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BANGLI

I SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.

LAMPIRAN V

NERACA

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ASET	5.3.1	1,649,391,830,376.66	1,517,960,855,187.34
ASET LANCAR	5.3.1.1	121,448,424,706.93	108,732,696,272.71
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	13,273,104,462.69	42,470,903,814.35
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	5,872,675,115.43	35,085,330,183.85
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	745,647,866.00	398,411,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	54,916,900.00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	2,575,866,509.58	4,621,882,096.23
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	-	722,912,155.88
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.6	246,105,211.68	-
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	3,828,768,760.00	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	4,041,000.00	1,587,451,478.39
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	38,799,756,571.78	38,817,107,320.78
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	349,609,495.67	422,021,095.81
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	5,465,663,912.25	3,625,614,352.71
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	6,854,570,960.88	12,370,489,737.55
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	73,177,294,980.00	17,540,579,457.00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(28,916,300,643.63)	(27,854,226,847.91)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	467,195,008.72	511,080,692.61
Persediaan	5.3.1.1.5	11,977,529,958.57	20,829,126,649.81
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	70,932,505,561.52	68,396,974,646.40
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	227,898,127.47	210,204,167.67
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	70,704,607,434.05	68,186,770,478.73
ASET TETAP	5.3.1.3	1,430,912,409,516.22	1,322,302,236,652.85
Tanah	5.3.1.3.1	193,005,470,022.36	182,690,383,171.00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	463,328,990,303.74	438,946,426,286.18
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	779,467,101,326.13	643,314,788,999.19
Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	1,340,339,617,709.94	1,255,416,002,811.16
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	66,537,336,078.76	75,929,952,477.76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6,918,380,698.20	5,901,638,883.11
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1,418,684,486,622.91)	(1,279,896,955,975.55)
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5	16,514,672,290.99	18,528,947,615.38
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	5,944,307,034.80	8,100,302,938.80
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	11,308,927,600.75	10,582,906,873.25
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	3,187,564,663.77	2,551,916,440.33
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(3,894,722,668.33)	(2,830,494,631.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(2,009,146,340.00)	(2,072,478,977.00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facilty (TDF)	5.3.1.5.6	1,977,742,000.00	2,196,794,971.00

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6	9,583,818,301.00	-
Properti Investasi - Gedung Bangunan	5.3.1.6.1	12,319,343,837.00	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.2	(2,735,525,536.00)	-
JUMLAH ASET		1,649,391,830,376.66	1,517,960,855,187.34
KEWAJIBAN	5.3.2	170,059,407,954.75	100,607,968,846.70
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	110,245,590,357.75	29,828,283,644.70
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	745,454.00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	382,589,121.00	382,589,121.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	11,962,764,660.00	996,897,055.00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	1,135,941,209.78	197,958,598.50
Utang Belanja	5.3.2.1.5	95,103,167,407.54	22,278,573,989.77
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	1,661,127,959.43	5,971,519,426.43
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	59,813,817,597.00	70,779,685,202.00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.1	59,813,817,597.00	70,779,685,202.00
EKUITAS	5.3.3	1,479,332,422,421.91	1,417,352,886,340.64
EKUITAS	5.3.3	1,479,332,422,421.91	1,417,352,886,340.64
Ekuitas	5.3.3.1	1,479,332,422,421.91	1,417,352,886,340.64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,649,391,830,376.66	1,517,960,855,187.34

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**	**183,631,272,982.29**	**159,289,066,718.71**
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.1**	**1,264,265,043,709.20**	**1,105,212,188,569.50**
Pajak Daerah		52,316,682,159.00	36,707,060,479.07
Retribusi Daerah		57,401,453,950.00	36,328,299,166.20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5,887,399,995.08	5,597,430,541.18
Lain-lain PAD yang Sah		103,909,560,249.73	65,144,751,773.05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		900,285,215,914.00	805,596,452,637.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		141,640,601,135.00	155,135,576,263.00
Pendapatan Hibah		2,709,130,306.39	702,617,710.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		115,000,000.00	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.2**	**1,080,633,770,726.91**	**945,923,121,850.79**
Belanja Pegawai		543,502,784,759.00	515,867,247,541.00
Belanja Barang dan Jasa		290,957,733,555.91	273,728,730,016.95
Belanja Bunga		4,504,678,363.00	3,297,009,892.57
Belanja Hibah		75,489,846,039.00	9,234,589,134.27
Belanja Bantuan Sosial		193,621,000.00	253,030,998.00
Belanja Tidak Terduga		-	2,430,457,000.00
Belanja Bagi Hasil		12,017,402,100.00	6,717,100,000.00
Belanja Bantuan Keuangan		153,967,704,910.00	134,394,957,268.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**183,631,272,982.29**	**159,289,066,718.71**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**	**(211,245,661,855.31)**	**(296,701,619,942.81)**
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.1**	**403,545,000.00**	**227,662,899.00**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		403,545,000.00	227,662,899.00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.2**	**211,649,206,855.31**	**296,929,282,841.81**
Belanja Modal Tanah		7,778,752,574.00	14,134,423,669.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		24,351,077,732.00	60,358,662,837.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		133,121,744,861.03	180,104,496,229.81
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi		45,773,863,865.78	37,746,357,806.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		85,109,295.00	1,585,342,300.00
Belanja Modal Aset Lainnya		538,658,527.50	-
Penyertaan Modal Daerah		-	3,000,000,000.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**(211,245,661,855.31)**	**(296,701,619,942.81)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**	**-**	**61,092,652,557.00**
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3.1**	**-**	**61,092,652,557.00**
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	61,092,652,557.00

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	61,092,652,557.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	(745,454.00)	(337,581.00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	84,232,012,370.00	88,185,699,305.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84,232,012,370.00	88,185,699,305.00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	84,232,757,824.00	88,186,036,886.00
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84,232,757,824.00	88,186,036,886.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(745,454.00)	(337,581.00)
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	(27,615,134,327.02)	(76,320,238,248.10)
SALDO AWAL KAS	5.5.6	40,883,452,335.96	117,209,643,226.51
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	5.5.7	745,453.75	(5,952,642.45)
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)	5.5.8	-	1,587,451,478.39
SALDO AKHIR KAS	5.5.9	13,269,063,462.69	42,470,903,814.35

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BANGLI

I GUSTI NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli disusun dengan maksud:

a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 dan PP Nomor 12 Tahun 2019;
b. Memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli;
c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana;
d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
    1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
    2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
    3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
    4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
    5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
    6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
    7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam

mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
j. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
k. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
l. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023;
p. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023; dan
q. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023, Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Statistik Kabupaten Bangli Tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,28%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,75 %;
c. Gini Ratio sebesar 0,282%;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,99%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,30%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 2,54%; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB) sebesar Rp7.908,31 miliar rupiah.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangli

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun)(%) 2023 thd 2022
1	Kab. Bangli (%)	**5,09**	**5,28**	**5,28**	**0,00**
2	Kab. Bangli (Ribu Orang)	**11,68**	**12,17**	**12,24**	**0,07**
3	Provinsi Bali(%)*	**4,53**	**4,57**	**4,25**	**-0,32**
4	Nasional (%)*	**10,14**	**9,54**	**9,36**	**-0,18**
5	Peringkat Provinsi	**5**	**5**	**5**	**-**

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli
**Hasil Susenas Maret*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli di Tahun 2021 dan Tahun 2022, sedangkan di Tahun 2023 masih tetap tidak ada peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli pada Tahun 2022 sebesar 5,28% masih tetap dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin tetap sebesar 5,28% dan diharapkan pada tahun 2024 dapat menurun hingga angka 4%. Prosentase angka kemiskinan tersebut menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli berangsur angsur membaik dari sebelumnya terdampak

pandemi *Covid-19* yang masih terasa. Dampak pandemi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli. Pertumbuhan ekonomi yang menurun berpengaruh pada pendapatan perkapita dan juga pengeluaran perkapita, dan secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kondisi perekonomian Kabupaten Bangli sudah mulai bangkit dan mulai menyerap tenaga kerja, kondisi tersebut agar bisa dipertahankan untuk menekan peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Namun penurunan pengangguran tersebut belum berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Penurunan pengangguran belum diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan penduduk, dimana penurunan penganguran ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal, sehingga peningkatan pendapatan tidak signifikan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

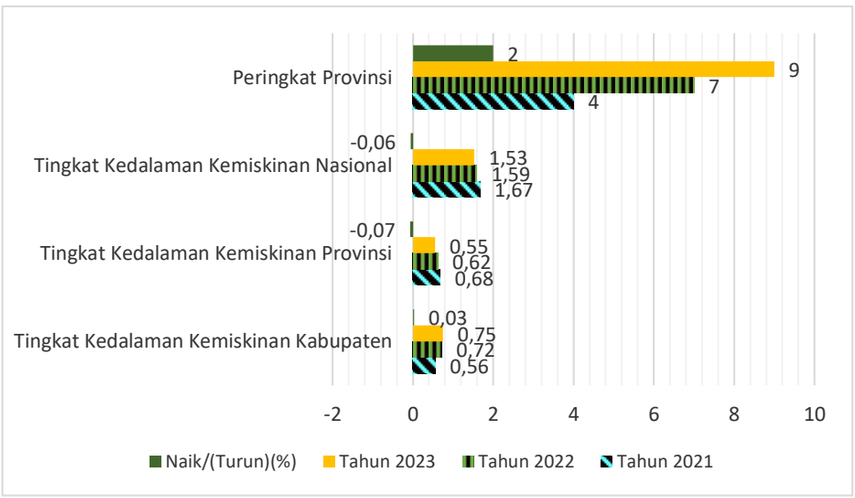

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangli

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahun 2023 Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangli dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas PUPRPerkim,
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
6. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan,
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
9. Dinas Perhubungsn,
10. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja.

Total anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari semua OPD tersebut adalah Rp63.500.005.889 dengan realisasi Rp56.291.147.002.

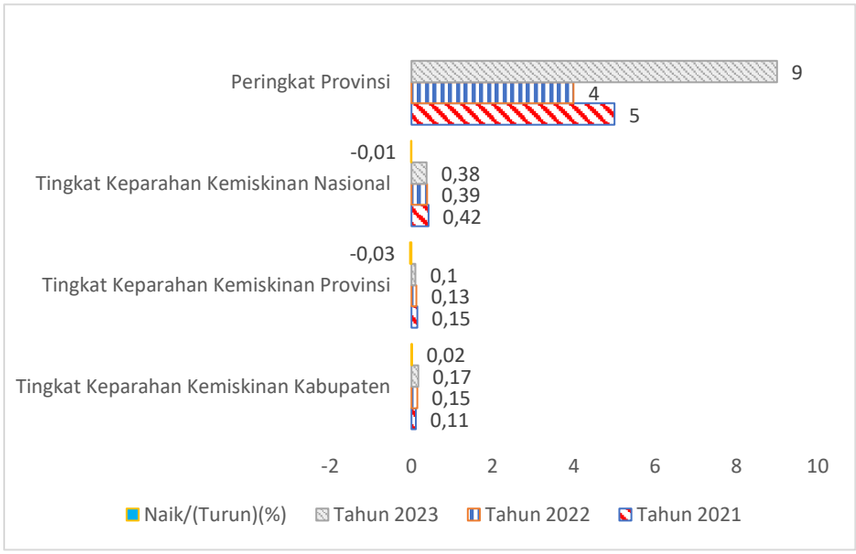

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.2. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangli

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2023 adalah sebesar 0,75%, sebagaimana dijelaskan gambar di bawah ini.

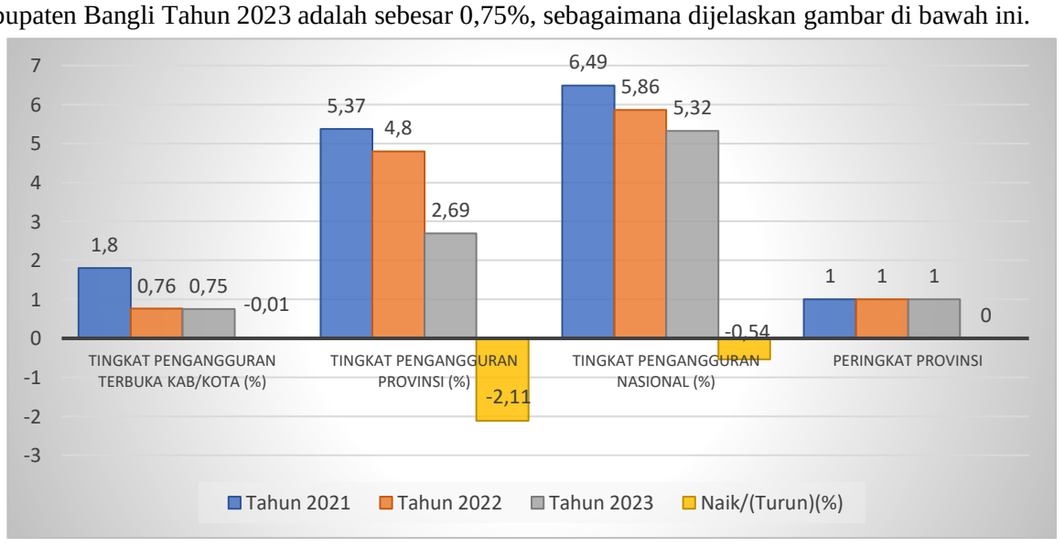

Sumber Dokumen: BPS

Gambar 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,76%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,80%. Namun

demikian TPT Kabupaten Bangli 2023 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 2,69 %.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara nol dan satu dimana:

a. Indeks Gini sama dengan nol, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
b. Indeks Gini sama dengan satu, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bangli Tahun 2023 adalah sebesar 0,282 poin. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangli adalah rendah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangli membuat distribusi pendapatan merata antar masyarakat. Koefisien gini di Kabupaten Bangli dijelaskan gambar di bawah ini:

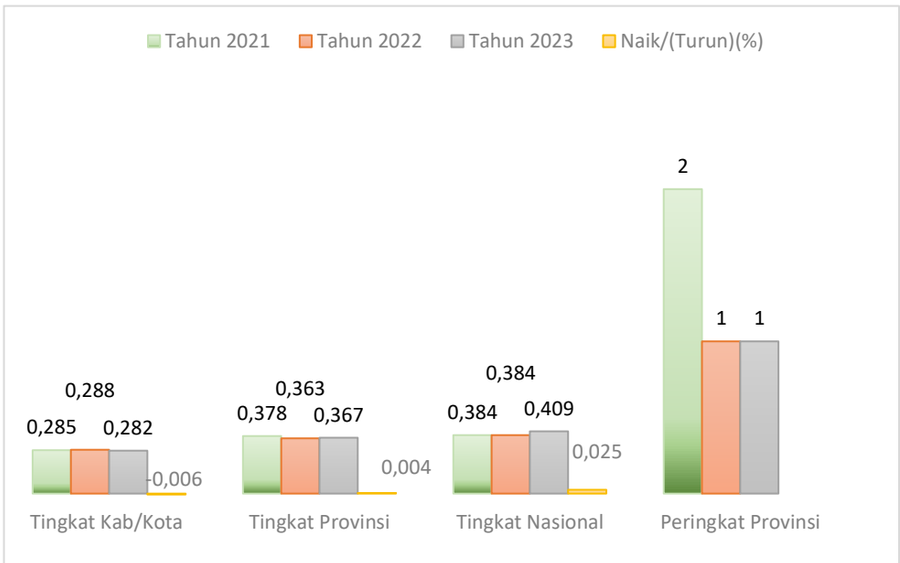

Sumber Dokumen:BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.4 Gini Ratio Kabupaten Bangli

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangli yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,288 Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 yang sebesar 0,285. lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan 0,127 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2023 adalah sebesar 71,99 poin. Tingkat IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2023 masuk dalam kategori tinggi, hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. IPM Kabupaten Bangli dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

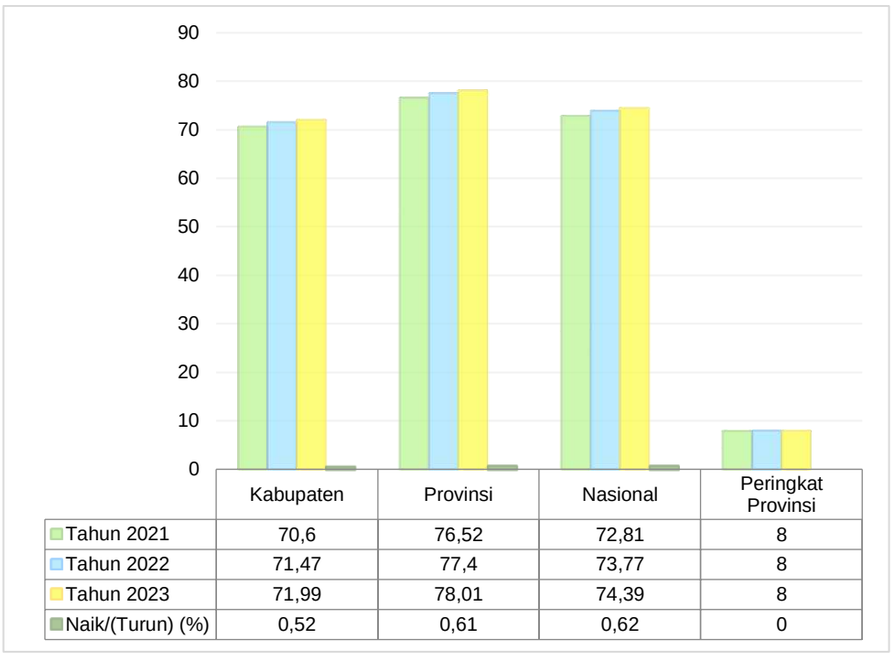

	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Peringkat Provinsi
Tahun 2021	70,6	76,52	72,81	8
Tahun 2022	71,47	77,4	73,77	8
Tahun 2023	71,99	78,01	74,39	8
Naik/(Turun) (%)	0,52	0,61	0,62	0

Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2023 adalah sebesar 71,99 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 71,47 poin mengalami kenaikan sebesar 0,52 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 73,98 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,57 tahun dengan harapan lama sekolah 12,52 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp11.670,00 atau naik sebesar Rp246,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Bangli pada saat ini berada pada urutan delapan dari sembilan Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli

No	Uraian	Kabupaten Bangli		Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (milyar Rp)	4.507,38	4.665,10	159.447,58	12.301.393,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,80	3,50	5,71	5,05
3	Peringkat Provinsi	8	8	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Selama kurun waktu Tahun 2022 - Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Bangli mengalami kenaikan rata rata 3,15%. Pada periode Tahun 2022 – Tahun 2023 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Bangli sebesar 3,50%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Bangli menempati urutan delapan dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bangli dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun,
c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Inflasi Kabupaten Bangli Tahun 2023 hanya menerbitkan inflasi kota Denpasar sebesar 2,54% dan Singaraja adalah sebesar 4,31% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.Tingkat Inflasi Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota Dps (%)	2,01	6,44	2,54	-3,9
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	-0,32
3	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-	-

4	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	-2,9
5	Peringkat Provinsi	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Tingkat inflasi di Prov/Kab/Kota di Bali (Denpasar) Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Namun demikian, inflasi Kota Denpasar lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 0,07 %.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bangli

Struktur perekonomian Kabupaten Bangli dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022*	Tahun 2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.035,01	2.159,56
2	Pertambangan dan Penggalian	131,51	139,86
3	Industri Pengolahan	641,51	681,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,06	3,48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,77	4,88
6	Konstruksi	654,65	675,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	738,88	807,99
8	Transportasi dan Pergudangan	79,73	89,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821,60	964,55
10	Informasi dan Komunikasi	338,27	354,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,15	257,97
12	Real Estat	232,40	241,14
13	Jasa Perusahaan	40,36	42,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	843,31	895,26
15	Jasa Pendidikan	179,63	181,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,67	124,99
17	Jasa Lainnya	251,49	283,56
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7.337,99	7.908,31
19	PDRB Provinsi	245.362,88	274.355,72
20	PDRB Nasional	19.588.090,00	20.892.377,00
22	Peringkat Provinsi	9	9

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Kondisi-kondisi tersebut yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2023. APBD TA 2023 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022. Dalam tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan perubahan APBD dan disahkan melalui 3 Tahun 2023 yang susunannya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp84.227.927.266 atau 6,14%. Kenaikan ini merupakan akumulasi dari beberapa jenis pendapatan seperti PAD naik sebesar 14,97%, Pendapatan Transfer naik sebesar 4,11%, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Rp919.735.000 dari semula sebesar Rp804.735.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Pendapatan Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PAD	217.270.074.898,00	255.527.244.826,00	38.257.169.928,00
Pendapatan Transfer	1.069.030.663.762,00	1.114.886.421.100,00	45.855.757.338,00
Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah	804.735.000,00	919.735.000,00	115.000.000,00
Jumlah	**1.287.105.473.660,00**	**1.371.333.400.926,00**	**84.227.927.266,00**

Secara garis besar upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan:
1) Mengupayakan dan mengintensifkan peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD
2) Mengintensifkan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
3) Evaluasi dan pemberlakuan tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah disesuaikan; dan
4) Peningkatan penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan pajak dan retribusi daerah.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar Rp55.511.177.805 dari anggaran semula Rp1.355.708.032.945 menjadi Rp1.411.219.210.750 atau mengalami kenaikan sebesar 4,09%. Dalam konteks penganggaran berdasar pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja tersebut terinci atas:

1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dari anggaran semula Rp893.582.319.946 menjadi Rp951.563.767.487 naik sebesar Rp57.981.447.541 atau 6,49% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Operasi Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)(Rp)
Belanja Pegawai	547.721.492.173	565.287.279.009	17.565.786.836
Belanja Barang dan Jasa	271.678.046.346	302.805.994.000	31.127.947.654
Belanja Bunga	4.763.518.229	4.637.465.040	(126.053.189)
Belanja Hibah	69.149.967.198	78.570.333.438	9.420.366.240
Belanja Bantuan Sosial	269.296.000	262.696.000	(6.600.000)
Jumlah	**893.582.319.946**	**951.563.767.487**	**57.981.447.541**

2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dari anggaran semula Rp294.574.428.899 menjadi Rp291.056.034.403 berkurang sebesar Rp3.518.394.496 atau 1% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Modal Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Belaja Modal Tanah	7.775.000.000	10.815.000.000	3.040.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.678.086.286	26.585.584.992	(3.092.501.294)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.647.161.851	189.302.850.759	(8.344.311.092)
Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	58.397.311.462	62.985.978.652	4.588.667.190
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	588.200.600	822.795.300	234.594.700
Belanja Modal Aset lainnya	488.668.700	543.824.700	55.156.000
Jumlah	**294.574.428.899**	**291.056.034.403**	**(3.518.394.496)**

3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu sebesar Rp5.250.000.000 menjadi Rp2.102.258.760 berkurang sebesar Rp3.147.741.240 atau 60% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.8. Anggaran Belanja Tidak Terduga Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000,00	2.102.258.760,00	(3.147.741.240,00)
Jumlah	**5.250.000.000,00**	**2.102.258.760,00**	**(3.147.741.240,00)**

4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, mengalami perubahan dari anggaran semula Rp162.301.284.100,00 menjadi Rp166.497.150.100,00 bertambah sebesar Rp4.195.866.000,00 atau 3 % yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran Belanja Transfer Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Bagi Hasil	10.117.402.100	12.017.402.100	1.900.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	152.183.882.000	154.479.748.000	2.295.866.000
Jumlah	**162.301.284.100**	**166.497.150.100**	**4.195.866.000**

Permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bangli untuk membiayai program dan kegiatan sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

c. Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan APBD tahun 2023, pembiayaan netto mengalami perubahan dari anggaran semula Rp68.602.559.285 menjadi Rp39.885.809.824 berkurang sebesar Rp28.716.749.461 atau 42 % yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.10 Anggaran Pembiayaan Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Pembiayaan	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Penerimaan:			
Silpa Tahun Sebelumnya	74.852.559.285	40.882.706.879	(33.969.852.406)
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah	**74.852.559.285**	**40.882.706.879**	**(33.969.852.406)**
Pengeluaran:			
Penyertaan Modal Daerah	6.250.000.000	996.897.055	(5.253.102.945)
Sub Jumlah	**6.250.000.000**	**996.897.055**	**(5.253.102.945)**
Pembiayaan Netto	**68.602.559.285**	**39.885.809.824**	**(28.716.749.461)**

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bangli diarahkan pada:

1) Optimalisasi penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (a) potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (b) tidak memberatkan masyarakat; (c) tidak merusak lingkungan; (d) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (e) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.
2) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Perkembangan dan asumsi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Bangli Tahun 2023 setelah dilakukan perhitungan ulang secara cermat terhadap seluruh komponen penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari target prediksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari target sebelum perubahan berasal dari pos PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah termasuk pos Pendapatan Transfer mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan pada pos PAD berasal dari Pajak Daerah dan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendapatan transfer.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada empat hal yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Secara umum belanja operasi adalah:

1) Belanja Pegawai
   a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
      (1) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
      (2) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
      (3) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.
2) Belanja Barang dan Jasa
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
3) Belanja Bunga
   Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4) Belanja Subsidi
   Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5) Belanja Hibah
   Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Belanja Bantuan Sosial
   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
1) berwujud;
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 Ayat (3) hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk:

1) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, yang terdiri enam bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 17 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, enam bidang urusan pilihan dan lima unsur urusan pemerintahan; dan
2) Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD 2023 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bangli.

b. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2023 diarahkan pada:

1) Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA dan penyesuaian karena adanya Peraturan Pemerintah;
2) Kegiatan lanjutan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun 2023 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran 2023;
3) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas yang harus ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2023;dan
4) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari:

Kebijakan Belanja Operasi

Perubahan Belanja Operasi pada APBD Perubahan tahun 2023 terjadi pada:

a) Belanja Pegawai;
b) Belanja Barang dan Jasa; dan
c) Belanja Bunga
d) Belanja Hibah
e) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2023 pada Modal di Perubahan APBD TA 2023 mengalami kenaikan dari prediksi, karena diprioritaskan pada:

a) Pergeseran, pengurangan atau penambahan rincian obyek belanja dan atau indikator capaian kinerja program dan kegiatan karena ada penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan penyesuaian terhadap capaian dalam KUA tahun 2023;
b) Program/kegiatan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi;
c) Program/kegiatan lanjutan dari tahun anggaran 2022 yang belum teranggarkan di APBD TA 2022;dan
d) Program/kegiatan baru yang berdampak langsung ke masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi serta RPJMD-SB Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2023.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga pada APBD Perubahan tahun 2023 mengalami perubahan

Kebijakan Belanja Transfer
Perubahan Belanja Transfer pada APBD Perubahan tahun 2023 terjadi pada:
a) Belanja Bagi Hasil; dan
b) Belanja Bantuan Keuangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2023 terdapat Penurunan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. SiLPA berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dan penerimaan pinjaman mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah.

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah Murni

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
   Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 diarahkan pada penerimaan dari SiLPA.
2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
   Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah yang diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami penurunan pada Penerimaan Pembiayaan yaitu pada SiLPA Tahun sebelumnya dan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Perubahan SiLPa digunakan untuk menutup defisit belanja daerah sehingga kondisi perubahan APBD TA 2023 adalah anggaran berimbang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD, sesuai dengan konteks Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tercermin dari penyerapan anggaran Belanja pada masing-masing urusan pemerintahan.

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh:

1) **Bidang Pendidikan,** dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)**, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp288.682.384.939,00 terealisasi sebesar Rp269.310.663.022,95 atau 93,29%.

2) **Bidang Kesehatan**, dilaksanakan oleh:
   a. **Dinas Kesehatan**, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar RpRp130.990.044.693,00 terealisasi sebesar Rp122.063.216.527,23 atau 90,31%

b. **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaratkat, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp156.141.004.422,00 terealisasi sebesar Rp137.241.844.709,16 atau 87,90%.

3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dilaksanakan oleh:
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim), melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp88.124.642.252,00 teralisasi sebesar Rp62.262.282.292,00 atau 70.65%.

4) **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** yang dilaksanakan oleh:
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim), melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.804.040.000,00 terealisasi sebesar Rp1.802.417.784,00 atau 99,91 %.

5) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** dilaksanakan oleh :
   a) **Satuan Polisi Pamong Praja**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp12.518.621.306,00 terealisasi sebesar Rp12.353.077.531,00 atau 98,68 %.
   b) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp8.376.372.500,00 terealisasi sebesar Rp8.218.823.973,00 atau 98,12 %.

6) **Bidang Sosial** dilaksanakan oleh:
Dinas Sosial, **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.431.260.265,00 terealisasi sebesar Rp5.276.789.060,00 atau 97,16 %.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh:
1) **Bidang Tenaga Kerja**, dilaksanakan oleh:

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, melaksanakan program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp137.975.500,00 terealisasi sebesar Rp136.086.500,00 atau 98,63 %.

2) **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dilaksanakan oleh:
Dinas Sosial, **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melaksanakan program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindungan Khusus Anak dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp664.934.000,00 terealisasi sebesar Rp426.669.540,00 atau 64,17 %.

3) **Bidang Pangan**, dilaksanakan oleh:
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, **dan Perikanan** melaksanakan program yaitu Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp370.372.500,00 terealisasi sebesar Rp367.969.200,00 atau 99,35 %.

4) **Bidang Lingkungan Hidup**, dilaksanakan oleh:
Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan Lingkungan hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp35.713.658.650,00 terealisasi sebesar Rp35.246.031.965,39 atau 98,69%.

5) **Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dilaksanakan oleh:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.070.925.724,00 terealisasi sebesar Rp5.907.708.605,00 atau 97,31%.

6) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** dilaksanakan oleh:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.885.263.354,00 terealisasi sebesar Rp7.597.978.247,00 atau 96,36%.

7) **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dilaksanakan oleh:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** melaksanakan program yaitu program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan total

anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.304.237.000,00 terealisasi sebesar Rp3.295.113.510,00 atau 76,56%.

8) **Bidang Perhubungan** dilaksanakan oleh:
Dinas Perhubungan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pengelolaan Pelayaran total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp12.816.515.850,00 terealisasi sebesar Rp12.425.436.154,78 atau 96,95%.

9) **Bidang Komunikasi dan Informatika** dilaksanakan oleh:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp8.450.483.074,00 terealisasi sebesar Rp8.271.110.721,00 atau 97,88%.

10) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** dilaksanakan oleh:
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp14.658.671.500,00 terealisasi sebesar Rp14.074.120.195,00 atau 96,01%.

11) **Bidang Penanaman Modal** dilaksanakan oleh:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp16.694.202.555,00 terealisasi sebesar Rp6.784.044.921,00 atau 40,64 %.

12) **Bidang Kepemudaan dan Olah Raga** dilaksanakan oleh:
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp17.236.192.500,00 terealisasi sebesar Rp14.095.608.298,00 atau 81,78%.

13) **Bidang Statistik** dilaksanakan oleh:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp33.043.250,00 terealisasi sebesar Rp22.248.000,00 atau 67,33%.

14) **Bidang Persandian** dilaksanakan oleh:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan program yaitu Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp195.552.500,00 terealisasi sebesar Rp184.310.105,00 atau 94,25%

15) **Bidang Kebudayaan** dilaksanakan oleh:
Dinas Periwisata dan Kebudayaan, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional, pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp51.234.345.000,00 terealisasi sebesar Rp48.707.711.600,00 atau 95,07 %.

16) **Bidang Perpustakaan** dilaksanakan oleh:
Sekretariat Daerah, melaksanakan program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp114.924.250,00 terealisasi sebesar 114.666.800,00 atau 99,78 %.

17) **Bidang Kearsipan** dilaksanakan oleh:
Sekretariat Daerah,melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.872.900,00 terealisasi sebesar Rp5.456.700,00 atau 92,91 %.

C. Urusan Pilihan dilaksanakan oleh:

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan** dilaksanakan oleh:
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, **dan Perikanan**melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.526.149.000,00 terealisasi sebesar Rp1.446.953.794,00 atau 94,81 %.

2) **Bidang Pariwisata** dilaksanakan oleh:
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp39.552.073.717,00 terealisasi sebesar Rp29.320.924.965,59 atau 74,13 %.

3) **Bidang Pertanian** dilaksanakan oleh:
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, **dan Perikanan** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp26.980.701.311,00 terealisasi sebesar Rp26.675.174.827,00 atau 98,87 %.

4) **Bidang Perdagangan** dilaksanakan oleh:
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaksanakan program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp76.332.511.250,00 terealisasi sebesar Rp72.233.150.850,00 atau 94,63 %.

5) **Bidang Perindustrian** dilaksanakan oleh:
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,

dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp18.765.702.800,00 terealisasi sebesar Rp16.181.665.893,00 atau 86,23 %.

6) **Bidang Trasmigrasi** dilaksanakan oleh:
Sekretariat Daerah, melaksanakan program yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp179.775.000,00 terealisasi sebesar Rp170.404.750,00 atau 94,79 %.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari:

1) **Bidang Sekretariat Daerah** dilaksanakan oleh:

a. **Sekretariat Daerah** yang melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp84.321.398.438,00 dan terealisasi sebesar Rp80.731.667.452,00 atau 95,74 %.

b. **Sekretariat Daerah**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp44.487.317.766,00 dan terealisasi sebesar Rp43.067.637.054,00 atau 96,81 %.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari:

1) **Bidang Perencanaan** yang dilaksanakan oleh:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.286.901.433,00 terealisasi sebesar Rp6.075.658.888,12 atau 96,64%.

2) **Bidang Keuangan** dilaksanakan oleh:
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp185.506.474.861,00 terealisasi sebesar Rp181.603.254.239,00 atau 97,90%.

3) **Bidang Kepegawaian** dilaksanakan oleh:
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Kepegawaian Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.968.136.660,00terealisasi sebesar 5.821.812.703,00 atau 97,55%.

4) **Bidang Pendidikan dan Pelatihan** dilaksanakan oleh:
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp627.320.200,00 terealisasi sebesar Rp407.007.500,00 atau 64,88 %.

5) **Bidang Penelitian dan Pengembangan** dilaksanakan oleh:

Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp651.743.216,00 terealisasi sebesar Rp565.621.160,00 atau 86,79 %.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh:
Inspektorat, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp9.511.724.900,00 terealisasi sebesar Rp9.309.406.456,00 atau 97,87 %.

G. Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh **Kecamatan**, melaksanakan program/kegiatan di 4 (empat) Kecamatan yaitu:

1) **Kecamatan Bangli** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp10.629.015.905,00 terealisasi sebesar Rp10.368.978.718,00 atau 97,55%.

2) **Kecamatan Kintamani** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.114.488.400,00 terealisasi sebesar Rp4.059.464.236,00 atau 98,66%.

3) **Kecamatan Susut** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.173.800.293,00 terealisasi sebesar Rp3.117.320.449,00 atau 98,22%.

4) **Kecamatan Tembuku** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.293.644.900,00 terealisasi sebesar Rp4.249.313.217,00 atau 98,97%.

H. Unsur Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan terdiri dari:

1) **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik** dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melaluai Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan

Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp19.608.300.351,00 terealisasi sebesar Rp19.469.444.917,00 atau 99,29%.

2.3.2 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli meliputi belanja wajib untuk Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.

A. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Rp130.990.044.693,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Rp151.503.539.382,00. Total alokasi anggaran bidang kesehatan adalah Rp282.493.584.075,00 atau 25,99 % dari postur APBD Kabupaten Bangli. Realisasi bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah 93,19 % dan pada Rumah Sakit Daerah yaitu 87,61%.

1. Dinas Kesehatan

   Hambatan

   Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah :

   a) Kurang meratanya SDM di Puskesmas dalam melaksanakan Program Kesehatan
   b) Sasaran proyeksi kegiatan terlalu tinggi di beberapa kegiatan terutama kegiatan P2PTM
   c) Banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
   d) Juknis kegiatan DAK Fisik maupun DAK Non Fisik yang terlambat terbit
   e) Perubahan kebijakan /regulasi pada tahun berjalan

   Capaian Kinerja

   Berdasarkan indikator SPM, Dinas Kesehatan sudah mencapai target yaitu jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta sudah mencapai target 100%, jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar difasilitas kesehatan sudah mencapai target 100%, jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar sudah mencapai target 100%, jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumah anak usia pendidikan dasar kelas satu dan tujuh yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar sudah mencapai target 100%, jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai 100%, jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjakabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif standar dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumah Sakit Umum Daerah

   Belanja Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Bangli terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu:

   1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Pembangunan Rumah Sakit Berserta sarana dan prasarana Pendukungnya dengan capaikan 1 gedung berupa Gedung Rawat Inap yaitu Pembangunan Gedung 2A RSU Bangli yang sumber pendanaannya berasal dari dana BKK Provinsi Bali serta DAU terarah bidang Kesehatan
b. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan capaian 1 unit genset dengan sumber dana DAK Bidang Kesehatan
c. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian berupa 1 unit dental panoramic yang sumber pendanaannya daro DAK Bidang Kesehatan.

2. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, capaiannya berupa presentase peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD yang seluruh pendanaannya dari pendapatan BLUD.

Sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Bangli, Visi Kabupaten Bangli merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Kabupaten Bangli, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bangli tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
"Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk mewujudkan Bangli Era Baru "
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bangli 2021-2026, terutama Misi Kedua yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan bagi seluruh Krama Bangli.
Adapun bentuk atau jenis pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan diantaranya ; a. Pelayanan Kesehatan Dasar, b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Rumah Sakit Umum Bangli sebagai satu- satunya Rumah Sakit Rujukan Tipe B yang ada di Kabupaten Bangli, terus berupaya memenuhi kriteria dan standar pelayanannya sebagai Rumah Sakit Rujukan. Dengan mulai diberlakukannya perubahan UU No. 32 Tahun 2002 menjadi UU No. 23 Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaan otonomi tersebut, sektor kesehatan termasuk sektor yang diserahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Pemerintah Daerah.

B. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memperoleh anggaran Rp351.177.046.689,00 atau sebesar 24,88% dari postur APBD Kabupaten Bangli, dengan realisasi Rp326.342.905.220,95 atau 92,93%. Sasaran belanja bidang pendidikan ini adalah meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan yang terjangkau, marata, adil, dan berkualitas.
Outcome yang diharapkan dengan terlaksananya kegiatan bidang pendidikan ini adalah meningkatnya persentase kualitas pengelolaan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yaitu:

BIDANG PAUD:
1. Pada Program Pendidikan Anak Usia Dini terjadi kendala pelaporan ke pusat kerena susahnya mengakses link terutama untuk satuan pendidikan yang berada di balik bukit;
2. Efesiensi dari penawaran harga dari belanja barang pada kegiatan DAK Fisik; dan
3. Pada BOP Kinerja Kesetaraan blm terpenuhinya persyaratan dari Lembaga Kesetaraan untuk mendapatkan realisasi BOP Kinerja Kesetaraan.

BIDANG PENDIDIKAN:

Pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat kegiatan untuk menunjang kreativitas siswa yang tidak bisa direalisasikan karena kegiatan dilaksanakan secara daring. Sehingga Pelaksanaan Tersebut Hanya Bisa di realisasikan untuk kegiatan persiapan melalui rapat (Biaya Konsumsi. Untuk Biaya Lainnya seperti Pendampingan dan Transportasi tidak direalisasikan. Akibatnya sisa dana yang tidak terealisasi dirasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan lainnya.

C. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau persentase yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud berupa belanja yang langsung untuk mendukug program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurang kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Perhitungan anggaran pada APBD Induk perubahan Kabupaten Bangli pada fungsi infastruktur dialokasikan sebesar Rp526.929.097.341,00 dari total belanja daerah Rp1.411.219.210.750,00 atau sebesar 37,34%.

Tabel 2.11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan	Realisasi	%
1	Total Belanja Daerah	**1.355.708.032.945**	**1.411.219.210.750,00**	**1.292.278.737.292,15**	**91,57**
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer Ke Pada Daerah dan/atau Desa				
	a. Belanja Bagi Hasil	10.117.402.100	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	100,00
	b. Bantuan Keuangan	152.183.882.000	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	99,67
	Jumlah (a = b)	**162.301.284.100**	**\166.497.150.100,00**	**165.985.107.010,00**	**99,69**
3	Selisih (1-2)	1.193.406.748.845	1.244.722.060.650,00	1.126.293.630.282,15	90,49
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)	477.362.699.538,00	497.888.824.260,00	450.517.452.112,86	90,49
5	a. Belanja Modal	294.574.428.899	291.056.034.403,00	211.649.206.855,31	72,72
	1) Tanah	7.775.000.000	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	71,93
	2) Peralatan dan Mesin	29.678.086.286	26.585.584.992,00	24.351.077.732,00	91,60
	3) Bangunan dan Gedung	197.647.161.851	189.302.850.759,00	133.121.744.861,03	70,32
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.397.311.462	62.985.978.652,00	45.821.440.865,78	72,75
	5) Aset tetap Lainnya	588.200.600	822.795.300,00	85.109.295,00	10,34
	6) Aset Lainnya	488.668.700	543.824.700,00	491.081.527,50	90,30
	b. Belanja Pemeliharaan	2.969.896.264	2.560.285.500,00	2.168.865.075,00	84,71
6	1) Belanja Hibah	69.149.967.198	78.570.333.438,00	75.330.046.039,00	95,88
	2) Belanja Bantuan Sosial	269.296.000	262.696.000,00	193.621.000,00	73,71
	3) Belanja Bantuan Keuangan	152.183.882.000	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	99,67
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5 + 6)	516.177.574.097	526.929.097.341,00	441.140.578.804,31	83,72

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan	Realisasi	%
	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	**38,07%**	**37,34%**		

D. *Mandatory Spending Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Perhitungan anggaran pada APBD Induk Kabupaten Bangli pada Pengembangan Kompetensi dialokasikan sebesar Rp1.090.220.450,00 terealisasi sebesar Rp.798.346.100,00 atau sebesar 73,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi SDM Dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**1.090.220.450,00**	**798.346.100,00**	**73,23**
- Program Kepegawaian Daerah	462.900.250,00	391.338.600,00	84,54
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	627.320.200,00	407.007.500,00	64,88
Jumlah	**1.090.220.450,00**	**798.346.100,00**	**73,23**

E. *Mandatory* Spending Fungsi Pengawasan

Belanja wajib untuk fungsi pengawasan pada tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp9.511.724.900,00 terealisasi Rp9.309.406.456,00 atau sebesar 97,87 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Inspektorat	**9.511.724.900**	**9.309.406.456,00**	**97,87**
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.580.344.900,00	8.497.908.456,00	99,04
- Program Penyelenggaraan Pengawasan	400.690.000,00	299.668.000,00	74,79
- Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	530.690.000,00	511.830.000,00	96,45
Jumlah	**9.511.724.900,00**	**9.309.406.456,00**	**97,87**

F. *Mandatory Spending* Fungsi *Stunting*

Belanja wajib untuk fungsi Stunting pada tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp52.533.422.400,00 terealisasi Rp51.435.038.572,00 atau sebesar 97,91 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi *Stunting* Dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	**2.522.600.000,00**	**2.522.600.000,00**	**100,00**
	- Program Pengelolaan Pendidikan	2.522.600.000,00	2.522.600.000,00	100,00
2	**Dinas Kesehatan**	**46.249.449.400,00**	**45.893.930.478,00**	**99,23**

	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.249.449.400,00	45.893.930.478,00	99,23
3	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**790.000.000,00**	**789.197.784,00**	**99,90**
	- Program Kawasan Permukiman	130.000.000,00	129.197.784,00	99,38
	- Pprogram Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
4	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**34.720.000,00**	**34.407.800,00**	**99,10**
	- Program Pemberdayaan Sosial	34.720.000,00	34.407.800,00	99,10
5	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**2.737.653.000,00**	**1.996.300.010,00**	**72,92**
	- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	953.506.000,00	939.853.000,00	98,57
	- Program Pengendalian Penduduk	142.200.000,00	142.200.000,00	100,00
	- Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.641.947.000,00	914.247.010,00	55,68
6	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**199.000.000,00**	**198.602.500,00**	**99,80**
	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	199.000.000,00	198.602.500,00	99,80
Jumlah		**52.533.422.400,00**	**51.435.038.572,00**	**97,91**

G. *Mandatory Spending* Fungsi Penanganan Inflasi

Belanja wajib untuk fungsi penanganan Inflasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp184.139.504.651,00 dan terealisasi Rp151505.755.443,78 atau sebesar 82,28 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Inflasi dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pmukiman**	**74.056.130.747,00**	**48.765.621.317,00**	**65,85**
	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	283.990.000,00	281.700.000,00	99,19
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100.000.000,00	99.742.000,00	99,74
	- Program Penataan Bangunan Gedung	5.926.160.000,00	984.405.700,00	16,61
	- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	17.284.580.000,00	7.958.554.833,00	46,04
	- Program Penyelenggaraan Jalan	50.461.400.747,00	39.441.218.784,00	78,16
2	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**39.484.500,00**	**37.109.500,00**	**93,98**
	- Program Administrasi Pemerintahan Desa	39.484.500,00	37.109.500,00	93,98

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3	**Dinas Perhubungan**	**7.538.382.500,00**	**7.297.531.875,78**	**96,81**
	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.538.382.500,00	7.297.531.875,78	96,81
4	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja**	**9.472.699.500,00**	**9.032.553.295,00**	**95,35**
	- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	136.000.000,00	134.239.000,00	98,71
	- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	149.620.000,00	149.354.900,00	99,82
	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	292.420.000,00	289.057.000,00	98,85
5	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**3.368.489.154,00**	**3.183.139.204,00**	**94,50**
	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.175.418.000,00	1.130.902.094,00	96,21
	- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	350.731.000,00	316.051.700,00	90,11
	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	588.296.654,00	541.029.010,00	91,97
	- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	539.855.000,00	486.533.200,00	90,12
	- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45.375.000,00	45.218.300,00	99,65
	- Program Penyuluhan Pertanian	273.441.000,00	270.435.700,00	98,90
	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	299.662.500,00	298.455.700,00	99,60
	- Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.075.000,00	34.298.000,00	97,78
	- Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.635.000,00	35.215.500,00	98,82
6	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**89.664.318.250,00**	**83.189.800.252,00**	**92,78**
	1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	76.159.560.000,00	72.064.963.150,00	94,62
	2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13.414.250,00	13.096.500,00	97,63
	3 Program Stadardisasi dan Perlindungan Konsumen	159.537.000,00	155.091.200,00	97,21
	4 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13.331.807.000,00	10.956.649.402,00	82,18
Jumlah		**184.139.504.651,00**	**151.505.755.443,78**	**82,28**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2023 dan perbandingan dengan realisasi TA 2022.

Pada bagian pendapatan, realisasi kurang dari target sebesar Rp106.664.812.216,80 dari target yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.371.333.400.926,00 terealisasi sebesar Rp1.264.668.558.709,20 atau 92,22%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp118.936.233.167,78 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.411.219.210.750,00 terealisasi sebesar Rp1.292.282.977.582,22 atau 91,57%.

Pembiayaan netto terealisasi sebesar 102,50% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp39.885.809.824,00 terealisasi sebesar Rp40.883.452.335,71.

Realisasi pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan SiLPA TA 2023 sebesar Rp13.269.063.462,69. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian pendapatan sebesar 92,22% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp255.527.244.826,00 terealisasi sebesar Rp219.918.641.353,81 atau 86,06%.
b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.114.886.421.100,00 terealisasi sebesar Rp1.041.925.817.049,00 atau 93,46%.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah target anggaran setelah perubahan sebesar Rp919.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.824.130.306,39 atau 307,06%.

Capaian bagian belanja sebesar 91,57% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp951.563.767.487,00 terealisasi sebesar Rp914.648.663.716,91 atau 96,12%.
b. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp291.056.034.403,00 terealisasi sebesar Rp211.649.206.855,31 atau 72,72%.
c. Belanja Tak Terduga, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.102.258.760,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
d. Belanja Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp166.497.150.100,00 terealisasi sebesar Rp165.985.107.010,00 atau 99,69%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 102,50% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp39.885.809.824,00 terealisasi sebesar Rp40.883.452.335,71 atau 102,50%.

Dibandingkan dengan realisasi APBD TA 2022, realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,40%, yaitu dari Rp1.105.440.499.468,50 pada tahun 2022 menjadi Rp1.264.668.588.709,20 pada tahun 2023. Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi sebesar 4,23%, yaitu Rp1.239.853.052.692,60 pada tahun 2022 menjadi Rp1.292.282.977.582,22 pada tahun 2023. Dari sisi pembiayaan, terjadi penurunan realisasi pembiayaan neto sebesar 77,07%, yaitu Rp175.295.260.106,06 pada tahun 2022 menjadi Rp40.883.452.335,71 pada tahun 2023. Sedangkan dari sisi SiLPA terjadi penurunan sebesar 67,54%, yaitu Rp40.882.706.881,96 di tahun 2022 menjadi Rp13.269.063.462,69 di tahun 2023.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami efisiensi dan pendapatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum mampu terpenuhi, untuk itu maka perlu optimalisasi pemungutan pendapatan sehingga realisasi pendapatan dapat terpenuhi. Secara umum, karena pendapatan daerah lebih dominan diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal tersebut disebabkan besarnya penerimaan pendapatan tersebut tergantung/disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Hambatan dan kendala dalam mencapai target pendapatan adalah adanya kekurang patuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak daerah maupun retribusi daerah serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bangli

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam tahun 2023, entitas pelaporan masih tersentralisasi pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi tersebut terdiri dari: 2 (dua) sekretariat, 14 (empat belas) dinas, 5 (lima) badan, 3 (tiga) perangkat daerah lainnya, dan 4 (empat) kecamatan. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Daftar OPD

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 82 Bangli Telp. (0366) 91124
2	Dinas Kesehatan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 28 Bangli Telp. (0366) 91043
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 99x Bangli Telp. (0366) 91521
4	Dinas PUPR dan Perkim	Jl. Nusantara Kubu Bangli
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 85 Bangli Telp. (0366) 91045
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan tenaga Kerja	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 80 Bangli Telp. (0366) 91033
7	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Nusantara, Kubu, Bangli Telp. (0366) 91023
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No. 1 Kawan Bangli Telp. (0366) 91620
9	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Kantor Bersama Loca Carana Jl.Merdeka No. 1 KawanBangli Telp. (0366) 91123
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 76 Bangli Telp. (0366) 91537
11	Dinas Perhubungan	JL. Merdeka No 71 Bangli Telp. (0366) 91406
12	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Jl. Taman Sari Kubu Bangli Telp. (0366) 91021
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Lettu Kanten Gang. II Bangli Telp. (0366) 91267
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Merdeka No. 1 Kawan Bangli Telp. (0366) 91406

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91547
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91011
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl.Nusantara No. 200, Bebalang, Bangli Telp. (0366) 91293
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 91448
19	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 22 Bangli Telp. (0366) 93048
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No.1 Kawan Bangli
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jl. Lettu Kanten Bangli Telp. (0366) 91044
22	Inspektorat	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 93600
23	Sekretariat Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91010
24	Sekretariat DPRD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 32 Bangli Telp. (0366) 91003, 91367
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Lettu Sobat Nomor 3 Bangli Telp. (0366) 92124
26	Kecamatan Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 33 Bangli Telp. (0366) 91018
27	Kecamatan Kintamani	Jl. Raya Kintamani telp. (0366) 51338
28	Kecamatan Susut	Jl. Putra Yudha Tanggahan Peken Telp (0366) 91006
29	Kecamatan Tembuku	Jl. Raya Besakih Tembuku Telp. (0366) 91007

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

a. Basis Akuntansi;
b. Prinsip Nilai Historis;
c. Prinsip Realisasi;
d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Normal;
e. Prinsip Periodisasi;
f. Prinsip Konsistensi;
g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima /dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan - LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Bangli menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Bangli dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. **Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. **Prinsip Periodisasi (*periodicity*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, LO, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, LO, Neraca, LPE, LP SAL dan LAK (PPKD) serta CaLK.

f. Prinsip Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2016 telah menggunakan akuntansi Basis Akrual.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*full disclosure)*

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli.Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangli, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Bangli yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan
b. Pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir.
b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pajak Reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Kabupaten Bangli di Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Bangli dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban; dan
b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli. Contohnya tagihan rekening air yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban;
b. Terjadinya konsumsi asset; dan
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Bangli, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Bangli, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Bappeda dan Penanaman Modal melalui Dana KPEL yang sudah diberhentikan penyalurannya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

a. PT BPD Bali;
b. PD BPR Bank Daerah Bangli;
c. PDAM Bangli;
d. PT Jamkrida Bali; dan
e. PD Bukti Mukti Bhakti.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
d. Persediaan dicatat sebesar:
    1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
    2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
    3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bangli. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk

menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Bangli menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Bangli yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Bangli baik dari dalam

negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Bangli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan konsisten untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut: Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan perpetual dengan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Untuk menetapkan kreteria piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang yaitu:

1) Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya Tak Tertagih TA 2023

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny.Piutang Tak Tertagih
Kurang dari 1 tahun	Lancar	0,5%
1 sampai 2 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

2) Piutang Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tak Tertagih TA 2023

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

3) Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih TA 2023

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai 1 bulan	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 12 bulan	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 12 bulan	Macet	100%

c. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aktiva tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

1) Tanah;
2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; dan
4) Konstruksi dalam pekerjaan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.6. Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama Aset Tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap mempergunakan pendekatan bulanan. Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset. Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   a) Bertambah ekonomis/efisien;
   b) Bertambah manfaat;
   c) Bertambah volume/ukuran; dan
   d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi.

Tabel 4.7. Persentase Nilai Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Kosntruksi Dalam Pengerjaan	

3. Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Persentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan

Tabel 4.8 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun

f. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

g. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00

3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

h. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

1) Tanah;
2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; dan
4) Konstruksi dalam pekerjaan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama Aset Tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap mempergunakan pendekatan bulanan. Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset. Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   a) Bertambah ekonomis/efisien;
   b) Bertambah manfaat;
   c) Bertambah volume/ukuran; dan
   d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

Tabel 4.11 Persentase Nilai Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

3. Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Persentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan

Tabel 4.12 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4.1	Jalan dan Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.3	Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 45%	5 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
			>45% s.d. 60%	7 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.4	Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun

4. Jika pemeliharaan melebihi 100% nilai perolehan maka dikenakan maksimal masa manfaat maka akan dikenakan masa manfaat maksimal golongan aset tetap tersebut. Pemeliharaan terhadap sebagian aset tetap menambah masa manfaat secara keseluruhan aset tersebut.

5. Aset Tak Berwujud

Tabel 4.13 Pemeliharaan *Software*

Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
Software	Peningkatan Kapasitas, Efektivitas dan Efisiensi	>0% s.d. 20%	1 Tahun

i. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO, LAK dan CaLK. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	255.527.244.826,00	219.918.641.353,81	86,06	144.005.842.858,50
Pendapatan Transfer	1.114.886.421.100,00	1.041.925.817.049,00	93,46	960.732.038.900,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	919.735.000,00	2.824.130.306,39	307,06	702.617.710,00
Jumlah	**1.371.333.400.926,00**	**1.264.668.588.709,20**	**92,22**	**1.105.440.499.468,50**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah.

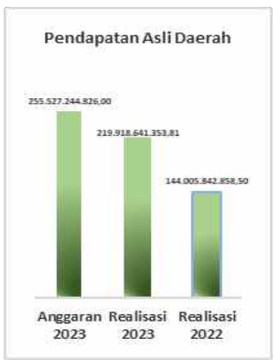

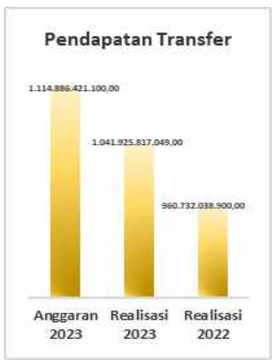

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	49.239.015.000,00	52.316.682.159,00	106,25	36.707.060.479,07
Pendapatan Retribusi Daerah	69.550.144.000,00	57.401.453.950,00	82,53	36.328.299.166,20
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.522.360.500,00	5.887.399.995,08	106,61	5.597.430.541,18
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.215.725.326,00	104.313.105.249,73	79,50	65.373.052.672,05
Jumlah	**255.527.244.826,00**	**219.918.641.353,81**	**86,06**	**144.005.842.858,50**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	2.500.000.000,00	4.915.909.588,00	196,64	1.765.288.243,00
Pajak Restoran	15.181.500.000,00	12.072.467.337,00	79,52	5.654.717.702,00
Pajak Hiburan	150.000.000,00	159.561.830,00	106,37	103.949.194,57
Pajak Reklame	1.076.230.000,00	933.965.547,00	86,78	1.380.934.821,00
Pajak Penerangan Jalan	11.196.000.000,00	11.665.491.716,00	104,19	10.145.156.104,00
Pajak Parkir	10.285.000,00	1.251.000,00	12,16	2.610.000,00
Pajak Air Tanah	600.000.000,00	829.888.516,00	138,31	323.259.895,50
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.025.000.000,00	4.373.468.693,00	108,66	2.869.152.783,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.500.000.000,00	17.364.677.932,00	119,76	14.461.991.736,00
Jumlah	**49.239.015.000,00**	**52.316.682.159,00**	**106,25**	**36.707.060.479,07**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Pajak Hotel, target Pajak Hotel di TA 2023 ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00, target ini naik Rp2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar 1.036,36% dari target Pajak Hotel TA 2022. Realisasi pendapatan Pajak Hotel mencapai Rp4.915.909.588,00 (empat milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 196,64% dari target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mendukung realisasi Pajak Hotel ini adalah mulai adanya kelonggaran dalam perjalanan wisata, adanya tren peningkatan kunjungan ke Kintamani, pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi (intensifikasi), serta penambahan Wajib Pajak Hotel potensial yang terdaftar sepanjang Tahun 2023 (ekstensifikasi);
   b. Pajak Restoran terdiri dari Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, serta Pajak Warung dan Sejenisnya. Realisasi Pajak Restoran di Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, terutama pada penerimaan pajak dari jenis objek Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp10.863.349.633,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 72,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miyar rupiah). Adapun penyebab tidak tercapainya target Pajak Restoran dan Sejenisnya adalah penentuan besaran target pajak dan pendataan serta pedaftaran potensi pajak restoran belum terselenggara secara optimal. Walaupun realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya di Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target, namun realisasi ini naik sebesar Rp6.419.121.554,00 atau sebesar 144,44% dari realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2022. Sedangkan untuk realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya telah melebihi dari target yang ditetapkan mencapai Rp1.209.117.704,00 atau sebesar 666,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp181.500.000,00. Adapun faktor yang mendukung realiasi tersebut adalah tidak dilakukannya perubahan target pajak

untuk jenis objek Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya pada anggaran perubahan 2023, penerimaan Pajak Restoran jenis objek Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Tahun 2023 sudah melampui target yaitu Rp1.027.617.704,00. Faktor pendukung lainnya adalah pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi serta penempatan Petugas Pengawas Pajak pada WP Rumah Makan yang potensial;

c. Pajak Hiburan, realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp159.561.830,00 atau sebesar 106,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00. Capaian realisasi Pajak Hiburan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp55.612.635,43 atau sebesar 53,50% dari TA 2022, hal ini disebabkan karena penentuan target dan pemantauan secara optimal;
d. Pajak Reklame, realisasi Pajak Reklame sebesar Rp933.965.547,00 atau sebesar 86,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.076.230.000,00. Capaian realisasi Pajak Reklame TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp446.969.274,00 atau sebesar 32,37% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena pajak reklame bersifat insidentil dan tergantung dari WP apakah ada pemasangan reklame atau tidak, sehingga Pemerintah Daerah sulit memprediksi penetapan targetnya;
e. Capaian realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp11.665.491.716,00 atau sebesar 104,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.196.000.000,00. Capaian Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan sebesar Rp1.520.335.612,00 atau sebesar 14,99% dibandingkan TA 2022. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan pelanggan dari PLN;
f. Pajak Parkir, realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.251.000,00 atau 12,16% dari target sebesar Rp10.285.000,00. Capaian realisasi Pajak Parkir TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.359.000,00 atau sebesar 52,07% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
    1) penentuan besaran target realisasi pajak parkir belum optimal;
    2) pengendalian dan pengawasan pajak parkir belum optimal; dan
    3) pendataan dan pendaftaran potensi pajak parkir belum terselenggara secara optimal;
g. Pajak Air Tanah, realisasi Pajak Air Tanah telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp829.888.516,00 atau sebesar 138,31% dari target sebesar Rp600.000.000,00. Capaian realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp506.628.620,50 atau sebesar 156,72% dibandingkan TA 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti timbulnya kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban Pajak Air Tanah, adanya pemantauan secara optimal terhadap pengguna air tanah terkait tunggakan, meter air agar diterapkan secara keseluruhan, adanya kejelasan perhitungan volume air tanah pada usaha yang melekat pada rumah tangga, serta pendataan dan pendaftaran potensi pajak air tanah yang optimal;
h. Capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.373.468.693,00 atau sebesar 108,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.025.000.000,00. Capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.504.315.910,00 atau sebesar 52,43% dibandingkan TA 2022. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah WP dan adanya piutang Tahun sebelumnya; dan
i. Capaian realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp17.364.677.932,00 atau sebesar 119,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.500.000.000,00. Capaian realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.902.686.196,00 atau sebesar 20,07% dibandingkan TA 2022. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan adanya piutang Tahun sebelumnya.

2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut.
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
   d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
   e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
   f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
   g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
   h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
   i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
   j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
   k. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2011 tentang tata Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak;
   l. Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah;
   m. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;
   n. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik; dan
   o. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2020 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.249.442.000,00	22.874.000,00	1,83	63.687.500,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	145.095.000,00	109.761.000,00	75,65	88.953.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	544.080.000,00	436.651.000,00	80,25	380.464.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	315.281.000,00	165.004.000,00	52,34	152.037.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	253.558.000,00	50,71	302.131.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	17.000.000,00	13.883.050,00	81,67	15.903.300,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	193.794.000,00	266.315.000,00	137,42	100.599.371,20
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	143.990.000,00	27.784.900,00	19,30	63.954.880,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	8.536.642.000,00	2.355.353.000,00	27,59	2.071.428.000,00
• Retribusi Terminal	7.000.000,00	7.061.500,00	100,88	7.046.500,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	55.148.779.000,00	52.936.886.000,00	95,99	32.575.707.115,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	62.000.000,00	62.525.000,00	100,85	62.850.500,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	185.041.000,00	92.668.500,00	50,08	118.185.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	651.129.000,00	26,05	323.974.500,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	0,00	0,00	1.377.500,00
Jumlah	**69.550.144.000,00**	**57.401.453.950,00**	**82,53**	**36.328.299.166,20**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Retribusi Jasa Umum
      1) Capaian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tercapai hanya 1,83% dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan target yang dipasang terlalu besar karena penetapan target masih memperhitungkan 12 Puskesmas (saat ini sudah menjadi BLUD) sebagai sumber pendapatan. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.813.500,00 atau sebesar 64,08% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena TA 2023 operasional UPT Laboratorium belum maksimal dan masih berproses untuk memperbaharui Peraturan Bupati tentang Pendapatan Retribusi Umum;
      2) Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar 75,65% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan karena adanya tunggakan piutang pembayaran di Tahun sebelumnya yang diakibatkan karena adanya beberapa obyek retribusi yang sudah tidak beroperasi lagi atau pindah lokasi ke tempat yang tidak lagi mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan namun sudah dibuatkan ketetapan obyek retribusi, adanya wajib pajak yang mengurangi jumlah Obyek Wajib Pajaknya berdasarkan APBD Desa, serta kurangnya wajib retribusi dalam membayar retribusi. Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.808.000,00 atau sebesar 23,39% dibandingkan TA 2022, kenaikan tersebut disebabkan karena bertambahnya target retribusi dan adanya pelunasan pembayaran piutang Tahun sebelumnya;
      3) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di bawah target yaitu sebesar 80,25%. Hal ini dikarenakan adanya renovasi pasar dan lahan parkir digunakan oleh pedagang selama masa renovasi, sehingga berdampak bagi petugas parkir dan berkurangnya retribusi parkir. Selain itu karena hal tersebut beberapa petugas parkir mengundurkan diri karena tidak adanya lahan parkir. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.187.000,00 atau sebesar 14,77% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena bertambahnya pengunjung yang memanfaatkan lahan parkir seperti di pasar Kidul, Pasar Singamandawa Kintamani, Pasar Kayuambua, Alun-Alun Bangli;
      4) Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp165.004.000,00 atau sebesar 52,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp315.281.000,00. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan kendala di Pasar Hewan Kayuambua dimana peternak sapi sekarang banyak beralih ke pertanian sayur dan jeruk

sehingga populasi sapi menurun, serta harga karcis masuk ternak ke pasar hewan realtif masih rendah namun hal tersebut telah diupayakan pengusulan perubahan tarif retribusi pada Peraturan Daerah yang baru. Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.967.000,00 atau sebesar 8,53% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena di Tahun 2022 terjadi wabah PMK yaitu penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan babi sehingga terjadi penutupan sementara/*lock down* di Pasar Hewan Kayuambua rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 sehingga ternak yang masuk ke Pasar Hewan Kayuambua relatif lebih sedikit yang menyebabkan pendapatan retribusi pelayanan pasar hewan tidak optimal, sedangkan di Tahun 2023 kasus PMK di Kabupaten Bangli mulai agak melandai sehingga ternak yang masuk ke Pasar Hewan Kayuambua relatif lebih banyak yang menyebabkan adanya peningkatan pendapatan dari Tahun 2022 sebanyak Rp152.037.000,00 meningkat menjadi Rp165.004.000,00 di Tahun 2023;

5) Capaian realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp253.558.000,00 atau sebesar 50,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Capaian realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp48.573.000,00 atau sebesar 16,08% dibandingkan TA 2022, hal ini dikarenakan:
   a) minimnya kendaraan angkutan umum dan kendaraan pariwisata (suburban) yang datang melakukan uji KIR akibat rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur batas usia kendaraan bermotor angkutan umum; dan
   b) mobil barang jenis *pick-up* dan *truck* yang digunakan untuk kegiatan operasional pendistribusian barang pasca pandemi Covid-19 minim beroperasi dikarenakan belum pulihnya perekonomian masyarakat;
6) Capaian realisasi Retribusi Tera/Tera Ulang sebesar Rp13.883.050,00 atau sebesar 81,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.000.000,00. Capaian realisasi Retribusi Tera/Tera Ulang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.020.250,00 atau sebesar 12,70% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari UMKM/wajib tera untuk melakukan tera ulang terhadap UTTP yg dimiliki;
7) Capaian realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sebesar Rp266.315.000,00 atau sebesar 137,42% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp193.794.000,00. Capaian realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena adanya pelunasan pembayaran piutang retribusi dari Tahun sebelumnya. Capaian realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan TA 2022 yaitu sebesar Rp165.715.628,80 atau sebesar 164,73%, hal ini disebabkan karena penambahan target retribusi dan adanya pelunasan piutang retribusi Tahun sebelumnya.

b. Retribusi Jasa Usaha
   1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai target yaitu 19,30% dari target yang ditetapkan, disebabkan oleh kurang optimalnya dalam pendataan potensi serta penetapan target retribusi. Capaian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp36.169.980,00 atau sebesar 56,56% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan setelah diterbitkan

SKRD hanya sebagian kecil wajib retribusi yang melakukan pembayaran atas retribusi tersebut, sedangkan untuk Retribusi Pemakaian Alat Berat capaian realisasi menurun disebabkan karena adanya dua unit alat berat yang mengalami kerusakan teknis;

2) Capaian realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp283.925.000,00 atau sebesar 13,71% dibandingkan TA 2022 disebabkan karena Tahun 2023 sudah ada sewa terhadap ruko di Pasar Kayuambua dan Pasar Singamandawa. Namun realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan baru sebesar 27,70% dari target yang ditetapkan, rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan karena:
   a) Target yang terpasang berdasarkan data semua toko dan kios yang ada di pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 4 (empat) Kecamatan yang dikenakan sewa per bulan, namun sampai saat ini belum bisa terealisasi, karena belum adanya penilaian dari KPKLN di Singaraja, sehingga masih menggunakan pungutan retribusi yang sesuai dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
   b) Adanya pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani, dimana para pedagang yang berjualan berkurang, karena tempat relokasi para pedagang yang disiapkan/disediakan banyak yang tidak digunakan/ditempati oleh para pedagang (banyak yang berjualan di luar area pasar), sehingga mengurangi pendapatan Retribusi Daerah; dan
   c) Penetapan target menggunakan rencana Perda baru, dimana nilainya sesuai dengan retribusi yang akan dinaikkan sesuai kajian akademis, namun di Tahun 2023 pemungutan retribusi masih tetap memakai peraturan yang lama yaitu Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
3) Capaian realisasi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan sebesar 100,88%, melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan angkutan orang ataupun barang yang masuk ke terminal. Capaian realisasi Retribusi Terminal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000,00 atau sebesar 0,21% dibandingkan TA 2022 disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan angkutan orang ataupun barang yang masuk ke terminal;
4) Capaian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp52.936.886.000,00 atau sebesar 95,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp55.148.779.000,00. Capaian realisasi tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena jalur wisata yang masih terbuka sehingga menyulitkan petugas untuk membedakan antara wisatawan dengan masyarakat. Capaian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.361.178.885,00 atau sebesar 62,50% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena di Tahun 2023 kondisi pariwisata sudah berangsur pulih sehingga kumjungan wisatawan ke Bangli semakin meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang masih dalam suasana pasca pandemi Covid-19;
5) Capaian realisasi Retribusi Penyeberangan di Air pada Dinas Perhubungan sebesar 100,85%. Capaian realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena 3 (tiga) dermaga apung yang dananya bersumber dari APBN Kemenhub sudah beroperasi sehingga terjadinya peningkatan kunjungan yang melakukan penyeberangan. Capaian realisasi Retribusi Penyeberangan di Air TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp325.500,00 atau sebesar 0,52% dibandingkan TA 2022;
6) Capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebesar Rp92.668.500,00 atau sebesar 50,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp185.041.000,00, tidak tercapainya realisasi tersebut untuk

Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar 45,78% disebabkan karena debit air relatif kecil dan besarnya fluktuasi suhu sehingga berakibat tingginya mortalitas/kematian benih ikan, serta adanya indukan pada kolam Balai Benih Ikan yang umurnya sudah melewati batas (tua) sehingga produktivitasnya berkurang. Sedangkan untuk Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan melebihi target sebesar 202,93%, hal ini disebabkan karena adanya penyerahan aset dari Setda Kab.Bangli ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan berupa kebun kopi di Desa Mengani sehingga adanya penambahan produksi biji kopi. Capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.516.500,00 atau sebesar 21,59% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena debit air relatif kecil dan besarnya fluktuasi suhu sehingga berakibat tingginya mortalitas/kematian benih ikan, serta adanya indukan pada kolam Balai Benih Ikan yang umurnya sudah melewati batas (tua) sehingga produktivitasnya berkurang.

c. Retribusi Perijinan Tertentu
   1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, mencapai realisasi 26,05%. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan karena realisasi yang tercapai berdasarkan permohonan izin mendirikan bangunan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman serta tingginya biaya pengurusan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Capaian realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp327.154.500,00 atau sebesar 100,98% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan meningkatnya pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan;
   2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan dengan capaian realisasi sebesar 0,00%. Capaian realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.377.500,00 dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena:
      a) Jumlah angkutan umum yang ada sebanyak 55 (lima puluh lima) armada dimana hanya melayani 4 (empat) trayek angkutan pedesaan. Dari jumlah tersebut ada beberapa armada yang tidak memenuhi persyaratan untuk pengurusan izin trayek. Dari 55 (lima puluh lima) unit jumlah angkutan umum dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bangli sampai saat ini belum semua memiliki izin trayek;
      b) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam pasal 212 ayat 1 dijelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas akan mempengaruhi capaian target retribusi izin trayek; dan
      c) Jumlah Angkutan umum dalam trayek yang terus mengalami penurunan seiring dengan menurunya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum sehingga pelaku usaha jasa angkutan umum banyak yang menghentikan usahanya.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda dan Perbup sebagai berikut:
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
   e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
n. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
o. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
p. Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli.

3. Rincian atas Pendapatan Retribusi Daerah atas masing-masing PD pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.214.876.119,00	5.881.633.148,08	112,79	5.493.321.297,18
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.984.381,00	5.766.847,00	115,70	4.109.244,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	302.500.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah	**5.522.360.500,00**	**5.887.399.995,08**	**106,61**	**5.597.430.541,18**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. adanya kenaikan pembagian deviden PT Bank BPD Bali sebesar Rp244.017.851,40 dan adanya kenaikan pembagian deviden PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp144.293.999,50;
   b. adanya kenaikan pembagian deviden PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp1.657.603,00; dan
   c. adanya penurunan pembagian deviden sebesar Rp100.000.000,00 pada Perumda Tirta Danu Arta Bangli, dimana di Tahun 2023 tidak adanya realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (PHPKDYD) yang berasal dari deviden Perumda Tirta Danu Arta Bangli disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Perumda Tirta Danu Arta.
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT. BPD Bali	2.614.111.933,00	3.280.868.962,08	125,05	3.036.851.110,68
PT. BPR Bank Daerah Bangli	2.600.764.186,00	2.600.764.186,00	100,00	2.456.470.186,50
PT. Jamkrida Bali Mandara	4.984.381,00	5.766.847,00	115,70	4.109.244,00
Perumda Tirta Danu Arta Bangli	302.500.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah	**5.522.360.500,00**	**5.887.399.995,08**	**106,61**	**5.597.430.541,18**

3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari:
   a. PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroan) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Gede Perdana Artha, S.H.,M.Kn. Nomor 05 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli;
   b. PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroan) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, SH. Nomor 5 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroan).; dan
   c. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali diakui berdasarkan RUPS dengan Akte Notaris I Made Widiada, SH. Nomor 41 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	312.180.000,00	403.545.000,00	129,27	227.662.899,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.384.862.000,00	1.391.769.025,00	100,50	81.000.000,00
Jasa Giro	3.327.500.000,00	961.877.362,95	28,91	1.220.909.422,84
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.851.038,30	0,00	7.876.985,00
Pendapatan Bunga	1.210.000.000,00	2.432.087,00	0,20	1.020.833.333,38
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	26.400.079,00	0,00	164.799.086,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	204.857.059,00	0,00	764.084.308,60

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	260.807.030,00	35.233.680,00	13,51	46.478.538,80
Pendapatan dari Pengembalian	7.913.582.928,00	1.328.828.254,74	16,79	523.602.012,17
Pendapatan BLUD	116.806.793.368,00	99.953.311.663,74	85,57	61.297.460.785,26
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	16.845.301,00
Jumlah	**131.215.725.326,00**	**104.313.105.249,73**	**79,50**	**65.373.052.672,05**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

1. Capaian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp403.545.000,00 atau sebesar 129,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp312.215.725.326,00. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp175.882.101,00 atau sebesar 77,26% dibandingkan TA 2022, kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjualan BMD terutama hasil penjualan gedung dan bangunan karena adanya pembangunan gedung dan bangunan RSUD, gedung PLUT, penataan di Sasana Budaya, Pasar Singamandawa dan Kantor PTSP. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp403.545.000,00 tersebut terdiri dari:
   a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp65.195.000,00 yang merupakan hasil lelang;
   b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan senilai Rp331.650.000,00 terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah, bongkaran bangunan gedung pada RSUD Bangli, penjualan hasil bongkaran bangunan Gedung pasar Singamandawa oleh Disperidag, penjualan atas material pada DLH, penjualan satu paket barang milik daerah yang dibongkar pada BPBD dan Damkar, penjualan barang milik daerah berupa satu paket bongkaran bangunan pada DPMPTSP Kab Bangli, bongkaran bangunan gedung sekolah, bongkaran bangunan di DLH, bongkaran bangunan dan gedung di Setda Kab. Bangli; dan
   c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.700.000,00 yang merupakan hasil penjualan potongan kayu pada DLH;
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.391.769.025,00 atau sebesar 100,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.384.862.000,00 yang merupakan Sewa Ruko Pasar Kayuambua dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Singamandawa. Capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.310.769.025,00 atau sebesar 1.618,23% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena meningkatnya pemanfaatan BMD berupa Sewa Ruko Pasar Kayuambua dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Singamandawa, dimana pada TA 2022 hanya berupa sewa 9 (sembilan) kios pada food court Alun-Alun Kabupaten Bangli;
3. Realisasi Jasa Giro sebesar Rp961.877.362,95 atau sebesar 28,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.327.500.000,00 merupakan pendapatan atas Jasa Giro pada Kas Daerah dan Jasa Giro di Kas Bendahara. Capaian realisasi jasa giro Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp259.032.059,89 atau sebesar 21,22% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, hal ini disebabkan karena menurunnya uang yang disimpan pada Bank;
4. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp4.851.038,30 atau 4/7 dari Rp8.489.317,03 yang merupakan bagian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dari pendapatan hasil

pengelokaan CTKI. Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.025.946,70 atau sebesar 38,42% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena menurunnya nasabah CTKI melakukan pembayaran atas pinjaman dana CTKI;

5. Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp2.432.087,00 atau sebesar 0,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.210.000.000,00 merupakan pendapatan bunga atas hasil pengelolaan dana bergulir CTKI. Capaian realisasi Pendapatan Bunga Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp1.018.401.246,38 atau sebesar 99,76% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya pembayaran atas pelunasan dana bergulir CTKI;
6. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp26.400.079,00. Capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp138.399.007,00 atau sebesar 83,98% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dapat diprediksi;
7. Capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp559.227.249,60 atau sebesar 73,19% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak dapat diprediksi tergantung dari berapa lama wajib pajak menunggak pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo. Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp204.748.081,00 terdiri dari:
   a. Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp14.015.805,00 (empat belas juta lima belas ribu delapan ratus lima rupiah) diperoleh dari pembayaran denda pajak dari sebanyak 62 (enam puluh dua) WP sepanjang Tahun 2023;
   b. Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp91.305.209,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus sembilan rupiah) yang diperoleh dari pembayaran denda pajak 31 (tiga puluh satu) WP jenis objek Restoran dan 85 (delapan puluh lima) jenis objek Rumah Makan dan Sejenisnya sepanjang Tahun 2023;
   c. Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp3.420,00 (tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) diperoleh dari Pembayaran Pajak Parkir LPM Rumah Makan Bagong;
   d. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp79.962.388,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah enam puluh sen) diperoleh dari pembayaran denda pajak 35 (tiga puluh) WP sepanjang Tahun 2023; dan
   e. Pendapatan Denda PBB-P2 sebesar Rp19.461.259,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) diperoleh dari perhitungan keterlambatan pembayaran PBB-P2 dengan perhitungan denda sebesar 2% per bulan dari nilai pokok pajak dan denda pajak maksimal dikenakan sebesar 48%. Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2023;
8. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp35.233.680,00 atau sebesar 13,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp260.807.030,00. Realisasi tersebut yang merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berupa sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah sesuai Perda Nomor 25 Tahun 2011 yang tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu berupa Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 0% dari target yang ditetapkan, tidak terealisasinya pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan disebabkan karena penetapan target hanya mengacu dari Tahun-Tahun sebelumnya dimana realisasinya tidak dapat diprediksi. Capaian realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.244.858,80 atau sebesar 24,19% dibandingkan dengan TA 2022, hal ini disebabkan

karena Pendapatan Denda Retribusi Daerah tidak dapat diprediksi tergantung dari berapa lama wajib retribusi menunggak pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo;

9. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.328.828.254,74 atau sebesar 16,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.913.582.928,00. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena penetapan target mengacu dari Tahun-Tahun sebelumnya dimana realisasinya tidak dapat diprediksi. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp211.435.371,56, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp440.845.875,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.600.000,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp239.753.933,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp2.044.000,00, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp264.361.006,18, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi - Jalan dan Jembatan sebesar Rp157.658.069,00. Capaian realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp805.226.242,57 atau sebesar 153,79% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena Pendapatan dari Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tahun sebelumnya tidak dapat diprediksi;
10. Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp99.953.311.663,74 atau sebesar 85,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp116.806.793.368,00. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena:
    a. Pada saat penyusunan Anggaran Tahun 2023, terdapat isu bahwa pada Tahun 2023 Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik di pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan. Namun setelah turunnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 9 Januari 2023, tetapi tarif JKN tersebut tidak mengalami kenaikan signifikan;
    b. Masyarakat yang memanfaatkan layanan di RSUD Bangli sudah 98% sebagai peserta JKN, sehingga target pendapatan dari masyarakat umum tidak mencapai target; dan
    c. Pasien JKN yang dilayani di RSUD Bangli tidak ada pembelian obat di luar tanggungan JKN sehingga pendapatan farmasi juga tidak mencapai target.

    Capaian realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp38.655.850.878,48 atau sebesar 63,06% dibandingkan TA 2022. Realisasi Pendapatan BLUD yang besar karena dengan terbangunnya Gedung 1A dan 1B RSU Bangli dimana Gedung tersebut telah langsung dapat difungsikan untuk pelayanan pada awal Tahun 2023 secara umum meningkatkan tren pelayanan di RSUD Bangli dibandingkan Tahun 2022. Gedung 1A terdiri dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Ruang Bersalin, dan Ruang *Intensive Care Unit* (ICU). Gedung 1B terdiri dari Poliklinik, Ruang Hemodialisa, dan Ruang Operasi. Terjadinya peningkatan kinerja pelayanan yang signifikan di RSUD Bangli dapat diuraikan sebagai berikut.
    a. Pelayanan di IGD sebelumnya rata-rata 41 pasien per hari, meningkat di Tahun 2023 menjadi rata-rata 86 pasien per hari;
    b. Di rawat jalan atau Poliklinik sebelumnya rata-rata per hari 160 pasien, meningkat menjadi 292 pasien dengan *Top Three* pada Poli Fisioterapi, Poli Saraf, dan Poli Penyakit Dalam. Peningkatan yang sangat tinggi serta menyumbang pendapatan yang tinggi adalah pelayanan di IBS atau Kamar Operasi, sebelumya rata-rata per hari 2 pasien, dengan beroperasinya Gedung 1B dengan kapasitas 6 ruang OK pada Tahun 2023 rata-rata 11 pasien per hari dengan *Top Three* Tindakan pada Bedah Umum, Ortopedi dan Urologi; dan

c. Untuk pelayanan Rawat Inap dengan kapasitas 157 tempat tidur sebelumnya tingkat hunian sebesar 39,8%, pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 56,4% dengan kapasitas 200 tempat tidur.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912.844.132.000,00	900.285.215.914,00	98,62	805.596.462.637,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.042.289.100,00	141.640.601.135,00	70,10	155.135.576.263,00
Jumlah	**1.114.886.421.100,00**	**1.041.925.817.049,00**	**93,46**	**960.732.038.900,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	821.876.334.000,00	809.317.417.914,00	98,47	739.520.744.637,00
Dana Insentif Daerah (DID)	30.884.546.000,00	30.884.546.000,00	100,00	10.515.789.000,00
Dana Desa	60.083.252.000,00	60.083.252.000,00	100,00	55.559.929.000,00
Jumlah	**912.844.132.000,00**	**900.285.215.914,00**	**98,62**	**805.596.462.637,00**

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	11.853.703.000,00	14.040.335.081,00	118,45	19.699.056.711,00
Dana Alokasi Umum	548.551.128.000,00	548.548.870.076,00	100,00	524.703.553.041,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	145.734.600.000,00	135.907.190.828,00	93,26	99.489.151.070,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	115.736.903.000,00	110.821.021.929,00	95,75	95.628.983.815,00
Jumlah	**821.876.334.000,00**	**809.317.417.914,00**	**98,47**	**739.520.744.637,00**

Penjelasan:

a. Capaian realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp809.317.417.914,00 atau sebesar 98,47% dari anggaran sebesar Rp821.876.334.000,00. Capaian realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.796.673.277,00 atau sebesar 9,44%. Hal tersebut disebabkan oleh di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli mendapatkan DAU *Specific Grant* yang terdiri dari DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan, DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan pengkajian PPPK, DAU yang ditentukan pengunaannya bidang pendidikan, DAU yang ditentukan pengunaannya bidang kesehatan, DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum;

b. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	455.162.000,00	1.013.057.659,00	222,57	5.721.080.675,00
DBH PPh Pasal 21	9.885.943.000,00	10.480.548.774,00	106,01	10.429.520.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	802.608.432,00	0,00	1.327.594.255,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	225.842.000,00	245.605.707,00	108,75	262.501.781,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.000,00	12.298,00	175,69	49.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.498.502.211,00	116,46	1.958.311.000,00
Jumlah	**11.853.703.000,00**	**14.040.335.081,00**	**118,45**	**19.699.056.711,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp14.040.335.081,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, karena kenaikan atau penurunan TKD atas Dana Bagi Hasil tergantung pada Pendapatan Negara;

c. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	463.481.193.000,00	463.478.935.076,00	99,99	524.703.553.041,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.206.862.000,00	9.206.862.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	15.145.849.000,00	15.145.849.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.046.587.000,00	32.046.587.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.870.637.000,00	27.870.637.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**548.551.128.000,00**	**548.548.870.076,00**	**100,00**	**524.703.553.041,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp548.548.870.076,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebesar Rp2.257.924,00 karena merupakan lebih salur pendapatan adminduk TA 2021 yang dipotong pada penerimaan Dana DAU TA 2023. Sesuai dengan PMK 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil TA 2023 atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan TA 2023;

d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – PAUD	842.535.000,00	842.329.000,00	93,26	1.054.813.250,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	11.368.258.000,00	11.119.671.000,00	97,81	23.332.884.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – SMP	3.240.136.000,00	3.239.963.500,00	99,99	14.565.534.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.551.055.101,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	829.761.958,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	0,00	0,00	0,00	589.314.000,00
DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	9.456.207.000,00	9.092.668.555,00	96,16	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	14.344.885.000,00	7.400.040.069,00	51,59	0,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	18.825.519.000,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan - Jalan	12.812.546.000,00	12.182.689.900,00	95,08	0,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	0,00	0,00	0,00	6.187.756.000,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	0,00	0,00	0,00	5.532.180.000,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.612.200.000,00	98,62	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	25.490.333.761,00
DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.530.000.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	8.886.513.000,00	7.996.993.877,00	89,99	0,00
DAK Fisik - Bidang Perdagangan – Penugasan	75.000.000.000,00	74.641.384.950,00	99,52	0,00
DAK Fisik - Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Penugasan	8.148.826.000,00	7.779.249.977,00	95,46	0,00
Jumlah	**145.734.600.000,00**	**135.907.190.828,00**	**93,26**	**99.489.151.070,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp135.907.190.828,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, karena penyaluran Dana DAK Fisik disesuaikan dengan kontrak kegiatan yang disampikan oleh Pemerintah Daerah ke aplikasi OMSPAN;

e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	39.241.780.000,00	38.198.966.382,00	97,34	36.145.918.620,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	49.431.360.000,00	49.431.360.000,00	100,00	48.180.645.500,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.770.000.000,00	1.365.250.000,00	77,13	1.092.000.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	2.522.600.000,00	2.522.600.000,00	100,00	2.079.460.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	109.750.000,00	64.750.000,00	59,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	12.718.126.000,00	10.925.665.014,00	85,91	5.034.014.510,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	3.645.847.000,00	2.523.137.883,00	69,21	1.511.607.835,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	410.170.000,00	405.413.650,00	98,84	397.353.550,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.052.920.000,00	651.642.400,00	61,89	735.957.000,00
DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000,00	308.390.600,00	75,79	309.798.800,00
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	0,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	488.650.000,00	485.046.000,00	99,26	142.228.000,00
DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**115.736.903.000,00**	**110.821.021.929,00**	**95,75**	**95.628.983.815,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp110.821.021.929,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa karena penyaluran dana DAK Non Fisik menyesuaikan dengan dana SiLPA atas DAK Non Fisik yang tersimpan di Kas Umum Daerah, jika masih ada silpa atas penyaluran Tahun sebelumnya maka penyaluran Tahun berjalan akan dikurangi sebesar SiLPA tersebut.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp30.884.546.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
3. Dana Desa yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp60.083.252.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada ***Lampiran 5***.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	112.102.112.041,00	106.999.308.955,00	95,45	92.910.305.211,00
Bantuan Keuangan	89.940.177.059,00	34.641.292.180,00	38,52	62.225.271.052,00
Jumlah	**202.042.289.100,00**	**141.640.601.135,00**	**70,10**	**155.135.576.263,00**

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	43.757.787.740,00	38.651.554.736,00	88,33	38.045.430.667,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.262.023.130,00	28.119.564.380,00	103,15	16.321.594.428,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.623.957.514,00	23.277.244.072,00	102,89	18.295.622.291,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	136.201.468,00	128.882.727,00	94,63	116.045.810,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.322.142.189,00	16.822.063.040,00	91,81	20.131.612.015,00
Jumlah	**112.102.112.041,00**	**106.999.308.955,00**	**95,45**	**92.910.305.211,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

a. Capaian realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp106.999.308.955,00 atau sebesar 95,45% dari anggaran sebesar Rp112.102.112.041,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya penerimaan pedapatan Dana Bagi Hasil TA 2023 yang disalurkan di TA 2024; dan
b. Capaian realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.089.003.744,00 atau sebesar 15,16% dibandingkan dengan TA 2022. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan atau penurunan Dana Bagi Hasil Provinsi tergantung pada penerimaan PAD Pemerintah Provinsi Bali.

2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	80.940.177.059,00	26.621.840.180,00	32,89	62.225.271.052,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	9.000.000.000,00	8.019.452.000,00	89,11	0,00
Jumlah	**89.940.177.059,00**	**34.641.292.180,00**	**38,52**	**62.225.271.052,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya karena rendahnya capaian realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar 32,89% dan Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.583.978.872,00 atau sebesar 44,33% dibandingkan dengan TA 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya penundaan penyaluran dana BKK dari Provinsi dan akan disalurkan pada TA 2024 sebesar Rp46.287.352.230,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	804.735.000,00	2.709.130.306,39	336,65	702.617.710,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**919.735.000,00**	**2.824.130.306,39**	**307,06**	**702.617.710,00**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	804.735.000,00	2.709.130.306,39	336,65	702.617.710,00
Jumlah	**804.735.000,00**	**2.709.130.306,39**	**336,65**	**702.617.710,00**

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

1. Capaian realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya sebesar Rp2.709.130.306,39 atau sebesar 336,65%, tingginya capaian realisasi tersebut disebabkan karena bertambahnya sumbangan pihak ketiga/sejenisnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangli, terdiri dari penerimaan Hibah dari Bank BPD Bali untuk Penataan Tapal Batas Bangli-Gianyar Tahap II sebesar Rp803.123.830,00, pengakuan pendapatan atas kas BPBD sebesar Rp1.587.451.478,39, sisa dana komando penanganan keadaan darurat sebesar Rp278.680.230,00, dan adanya pengembalian jaminan bongkaran reklame sebesar Rp39.874.768,00; dan
2. Capaian realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya TA 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp2.006.512.596,39 atau sebesar 285,58% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena adanya sumbangan pihak ketiga/sejenisnya tahun sebelumnya yang disetorkan ke Kas Daerah di Tahun 2023 berupa pengakuan pendapatan atas Kas BPBD sebesar Rp1.587.451.478,39, Sisa Dana Komando Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp278.680.230,00, dan adanya pengembalian jaminan bongkaran reklame sebesar Rp39.874.768,00.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Penjelasan:

Capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp115.000.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena TA 2023 Pemerintah Kabupaten

Bangli menerima Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN berupa penerimaan hibah dari PT Taspen untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp115.000.000,00 sedangkan pada TA 2022 tidak adanya Pendapatan atas Pengembalian Hibah.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	951.563.767.487,00	914.648.663.716,91	96,12	802.381.255.582,79
Belanja Modal	291.056.034.403,00	211.649.206.855,31	72,72	293.929.282.841,81
Belanja Tak Terduga	2.102.258.760,00	0,00	0,00	2.430.457.000,00
Belanja Transfer	166.497.150.100,00	165.985.107.010,00	99,69	141.112.057.268,00
Jumlah	**1.411.219.210.750,00**	**1.292.282.977.582,22**	**91,57**	**1.239.853.052.692,60**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	565.287.279.009,00	543.502.784.759,00	96,15	515.867.247.541,00
Belanja Barang dan Jasa	302.805.994.000,00	291.007.733.555,91	96,10	273.729.368.016,95
Belanja Bunga	4.637.465.040,00	4.504.678.363,00	97,14	3.297.019.892,57
Belanja Hibah	78.570.333.438,00	75.439.846.039,00	96,02	9.234.589.134,27
Belanja Bantuan Sosial	262.696.000,00	193.621.000,00	73,71	253.030.998,00
Jumlah	**951.563.767.487,00**	**914.648.663.716,91**	**96,12**	**802.381.255.582,79**

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

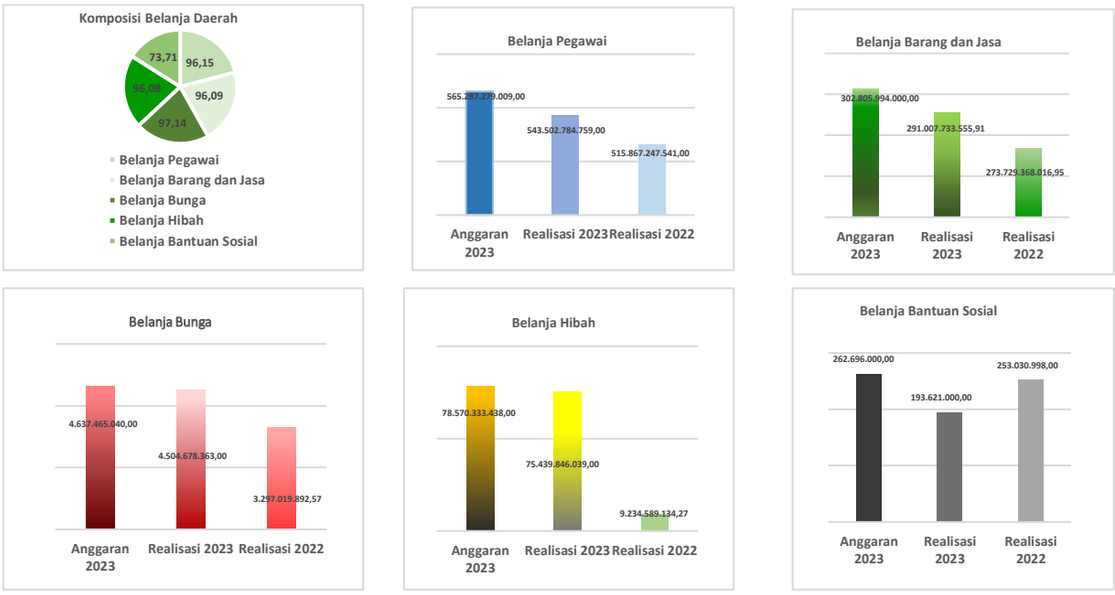

Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.1 sampai dengan Lampiran 2.5***.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	324.242.044.916,00	319.818.527.890,00	98,64	308.846.806.933,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	113.699.074.075,00	112.372.880.886,00	98,83	96.137.888.574,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.374.199.300,00	42.514.317.139,00	74,10	50.208.741.600,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.137.418.050,00	19.853.887.206,00	98,59	19.916.521.806,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.119.606.734,00	459.557.603,00	41,05	292.692.188,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	710.880.000,00	100,00	510.480.000,00
Belanja Pegawai BOS	8.605.566.000,00	7.872.231.400,00	91,44	6.844.758.467,00
Belanja Pegawai BLUD	39.398.489.934,00	39.900.502.635,00	101,27	33.109.357.973,00
Jumlah	**565.287.279.009,00**	**543.502.784.759,00**	**96,15**	**515.867.247.541,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

a. Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp543.502.784.759,00 atau sebesar 96,15% dari anggaran sebesar Rp565.287.279.009,00. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.635.537.218,00 atau sebesar 5,36% dibandingkan dengan TA 2022; dan

b. Adapun capaian realisasi belanja pegawai yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Belanja Pegawai BLUD sebesar 101,27%, hal ini disebabkan karena adanya pelampauan realisasi belanja pegawai pada RSUD Bangli, Puskesmas Kintamani II dan Puskesmas Kintamani V dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No.	Unit SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	RSUD Bangli	29.396.039.120,00	30.315.829.659,00	103,13
2	Puskesmas Bangli	857.506.736,00	815.438.044,00	95,09
3	Puskesmas Bangli Utara	685.793.640,00	682.241.199,00	99,48
4	Puskesmas Susut I	983.799.521,00	840.402.834,00	85,42
5	Puskesmas Susut II	878.366.868,00	843.196.255,00	96,00
6	Puskesmas Tembuku I	907.396.533,00	874.800.758,00	96,41
7	Puskesmas Tembuku II	1.022.595.324,00	958.871.109,00	93,77
8	Puskesmas Kintamani I	1.062.801.788,00	1.028.936.567,00	96,81
9	Puskesmas Kintamani II	685.792.440,00	718.353.163,00	104,75
10	Puskesmas Kintamani III	709.576.973,00	673.774.459,00	94,95
11	Puskesmas Kintamani IV	576.723.264,00	555.094.013,00	96,25
12	Puskesmas Kintamani V	930.658.528,00	948.525.676,00	101,92
13	Puskesmas Kintamani VI	701.439.199,00	645.038.899,00	91,96
Jumlah		**39.398.489.934,00**	**39.900.502.635,00**	**101,27**

Capaian realisasi belanja pegawai pada RSUD Bangli sebesar 103,13% hal ini disebabkan karena adanya fleksibilitas yang dimiliki BLUD dengan menggunakan ambang batas sebesar 3,13% untuk belanja pegawai dari ambang batas BLUD yang ditetapkan 36,15% sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Adapun penetapan ambang batas disesuaikan dengan data historis 2 (dua) tahun terakhir yaitu di Tahun 2021 dan Tahun 2022. Capaian realisasi belanja pegawai yang melebihi dari target yaitu pada Puskesmas Kintamani II sebesar 104,75% dan Puskesmas Kintamani V sebesar 101,92%. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penganggaran untuk Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 4% yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Pegawai BLUD akan tetapi dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa BLUD sedangkan direalisasikan pada Belanja Pegawai BLUD.

2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.1*.**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	59.995.273.895,00	51.169.887.495,00	85,29	62.534.463.320,80
Belanja Jasa	145.184.201.724,00	137.875.528.967,62	94,97	131.341.579.338,00
Belanja Pemeliharaan	2.560.285.500,00	2.175.495.075,00	84,97	4.655.361.716,89
Belana Perjalanan Dinas	33.429.183.599,00	30.125.400.235,00	90,12	23.044.295.375,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	429.150.000,00	393.150.000,00	91,61	125.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	25.498.718.069,00	25.911.618.571,95	101,62	22.783.265.312,96
Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.709.181.213,00	43.356.653.211,34	121,42	29.245.352.953,30
Jumlah	**302.805.994.000,00**	**291.007.733.555,91**	**96,10**	**273.729.368.016,95**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp291.007.733.555,91 atau sebesar 96,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp302.805.994.000,00. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.278.365.538,96 atau sebesar 6,31% dibandingkan dengan TA 2022, terutama dari Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp14.110.662.258,04 atau sebesar 48,25% dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp268.100.000,00 atau sebesar 214,39%; dan
   b. Capaian realisasi Belanja dan Jasa yang melebihi target yang ditetapkan yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 101,62% disebabkan karena adanya kesalahan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Bidang Dikdas) yang tidak menginput Pagu Anggaran perubahan yang dilaporkan oleh pihak sekolah disebabkan karena sekolah tersebut terlambat menyampaikan perubahan anggaran ke Bidang Dikdas, dan adanya sekolah yang salah dalam merealisasikan belanja sehingga menyebabkan kelebihan belanja pada pagu belanja. Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar 121,42% hal ini disebabkan karena adanya fleksibilitas yang dimiliki BLUD dengan menggunakan ambang batas sebesar 36,1% untuk belanja barang dan jasa dari ambang batas BLUD yang ditetapkan 36,15% sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Adapun penetapan ambang batas disesuaikan dengan data historis 2 (dua) Tahun terakhir yaitu di Tahun 2021 dan Tahun 2022.
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.2***.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.637.465.040,00	4.504.678.363,00	97,14	3.297.019.892,57
Jumlah	**4.637.465.040,00**	**4.504.678.363,00**	**97,14**	**3.297.019.892,57**

Penjelasan:

1. Capaian realisasi Belanja Bunga sebesar Rp4.504.678.363,00 atau sebesar 97,14% dari anggaran sebesar Rp4.637.465.040,00. Capaian realisasi Belanja Bunga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.207.658.470,43 atau sebesar 36,63% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena pemotongan bunga tersebut didasarkan pada KMK Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Dearah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023 dan dipotong langsung pada saat penyaluran DAU Tahun 2023; dan
2. Belanja Bunga tersebut di atas merupakan pembayaran atas bunga pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor PERJ-145A/SMI/0921 Tahun 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp75.000.000.000,00 dengan masa pinjaman delapan tahun dikenakan bunga pinjaman sebesar 6,19% atau dengan skema bunga sebagai berikut.
   a. periode perhitungan bunga untuk masing-masing penarikan pinjaman akan dimulai pada tanggal penarikan pinjaman sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing-masing bulan dimana penarikan pinjaman dilakukan;
   b. periode perhitungan bunga berikutnya akan dimulai pada tanggal pembayaran bunga sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan;
   c. periode perhitungan bunga terakhir akan dimulai sejak tanggal pembayaran bunga sebelumnya dan terakhir serta dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pinjaman; dan
   d. pada masa *Availability Period* dan dalam hal terdapat penarikan pinjaman dimana Pihak Pertama telah melaksanakan perhitungan DTU, maka kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga akan diperhitungkan pada periode pembayaran pokok dan/atau bunga berikutnya.
3. Rincian saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.3***.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	60.000.000,00	59.360.000,00	98,93	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.338.491.200,00	21.270.127.948,00	99,68	2.264.520.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.025.000.000,00	1.540.000.000,00	76,05	3.154.381.859,27
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	54.304.375.000,00	51.727.890.853,00	95,26	2.868.220.037,00
• Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772.467.238,00	772.467.238,00	100,00	772.467.238,00
Jumlah	**78.570.333.438,00**	**75.439.846.039,00**	**96,02**	**9.234.589.134,27**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp75.439.846.039,00 atau sebesar 96,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.570.333.438,00; dan
   b. Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp66.205.256.904,73 atau sebesar 716,93% dibandingkan dengan TA 2022. Kenaikan belanja hibah yang sangat meningkat yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp66.320.896.904,73 atau sebesar 800,29% dibandingkan TA 2022;
2. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa hasil kegiatan pembangunan ruang pelayanan terpadu satu pintu di rumah tahanan negara kelas IIB yang didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli Tahun 2023 Nomor 641.6/2562/NPHD/PUPERKIM/2023 tentang Hibah Hasil Kegiatan Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disajikan pada ***Lampiran 2.4***;

4. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/46/2023 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Bangli TA 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut.

Partai Politik	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	395.422.596,00	395.422.596,00	100,00	395.422.596,00
Partai Golongan Karya	129.986.758,00	129.986.758,00	100,00	129.986.758,00
Partai Demokrat	97.677.046,00	97.677.046,00	100,00	97.677.046,00
Partai Hati Nurani Rakyat	47.922.978,00	47.922.978,00	100,00	47.922.978,00
Partai Nasional Demokrat	41.893.276,00	41.893.276,00	100,00	41.893.276,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	31.732.016,00	31.732.016,00	100,00	31.732.016,00
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27.832.568,00	27.832.568,00	100,00	27.832.568,00
Jumlah	**772.467.238,00**	**772.467.238,00**	**100,00**	**772.467.238,00**

5. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah kepada Sekolah Swasta di Kabupaten Bangli sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	252.696.000,00	183.661.000,00	72,68	246.096.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000,00	9.960.000,00	99,60	6.934.998,00
Jumlah	**262.696.000,00**	**193.621.000,00**	**73,71**	**253.030.998,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp193.621.000,00 atau sebesar 73,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp262.696.000,00 yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), sedangkan Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu berupa bantuan alat bantu (kursi roda) kepada penyandang disabilitas. Tidak tercapainya realisasi Belanja Bantuan Sosial terbesar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disebabkan karena pada saat perencanaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menghitung anggaran per jumlah siswa, namun pada saat pelaksanaannya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hanya memberikan BSM kepada sekolah-sekolah yang telah memenuhi proposal kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, berdasarkan SK Bupati Bangli Nomor 420/507/2023 tentang Nama-nama Penerima

Bantuan Siswa Miskin untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2023; dan

b. Sedangkan untuk Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Dinas Sosial yang berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.025.002,00 atau sebesar 43,62% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena bertambahnya penerima bantuan kursi roda sesuai dengan yang tercantum pada SK Bupati Bangli Nomor 461/48/2023 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023.

2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) sesuai dengan SK Bupati Bangli Nomor 420/507/2023 tentang Nama-nama Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2023 , sedangkan Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu berupa bantuan alat bantu (kursi roda) kepada penyandang disabilitas sesuai dengan SK Bupati Bangli Nomor 461/48/2023 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023. Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2023 dianggaran dan realisasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli.
4. Rincian saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.5***.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	71,93	14.134.423.669,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	26.585.584.992,00	24.351.077.732,00	91,60	60.358.662.837,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	189.302.850.759,00	133.121.744.861,03	70,32	180.104.496.229,81
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.985.978.652,00	45.773.863.865,78	72,67	37.746.357.806,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	822.795.300,00	85.109.295,00	10,34	1.585.342.300,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	543.824.700,00	538.658.527,50	99,05	0,00
Jumlah	**291.056.034.403,00**	**211.649.206.855,31**	**72,72**	**293.929.282.841,81**

Penjelasan:
Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	71,93	14.134.423.669,00
Jumlah	**10.815.000.000,00**	**7.778.752.574,00**	**71,93**	**14.134.423.669,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Capaian realisasi Belanja Modal – Tanah sebesar Rp7.778.752.574,00 atau sebesar 71,93% dari anggaran sebesar Rp10.815.000.000,00
   b. Capaian realisasi Belanja Modal - Tanah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.355.671.095,00 atau sebesar 27,99% dibandingkan dengan TA 2022, yang merupakan kelanjutan pengadaan tanah TA 2023 untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga yang anggaran dan realisasinya dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli
2. Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	18.200.000,00	9.311.670,00	51,16	2.259.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.287.500.000,00	2.227.997.500,00	97,40	302.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.472.850.000,00	1.430.985.900,00	97,16	146.736.640,00
Belanja Modal Alat Pertanian	187.679.200,00	165.680.000,00	88,28	136.974.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.175.581.311,00	6.618.115.562,00	92,23	3.684.740.327,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.688.871.903,00	2.438.879.110,00	90,70	2.962.003.299,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.794.631.903,00	2.349.268.187,00	84,06	23.898.363.582,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.652.672.250,00	1.599.760.447,00	96,80	2.634.784.397,00
Belanja Modal Komputer	6.623.032.815,00	6.014.925.726,00	90,82	26.295.297.301,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	3.413.250,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.500.000,00	2.850.000,00	81,43	186.904.999,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.533.020.000,00	1.342.000.795,00	87,54	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	58.000.000,00	56.274.225,00	97,02	105.186.042,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Olahraga	90.045.610,00	95.028.610,00	105,53	0,00
Jumlah	**26.585.584.992,00**	**24.351.077.732,00**	**91,60**	**60.358.662.837,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp36.007.585.105,00 atau sebesar 59,66% dibandingkan dengan TA 2022. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan karena arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli masih mengarah pada peningkatan infrastruktur sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangli, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026; dan
   b. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp24.351.077.732,00 atau sebesar 91,60% dari anggaran sebesar Rp26.585.584.992,00. Beberapa hal yang menjelaskan realisasi belanja modal capaian dibawah 75% dari target yaitu, Belanja modal Pengadaan Alat Besar pada Tahun 2023 terealisasi 51,16% merupakan pengadaan pada Dinas PUPRPERKIM dan BPBD Damkar, dimana realisasi Pengadaan Alat Besar pada BPBD Damkar telah mencapai 95,45%, sedangkan pada Dinas PUPRPERKIM realisasinya masih dibawah 50% yaitu sebesar 45,07% dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena harga satuan yang tercantum pada e-Katalog lebih murah dibandingkan dengan harga satuan yang tercantum pada DPA. Sedangkan realisasi belanja modal yang capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga pada Tahun 2023 terealisasi 105,53%, hal ini disebabkan karena kelalaian pengelolaan Dana BOS pada SMP SATAP 4 Kintamani dalam merealisasikan dana BOS Kinerja yang masuk Belanja Modal, dan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat yang realisasinya sebesar 108,44% disebabkan karena adanya kesalahan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Bidang Dikdas) yang tidak menginput pagu anggaran perubahan yang dilaporkan oleh pihak sekolah disebabkan karena sekolah tersebut terlambat menyampaikan perubahan anggaran ke Bidang Dikdas, dan adanya sekolah yang salah dalam merealisasikan belanja sehingga menyebabkan kelebihan belanja pada Pagu Belanja.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	187.088.115.759,00	131.528.470.488,94	70,30	179.392.422.519,81
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.214.735.000,00	1.593.274.372,09	71,94	712.073.710,00
Jumlah	**189.302.850.759,00**	**133.121.744.861,03**	**70,32**	**180.104.496.229,81**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp46.982.751.368,78 atau sebesar 26,09% dibandingkan dengan TA 2022. Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan karena arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli masih mengarah pada peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangli, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026; dan
   b. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp133.121.744.861,03 atau sebesar 70,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp189.302.850.759,00. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan karena adanya penundaan pembayaran atas Transfer Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Provinsi untuk pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut dan akan dibayarkan pada TA 2024.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	57.015.678.647,00	40.153.546.884,00	70,43	37.013.080.394,00
Belanja Modal Bangunan Air	50.790.000,00	49.500.000,00	97,46	321.342.750,00
Belanja Modal Instalasi	467.429.600	445.758.081,00	95,36	207.910.662,00
Belanja Modal Jaringan	5.452.080.405,00	5.125.058.900,78	94,00	204.024.000,00
Jumlah	**62.985.978.652,00**	**45.773.863.865,78**	**72,67**	**37.746.357.806,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.027.506.059,78 atau sebesar 21,27% dibandingkan dengan TA 2022, hal ini disebabkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli masih mengarah pada peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangli, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026;

b. Capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.773.863.865,78 atau sebesar 72,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.985.978.652,00. Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan karena:
   1) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada Dinas PUPRPERKIM sebesar 97,46% diakibatkan karena penawaran kegiatan di bawah 80% sehingga terjadi efisiensi pada belanja pengadaan bangunan air; dan
   2) Realisasi Belanja Modal Jaringan sebesar 94,00% merupakan realisasi dari Belanja Modal Jaringan pada beberapa PD seperti Rumah Sakit Umum Daerah Bangli untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD dengan total anggaran sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.767.000,00 atau sebesar 20,64% dari anggaran. Sesuai dengan Master Plan RSUD Bangli Tahun 2021, dilakukan revitalisasi seluruh bangunan gedung secara bertahap dimulai dengan Gedung 1A dan 1B RSUD Bangli pada Tahun 2021 dan 2022, serta Gedung 2A pada Tahun 2023. Sepanjang Tahun 2023 Pagu Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menyisakan anggaran 79,36%. Hal ini dikarenakan seluruh belanja dioptimalkan untuk operasional pelayanan. Anggaran pembangunan gedung-gedung baru disiapkan sebagai *back-up* untuk menopang pelayanan di RSUD Bangli. Selain hal tersebut, optimalisasi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan secara swakelola, dilaksanakan oleh Instalasi Prasaran dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS). Belanja Modal Jaringan Distribusi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli terealisasi sebesar Rp770.000.000,00 dan pada Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli terealisasi sebesar Rp2.000.000,00. Untuk Belanja Modal Jaringan Transmisi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli dengan realisasi sebesar Rp4.325.006.300,78. Sedangkan Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli untuk kegiatan pengadaan Sambungan Air di Objek Wisata Anjungan Penelokan Kintamani dengan anggaran sebesar Rp3.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.285.600,00 (99,56%).

2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	814.920.300,00	85.109.295,00	10,34	64.346.700,00
Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	595.914.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	7.875.000,00	0,00	0,00	881.281.600,00
*(Salah dr BAS 1317)				
Jumlah	**822.795.300,00**	**85.109.295,00**	**10,34**	**1.585.342.300,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
   a. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.500.233.005,00 atau sebesar 94,63% dibandingkan dengan TA 2022. Penurunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disebabkan pada TA 2023 tidak dianggarkan dan direalisasikan untuk Pengadaan Biota Perairan dan Pengadaan Tanaman, serta rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2023;
   b. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp85.109.295,00 atau sebesar 10,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp822.795.300,00. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan karena:
      1) Untuk Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada Tahun 2023 tercapai realisasi hanya 10,44%. Realisasi tersebut tidak optimal karena dilakukan pergeseran perencanaan di Satuan Pendidikan mengingat ada kegiatan yang lebih prioritas namun tetap dalam satu kegiatan Belanja Modal. Pergeseran RKAS dapat dilakukan beberapa kali, sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Pasal 8 ayat 4 poin menyebutkan bahwa penanggung jawab dana BOS Satdikmen Negeri maupun Swasta adalah melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan ketua komite serta Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip:
         - fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
         - efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
         - efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
         - akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
         - transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
      2) Untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2023 tidak terealisasi disebabkan karena belanja tersebut merupakan Belanja Modal Software-Belanja Lisensi Keamanan Digital (SSL) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangli tidak dapat direalisasikan diakibatkan kendala sebagai berikut:
         - paket pekerjaan ini merupakan jenis Pengadaan Barang tak benda/tak berwujud yang karakteristiknya adalah barang pakai habis yaitu Software Liesensi yang masa aktifnya hanya selama satu tahun;
         - akibat penyusunan Anggaran pada Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) paket pekerjaan tersebut dicantumkan pada rekening Belanja Modal pada rekening Belanja 5.2.05.08.01.0005; dan

3) Berdasarkan kondisi poin 1) dan 2) di atas, maka terdapat kendala bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat direalisasikan karena bukan merupakan Barang/Aset Tetap. Untuk dapat direalisasikan pada rekening Belanja Modal.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud				
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - *Software*	158.824.700,00	158.114.743,50	99,55	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	310.000.000,00	306.043.784,00	98,72	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	75.000.000,00	74.500.000,00	99,33	0,00
Jumlah	**543.824.700,00**	**538.658.527,50**	**99,05**	**0,00**

Penjelasan

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp538.658.527,50 atau sebesar 100% dibandingkan dengan TA 2022, hal ini disebabkan karena Tahun anggaran 2022 tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Aset Lainnya; dan
   b. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 sebesar Rp538.658.527,50 atau sebesar 99,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp822.795.300,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	2.102.258.760,00	0,00	0,00	2.430.457.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 tidak ada realisasi Belanja Tak Terduga, hal tersebut disebabkan karena Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Dikarenakan pada Tahun 2023 kondisi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam keadaan kondusif atau tidak terjadi bencana, maka Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	100,00	6.717.100.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	99,95	134.394.957.268,00
Jumlah	**166.497.150.100,00**	**165.985.107.010,00**	**99,69**	**141.112.057.268,00**

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.923.901.500,00	4.923.901.500,00	100,00	2.192.139.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.093.500.600,00	7.093.500.600,00	100,00	4.524.961.000,00
Jumlah	**12.017.402.100,00**	**12.017.402.100,00**	**100,00**	**6.717.100.000,00**

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.300.302.100,00 atau sebesar 78,91% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan anggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Belanja Transfer Bagi Hasil juga mengalami peningkatan karena Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan Beban Transfer Bagi hasil adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Reribusi Daerah Kabupaten Bangli;
2. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 68 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4.1***; dan
3. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 68 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepada Desa Tahun Anggaran 2023. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4.2.***

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.083.252.000,00	145.074.132.050,00	99,99	127.877.985.470,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.396.496.000,00	8.893.572.860,00	94,65	6.516.971.798,00
Jumlah	**154.479.748.000,00**	**153.967.704.910,00**	**99,67**	**134.394.957.268,00**

Penjelasan:

1. Capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.572.747.642,00 atau sebesar 14,56% dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemda untuk menaikkan anggaran ADD, akibat adanya kenaikan belanja yang bersumber dari Dana Desa mengingat Dana Desa yang harus sepenuhnya dianggarkan untuk Desa, adanya kebijakan Pemda untuk pengganggaran Bantuan Keuangan Khusus Program Samsara. Rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 5.1;***
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada:
   a. Bantuan Keuangan Umum kepada Desa
      1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
      2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
      3) Peraturan Bupati Bangli Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

      Transfer Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bangli disalurkan kepada 68 Desa dengan rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 5.2;***
   b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
      1) Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program Sadia Satya Membangun Menuju Kesejahteraan;
      2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
      3) Keputusan Bupati Bangli Nomor 460/738/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 460/240/2023 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Program Sadia Satya Membangun Menuju Kesejahteraan Tahun Anggaran 2023;

      Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bangli disalurkan kepada 68 Desa dengan rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 5.3.***

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	100,00	178.295.260.106,06
Pengeluaran Pembiayaan	996.897.055,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**39.885.809.824,00**	**40.883.452.335,71**	**102,50**	**175.295.260.106,06**

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	100,00	117.202.607.549,06
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	61.092.652.557,00
Jumlah	**40.882.706.879,00**	**40.883.452.335,71**	**100,00**	**178.295.260.106,06**

Penjelasan:
Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp137.411.807.770,35 atau sebesar 77,07%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya, dimana hal tersebut tergantung dari tinggi rendahnya SiLPA tahun sebelumnya, dan juga karena terdapat Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp61.092.652.557,00 pada TA 2022.

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	7.324.254.804,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	33.558.452.075,00	40.882.706.881,96	121,83	117.208.560.191,51
Koreksi SiLPA	0,00	745.453,75	0,00	(5.952.642,45)
Jumlah	**40.882.706.879,00**	**40.883.452.335,71**	**100,00**	**117.202.607.549,06**

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	61.092.652.557,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.092.652.557,00**

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2021 telah menerima Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp75.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Bangli dengan jangka waktu delapan tahun terhitung mulai Bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2029 dengan tingkat bunga 6,19% dan metode perhitungan bunga yaitu:

1. periode perhitungan bunga untuk masing-masing penarikan pinjaman akan dimulai pada tanggal penarikan pinjaman sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing-masing bulan dimana penarikan pinjaman dilakukan;
2. periode perhitungan bunga berikutnya akan dimulai pada tanggal pembayaran bunga sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan; dan
3. periode perhitungan bunga terakhir akan dimulai sejak tanggal pembayaran bunga sebelumnya dan terakhir serta dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pinjaman.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	996.897.055,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**996.897.055,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**

Penjelasan:
Capaian Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00, hal ini disebabkan karena TA 2023 tidak mengganggarkan dan merealisasikan Penyertaan Modal Daerah, serta pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak merealisasikan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
• PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroan)	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 tidak melakukan penyertaan modal pada BUMD.

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	996.897.055,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	996.897.055,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 tidak membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dari total nilai pinjaman sebesar Rp75.000.000.000,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp71.776.582.257,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.2.2 dan Poin 5.3.2.1.3***.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ **Pendapatan Daerah**				
✓ Pendapatan Asli Daerah	255.527.244.826,00	219.918.641.353,81	86,06	144.005.842.858,50
✓ Pendapatan Transfer	1.114.886.421.100,00	1.041.925.817.049,00	93,46	960.732.038.900,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	919.735.000,00	2.824.130.306,39	307,06	702.617.710,00
➢ **Belanja Daerah**				
✓ Belanja Operasi	951.563.767.487,00	914.648.663.716,91	96,12	802.381.255.582,79
✓ Belanja Modal	291.056.034.403,00	211.649.206.855,31	72,72	293.929.282.841,81
✓ Belanja Tak Terduga	2.102.258.760,00	0,00	0,00	2.430.457.000,00
➢ **Transfer Daerah**				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	100,00	6.717.100.000,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	99,67	134.394.957.268,00
➢ **Pembiayaan Daerah**				
✓ Penerimaan Pembiayaan	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	100,00	178.295.260.106,06
✓ Pengeluaran Pembiayaan	996.897.055,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	**0,00**	**13.269.063.462,69**	**0,00**	**40.882.706.881,96**

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp13.269.063.462,69 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	
✓ Dana pada Kas di BLUD	2.575.866.509,58
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	246.105.211,68
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00
✓ Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Pariwisata	351.798.869,00
» DAK Fisik Bidang Perindustrian	3.714.945.100,00
» DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP	922.500,00
» DAK Fisik Bidang Jalan	46.886,43
✓ Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik – TPG PNSD	1.538.373.000,00
» Dana Non Fisik – Tamsil Guru PNSD	29.000.000,00
» Dana Non Fisik – PK2UKM	5.001.000
» Dana Non Fisik - PPPA	232.587.760
➢ **Dana SiLPA Non-Terikat**	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00
Jumlah	**13.269.063.462,69**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43
Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	2.575.866.509,58
Kas Dana BOS	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOSP	246.105.211,68
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00
Jumlah	**13.269.063.462,69**

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada ***Poin 5.5.9*** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.3*** dan ***Poin 5.2.5***. Jumlah tersebut tidak termasuk Kas Lainnya sebesar Rp4.041.000,00 yang merupakan sisa dana Jampersal yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada 5 Maret 2024.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Bangli (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33
Kas di Bendahara Penerimaan	398.411.000,00	51.528.600,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.916.900,00	0,00
Kas di BLUD	4.621.882.096,23	58.233.673.614,89
Kas Dana BOS	722.912.155,88	711.610.259,29
Koreksi PFK BOS	(745.454,00)	(1.083.035,000)
Jumlah	**40.882.706.881,96**	**117.208.560.191,51**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.
Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 tidak sama dengan Saldo Akhir Kas pada LAK Tahun 2022 karena tidak termasuk Kas Lainnya sebesar Rp1.587.451.478,39 yang baru diakui sebagai pendapatan pada Tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	40.883.452.335,71	117.202.607.549,06

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin 5.2.5*** di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	13.269.063.462,69	40.882.706.881,96

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada

tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***Poin 5.2.5*** di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi SiLPA atas Pendapatan Bunga BOS TA 2020	0,00	(41.352,02)
Koreksi SiLPA karena Utang Pajak PPN SDN 5 Yang Api sudah dibayarkan TA 2021	0,00	337.581,00
Koreksi SiLPA atas Pendapatan Bunga Kas BOS TA 2022	0,00	(37.399,75)
Koreksi SiLPA atas Kas BOS karena sekolah tutup (SDN 3 Dausa)	0,00	(6.211.471,68)
Koreksi SiLPA atas saldo awal dana BOS karena kesalahan catat pada SMP 4 Tembuku TA 2023	(0,25)	0,00
Koreksi SiLPA karena Utang Pajak PPN TA 2020 pada SDN 1 Belantih yang sudah dibayarkan TA 2023	745.454,00	0,00
Jumlah	**745.453,75**	**(5.952.642,45)**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43	35.085.330.183,85
Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00	398.411.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.916.900,00
Kas di BLUD	2.575.866.509,58	4.621.882.096,23
Kas Dana BOS	0,00	722.912.155,88
Kas Dana BOSP	246.105.211,68	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00	0,00
Jumlah	**13.269.063.462,69**	**40.882.706.881,96**

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***Poin 5.2.3*** di atas. Jumlah tersebut tidak termasuk Kas Lainnya sebesar Rp4.041.000,00 yang merupakan sisa dana Jampersal yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada 5 Maret 2024.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli untuk per tanggal 31 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut.

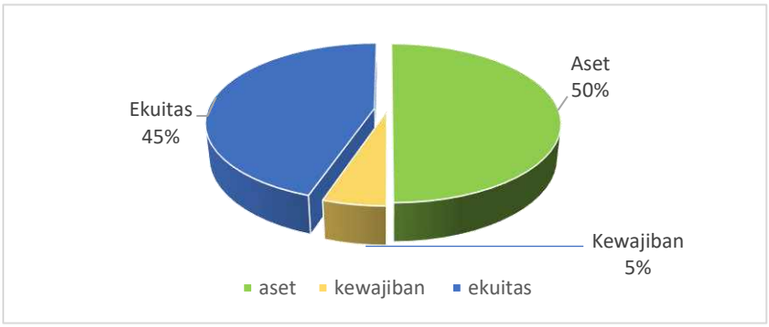

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	121.448.424.706,93	108.732.696.272,71	12.715.728.434,22	11,69
Investasi Jangka Panjang	70.932.505.561,52	68.396.974.646,40	2.535.530.915,12	3,71
Aset Tetap	1.430.912.409.516,22	1.322.302.236.652,85	108.610.172.863,37	8,21
Properti Investasi	9.583.818.301,00	0,00	9.583.818.301,00	100,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	16.514.672.290,99	18.528.947.615,38	(2.014.275.324,39)	(10,87)
Jumlah	**1.649.391.830.376,66**	**1.517.960.855.187,34**	**131.430.975.189,32**	**8,66**

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Aset Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	13.273.104.462,69	42.470.903.814,35	(29.197.799.351,66)	(68,75)
Piutang Pendapatan	124.646.895.920,58	72.775.811.963,85	51.871.083.956,73	71,28
Penyisihan Piutang	(28.916.300.643,63)	(27.854.226.847,91)	(1.062.073.795,72)	3,81
Beban Dibayar Dimuka	467.195.008,72	511.080.692,61	(43.885.683,89)	(8,59)
Persediaan	11.977.529.958,57	20.829.126.649,81	(8.851.596.691,24)	(42,50)
Jumlah	**121.448.424.706,93**	**108.732.696.272,71**	**12.715.728.434,22**	**11,69**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas Tetap Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Aset Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43	35.085.330.183,85	(29.212.655.068,42)	(83,26)
Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00	398.411.000,00	347.236.866,00	87,16
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.916.900,00	(54.916.900,00)	(100,00)
Kas di BLUD RSUD	546.772.275,18	3.116.826.347,75	(2.570.054.072,00)	(82,46)
Kas di BLUD Puskesmas	2.029.094.234,40	1.505.055.748,48	524.038.485,92	34,82
Kas di Bendahara BOS	246.105.211,68	722.912.155,88	(476.806.944,20)	(65,96)
Kas Lainnya	4.041.000,00	1.587.451.478,39	(1.583.410.478,39)	(99,75)
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00	0,00	3.828.768.760,00	100,00
Jumlah	**13.273.104.462,69**	**42.470.903.814,35**	**(29.197.799.351,66)**	**(68,75)**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43	35.085.330.183,85	(29.212.655.068,42)	(83,26)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah Nomor 01.00.00221-0 di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali). Jumlah Kas di Kas Daerah diatas merupakan saldo setelah rekonsiliasi bank yang dilakukan antara pihak BPD Bali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	726.197.000,00	386.413.000,00	339.784.000,00	87,93
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.751.000,00	11.998.000,00	753.000,00	6,28
Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	100,00
Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.434.866,00	0,00	5.434.866,00	100,00
Jumlah	**745.647.866,00**	**398.411.000,00**	**347.236.866,00**	**87,16**

Dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp398.411.000,00 tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023. Rincian penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan berikut ini:

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 sebesar Rp726.197.000,00 merupakan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang masih disimpan oleh petugas pemungut di pengelola masing-masing objek wisata yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian:

No	DTW	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Objek Wisata Kintamani	272.795.000,00	02/01/2024
2	Objek Wisata Penulisan	830.000,00	02/01/2024
3	Objek Wisata Kehen	3.825.000,00	02/01/2024
4	Objek Wisata Penglipuran	447.817.000,00	02/01/2024
5	Objek Wisata Trunyan	930.000,00	02/01/2024
Jumlah		**726.197.000,00**	

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Saldo tersebut merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar yang masih disimpan oleh petugas pemungut di masing-masing pasar dan belum sempat disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian:

No	DTW	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Pasar Kidul	7.433.000,00	02/01/2024
2	Pasar Yang Api	694.000,00	03/01/2024
3	Pasar Kintamani	1.568.000,00	02/01/2024
4	Pasar Kayuambua	2.541.000,00	02/01/2024
5	Pasar Catur	515.000,00	03/01/2024
Jumlah		**12.751.000,00**	

c. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

Saldo tersebut merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar hewan yang masih disimpan oleh petugas pemungut di Pasar Hewan Kayuambua sebesar Rp1.265.000,00 yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan sudah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2024

d. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Saldo tersebut merupakan pendapatan pajak restoran dari wajib pajak yang masih disimpan dalam rekening titipan Bank BPD Bali, sebesar Rp5.434.866,00 yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan sudah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2024, dengan rincian

No	Jenis Penerimaan	Objek Pajak	Jumlah
1	Pajak Hotel	Tukad Sari Camping	272.500,00
2	Pajak Hotel	Batur Cozy Bali	1.200.000,00
3	Pajak Hotel	Pinggan Hill Glamping	2.350.000,00
4	Pajak Rumah Makan	ACK Banjar Kawan	641.800,00
5	Pajak Air Tanah	I Komang Swastawa	432.000,00
6	Pajak Air Tanah	I Komang Swastawa/Ketut Ratep	432.000,00
Jumlah			5.328.300,00

No	Jenis Penerimaan	Objek Pajak	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Denda Pajak Hotel	Tukad Sari Camping	5.450,00	02/01/2024
2	Denda Pajak Hotel	Batur Cozy Bali	24.000,00	02/01/2024
3	Denda Pajak Hotel	Pinggan Hill Glamping	47.000,00	02/01/2024
4	Denda Pajak Rumah Makan	ACK Banjar Kawan	12.836,00	02/01/2024
5	Denda Pajak Air Tanah	I Komang Swastawa	8.640,00	02/01/2024
6	Denda Pajak Air Tanah	I Komang Swastawa/Ketut Ratep	8.640,00	02/01/2024
Jumlah			**106.566,00**	

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	54.916.900,00	(54.916.900,00)	(100,00)

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD terdiri dari BLUD RSUD Bangli sebesar Rp546.772.275,18 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp2.029.094.234,40 dengan rincian sebagai berikut.

Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Saldo awal rekening BLUD	3.116.826.347,75	54.319.971.217,68	(51.203.144.869,93)
Penerimaan BLUD	85.056.652.663,42	50.313.655.386,24	34.742.997.277,18
Pengeluaran BLUD	(87.646.273.815,99)	(101.523.938.856,17)	13.877.665.040,18
Saldo Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	19.567.080,00	7.138.600,00	12.428.480,00
Jumlah	**546.772.275,18**	**3.116.826.347,75**	**(2.570.054.072,57)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang terdapat di rekening BPD Bali dengan Nomor 020.01.05.00401-9 sebesar Rp527.205.195,18 dan Saldo Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD sebesar Rp19.567.080,00

Tahun 2023 BLUD RSUD melakukan transfer ke kas daerah sebesar Rp13.504.687.363,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Pembayaran bunga utang PEN	27 Desember 2023	4.504.678.363,00
2	Penyetoran ke Kas Daerah untuk membaiayai kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bangli	29 Desember 2023	9.000.000.000,00
	Jumlah		**13.504.678.363,00**

Untuk memberikan keyakinan kepada pembaca, diungkapkan bahwa laporan keuangan BLUD RSU telah diaudit oleh KAP dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00056/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2024 tanggal 9 April 2024.

Kas di BLUD Puskesmas

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 440.05/197/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bangli tanggal 26 Januari 2022, maka Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bangli menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan penetapan ini maka Unit Pelayanan Puskesmas Kabupaten Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah saldo merupakan Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Puskesmas	No. Rekening	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Bangli	020.01.05.00147-6	79.737.309,54	37.063.355,10
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	272.549.333,92	202.218.308,01
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	305.034.347,79	270.895.630,06
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	7.940.409,93	31.672.863,49
5	Susut I	020.01.05.00148-0	89.056.159,55	143.663.635,79
6	Susut II	020.01.05.00147-2	263.111.343,17	99.120.990,63
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	219.505.191,70	142.459.887,05
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	346.642.964,59	236.532.994,69
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	121.122.368,65	112.150.300,39
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	98.024.642,16	39.623.431,44
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	11.270.769,62	177.783.227,64
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	215.099.493,78	11.871.124,10
	Jumlah		**2.029.094.234,40**	**1.505.055.748,48**

Saldo di Kas BLUD per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari saldo di rekening bank dan saldo tunai, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Puskesmas	No. Rekening	Saldo RC Bank	Saldo Tunai	Jumlah
1	Bangli	020.01.05.00147-6	79.565.809,54	171.500,00	79.737.309,54
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	272.518.833,92	30.500,00	272.549.333,92
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	305.034.347,79	0,00	305.034.347,79
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	7.753.409,93	187.000,00	7.940.409,93
5	Susut I	020.01.05.00148-0	88.296.159,55	760.000,00	89.056.159,55
6	Susut II	020.01.05.00147-2	263.111.343,17	0,00	263.111.343,17
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	217.111.191,70	2.394.000,00	219.505.191,70
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	346.642.964,59	0,00	346.642.964,59
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	121.122.268,65	0,00	121.122.368,65
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	98.024.642,16	0,00	98.024.642,16
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	11.270.769,62	0,00	11.270.769,62
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	214.630.493,78	0,00	215.099.493,78
Jumlah			**2.025.082.234,40**	**4.012.000,00**	**2.029.094.234,40**

Untuk memberikan keyakinan pada pembaca diungkapkan bahwa laporan keuangan BLUD telah diaudit oleh KAP. Berikut rincian Laporan Audit Independen dan Laporan Keuangan BLUD.

No.	Puskesmas	No. LAI	Tanggal LAI
1	Bangli	00169/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
2	Bangli Utara	00170/3.0290/AU.5/11/1183-4/1/III/2024	30 Maret 2024
3	Tembuku I	00165/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
4	Tembuku II	00166/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
5	Susut I	00167/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
6	Susut II	00168/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
7	Kintamani I	00159/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
8	Kintamani II	00160/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
9	Kintamani III	00161/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
10	Kintamani IV	00162/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
11	Kintamani V	00163/3.0290/AU.5/11/1183-2/1/III/2024	30 Maret 2024
12	Kintamani VI	00164/3.0290/AU.5/11/1183-4/1/III/2024	30 Maret 2024

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara BOS	0,00	722.912.155,88	(722.912.155,88)	(100,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOS Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Pengalihan saldo ke Kas di Bendahara BOSP dapat dilihat pada ***Lampiran 6***.

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOSP

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara BOSP	246.105.211,68	0,00	246.105.211,68	100,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOSP Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Pada TA 2023, akun Kas di Bendahara BOS tidak digunakan dan dialihkan ke akun Kas di Bendahara BOSP. Rincian dapat dilihat di ***Lampiran 6***.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00	0,00	0,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana BOK Pusksmas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa penyaluran Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke kas rekening puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli mengeluarkan Surat Kepetusan Bupati Bangli Nomor 900/163/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening pada Puskesmas untuk Pengelolaan Dana Operasional Kesehatan. Dana tersebut disimpan di rekening Bank BNI. Adapun rincian saldo per 31 Desember 2023 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut.

No.	Puskesmas	No. Rekening	Saldo 31 Des (Rp)
1	Bangli	1590016622	323.526.090,00
2	Bangli Utara	1590016702	373.378.072,00
3	Tembuku I	1590016666	257.888.054,00
4	Tembuku II	1590016655	311.387.854,00
5	Susut I	1590016644	322.975.148,00
6	Susut II	1590016688	302.677.360,00
7	Kintamani I	1590016713	397.900.768,00
8	Kintamani II	1590016699	359.835.446,00
9	Kintamani III	1590016600	185.646.620,00
10	Kintamani IV	1590016633	347.526.899,00
11	Kintamani V	1590016611	321.087.516,00
12	Kintamani VI	1590016677	324.938.933,00
Jumlah			**3.828.768.760,00**

5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Lainnya	4.041.000,00	1.587.451.478,39	(1.583.410.478,39)	(99,75)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 berupa sisa dana Jampersal yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Maret 2024.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	62.974.494,55	235.859.995,55	(172.885.501,00)	(73,30)
Piutang Pajak Restoran	1.268.618.160,30	1.444.450.765,30	(175.832.605,00)	(12,17)
Piutang Pajak Reklame	3.587.380,00	2.649.880,00	937.500,00	35,38
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.029.209.946,00	876.496.630,00	152.713.316,00	17,42
Piutang Pajak Air Tanah	853.101.076,50	793.973.820,50	59.127.256,00	7,45
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	35.491.028.940,00	35.359.716.655,00	131.312.285,00	0,37
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	84.000.000,00	90.000.000,00	(6.000.000,00)	(6,67)
Piutang Pajak Hiburan	7.236.574,43	13.959.574,43	(6.723.000,00)	(48,16)

Jumlah	**38.799.756.571,78**	**38.817.107.320,78**	**(17.350.749,00)**	**(0,04)**

Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2023 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut penjelasan atas saldo Piutang Pajak tersebut:

a. Piutang Pajak Hotel merupakan saldo tagihan Pajak Hotel yang belum disetor WP sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang Pajak Hotel tersebut merupakan saldo tagihan kepada 34 WP Hotel sebesar Rp62.974.494,55. Piutang Pajak Hotel dapat dilihat pada ***Lampiran 7****;*
b. Piutang Pajak Restoran merupakan saldo tagihan Pajak Restoran yang belum disetor WP sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang Pajak Restoran tersebut merupakan saldo tagihan kepada 96 WP Restoran sebesar Rp1.268.618.160,30. Pajak Restoran dapat dilihat pada ***Lampiran 8****;*
c. Piutang Reklame merupakan saldo tagihan Pajak Reklame yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Piutang Reklame adalah tagihan atas pajak pemasangan reklame oleh pengusaha. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 31 WP sebesar Rp3.587.380,00. Rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada ***Lampiran 9****;*

   Terjadi penurunan piutang pajak hotel, restoran di tahun 2023. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dengan melakukan optimalisasi Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal pembinaan terhadap WP dan Surat Kuasa Khusus hal penagihan piutang pajak daerah yang nilai minimalnya Rp10.000.000,00 serta mengeluarkan kebijakan berupa Perbub Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda Pajak Daerah Terhutang Nomor 63 Tahun 2023 yang ditetapkan per tanggal 28 Desember 2022 dimana banyak WP yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan pembayaran piutang pajaknya.
d. Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan saldo tagihan Pajak Penerangan Jalan yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan tagihan PPJ bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya sebesar Rp1.029.209.946,00;
e. Piutang Pajak Air Tanah merupakan saldo tagihan Pajak Air Tanah yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 31 WP sebesar Rp853.101.076,50. Rincian Piutang Pajak Air Tanah dapat dilihat pada ***Lampiran 10****;*
f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan piutang PBB-P2 yang diserahterimakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-26/WPJ.17/KP.07/2014 tanggal 27 Januari 2014. PBB-P2 dipungut berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 di tahun 2016 untuk dapat menyajikan nilai piutang yang lebih akurat. Berikut penjelasan atas proses pelaksanaan verifikasi dan validasi piutang PBB-P2:
   1) Pada tahun 2023 dilakukan validasi terhadap 7.941 NOP di Kecamatan Tembuku pada enam wilayah yaitu Desa Yangapi, Bangbang, Jehem, Peninjoan, Tembuku dan Undisan dengan hasil 7.535 NOP diakui dan 406 NOP tidak diakui yang akan diusulkan untuk dihapuskan dengan rincian sebagai berikut. Desa Yangapi 303 NOP diakui dan 2 NOP tidak diakui, Desa Bangbang 1.095 NOP diakui dan 43 NOP tidak diakui, Desa Jehem 2.688 NOP diakui dan 243 NOP tidak diakui, Desa Peninjoan 525 NOP diakui dan 16 NOP tidak diakui, Desa Tembuku 1.790 NOP diakui dan 66 NOP tidak diakui, Desa Undisan 1.134 NOP diakui dan 406 NOP tidak diakui. Tim yang melakukan validasi tertuang dalam Keputusan Bupati Bangli Nomor 973.05/1075/2022 tentang Tim Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023. Tingginya NOP yang tidak diakui berpengaruh besar pada peningkatan piutang PBB-P2 Tahun 2023;

2) Piutang pajak PBB-P2 sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.491.028.940,00; dan
3) Terdapat selisih nilai piutang antara neraca dengan di Sismiop sebesar Rp497.841.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh dua hal, yang pertama merupakan selisih piutang kategori macet atas data piutang sebelum Tahun 2014 yang disebabkan perbedaan nilai yang ada di BAST dengan Basis Data PBB yang diserahkan ke Pemkab Bangli oleh KPP Pratama. Penyebab kedua adalah adanya *bug/error* pada sistem sinkronisasi pembayaran yang berakibat terjadi selisih jumlah pengurangan antara data pembayaran dengan data SPPT yang terbayar pada database SPPT, data SPPT terbayar dengan data pembayaran (lebih besar data pembayaran daripada jumlah data SPPT yang statusnya terbayar untuk tahun data piutang sebelum tahun 2014).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bidang PBB dan BPHTB bersama dengan Bidang PDRL mengeluarkan kebijakan berupa Perbub Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda Pajak Daerah Terhutang Nomor 63 Tahun 2023 yang ditetapkan per tanggal 28 Desember 2022 dan melakukan penagihan secara langsung ke desa-desa sesuai dengan permintaan dari desa setempat.

g. Piutang BPHTB pada 31 Desember 2023 sebesar Rp84.000.000,00. Piutang ini timbul berdasarkan tagihan pembayaran BPHTB yang dipungut berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
h. Piutang Pajak Hiburan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.236.574,43 yang merupakan piutang terhadap pada PT Toyo Bungkah Villas dan Tira Vilagna (Spa).

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Kebersihan/ Persampahan	24.379.000,00	28.324.000,00	(3.945.000,00)	(13,93)
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.210.000,00	142.135.000,00	(71.925.000,00)	(50,60)
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	254.906.495,67	251.448.095,81	3.458.399,86	1,38
Jumlah	**349.609.495,67**	**422.021.095,81**	**(72.411.600,14)**	**(17,16)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang telah terbit ketetapan retribusi namun belum terealisasi pembayarannya dari wajib retribusi (WR).

Berikut penjelasan atas saldo Piutang Retribusi:

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Jamkesmas sebesar Rp114.000,00 merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan yang ada di Puskesmas;
b. Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan sebesar Rp24.379.000,00 merupakan saldo piutang terhadap 150 WR. Pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan dilaksanakan setiap bulan oleh juru pungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada setiap WR. Di tahun 2023 terjadi penurunan jumlah dan WR dan nilai piutang hal tersebut disebabkan oleh:
   - Adanya beberapa objek retribusi yang sudah tidak beroperasi lagi atau pindah lokasi ke tempat yang tidak lagi mendapat mendapat pelayanan persampahan/kebersihan;
   - Menambah tenaga dalam melakukan pemungutan retribusi sampah, dengan memperbantukan tenaga dari petugas satgas lapangan; dan
   - Adanya Wajib Pajak yang mengurangi jumlah Obyek Wajib Pajaknya berdasarkan DPA Desanya (Desa Kayubihi yang dibuatkan ketetapan 400 KK per bulan, realisasinya 300 KK per bulan).

Rincian Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan dapat dilihat pada ***Lampiran 11***.

c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar Rp70.210.000,00 Piutang tersebut merupakan Saldo Piutang 2022 dan keterlambatan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2023, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran terhadap retribusi dari 6 WR Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk 58 buah menara yang tersebar di Kabupaten Bangli. Tingginya piutang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi disebabkan karena keterlambatan pembayaran dari pihak penyedia menara telekomunikasi serta adanya beberapa menara telekomunikasi yang berpindah tangan/diakuisisi oleh provider lain. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada ***Lampiran 12***.

d. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp254.906.495,67 merupakan pungutan daerah kepada pengguna/pedagang yang menempati tanah/kios/ruko/pasar di Pasar Kidul, Pasar Kayuamba dan Pasar Kintamani dan sewa tanah eks CTA di beberapa desa serta sewa kantin di masing-masing Perangkat Daerah dan sekolah-sekolah dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daearah dan Kantor Camat Tembuku untuk ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Piutang	Jumlah WR Menunggak	Unit Layanan/Lokasi	Nilai (Rp)
1.	Retribusi Pasar	225 WR	Pasar Kidul	19.676.770,00
		262 WR	Pasar Kayuamba	6.123.906,00
		6 WR	Desa Kedisan	1.830.000,00
		219 WR	Pasar Kintamani	23.978.277,00
2.	Sewa Tanah eks CTA	135 orang	Desa Langgahan	14.900.004,00
		152 orang	Desa Satra	45.800.468,00
		32 orang	Desa Mengani	3.515.545,00
		3 orang	Desa Manikliyu	1.197.500,00
		5 orang	Desa Belancan	365.000,00
		45 orang	Desa Selulung	11.943.600,00
		37 orang	Desa Catur	10.919.620,00
		14 orang	Desa Siakin	1.813.350,00
		9 orang	Desa Bunutin	313.514,00
		19 orang	Desa Bayung Cerik	2.571.100,00
3.	Pemanfaatan Kantin	126 orang	Kab Bangli	107.466.666,81
4.	Pemenfaatan Tanah Sekretariat Daerah	1 Unit	Kec. Bangli	1.932.704,92
5	Pemenfaatan Tanah pada Kantor Camat Tembuku	1 Unit	Kec. Tembuku	558.469,95
Jumlah				**254.906.495,67**

Di Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabuapten Bangli telah melakukan upaya panagihan terhadap Piutang Retribusi Pasar yang sudah macet, di tiga unit lokasi layanan retribusi yaitu di Pasar Kidul WR yang dipungut adalah 12 WR sebesar Rp179.900,00, Pasar Kintamani (Singamandawa) 92 WR sebesar Rp3.766.575,00 dan Pasar Kayuambua 64 WR sebesar Rp2.286.300,00

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 13***.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang

diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT BPR Bank Daerah Bangli	2.687.181.030,60	2.600.764.186,00	86.416.844,60	3,32
Perusda Tirta Danu Arta Bangli	2.778.482.881,65	1.024.850.166,71	1.753.632.714,94	171,11
Jumlah	**5.465.663.912,25**	**3.625.614.352,71**	**1.840.049.559,54**	**50,75**

Piutang Bagian Laba Perusda Tirta Danu Arta per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.899.578.999,99 merupakan piutang bagian laba sampai dengan Tahun 2023 yang belum/kurang disetor ke Kas Daerah. Piutang bagian laba merupakan bagian laba atas 55% dari laba (keuntungan) Prusda Tirta Danu Arta. Terdiri dari Rp1.974.060.545,94 piutang Tahun 2023 dan Rp42.193.439,75 piutang bagian laba PDAM Tahun 2022, Rp302.301.234,40 piutang bagian laba Tahun 2021 dan Rp581.023.779,90 piutang bagian laba Tahun 2020. Piutang bagian laba PDAM di Tahun 2023 merupakan bagian laba atas 55% keuntungan Perusda Tirta Danu Arta Tahun 2023 sebesar Rp3.589.200.992,61. Masih tingginya piutang bagian laba disebabkan karena keterbatasan pada Perusda Tirta Danu Arta Bangli.

Piutang bagian laba PT BPR Bank Pasar Bangli sebesar Rp2.641.301.160,30 merupakan bagian laba atas keuntungan PT BPR Pasar Bangli Tahun 2023 yaitu 55% dari Rp4.802.365.746,00 yang belum/kurang disetor ke Kas Daerah. Perhitungan bagian laba ke daerah sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (PERSERODA) tanggal 12 Februari 2024. Persentase pembagian laba tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Pekreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas kedua BUMD tersebut disebabkan karena menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 100%.

Sama seperti tahun sebelumnya PD Bhukti Mukti Bhakti tidak mengakui Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena tidak terdapat pembagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas laba tahun buku 2023 (mengalami kerugian).

Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas kedua BUMD tersebut dikarenakan menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 100%. Untuk PD Bhukti Mukti Bhakti tidak terdapat pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena tidak terdapat pembagian kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas laba tahun buku 2021 (mengalami kerugian).

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Denda Pajak	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00
Piutang Denda Retribusi	5.499.720,20	5.499.720,20	0,00	0,00
Piutang Bunga	0,00	532.789,58	(532.789,58)	(100,00)
Piutang BLUD RSU	6.055.230.680,00	11.567.567.150,00	(5.512.336.470,00)	(47,65)
Piutang BLUD Puskesmas	14.034.316,00	26.314.900,00	(12.280.584,00)	(46,67)
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.336.244,68	151.158.177,77	15.178.066,91	10,04
Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP	598.250.000,00	598.250.000,00	0,00	0,00

Piutang Kelebihan DBH Pajak kepada Desa	0,00	5.947.000,00	(5.947.000,00)	(100,00)
Jumlah	**6.854.570.960,88**	**12.370.489.737,55**	**(5.515.918.776,67)**	**(44,59)**

Penjelasan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas adalah sebagai berikut.

a. Piutang Denda Pajak sebesar Rp15.220.000,00 merupakan Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2023 yang belum dibayar oleh 27 WP Restoran. Rincian Piutang Denda Pajak dapat dilihat pada ***Lampiran 14****;*
b. Piutang Denda Retribusi sebesar Rp5.499.720,20 merupakan Denda Pajak Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023 yang belum dibayar oleh 54 Wajib Retribusi. Rincian Piutang Denda Retribusi dapat dilihat pada ***Lampiran 15****;*
c. Piutang BLUD sebesar Rp6.055.230.680,00 merupakan piutang yang dimiliki RSU Bangli yang pembayarannya belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut.
   1) Piutang Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas pelayanan kesehatan oleh RSUD Bangli kepada masyarakat pengguna JKN yang belum dibayarkan klaimnya dan telah diverifikasi oleh BPJS sebesar Rp6.007.829.900,00 merupakan klaim bulan Desember TA 2023
   2) Piutang Rujukan Parsial pada RSUD Bangli sebesar Rp41.411.580,00;
   3) Piutang Ambulance pasien JKN pada RSUD Bangli sebesar Rp5.989.200,00; dan

   Rincian Piutang BLUD RSUD dapat dilihat pada ***Lampiran 16***.
d. Piutang BLUD Puskesmas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp14.034.316,00 merupakan Klain Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas tahun 2023 yang belum diterima dari BPJS. Rincian Piutang BLUD Puskesmas dapat dilihat pada ***Lampiran 17***.
e. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 sebesar Rp166.336.244,68 terdiri dari:
   1) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir CTKI sebesar Rp142.760.203,68;
   2) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir KPEL sebesar Rp23.576.041,00

   Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dapat dilihat pada ***Lampiran 18 dan 19***.
f. Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kredit Pembelian Gabah KUD tahun 2003	265.250.000,00	265.250.000,00
Penguatan Modal Kopi tahun 2004	318.000.000,00	318.000.000,00
Bantuan UP3HP tahun 2004	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah	**598.250.000,00**	**598.250.000,00**

Kredit Pembelian Gabah KUD terjadi Tahun 2003, Kredit Penguatan Modal Kopi terjadi Tahun 2004, dan Bantuan UP3HP terjadi Tahun 2004. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan upaya-upaya penagihan secara terus menerus mendatangi peminjam, dan informasi yang berhasil diperoleh dari peminjam adalah siap untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi karena terjadi pandemi *Covid-19* pembayaran masih tertunda.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	10.796.256.394,00	8.991.956.798,00	1.804.299.596,00	20,07
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.102.613.864,00	4.368.985.244,00	4.733.628.620,00	108,35
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.952.254.835,00	4.156.075.694,00	2.796.179.141,00	67,28
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	38.817.657,00	23.561.721,00	15.255.936,00	64,75

Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	46.287.352.230,00	0,00	46.287.352.230,00	100,00
Jumlah	**73.177.294.980,00**	**17.540.579.457,00**	**55.636.715.523,00**	**317,19**

Jumlah tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bali yang belum terealisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/684/PADFE/BPKAD tanggal 30 Januari 2024 perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 dan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bali yang belum terealisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli sampai 31 Desember 2023 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 9/03-Q/HK/2024 Tanggal 1 April 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 8/03-Q/HK/2024 Tanggal 1 April 2024 Tentang Kewajiban Belanja Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak	(27.403.003.748,44)	(26.681.020.323,47)	(721.983.424,97)	2,71
Penyisihan Piutang Retribusi	(303.768.381,68)	(306.181.590,81)	2.413.200,91	(0,79)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(468.958.659,66)	(102.420.102,28)	(366.538.557,38)	357,88
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(740.569.853,85)	(764.604.831,35)	24.034.977,40	(3,14)
Jumlah	**(28.916.300.643,63)**	**(27.854.226.847,91)**	**(1.062.073.795,72)**	**3,81**

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 20***.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	**467.195.008,72**	**511.080.692,61**	**(43.885.683,89)**	**(8,59)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Beban Dibayar Dimuka terdiri atas:

1. Sisa belanja sewa *Domain dan Hosting VPS* pada CV Rumah Media selama 1 tahun yang dimulai tanggal 1 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2024 dengan nilai Rp74.000.000,00 sehingga belum jatuh tempo selama 213 hari atau sebesar Rp43.065.573,77 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2. Dan sewa tanah untuk *drag race* berdasarkan akta perjanian sewa tanah nomor 11 tanggal 25 Juli 2022 dan Addendum Sewa Tanah Nomor 3 tanggal 14 desember 2022. Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan sewa tanah di Desa Landih Kec. Bangli untuk *Drag Race* seluas 20.000 m² kepada Ni Luh Murni yang beralamat di Br Palaktiying Desa Landih Kecamatan Bangli, selama 25 tahun yang mulai dari tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2047, dengan nilai Rp450.000.000,00. Sehingga yang belum jatuh tempo adalah selama 8607 hari atau sebesar Rp424.129.434,95 pada Dinas PUPERKIM

Rincian perhitungan beban dibayar dimuka dapat dilihat pada ***Lampiran 21***.

5.3.1.1.4 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	**11.977.529.958,57**	**20.829.126.649,81**	**(8.851.596.691,24)**	**(42,50)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara *stock opname*. Rincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 22***.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 tersebut tidak termasuk dengan persediaan yang telah kedaluwarsa sebesar Rp1.337.526.563,63 yang tersebar pada sepuluh OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3 Rincian Persediaan Kedaluwarsa

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	16.001.800,00
2	Dinas Kesehatan	1.164.391.038,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	20.067.812,04
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.665.670,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.125.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	107.470.242,92
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli	45.000,00
8.	Kecamatan Susut	1.719.000,00
9	BPBD dan Damkar	885.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	156.000,00
Jumlah		**1.337.526.563,63**

Rincian Persediaan kadaluwarsa dapat dilihat pada ***Lampiran 23.***

Jumlah obat yang kadaluarsa di Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp1.478.537.093,86 dan di tahun 2023 melakukan penghapusan atas obat-obatan yang sudah kadaluarsa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli/Pengelola Barang Nomor 032/12/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang ditetapkan tanggal 14 April 2023. Persediaan yang dihapuskan adalah obat-obatan kadaluarsa tahun 2021 pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp314.146.055,35 jadi persediaan kadaluarsa yang belum dihapuskan adalah sebesar Rp1.164.391.038,67. Adapun rincian persediaan yang dihapuskan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Rincian Persediaan Kedaluwarsa yang Belum Dihapuskan

No	Nama	Nilai (Rp)
1	Gudang Farmasi (Dinas Kesehatan)	160.058.493,76
2	Puskesmas Bangli	3.301.316,00
3	Puskesmas Bangli Utara	11.612.418,00
4	Puskesmas Susut I	11.051.676,25
5	Puskesmas Susut II	10.502.233,93
6	Puskesmas Tembuku I	6.263.377,60
7	Puskesmas Tembuku II	10.198.012,80

8	Puskesmas Kintamani I	38.825.493,00
9	Puskesmas Kintamani II	3.683.125,48
10	Puskesmas Kintamani III	1.250.204,00
11	Puskesmas Kintamani IV	14.715.973,65
12	Puskesmas Kintamani V	11.225.660,91
13	Puskesmas Kintamani VI	31.458.069,97
Jumlah		**314.146.055,35**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	227.898.127,47	210.204.167,67	17.693.959,80	8,42
Investasi Jangka Panjang Permanen	70.704.607.434,05	68.186.770.478,73	2.517.836.955,32	3,69
Jumlah	**70.932.505.561,52**	**68.396.974.646,40**	**2.535.530.915,12**	**3,71**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	632.748.525,00	633.348.525,00	(600.000,00)	(0,09)
Penyisihan Invetasi Non Permanen	(404.850.397,53)	(423.144.357,33)	18.293.959,79	(4,32)
Jumlah	**227.898.127,47**	**210.204.167,67**	**17.693.959,79**	**8,13**

1. Dana Bergulir

   Jumlah tersebut merupakan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

   a. Dana Bergulir Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebesar Rp576.000.000,00 dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli. Dana Bergulir CTKI disalurkan dengan pola *channeling*, melalui PT BPR Bank Daerah Bangli (d/h PD Bank Pasar) dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/33/Pem/2011/02/PKS/XII/2011. Dari jumlah Dana Bergulir sebesar Rp576.000.000,00 per 31 Desember 2022, sebesar Rp453.235.672,53 disalurkan kepada CTKI dan sebesar Rp122.764.327,47 belum digulirkan dan berada pada rekening PT BPR Bank Daerah Bangli (d/h PD Bank Pasar) dengan Nomor 330.80.01.00564.2. Pada rekening tersebut terdapat pula dana sebesar Rp365.245,00 yang merupakan kelebihan pembayaran debitur. Dana tersebut belum bisa dikembalikan karena belum diketahui identitas debitur yang melakukan kelebihan pembayaran. Rincian di ***Lampiran 24.***

   b. Dana Bergulir Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) sebesar Rp37.548.525,00 dikelola melalui 2 OPD yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan (OPD lama) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dana KPEL merupakan Program pada Bappeda dan PM berupa pelaksanaan penyaluran Bantuan Kredit Lunak/bunga rendah yang digulirkan sejak tahun 2006 sesuai Keputusan Bupati Bangli No.400/284/2006 tanggal 2 Oktober 2006. Bantuan ini disalurkan melalui PT BPR Bank Daerah Bangli kepada masyarakat/kelompok binaan pada 2 (dua)

PD (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Perindutrian dan Perdagangan), direkomendasikan untuk Kelompok Sari Bambu Banjar Kayubihi Bangli dengan dana awal Rp35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2009 dengan saldo pertanggal 31 Desember 2023 Rp17.098.000,00 tingkat kolektibiltas macet. Direkomendasikan untuk Kelompok Sunia Mandala Br.Karang Suung Kaja, Peninjoan Tembuku dengan dana awal Rp60.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2014 dengan saldo pertanggal 31 Desember 2023 Rp20.450.525,00 tingkat kolektibilitas macet. Rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 25.***

c. Jumlah tersebut merupakan Dana Bergulir Pinjaman Alsintan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.200.000,00 berupa pemberian pinjaman (*leasing*) alat mesin pertanian (Alsintan) traktor tangan kepada kelompok tani UPJA dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana Bergulir atas leasing traktor ini sudah jatuh tempo tahun 2008 atas nama UPJA Tampuagan, Karya Sejati dan Sri Artha Galih sebesar Rp17.800.000,00 dan jatuh tempo tahun 2012 atas leasing traktor Kelompok Sidakarya sebesar Rp1.400.000,00. Sampai tahun 2023 belum melakukan pelunasan kelompuk usah tani tersebut belum bisa menyelesaikan tunggakannya karena usaha tani tersebut tidak aktif lagi. Dilakukan reklas dari akun Investasi Non Permanen Lainnya ke akun Dana Bergulir. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 26.***

2. Penyisihan Investasi Non Permanen

   Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dengan perincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir CTKI	(348.101.872,53)	(365.795.832,33)	17.693.959,79	(4,48)
Dana Bergulir KPEL	(37.548.525,00)	(37.548.525,00)	0,00	0,00
Dana Bergulir Pinjaman Alsintan	(19.200.000,00)	(19.800.000,00)	600.000,00	(3,03)
Jumlah	**(404.850.397,53)**	**(423.144.357,33)**	**18.293.959,79**	**(4,32)**

Khusus Dana Bergulir CTKI sesuai perjanjian kredit dengan PD Bank Pasar, peminjam diberikan masa tenggang untuk melakukan setoran awal setelah 2 tahun dari tanggal akad kredit, sehingga penyisihannya mengikuti klausul perjanjian ini. Rincian Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 24 s.d. Lampiran 26.***

Upaya-upaya penagihan yang dilakukan terhadap dana bergulir CTKI dan KPEL adalah bekerjasama dengan PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagai *bank chanelling* untuk melakukan penagihan serta melibatkan Kepala Desa dan Kelian Dusun untuk membantu penagihan bagi peminjam yang telah melewati masa pinjaman lebih dari lima tahun atau kategori piutang macet.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Bank BPD Bali	13.577.726.125,83	13.577.726.125,83	0,00	0,00
PT Jamkrida Bali Mandara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
PDAM Bangli	27.897.786.252,96	26.562.327.562,48	1.335.458.690,48	5,03
PT BPR Bank Daerah Bangli	28.629.095.055,26	27.446.716.790,42	1.182.378.264,84	4,31
PD Bhukti Mukti Bhakti	0.00	0.00	0,00	0,00
Jumlah	**70.704.607.434,05**	**68.186.770.478,73**	**2.517.836.955,32**	**3,69**

Penjelasan atas nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada masing-masing BUMD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

a. Nilai penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp13.577.726.125,83 disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali. Dengan demikian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT Bank BPD Bali masih tercatat sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp13.577.726.125,83. Dari nilai tersebut, terdapat nilai penyertaan modal sebesar Rp726.125,83 yang belum disahamkan;
b. Nilai penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp600.000.000,00 disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara sehingga nilai penyertaan modalnya masih sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp600.000.000,00;
c. Nilai penyertaan modal pada PDAM Bangli sebesar Rp27.897.786.252,96 disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PDAM Bangli merupakan BUMD yang 100% kepemilikiannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM Bangli;
d. Nilai penyertaan modal pada PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp28.629.095.055,26 disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PT BPR Bank Daerah Bangli merupakan BUMD yang 100% kepemilikiannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM Bangli
e. Nilai penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PD Bhukti Mukti Bhakti merupakan BUMD yang 100% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada BUMD dapat dilihat pada ***Lampiran 27***.

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	193.005.470.022,36	182.690.383.171,00	10.315.086.851,36	5,65
Peralatan dan Mesin	463.328.990.303,74	438.946.426.286,18	24.382.564.017,56	5,55
Gedung dan Bangunan	779.467.101.326,13	643.314.788.999,19	136.152.312.326,94	21,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.340.339.617.709,94	1.255.416.002.811,16	84.923.614.898,78	6,76
Aset Tetap Lainnya	66.537.336.078,76	75.929.952.477,76	(9.392.616.399,00)	(12,37)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.918.380.698,20	5.901.638.883,11	1.016.741.815,09	17,23
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.418.684.486.622,91)	(1.279.896.955.975,55)	(138.787.530.647,45)	10,84
Jumlah Aset Tetap	**1.430.912.409.516,22**	**1.322.302.236.652,85**	**108.610.172.863,37**	**8,21**

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tanah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**182.690.383.171,00**
Mutasi Tambah:	
- B. Modal	7.778.752.574,00

-	Inventarisasi	1.581.568.000,00
-	Hibah	1.280.448.277,36
-	Mutasi Antar OPD	1.698.542.500,00
	Jumlah Mutasi Tambah	**12.339.311.351,36**
	Mutasi Kurang:	
-	Mutasi Antar OPD	1.698.542.500,00
-	Pemberian Hibah	183.210.000,00
-	Inventarisasi	54.000,00
-	Penghapusan	88.418.000,00
-	Dobel Catat	54.000.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	**2.024.224.500,00**
	Saldo Akhir Tanah	**193.005.470.022,36**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut

Penjelasan atas mutasi aset tanah adalah sebagai berikut.

1. Mutasi tambah sebesar Rp7.778.752.574,00 berasal dari belanja modal tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Mutasi Tambah Inventarisasi sebesar Rp1.581.568.000,00:
   a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp62.640.000,00 berupa Inventarisasi Tanah SDN Pengejaran yang belum tercatat sebelumnya dan sertifikatnya terbit d Tahun 2022;
   b. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp257.580.000,00 berupa Inventarisasi Tanah Pasar Hewan Kayuambua; dan
   c. Kantor Camat Tembuku senilai Rp1.261.348.000,00 berupa Inventarisasi Tanah GOR Tembuku.
3. Mutasi Tambah Hibah sebesar Rp1.280.448.277,36:
   a. Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Dinas Kesehatan senilai Rp59.175.000,00 berupa Tanah Puskesmas Bangli Utara seluas 1.500 m^2;
   b. Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp661.600.000,00 berupa Tanah Jalan Penelokan – Batur seluas 41.350 m2;
   c. Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp423.053.277,36 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 3.600 m2;
   d. Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Dinas Perhubungan senilai Rp23.220.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor seluas 860 m2; dan
   e. Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan senilai Rp113.400.000,00 berupa Tanah BBI Yangapi seluas 4.200 m2.
4. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp1.698.542.500,00:
   a. Mutasi ke Dinas Kesehatan senilai Rp 171.680.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 370 m^2 akibat pembangunan Kantor Pengaduan Service Center (PSC);
   b. Mutasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp107.022.500,00 dari Sekretariat Daerah berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan luas 780 m^2 untuk perluasan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

c. Mutasi ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp1.119.210.000,00 dari Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 430 m2 dan 1.920 m2 untuk pembangunan Pusat Layanan Unit Terpadu;
d. Mutasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp250.630.000,00 dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 500 m2 dan 500 m2 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
e. Mutasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp50.000.000,00 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 500 m2 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

5. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp1.698.542.500,00:
   a. Mutasi dari Sekretariat Daerah senilai Rp1.169.582.500,00 ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas masing masing 430 m^2 , 780 m^2 dan 370 m^2 untuk kebutuhan Pembangunan PLUT, Perluasan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pembangunan Kantor PSC.
   b. Mutasi dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp250.630.000,00 ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 500 m2 dan 500 m2 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
   c. Mutasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp50.000.000,00 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 500 m2 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
   d. Mutasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp228.330.000,00 ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 430 m2 dan 1.920 m2 untuk pembangunan Pusat Layanan Unit Terpadu.
6. Mutasi Kurang Pemberian Hibah sebesar Rp183.210.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor ke Pemerintah Provinsi Bali seluas 930 m2.
7. Mutasi Kurang Inventarisasi pada Kantor Camat Tembuku senilai Rp54.000,00 akibat kesalahan pencatatan pada Rumah Dinas Kantor Camat Tembuku.
8. Mutasi Kurang Penghapusan senilai Rp88.418.000,00 terdiri dari:
   a. Dinas Kesehatan senilai Rp15.418.000,00 berupa Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu seluas 22,5 m^2 berupa Tanah Polindes Cempaga; dan
   b. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp73.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 680 m^2 berupa Tanah Ex Poskeswan.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 28***.

Per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan Pinjam Pakai Tanah ke berbagai Instansi Vertikal antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Koranmil Susut senilai Rp4.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 450 m^2 berlokasi di Desa Sulahan, Kecamatan Susut dipergunakan untuk Bangunan Gedung Koranmil dengan nomor perjanjian 028/252/2016 tertanggal 27 April 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU Bangli) sesuai dengan perjanjian nomor 415.4/12/PP/PKP/2021; 46.1/RT.02.1-BA/5106/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dengan rincian:

a. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp68.000.000,00 dengan luas 340 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
b. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
c. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp700.000.000,00 dengan luas 2.500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;

3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp165.000.000 berupa Tanah Bangunan Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022

Saat ini terdapat beberapa Tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bangli teridentifikasi sebagai dobel catat dengan Pemerintah Provinsi Bali. Tanah-tanah tersebut antara lain:

1. Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama dengan Kode Barang 1.3.1.01.001.001.005.000003 dengan luas 300 m^2 dengan Tahun Perolehan 1993 seharga Rp54.000.000 yang dipergunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**438.946.426.286,18**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	24.351.077.732,00
- Koreksi Saldo Awal	9.343.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	3.692.683.623,00
- Penerimaan Hibah	594.410.895,00
- Utang Belanja Modal	29.650.000,00
- Reklasifikasi dari Barang/Jasa	4.757.545.550,00
- Mutasi Antar OPD	916.117.669,00
- **Jumlah Mutasi Tambah**	**34.350.828.469,00**
- *Mutasi Kurang:*	
Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	1.661.548.176,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	88.439.130,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	7.299.661.976,44
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	2.497.500,00
- Koreksi Saldo Awal	0,00
- Mutasi Antar OPD	916.117.669,00
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**9.968.264.451,44**
- **Saldo Akhir Peralatan dan Mesin**	**463.328.990.303,74**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 29***.

Penjelasan atas mutasi aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut.

1. Mutasi tambah sebesar Rp24.351.077.732,00 berasal dari belanja modal tahun 2023.

2. Mutasi Tambah Koreksi Pencatatan Saldo Awal sebesar Rp9.343.000,00:
    a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.143.000,00 berupa koreksi pencatatan Aset yang masih bernilai 0 (nol) Rupiah; dan
    b. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.200.000,00 berupa koreksi pencatatan pengadaan sekat ambulance.
3. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp3.692.683.623,00:
    a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp39.545.000,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp18.232.600,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
    c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp800.600.000,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp532.090.500,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan;
    e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp193.584.000,00 direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
    f. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.108.631.523,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp594.410.895,00:
    a. Hibah dari Kementrian Perhubungan ke Dinas Perhubungan senilai Rp105.490.895,00; dan
    b. Hibah dari CSR PT. Teco, CSR Bank BPD Bali, CSR Universitas Islam Al-Azhar dan Kementrian Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp488.920.000,00.
5. Utang Belanja Modal senilai Rp29.650.000,00 berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Peralatan Komputer.
6. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Barang/Jasa sebesar Rp4.757.545.550,00:
    a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp4.714.456.000,00 berupa Persediaan Pompa dan Gergaji;
    b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp27.089.550,00 berupa Peralatan Komputer; dan
    c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp16.000.000,00 berupa Papan Visual Akrilik.
7. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp916.117.669,00:
    a. Mutasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Kab. Bangli senilai Rp208.202.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    b. Mutasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Bangli dan Sekretariat Daerah senilai Rp393.097.344,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    c. Mutasi ke Rumah Sakit Umum Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp290.118.325,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
    d. Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp24.700.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
8. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel sebesar Rp1.661.548.176,00:

a. Sekretariat Daerah senilai Rp33.105.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
b. Dinas Kesehatan senilai Rp110.533.150,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
c. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp6.400.910,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.245.399.908,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
e. Dinas Perhubungan senilai Rp12.606.825,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp61.669.820,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel
g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp78.218.125,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel; dan
h. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp113.614.438,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2023 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel.

9. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp88.439.130,00 berasal Dinas Lingkungan Hidup direklasifikasi dari belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan.
10. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp7.299.661.976,44:
    a. Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp545.553.937,00;
    b. Dinas Perhubungan senilai Rp92.681.600,00;
    c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp6.538.936.071,00; dan
    d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Rp122.490.368,44.
11. Mutasi Kurang Reklas ke Belanja Barang dan Jasa berasal dari Dinas Perhubungan senilai Rp2.497.500,00 berupa pemeliharaan yang nilainya di bawah batasan kapitalisasi;
12. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp916.117.669,00:
    a. Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp590.488.325,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 4;
    b. Mutasi dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Kab. Bangli ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp41.202.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    c. Mutasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp259.727.344,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan

d. Mutasi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp24.700.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin ke berbagai Instansi Vertikal antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp22.275.000,00 berupa Genzet dengan nomor perjanjian 028/758/Umum/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp272.450.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/14.1/PP/PKKP/2017; B 898/P.1.13/CPL.1/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Tinggi Bali senilai Rp410.000.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/24/PP/PKKP/2017; B-3833/P1/CPL.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017;
4. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/38/PP/PKKD/2018; B-1984/P.I.13/CPL.1/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018;
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/48/PP/PKKD/2019; SP/48/XII/2019/PPK/POLRES BANGLI tertanggal 31 Desember 2019;
6. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli sesuai dengan nomor perjanjian 032/49/PP/PKKD/2019; B-2453/N.I.13/CPL.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Pick Up senilai Rp218.000.000,00;
   b. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) senilai Rp21.230.000,00;
   c. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) senilai Rp21.230.000,00;
   d. Server senilai Rp28.750.000,00;
   e. Televisi senilai Rp4.823.610,00;
   f. Notebook senilai Rp14.160.000,00;
   g. Notebook senilai Rp14.160.000,00;
   h. Notebook senilai Rp14.160.000,00;
   i. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   j. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   k. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   l. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   m. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   n. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   o. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   p. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   q. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   r. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
   s. PC Unit senilai Rp18.200.000,00;
   t. Karpet senilai Rp3.397.425,00;
   u. AC Split senilai Rp4.950.000,00; dan
   v. AC Unit senilai Rp4.955.000,00.

7. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1626 Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/50/PP/PKKD/2019; B/1914/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
8. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/51/PP/PKKD/2019; W.24-U8/PL.06/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
9. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp271.500.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/52/PP/PPKP/2019; B/3489/XII/LOG.4.1.2/2019/Res.Bangli tertanggal 31 Desember 2019.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**643.314.788.999,19**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	133.121.744.861,03
- Penilaian	0,00
- Utang Belanja Modal	37.910.887.130,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	198.161.000,00
- Penerimaan Hibah	1.334.714.220,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	1.420.248.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	6.198.666.532,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	2.155.995.904,00
- Mutasi Antar OPD	12.117.759.550,66
- **Jumlah Mutasi Tambah**	**194.458.177.197,69**
- *Mutasi Kurang:*	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	16.606.355.029,09
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.416.182.720,00
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	650.569.229,00
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	12.319.343.837,00
- Pemberian Hibah	82.101.564,00
- Penghapusan	15.113.552.941,00
- Mutasi Antar OPD	12.117.759.550,66
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**58.305.864.870,75**
- **Saldo Akhir Gedung dan Bangunan**	**779.467.101.326,13**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 30***.

Pada penyusunan LKPD tahun 2023, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah dari belanja modal sebesar Rp133.121.744.861,03
2. Mutasi Tambah Utang belanja Modal sebesar Rp37.910.887.130,00:

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp6.994.007.550,00;
b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp3.645.600.000,00; dan
c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp27.271.279.580,00.

3. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa Sekretariat Daerah senilai Rp198.161.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung;
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp1.334.714.220,00:
   a. Hibah dari Pemerintah Provinsi Daerah Bali ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp426.056.220,00; dan
   b. Hibah dari Kementrian Koperasi dan UMKM ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp908.658.000,00.
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal sebesar Rp1.420.248.000,00:
   a. Dinas Perhubungan senilai Rp120.248.000,00 akibat Inventarisasi Tembok Pengaman Danau; dan
   b. Kantor Kecamatan Tembuku senilai Rp1.300.000.000,00 akibat Inventarisasi Bangunan GOR.
6. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp6.198.666.532,00:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp198.571.000,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp99.495.000,00 direklasifikasi dari KDP;
   c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp198.835.485,00 direklasifikasi dari KDP;
   d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.344.732.922,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Renovasi dan KDP;
   e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp3.280.699.300,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan jaringan dan KDP;
   f. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp484.484.000,00 direklasifikasi dari KDP; dan
   g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp591.848.825,00 direklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi.
7. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp2.155.995.904,00 berasal dari Dinas Lingkungan Hidup berupa penghentian Sewa *Foodcourt* Alun-Alun Kota Bangli.
8. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp12.117.759.550,66:
   a. Mutasi ke Sekretariat Daerah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp857.797.400,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
   b. Mutasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari Sekretariat Daerah senilai Rp51.030.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
   c. Mutasi ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp94.521.016,00 akibat rencana pembangunan Gedung PLUT;
   d. Mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.847.907.000,00 akibat Pembangunan Gedung Pasar Singamandawa Kintamani;
   e. Mutasi ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan dari Sekretariat Daerah senilai Rp297.491.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

f. Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp75.216.350,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
g. Mutasi ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dari Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp2.168.314.784,66 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
h. Mutasi ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp90.050.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
i. Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp635.432.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

9. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp16.606.355.029,09:
   a. Sekretariat Dewan senilai Rp39.545.000,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
   b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp12.109.885.383,00 direklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dan KDP;
   c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp996.943.276,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dan KDP;
   d. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp389.133.550,00 direklasifikasikan ke KDP;
   e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp2.880.000,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
   f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp134.230.047,00 direklasifikasikan ke KDP;
   g. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp113.292.150,00 direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya;
   h. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan senilai Rp733.714.100,09 direklasifikasi ke KDP; dan
   i. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.086.731.523,00 direklasifikasi ke Perlatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.
10. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.416.182.720,00:
   a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp426.056.220,00;
   b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp55.000.000,00; dan
   c. Dinas Kesehatan senilai Rp935.126.500,00.
11. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa sebesar Rp650.569.229,00:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp83.776.188,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan);
   b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp157.538.180,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan);
   c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp93.198.861,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan); dan
   d. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp316.056.000,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan).
12. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp12.319.343.837,00 berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Bangunan Pasar Singamandawa dan Pasar Kayuambua
13. Mutasi Kurang Pemberian Hibah ke Pemerintah Provinsi Bali dari Sekretariat Daerah senilai Rp82.101.564,00.
14. Mutasi Kurang Penghapusan sebesar Rp15.113.552.941,00:

a. Sekretariat Daerah senilai Rp1.567.997.077,00 berupa Bangunan Gedung Kantor;
b. Dinas Kesehatan senilai Rp6.833.836.021,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
c. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga senilai Rp439.371.580,00 berupa Bangunan Tempat Pendidikan
d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp567.083.000,00 berupa Bangunan Pasar;
e. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp57.812.063,00 berupa Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain;
f. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp5.352.340.100,00 berupa Bangunan Rumah Sakit; dan
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp295.113.100,00 berupa Bangunan Gedung Kantor.

15. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp12.117.759.550,66:
    a. Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan senilai Rp297.491.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    b. Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp51.030.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    c. Mutasi dari Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan senilai Rp2.168.314.784,66 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    d. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai ke Sekretariat Daerah Rp446.366.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    e. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp7.847.907.000,00 akibat Pembangunan Gedung Pasar Singamandawa Kintamani;
    f. Mutasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp75.216.350,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    g. Mutasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp635.432.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    h. Mutasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp90.050.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
    i. Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp94.521.016,00 akibat rencana pembangunan Gedung PLUT; dan
    j. Mutasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Sekretariat Daerah senilai Rp411.431.400,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan Pinjam Pakai Gedung dan Bangunan ke berbagai Instansi antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Desa Batur Tengah senilai Rp47.000.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dengan nomor perjanjian 032/05/PP/PKKP/2018 tertanggal 14 Februari 2018;

2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM 1626) Bangli senilai Rp250.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor perjanjian 046/3625/DINSOS/2020 tertanggal 12 Desember 2020; dan
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp1.485.315.999,80 berupa Bangunan Gedung Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**1.255.416.002.811,16**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	45.773.863.865,78
- Utang Belanja Modal	5.994.043.670,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	28.174.300,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	20.413.818.168,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	3.063.484.000,00
- Penerimaan Hibah	18.432.403.700,00
- Mutasi Antar OPD	2.346.835.055,00
Jumlah Mutasi Tambah	**96.052.622.758,78**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	7.885.600,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	5.405.107.700,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	142.257.600,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang/Jasa	1.173.154.340,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	4.537.000,00
- Penghapusan	2.049.230.565,00
- Mutasi Antar OPD	2.346.835.055,00
Jumlah Mutasi Kurang	**11.129.007.860,00**
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.340.339.617.709,94**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 31***.

Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2023 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 620/362/2023 tentang Ruas Jalan menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor -2, Kolektor-3, Kolektor-4, Lokal, dan Lingkungan (dalam Sistem Jaringan Primer) dan Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan (dalam Sistem Jaringan Sekunder) di Kabupaten Bangli. Berdasarkan surat keputusan tersebut, ruas jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli sebanyak 689 ruas.

Pada penyusunan LKPD tahun 2023, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah dari belanja modal tahun 2023 sebesar Rp45.773.863.865,78.

2. Mutasi Tambah Utang Belanja Modal berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.994.043.670,00.
3. Mutasi tambah Koreksi Pencatatan Saldo Awal berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp28.174.300,00.
4. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp20.413.818.168,00:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp20.375.429.403,00 yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Aset tetap Lainnya dan KDP; dan
   b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp38.388.765,00 yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
5. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa senilai Rp3.063.484.000,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman berupa Jaringan Pipa Distribusi.
6. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp18.432.403.700,00 dari Pemerintah Provinsi Bali ke Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
7. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp2.346.835.055,00:
   a. Mutasi ke Dinas Perhubungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Rp1.871.360.730,00 berupa Lampu Penerangan Jalan;
   b. Mutasi ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp113.419.225,00 berupa Jalan Khusus dan Bangunan Air;
   c. Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp193.424.000,00 berupa Jaringan Listrik; dan
   d. Mutasi ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dari Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp168.631.100,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
8. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp7.885.600,00:
   a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp2.600.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan karena nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp10.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel;
   b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp2.000.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan karena nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp10.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel; dan
   c. Dinas Pariwisata senilai Rp3.285.600,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan karena nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp10.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.
9. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp5.405.107.700,00:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp1.576.828.500,00 ke Peralatan dan Mesin, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Renovasi;
   b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp529.210.500,00 ke Peralatan dan Mesin; dan
   c. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebesar Rp3.299.068.700,00 yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan.

10. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp142.257.600,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
11. Mutasi Kurang Koreksi Saldo Awal sebesar Rp4.537.000,00 yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akibat kesalahan klasifikasi barang ekstrakomptabel ke intrakomptabel.
12. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa sebesar Rp1.173.154.340,00:
    a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp363.577.625,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi;
    b. Dinas Perhubungan senilai Rp26.679.715,00 berupa pembelian kabel Jaringan Listrik;
    c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp758.130.000,00 berupa peralatan Hiking; dan
    d. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp24.767.000,00 berupa berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi.
13. Mutasi Kurang Penghapusan sebesar Rp2.049.230.565,00:
    a. Sekretariat Daerah senilai Rp195.483.565,00 berupa Jaringan Listrik; dan
    b. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.853.747.000,00 berupa Bangunan Air Kotor.
14. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp2.346.835.055,00:
    a. Mutasi dari Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan senilai Rp168.631.100,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
    b. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perhubungan Rp1.871.360.730,00 berupa Lampu Penerangan Jalan;
    c. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp193.424.000,00 berupa Jaringan Listrik;
    d. Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp113.419.225,00 berupa Jalan Khusus dan Bangunan Air;

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Efektivitas Pengelolaan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam rangka Pengawasan Program Prioritas Nasional Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) pada Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor ST-1924/PW22/2/2018, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan fisik EBTKE belum dilakukan secara memadai yaitu:

1. PLTS tidak segera diserahterimakan oleh Kementrian ESDM kepada Pemkab Bangli sehingga terjadi kerusakan karena tidak ada pemeliharaan;
2. Setelah diserahterimakan kepada Pemkab Bangli, PLTS tersebut belum diserahkan kepada masyarakat karena belum adanya dokumen pengelolaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan oleh masyarakat;
3. Terbatasnya kemampuan ekonomi dan pengetahuan masyarakat penerima jaringan PLTS sehingga tidak dapat segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan;
4. Telah masuknya jaringan listrik oleh PLN, sehingga masyarakat lebih memilih beralih ke jaringan PLN dan berpotensi jaringan PLTS akan ditinggalkan oleh masyarakat dan rusak.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**75.929.952.477,76**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	85.109.295,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	461.597.150,00
- Inventarisasi	0,00
- Mutasi Antar OPD	1.533.666.409,00
Jumlah Mutasi Tambah	**2.080.372.854,00**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	211.313.665,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	9.728.009.179,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	0,00
- Mutasi Antar OPD	1.533.666.409,00
Jumlah Mutasi Kurang	**11.472.989.253,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**66.537.336.078,76**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 32***.

Pada penyusunan LKPD tahun 2023, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah berasal dari belanja modal sebesar Rp85.109.295,00.
2. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp461.597.150,00:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp49.500.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan;
   b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp113.292.150,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
   c. Rumah Sakit Umum Daerah Desa senilai Rp298.805.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
3. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp1.533.666.409,00:
   a. Mutasi ke Sekretariat Daerah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp 198.571.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
   b. Mutasi ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.500.000,00 berupa Tanaman;
   c. Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp721.946.584,00 berupa Tanaman dan Aset Tetap Renovasi;
   d. Mutasi ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dari Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp19.800.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
   e. Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp591.848.825,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
4. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp211.313.665,00:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp58.970.515,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel;
b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp44.141.700,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel; dan
c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp108.201.450,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.

5. Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp9.728.009.179,00:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp198.571.000,00 yang direklas ke Gedung dan Bangunan;
   b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp8.058.940.270,00 yang direklas ke Peralatan dan Mesin dan Jalan Irigasi dan Jaringan;
   c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp557.944.084,00 yang direklas ke Gedung dan Bangunan;
   d. Rumah Sakit Umum Daerah Senilai Rp320.705.000,00 yang direklas ke Peralatan dan Mesin; dan
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp591.848.825,00 yang direklas ke Gedung dan Bangunan.
6. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp1.533.666.409,00:
   a. Mutasi dari Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan senilai Rp19.800.000,00 akibat penataan kembali kantor pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
   b. Mutasi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Sekretariat Daerah senilai Rp198.571.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
   c. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp721.946.584,00 berupa Tanaman dan Aset Tetap Renovasi;
   d. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran senilai Rp591.848.825,00 berupa Aset Tetap Renovasi;
   e. Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp1.500.000,00 berupa Tanaman;

Informasi lainnya:

Terdapat Aset Tetap Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa saluran irigasi sebanyak 46 daerah irigasi, berdasarkan Revisi Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota di wilayah Kerja BWS Bali-Penida Provinsi Bali.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**5.901.638.883,11**
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	3.122.653.873,09
- Reklasifikasi Dari Belanja Barang/Jasa	0,00

- Mutasi Antar OPD	98.655.150,00
Jumlah Mutasi Tambah	**3.221.309.023,09**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.061.508.308,00
- Koreksi Saldo Awal	44.403.750,00
- Mutasi Antar OPD	98.655.150,00
Jumlah Mutasi Kurang	**2.204.567.208,00**
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	**6.918.380.698,20**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 33.***

Pada penyusunan LKPD tahun 2023, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp3.122.653.873,09:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp1.669.232.900,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan bangunan dan belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan;
   b. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga senilai Rp196.343.276,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   c. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp389.133.550,0000 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp134.230.047,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
   e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp733.714.100,09 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan.
2. Mutasi Tambah Mutasi antar OPD sebesar Rp98.655.150,00 ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Master Plan GOR.
3. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp2.061.508.308,00;
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp466.235.750,00 yang direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan;
   b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi senilai Rp198.835.485,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan;
   c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp736.738.473,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan;
   d. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan senilai Rp175.214.600,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan;
   e. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp484.484.000,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan.
5. Mutasi Kurang Koreksi Saldo Awal sebesar Rp44.403.750,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman akibat DED yang masih tertinggal di KDP padahal sudah direklasifikasi tahun lalu ke Kalan Irigasi dan Jaringan sehingga terjadi double Pencatatan.

5. Mutasi Kurang Mutasi antar OPD sebesar Rp98.655.150,00 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Master Plan GOR.

Informasi lainnya:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki 92 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersebar di berbagai OPD seperti Dinas PUPRPERKIM, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSU Bangli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, BKPAD, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dengan total nilai sebesar Rp6.918.380.698,20. Rincian data progres Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada ***Lampiran 34****;*

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal	**(1.279.896.955.975,55)**
Mutasi Tambah:	
- Beban Penyusutan	(138.035.422.527,80)
- Koreksi Saldo Awal	(21.384.192.599,56)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(93.426.489,00)
- Mutasi Antar OPD	(2.739.940.168,00)
Jumlah Mutasi Tambah	**(162.252.981.784,36)**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(7.993.708.489,00)
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	(2.735.525.536,00)
- Koreksi Saldo Awal	(242.920.230,00)
- Pemberian Hibah	(42.021.057,00)
- Penghapusan	(9.711.335.657,00)
- Mutasi Antar OPD	(2.739.940.168,00)
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**(23.465.451.137,00)**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(1.418.684.486.622,91)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset Tetap pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 35***.

Informasi lainnya:

Nilai akumulasi penyusutan atas aset peralatan mesin di RSUD Kab. Bangli menggunakan data yang tercatat di SIMDA BMD Pemerintah Kabupaten Bangli, tidak menggunakan nilai pada Laporan Keuangan Audited KAP per 31 Desember 2023 karena perhitungan penyusutan dengan SIMDA BMD sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi yaitu penyusutan dihitung saat perolehan aset tetap, sedangkan oleh KAP menghitung penyusutan berdasarkan tanggal NPHD.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.944.307.034,80	8.100.302.938,80	(2.155.995.904,00)	(26,62)
Aset Tidak Berwujud	11.308.927.600,75	10.582.906.873,25	726.020.727,50	6,86
Aset Lain-Lain	3.187.564.663,77	2.551.916.440,33	635.648.223,44	24,91
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.894.722.668,33)	(2.830.494.631,00)	(1.064.228.037,33)	37,60
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.009.146.340,00)	(2.072.478.977,00)	63.332.637,00	(3,06)
Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)	1.977.742.000,00	2.196.794.971,00	(219.052.971,00)	(9,97)
Jumlah	**16.514.672.290,99**	**18.528.947.615,38**	**(2.014.275.324,39)**	**(10,87)**

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	5.944.307.034,80	8.100.302.938,80	(2.155.995.904,00)	(26,62)

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022, dengan perincian sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sekretariat Daerah	3.732.491.035,00	3.732.491.035,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	271.500.000,00	271.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.650.315.999,80	1.650.315.999,80	0,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.155.995.904,00	(2.155.995.904,00)	(00,00)
Jumlah	**5.944.307.034,80**	**8.100.302.938,80**	**(2.155.995.904,00)**	(26,62)

Saldo Awal	**8.100.302.938,80**
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**0,00**
Mutasi Kurang:	

- Reklasifikasi ke Aset Tetap	2.155.995.904,00
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**2.155.995.904,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	**5.944.307.034,80**

Rincian Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.944.307.034,80 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 36.***

Pinjam Pakai Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Instansi Vertikal, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Tanah

1) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Koramil Susut senilai Rp4.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 450 m^2 berlokasi di Desa Sulahan, Kecamatan Susut dipergunakan untuk Bangunan Gedung Koranmil dengan nomor perjanjian 028/252/2016 tertanggal 27 April 2016;
2) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU Bangli) sesuai dengan perjanjian nomor 415.4/12/PP/PKP/2021; 46.1/RT.02.1-BA/5106/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dengan rincian:
   - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp68.000.000,00 dengan luas 340 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp700.000.000,00 dengan luas 2.500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   - Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp165.000.000 berupa Tanah Bangunan Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022.

B. Peralatan Dan Mesin

1) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp22.275.000,00 berupa Genzet dengan nomor perjanjian 028/758/Umum/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
2) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp272.450.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/14.1/PP/PKKP/2017; B 898/P.1.13/CPL.1/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
3) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Tinggi Bali senilai Rp410.000.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/24/PP/PKKP/2017; B-3833/P1/CPL.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017;
4) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/38/PP/PKKD/2018; B-1984/P.I.13/CPL.1/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018;
5) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/48/PP/PKKD/2019; SP/48/XII/2019/PPK/POLRES BANGLI tertanggal 31 Desember 2019;
6) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp514.016.035,00 berupa kendaraan, alat lantor lainnya, server, televisi, Notebook, PC Unit, AC dan karpet dengan nomor perjanjian 032/49/PP/PKKD/2019; B-2453/N.I.13/CPL.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 \;
7) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1626 Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/50/PP/PKKD/2019; B/1914/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;

8) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/51/PP/PKKD/2019; W.24-U8/PL.06/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019; dan
9) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp271.500.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/52/PP/PPKP/2019; B/3489/XII/LOG.4.1.2/2019/Res. Bangli tertanggal 31 Desember 2019.

C. Gedung Dan Bangunan

1) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Desa Batur Tengah senilai Rp47.000.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dengan nomor perjanjian 032/05/PP/PKKP/2018 tertanggal 14 Februari 2018;
2) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM 1626) Bangli senilai Rp250.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor perjanjian 046/3625/DINSOS/2020 tertanggal 12 Desember 2020;
3) Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp1.485.315.999,80 berupa Bangunan Gedung Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	11.308.927.600,75	10.582.906.873,25	726.020.727,50	6,86
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.894.722.668,33)	(2.830.494.631,00)	(1.064.228.037,33)	37,60
Jumlah	**7.414.204.932,42**	**7.752.412.242,25**	**(338.207.309,83)**	**(4,36)**

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dan rincian mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 37 dan 38.***

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Rusak Berat	35.717.761.133,27	27.567.654.256,83	8.150.106.876,44	29,56
Akumulasi Aset Tetap Rusak Berat	(32.584.574.594,50)	(25.063.922.325,50)	(7.520.652.269,00)	30,01
Kas yang dibatasi status pengguannnya	46.212.827,00	40.019.211,00	6.193.616,00	15,48
Aset Tetap yang akan Dihibahkan/ Disertakan	8.165.298,00	8.165.298,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.187.564.663,77**	**2.551.916.440,33**	**635.648.223,44**	**24,91**

1. Aset Tetap Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat

Jenis Aset Tetap Rusak Berat	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2023
Peralatan dan Mesin	31,104,607,633.27	29,064,379,803.50	2,040,227,829.77
Gedung dan Bangunan	4,225,043,500.00	3,295,629,291.00	929,414,209.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	369,365,000.00	224,565,500.00	144,799,500.00

Aset Tetap Lainnya	18,745,000.00	0,00	18,745,000.00
Jumlah	**35,717,761,133.27**	**32,584,574,594.50**	**3,133,186,538.77**

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	**27.567.654.256,83**
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	8.623.163.096,44
Jumlah Mutasi Tambah	**8.623.163.096,44**
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan	473.056.220,00
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**473.056.220,00**
Saldo Akhir Aset Rusak Berat	**35.717.761.133,27**

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 39***.

Informasi lainnya: Terdapat aset hilang senilai Rp11.500.000,00 belum diproses penelitian tuntutan ganti rugi dan masih tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

Saldo Awal		**(25.063.922.325,50)**
Mutasi Tambah:		
Koreksi Pencatatan Saldo Awal Aset Rusak Berat	(512.597.439,00)	
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Rusak Berat	(7.481.111.050,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		**(7.993.708.489,00)**
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	(473.056.220,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(473.056.220,00)**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		**(32.584.574.594,50))**

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 40***

2. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas yang Dibatasi Penggunaanya	46.212.827,00	40.019.211,00	6.193.616,00	15,48

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Jumlah tersebut sama dengan Utang Jangka Pendek Lainnya atas jaminan pembongkaran reklame. Jaminan pembongkaran reklame disimpan pada rekening tabungan di BPD Bali Nomor 020.02.02.64979-9 atas nama jaminan pembongkaran reklame di BKPAD. Rekening penampung ini telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 973/407/2020 sebagai rekening Pemerintah Daerah. Saldo nilai jaminan pembongkaran reklame per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.212.827,00

3. Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan

Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/Disertakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.165.298,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Desa Abang Batundinding sebesar Rp6.000.000,00 dan DED Pasar Desa Bayung Gede sebesar Rp2.165.298,00. Tidak ada mutasi tambah dan kurang atas Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan selama Tahun 2022.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.894.722.668,33)	(2.830.494.631,00)	(1.064.228.037,33)	37,60

Rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal		**(2.830.494.631,00)**
Mutasi Tambah:		
Beban Amortisasi Tahun 2023	(1.025.610.704,00)	
Koreksi Saldo Awal	(38.617.333,33)	
Jumlah Mutasi Tambah		**(1.064.228.037,33)**
Mutasi Kurang:		
	0,00	
		(0,00)
Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud		**(3.894.722.668,33)**

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tertap digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	(2.009.146.340,00)	(2.072.478.977,00)	63.332.637,00	(3,06)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal		**(2.072.478.977,00)**
Mutasi Tambah:		
	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**0,00**
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke aset tetap	(57.493.224,00)	
Koreksi Saldo Awal	**(5.839.413,00)**	
Jumlah Mutasi Kurang		**(63.332.637,00)**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap digunakan Pihak Ketiga/PinjamPakai		**(2.009.146.340,00)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai dapat dilihat pada ***Lampiran 41.***

5.3.1.5.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
DBH PBB-LO	75.486.000,00	0,00	75.486.000,00	0,00

DBH PPh Pasal 21 - LO	1.801.220.000,00	1.290.130.774,00	511.089.226,00	39,62
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	101.036.000,00	107.083.432,00	(6.047.432,00)	(5,65)
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	0,00	557.895.659,00	(557.895.659,00)	(100,00)
SDA Kehutanan	0,00	5.298,00	(5.298,00)	(100,00)
DBH SDA Perikanan	0,00	211.753.211,00	(211.753.211,00)	(100,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	29.926.597,00	(29.926.597,00)	(100,00)
Jumlah	**1.977.742.000,00**	**2.196.794.971,00**	**(219.052.971,00)**	**(9,97)**

5.3.1.6 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	12.319.343.837,00	0,00	12.319.343.837,00	100,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.735.525.536,00)	0,00	(2.735.525.536,00)	(100,00)
Jumlah	**9.583.818.301,00**	**0,00**	**9.583.818.301,00**	**100,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Pengalihan dari aset tetap gedung dan bangunan ke properti investasi berdasarkan pada Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan beberapa perorangan. Rincian Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah bisa dilihat pada ***Lampiran 42.***

Properti investasi terdiri dari gedung dan bangunan berupa gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yaitu gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen Singamandawa sebesar Rp7.037.901.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp328.435.380,00 dan gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen Kayuambua sebesar Rp5.281.442.837,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.407.090.156,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5 Rincian Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutannya

No.	Keterangan	Luas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1.	Gedung 1 Pasar Singamandawa	700 m2	2022	2.748.216.000,00	128.250.080,00
2.	Gedung 2 Pasar Singamandawa	980 m2	2022	4.289.685.000,00	200.185.300,00
3.	Blok 1 Ruko Pasar Kayuambua	210 m2	1993	541.260.968,00	245.661.521,00
4.	Blok 2 Ruko Pasar Kayuambua	350 m2	1993	902.102.606,00	409.436.869,00
5.	Blok 3 Ruko Pasar Kayuambua	350 m2	1993	902.102.606,00	409.436.869,00
6	Blok 4 Ruko Pasar Kayuambua	440 m2	1993	902.102.607,00	409.436.869,00
7	Blok 5 Ruko Pasar Kayuambua	375 m2	1993	930.697.607,00	438.031.869,00
8	Blok 6 Ruko Pasar Kayuambua	408 m2	1993	1.103.176.443,00	495.086.159,00
Total				**12.319.343.837,00**	**2.735.525.536,00**

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	110.245.590.357,75	29.828.283.644,70	80.417.306.713,05	269,60

Kewajiban Jangka Panjang	59.813.817.597,00	70.779.685.202,00	(10.965.867.605,00)	(15,49)
Jumlah	**170.059.407.954,75**	**100.607.968.846,70**	**69.451.439.108,05**	**69,03**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	745.454,00	(745.454,00)	(100,00)
Utang Bunga	382.589.121,00	382.589.121,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jk Panjang	11.962.764.660,00	996.897.055,00	10.965.867.605,00	1.100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.135.941.209,78	197.958.598,50	937.982.611,28	473,83
Utang Belanja	95.103.167.407,54	22.278.573.989,77	72.824.593.417,77	326,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.661.127.959,43	5.971.519.426,43	(4.310.391.467,00)	(72,18)
Jumlah	**110.245.590.357,75**	**29.828.283.644,70**	**80.417.306.713,05**	**269,60**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang PFK	0,00	745.454,00	(745.454,00)	(100,00)

Tidak terdapat saldo Utang Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Bunga	382.589.121,00	382.589.121,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Utang Bunga merupakan utang bunga atas Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bangli ke pada PT SMI untuk periode Desember 2023. Dan sudah dibayarkan di bulan Januari 2024 yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan langsung pada dana DAU bulan Januari 2024.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jk. Panjang	11.962.764.660,00	996.897.055,00	10.965.867.605,00	1.100,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo tersebut terdiri dari saldo tahun 2022 sebesar Rp996.897.055,00 yang dibayarkan pada pemotongan DAU bulan Januari TA 2024 dan saldo tahun 2023 sebesar Rp11.962.764.660,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang atas Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bangli ke pada PT SMI yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal 31 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024. Pembayaran pertama atas pembayaran bagian lancar utang jangka

panjang ini berdasarkan perjanjian dengan PT SMI Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 bahwa diberikannya masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan, terhitung dari pembayaran pertama bunga pinjaman yaitu tanggal 31 Desember 2021, dan atas pembayarannya akan dilakukan pemotongan langsung pada dana DAU bulan Januari 2024.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	1.135.941.209,78	197.958.598,50	937.982.611,28	473,83

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Pendapatan Dibayar Dimuka merupakan pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2023. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Reklame	176.348.318,77	135.871.872,47	40.476.446,30	29,79
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	6.977.136,99	(6.977.136,99)	(100,00)
Pendapatan Sewa BMD (*Food Court*)	0,00	55.109.589,04	(55.109.589,04)	(100,00)
Sewa Kios	959.592.891,01	0,00	959.592.891,01	100,00
Jumlah	**1.135.941.209,78**	**197.958.598,50**	**937.982.611,28**	**473,83**

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka (Pajak Reklame) per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada ***Lampiran 42***.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	**95.103.167.407,54**	**22.278.573.989,77**	**72.824.593.417,77**	**326,88**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	29.364.733.669,00	13.485.113.161,0	15.879.620.508,00	117,76
Utang Belanja Barang dan Jasa	21.794.732.938,54	8.793.417.828,77	13.001.315.109,77	147,85
Utang Belanja Transfer	9.120.000,00	43.000,00	9.077.000,00	21.109,30
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.650.000,00	0,00	29.650.000,00	100,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Banguinan	33.346.482.580,00	0,00	33.346.482.220,00	100,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.558.448.220,00	0,00	10.558.448.220,00	100,00
Jumlah	**95.103.167.407,54**	**22.278.573.989,77**	**72.824.593.417,77**	**326,88**

Tingginya kenaikan utang belanja disebabkan karena penambahan yang signifikan utang belanja pada beberapa OPD yaitu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan RSUD adanya penambahan utang belanja modal peralatan dan mesin berupa personal computer sebesar Rp29.650.000,00. Pada RSUD adanya penambahan utang belanja modal pembangunan gedung kesehatan berupa Pembangunan Gedung 2A RSU

Bangli sebesar Rp27.271.279.580,00 dimana kegiatan tersebut didanai dari dana BKK Propinsi Rp16.625.000.000.00 dan dana DAU Kesehatan sebesar Rp10.464.279.580,00. Dinas PU adanya penambahan utang belanja barang dan jasa (barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat) berupa pembangunan Balai Desa di Desa Belantih sebasar Rp543.018.000,00 dan pembangunan Balai Desa di Desa Selulung sebesar Rp616.233.000,00 dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp2.429.603.000,00 dan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 10.558.448.220,00 hal tersebut disebabkan karena kegiatan tersebut didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi, tetapi dana tersebut sampai tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan dari kas RKUD Propinsi ke kas RKUD Pemerintah Daerah Bangli. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas belanja modal gedung dan bangunan untuk pembayaran retensi pembangunan pasar singamandawa sebesar Rp3.645.600.000,00 dan Dinas Pendidikan adanya penambahan utang TPG Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp12.507.328.135,00. Yang sudah dibayarkan tanggal 2 Januari 2024, dan atas utang belanja modal yang lainnya akan dibayarkan di tahun 2024.

Rincian masing-masing jenis Utang Belanja pada masing-masing OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 44***.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	332.649,00	385.057,56	(52.408,56)	(13,61)
Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	6.786.037,87	6.786.037,87	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	11.482.257,56	5.924.329.120,00	(5.912.846.862,44)	(99,81)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.596.314.188,00	0,00	1.596.314.188,00	0,00
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	46.212.827,00	40.019.211,00	6.193.616,00	15,48
Jumlah	**1.661.127.959,43**	**5.971.519.426,43**	**(4.310.391.467,00)**	**(72,18)**

Penjelasan atas data diatas adalah sebagai berikut.

a. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp332.649,00 terdiri atas utang kelebihan pembayaran pajak hotel sebesar Rp148.214,00 dan utang kelebihan pembayaran pajak air tanah sebesar Rp184.435,00;
b. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi sebesar Rp6.786.037,87 terdiri atas utang kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha sebesar Rp266.666,67 dan utang kelebihan pembayaran retribusi jasa umum (utang menara telekomunikasi) sebesar Rp6.519.371,20;
c. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp11.482.257,56 terdiri atas utang kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp228.057,56 dan utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD sebesar Rp11.254.200,00 yang merupakan kelebihan transfer atas klaim pembayaran pasien *Covid-19* dari Kemenkes pada Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2023. Jumlah utang kelebihan transfer tersebut merupakan saldo setelah rekonsiliasi antara RSUD Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kemenkes RI;
d. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.596.314.188,00 terdiri atas:

1) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp760.296.035,00;
2) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH PPH Pasal 21 sebesar Rp 514.491.008,00;
3) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 10.433.322,00;
4) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 54.298,00;
5) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp 311.039.525,00.

e. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp46.212.827,00 merupakan jaminan bongkar yang diberikan WP Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pemberian izin reklame dan yang belum jatuh tempo masa tayang per 31 Desember 2023. Rincian Utang Jaminan Pembongkaran Reklame dapat dilihat pada ***Lampiran 45;***

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas mutasi tambah saldo yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	59.813.817.597,00	70.779.685.202,00	(10.965.867.605,00)	(15,49)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 terdiri dari: Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan Utang Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sesuai dengan perjanjian Pemerintah Kabupaten Bangli dengan PT SMI Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pinjaman PEN Daerah kepada PT. SMI untuk tujuan pembiayaan kegiatan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bangli, dengan jangka waktu pinjaman adalah 96 bulan yaitu dimulai sejak pencairan pinjaman pertama kali, termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan. Jumlah yang sudah dicaikan adalah senilai Rp10.683.929.700,00 tanggal 27 Desember 2021 yang merupakan uang muka 15% dari kontrak pembangunan Gedung RSUD Bangli. Pada tahun 2022 disalurkan bertahap yaitu tahap II tanggal 28 April 2022 sebesar Rp32.051.789.100,00 dan tahap III tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp29.040.863.457,00.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	**1.479.332.422.421,91**	**1.417.352.886.340,64**	**61.979.536.081,27**	**4,37**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Rincian perhitungan nilai Ekuitas dapat dilihat pada CaLK bagian Penjelasan **Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.6.4.**

5.4 Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	224.538.377.625,81	162.362.768.249,39
Pendapatan Transfer – LO	1.037.629.190.840,00	916.646.787.691,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	11.208.163.766,41	16.615.233.323,97
Jumlah	**1.273.375.732.232,22**	**1.095.624.789.264,36**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	52.258.679.314,70	38.308.122.487,60
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	57.336.019.486,85	36.421.180.795,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO	11.541.445.733,08	8.088.493.469,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	103.402.233.091,18	79.544.971.497,59
Jumlah	**224.538.377.625,81**	**162.362.768.249,39**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuanganatas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel – LO	4.742.875.873,00	1.725.459.545,00
Pajak Restoran– LO	11.896.634.732,00	5.583.051.643,00
Pajak Hiburan – LO	152.838.830,00	103.734.704,00
Pajak Reklame – LO	894.426.600,70	1.356.892.845,60
Pajak Penerangan Jalan – LO	11.818.205.032,00	10.260.619.430,00
Pajak Parkir – LO	1.251.000,00	2.610.000,00
Pajak Air Tanah – LO	888.988.337,00	366.085.686,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.504.780.978,00	4.468.676.898,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	17.358.677.932,00	14.440.991.736,00
Jumlah	**52.258.679.314,70**	**38.308.122.487,60**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Kenaikan pada nilai Pajak Hotel dan Restoran yang disebabkan oleh adanya kelonggaran dalam perjalanan wisata, adanya tren peningkatan kunjungan ke Kintamani, pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi serta penempatan Petugas Pengawas Pajak pada WP Rumah Makan yang potensial;
   b. Kenaikan pada nilai Pajak Hiburan karena adanya pemantauan target secara optimal;
   c. Penurunan nilai Pajak Reklame karena sebagian besar bersumber dari WP produk rokok yang memasang media promosi berupa spanduk atau *banner* dimana hal ini bersifat insidentil serta sulit diprediksi;
   d. Kenaikan nilai Pajak Penerangan Jalan karena adanya penambahan pelanggan PLN;
   e. Penurunan nilai Pajak Parkir karena pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pendataan serta pendaftaran Pajak Parkir belum terselenggara secara optimal;
   f. Kenaikan nilai Pajak Air Tanah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu timbulnya kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban pajak air tanah, adanya pemantauan secara optimal terhadap pengguna air tanah terkait tunggakan, meter air agar diterapkan secara keseluruhan, adanya kejelasan perhitungan volume air tanah pada usaha yang melekat pada rumah tangga, serta pendataan dan pendaftaran potensi pajak air tanah yang optimal; dan
   g. Kenaikan pada nilai PBB-P2 dan BPHTP karena adanya pembayaran piutang PBB-P2 dan BPHTP Tahun 2022 serta peningkatan jumlah WP.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp58.002.844,30 (Rp52.258.679.314,70 - Rp52.316.682.159,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(58.002.844,30)**
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023	62.974.494,55
✓ Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023	1.268.618.160,30
✓ Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023	7.236.574,43
✓ Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023	3.587.380,00
✓ Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2022	135.871.872,47
✓ Piutang Pajak Penerangan per 31 Desember 2023	1.029.209.946,00
✓ Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023	853.101.076,50
✓ Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2023	35.491.028.940,00
✓ Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2023	84.000.000,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022	(235.859.995,55)
✓ Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022	(1.444.450.765,30)
✓ Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022	(13.959.574,43)
✓ Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022	(2.649.880,00)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2023	(176.348.318,77)
✓ Piutang Pajak Penerangan per 31 Desember 2022	(876.496.630,00)
✓ Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022	(793.973.820,50)
✓ Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022	(35.359.716.655,00)

Uraian	Nilai
✓ Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2022	(90.000.000,00)
✓ Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel - Vila de Klumpu TA 2023	(148.214,00)
✓ Utang Kelebihan Pembayaran PAT - I Nyoman Jiwa TA 2023	(27.435,00)
JumlahPenjelasanSelisih	**(58.002.844,30)**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum – LO	**1.192.176.050,00**	**1.189.456.800,00**
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	22.874.000,00	63.687.500,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	105.816.000,00	109.929.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	436.651.000,00	380.464.000,0
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	165.004.000,00	152.037.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	253.558.000,00	302.131.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	13.883.050,00	15.903.300,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	194.390.000,00	165.305.000,00
Retribusi Jasa Usaha	**55.492.714.436,85**	**34.906.371.995,00**
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	38.220.436,85	71.154.880,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan– LO	2.355.353.000,00	2.071.428.000,00
• Retribusi Terminal – LO	7.061.500,00	7.046.500,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	52.936.886.000,00	32.575.707.115,00
• Retribusi Penyeberangan di Air – LO	62.525.000,00	62.850.500,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	92.668.500,00	118.185.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**651.129.000,00**	**325.352.000,00**
• RetribusiIzin Mendirikan Bangunan – LO	651.129.000,00	323.974.500,00
• Retribusi Izin Trayek – LO	0,00	1.377.500,00
Jumlah	**57.336.019.486,85**	**36.421.180.795,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Penurunan nilai Retribusi Pelayanan Kesehatan karena UPT Laboratorium Dinas Kesehatan belum memaksimalkan pemeriksaan secara lengkap dan di Tahun 2023 masih berproses untuk meperbaharui Peraturan Bupati tentang Pendapatan Retribusi Umum;
   b. Penurunan nilai Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup karena adanya beberapa obyek retribusi yang sudah tidak beroprasi lagi atau pindah ke tempat yang tidak lagi mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan dan kurangnya kesadaran masyarakat wajib retribusi;
   c. Kenaikan Rertribusi Parkir Tepi Jalan umum karena bertambahnya pengunjung yang memanfaatkan lahan parkir seperti di pasar Kidul Bangli, pasar Singamandawa Kintamani, Pasar Kayuambua dan Alun-Alun Bangli;
   d. Kenaikan nilai Retribusi Pelayanan Pasar pada dinas PKP karena di Tahun 2022 terjadi wabah PMK yaitu penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan babi sehingga terjadi penutupan

sementara/*lockdown* di Pasar Hewan Kayuambua sehingga ternak yang masuk berkurang dan menyebabkan pendapatan retribusi pelayanan pasar kurang optimal, sedangkan di Tahun 2023 kasus PMK di Kabupaten Bangli mulai agak melandai sehingga ternak yang masuk ke Pasar Hewan Kayuambua relatif lebih banyak sehingga ada peningkatan pendapatan di Tahun 2023;

e. Penurunan nilai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor karena menurunya kendaraan angkutan umum dan kendaraan pariwisata yang datang melakukan Uji KIR;
f. Penurunan nilai Retribusi Pelayanan Tera Ulang karena kurangnya kesadaran dari UMKM/wajib tera untuk melakukan tera ulang terhadap UTTP yang dimiliki;
g. Kenaikan nilai Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi karena adanya pelunasan pembayaran piutang retribusi dari tahun sebelumnya;
h. Penurunan nilai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah karena adanya penurunan pendapatan retribusi di Dinas PU akibat adanya 2 unit alat berat yang mengalami kerusakan teknis sehingga tidak bisa beroprasi, juga terjadi penurunan retribusi sewa kantin di BKPAD karena setelah diterbitkan SKRD hanya sebagian kecil yang melakukan pembayaran atas retribusi tersebut;
i. Kenaikan nilai Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan karena adanya penambahan sewa terhadap ruko di Pasar Kayuambua dan Pasar Singamandawa;
j. Kenaikan nilai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena di Tahun 2023 kondisi pariwisata sudah berangsur pulih sehingga kunjungan wisatawan ke Bangli juga semakin meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang masih dalam suasana pasca pandemi Covid-19;
k. Kenaikan nilai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena meningkatnya pengajuan permohonan ijin mendirikan bangunan; dan
l. Penurunan nilai Retribusi Izin Trayek karena jumlah angkutan umum dalam trayek yang terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum sehinga pelaku usaha jasa angkutan umum banyak yang menghentikan usahanya.

2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp65.434.463,15 (Rp57.336.019.486,85 - Rp57.401.453.950,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(65.434.463,15)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2023	24.379.000,00	
✓ Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023	70.210.000,00	
✓ Pengakuan Pendapatan atas Pendapatan Diterima Dimuka Aset yang Disewa Bank BPD TA 2022	6.977.136,99	
✓ Piutang Retribusi atas Sewa Kantin per 31 Desember 2023	9.600.000,00	
✓ Piutang Retribusi atas Sewa ATM BPD per 31 Desember 2023	2.491.174,86	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2022 pada Tahun 2023	(28.324.000,00)	
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 pada Tahun 2023	(142.135.000,00)	

Uraian	Nilai
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Sewa Kantin Tahun 2022 pada Tahun 2023	(2.400.000,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	(6.232.775,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(65.434.463,15)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	8.166.652.654,08	7.827.065.766,28
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	5.766.847,00	4.109.244,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	3.369.026.232,00	257.318.458,92
Jumlah	**11.541.445.733,08**	**8.088.493.469,20**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Kenaikan nilai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan karena kenaikan pembagian deviden PT Bank BPD Bali dan PT BPR Bank Daerah Bangli;
   b. Kenaikan nilai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) karena adanya kenaikan pembagian deviden PT Jamkrida Bali Mandara; dan
   c. Kenaikan nilai Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena adanya pengakuan atas Piutang Laba Perumda Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli Tahun Buku 2023.
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah kandalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.654.045.738,00 (Rp11.541.445.733,08 - Rp5.887.399.995,08). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**5.654.045.738,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Laba PDAM Bangli Tahun Buku 2023 yang belum diterima	3.369.026.232,00	
✓ Pengakuan Laba PT BPR Bank Daerah Bangli Tahun Buku 2023 yang belum diterima	4.885.783.692,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		

Uraian	Nilai
✓ Penerimaan Laba PD BPR Bank Pasar Tahun Buku 2022 pada Tahun 2023	(2.600.764.186,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**5.654.045.738,00**

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	227.662.899,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	487.285.723,03	25.890.410,96
Jasa Giro – LO	961.877.362,95	1.246.623.492,95
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	20.029.105,30	21.935.068,69
Pendapatan Bunga – LO	1.899.297,42	1.021.366.122,96
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	26.400.079,00	164.799.086,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	204.857.059,00	764.084.308,60
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	35.233.680,00	44.177.910,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	1.322.881.254,74	523.917.115,17
Pendapatan BLUD – LO	100.341.769.529,74	75.486.484.885,26
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	0,00	1.500.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	16.530.198,00
Jumlah	**103.402.233.091,18**	**79.544.971.497,59**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2022 merupakan pendapatan atas penjualan bongkaran Aset Tetap, sedangkan di Tahun 2023 pendapatan tersebut tidak diakui di Pendapatan - LO akan tetapi diakui pada Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO;
   b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami kenaikan yang disebabkan karena meingkatnya pemanfaatan BMD berupa Sewa Ruko Pasar Pasar Kayuambua, Sewa Ruko Pasar Singawandawa dan Sewa kios pada Food Court Alun-Alun Bangli;
   c. Penurunan nilai Jasa Giro disebabkan karena menurunnya uang yang disimpan di Bank;
   d. Penurunan nilai Hasil Pengelolaan Dana Bergulir disebabkan karena karena berkurangnya pelunasan pembayaran dana bergulir CTKI;
   e. Pendapatan Bunga merupakan pendapatan atas hasil pengelolaan dana bergulir CTKI yang mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya pelunasan pembayaran dana bergulir CTKI;
   f. Penurunan nilai Pendaptan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan peristiwa yang insidentil dan tidak dapat diprediksi;
   g. Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan Pendapatan Denda dari Pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda Pajak Parkir, Denda Pajak Air Tanah. Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami

penurunan di Tahun 2023 disebabkan karena Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak dapat diprediksi tergantung dari berapa lama WP menunggak pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo;

h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan Realisasi tersebut yang merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berupa sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah sesuai Perda Nomor 25 Tahun 2011 yang tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu berupa Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Nilai Pendapatan Denda Retribusi Daerah di Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena Pendapatan Denda Retribusi tidak dapat diprediksi tergantung dari berapa lama wajib retribusi menunggak pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo;

i. Pendapatan dari Pengembalian merupakan pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan. Nilai Pendapatan Pengembalian ini mengalami penurunan di Tahun 2023 karena Pendapatan Pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya tidak dapat diprediksi; serta

j. Pendapatan BLUD mengalami kenaikan disebabkan karena dengan terbangunnya Gedung 1A dan 1B RSU Bangli dimana Gedung tersebut telah langsung dapat difungsikan untuk pelayanan pada awal Tahun 2023 secara umum meningkatkan tren pelayanan di RSUD Bangli dibandingkan tahun 2022. Gedung 1A terdiri dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Ruang Bersalin, Ruang *Insentif Care Unit* (ICU). Gedung Gedung 1B terdiri dari Poliklinik, Ruang Hemodialisa, dan Ruang Operasi. Terjadinya peningkatan kinerja pelayanan yang signifikan di RSUD Bangli dapat diuraikan sebagai berikut.
   1) Pelayanan di IGD sebelumnya rata-rata 41 pasien per hari, meningkat di tahun 2023 menjadi rata-rata 86 pasien per hari;
   2) Di rawat jalan atau Poliklinik sebelumnya rata-rata per hari 160 pasien, meningkat menjadi 292 pasien dengan *Top Three* pada Poli Fisoterapi, Poli Saraf, dan Poli Penyakit Dalam. Peningkatan yang sangat tinggi serta menyumbang pendapatan yang tinggi adalah pelayanan di IBS atau Kamar Operasi, sebelumya rata-rata per hari 2 pasien, dengan beroperasinya Gedung 1B dengan kapasitas 6 ruang OK pada Tahun 2023 rata-rata 11 pasien per hari dengan *Top Three* tindakan pada Bedah Umum, Ortopedi dan Urologi; dan
   3) Untuk pelayanan Rawat Inap dengan kapasitas 157 tempat tidur sebelumnya tingkat hunian sebesar 39,8%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 56,4% dengan kapasitas 200 tempat tidur.

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp910.872.158,55 (Rp103.402.233.091,18 - Rp104.313.105.249,73). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(910.872.158,55)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Pendapatan BLUD RSU Tahun 2023	6.055.230.680,00	

Uraian	Nilai
✓ Piutang Pendapatan BLUD DISKES Tahun 2023	14.034.316,00
✓ Pengakuan Pendapatan atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD RSU Tahun 2021	5.913.074.920,00
✓ Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2023	20.029.105,30
✓ Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Food Court PU Tahun 2022	46.750.684,93
✓ Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Food Court DLH Tahun 2022	8.358.904,11
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penerimaan pembayaran Piutang Pendapatan BLUD RSU Tahun 2022 pada Tahun 2023	(11.567.567.150,00)
✓ Penerimaan pembayaran Piutang Pendapatan BLUD DISKES Tahun 2022 pada Tahun 2023	(26.314.900,00)
✓ Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan (Penjualan Aset Tetap)	(403.545.000,00)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Ruko Disperindag Tahun 2023	(959.592.891,01)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Remunerasi/Bunga TDF-TDK Tahun 2022 pada Tahun 2023	(532.789,58)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Kelebihan DBH Pajak Desa Batudinding Tahun 2022 pada Tahun 2023	(5.947.000,00)
✓ Penerimaan Pembayaran Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2022 pada Tahun 2023	(4.851.038,30)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(910.872.158,55)**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuanganatas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	840.351.874.182,00	759.593.691.037,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	197.277.316.658,00	157.053.096.654,00
Jumlah	**1.037.629.190.840,00**	**916.646.787.691,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuanganatas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Perimbangan– LO		
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	13.821.282.110,00	21.895.851.682,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)– LO	548.548.870.076,00	524.703.553.041,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik– LO	135.907.190.828,00	99.489.151.070,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– LO	111.189.985.168,00	102.989.346.244,00
Dana Insentif Daerah – LO		
• Dana Insentif Daerah – LO	30.884.546.000,00	10.515.789.000,00
Jumlah	**840.351.874.182,00**	**759.593.691.037,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2023 disebabkan karena penyaluran atas Dana Bagi Hasil tergantung atas kenaikan atau penurunan Pendapatan Negara;
   b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan disebabkan karena adanya penambahan dana untuk penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Pendanaan Bidang Pendidikan, Pendanaan Bidang Kesehaatan, dan Pendanaan Bidang Pekerjaan Umum. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBM TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
   c. Dana Transfer Khusus – DAK Fisik mengalami kenaikan yang disebabkan karena penyaluran Dana DAK Fisik disesuaikan dengan kontrak kegiatan yang disampikan oleh Pemerintah Daerah ke aplikasi OMSPAM;
   d. Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik mengalami kenaikan yang disebabkan karena penyaluran dana DAK Non Fisik menyesuaikan dengan dana silpa atas DAK Non Fisik yang tersimpan di Kas Umum Daerah;
   e. Dana Insentif Daerah (DID) Mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan karena penyaluaran DID sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp59.933.341.732,00 (Rp840.351.874.182,00 – Rp900.285.215.914,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(59.933.341.732,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Utang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening *Trasury Depositb Facillity* (TDF) Tahun 2023		
✓ Pengakuan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik – BOS Reguler Sekolah Swasta	368.963.239,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening Trasury Depositb Facillity (TDF) Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023	(2.196.794.971,00)	
✓ Penerimaan Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan LO	(60.083.252.000,00)	

Uraian	Nilai
Jumlah Penjelasan Selisih	**(59.933.341.732,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	40.455.854.332,00	39.461.962.967,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	32.853.193.000,00	18.433.742.019,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	26.073.423.213,00	19.428.795.322,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	144.138.663,00	119.910.633,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	16.822.063.040,00	17.383.414.661,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	72.909.192.410,00	62.225.271.052,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	8.019.452.000,00	0,00
Jumlah	**197.277.316.658,00**	**157.053.096.654,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan karena penyaluran Dana Bagi Hasil tidak bisa diprediksi tergantung dari Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali;
   b. Bantuan Keuangan mengalami kenaikan disebabkan karena adanya pengakuan Piutang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali yang penyalurannya ditunda dan akan disalurkan TA 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp59.933.341.732,00 (Rp840.351.874.182,00 – Rp900.285.215.914,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(59.933.341.732,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Utang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening *Trasury Depositb Facillity* (TDF) Tahun 2023		
✓ Pengakuan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik – BOS Reguler Sekolah Swasta	368.963.239,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening Trasury Depositb Facillity (TDF) Berdasarkan nota dinas	(2.196.794.971,00)	

Uraian	Nilai
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023	
✓ Penerimaan Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan LO	(60.083.252.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(59.933.341.732,00)**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah – LO	11.093.163.766,41	16.615.233.323,97
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	115.000.000,00	0,00
Jumlah	**11.208.163.766,41**	**16.615.233.323,97**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	942.244.823,00	3.827.707.468,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	7.089.268.637,02	12.084.908.145,97
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	250.500.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	29.000.000,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.782.150.306,39	702.617.710,00
Jumlah	**11.093.163.766,41**	**16.615.233.323,97**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 berupa hibah Aset Tetap di Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, dan RSUD;
   b. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya berupa hibah dari Pemerintah Provinsi Bali di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan,dan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemerdayaan Masy. dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana;
   c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri merupakan pendapatan hibah berupa aset tetap dari PT. BPD Bali dan Universitas Islam Al-Azhar; dan
   d. Sumbangan Pihak Ketiga Sejenis merupakan pendapatan atas pengakuan pendapatan atas kas BPBD, sisa dana komando penanganan keadaan darurat, pengembalian jaminan bongkaran reklame dan juga hibah aset tetap dari PT. TECO.
2. Rincian atas Pendapatan Hibah-LO disajikan pada ***Lampiran 46***.

3. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp8.384.033.460,02 (Rp11.093.163.766,41- Rp2.709.130.306,39). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**8.384.033.460,02**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO berupa hibah Aset Tetap dari Kementrian	942.244.823,00	
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO berupa Hibah Aset tetap dan Persediaan Obat dan Obat-obatan Lainnya dari Provinsi	7.089.268.637,02	
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO berupa Hibah Aset Tetap dari PT BPD Bali	250.500.000,00	
✓ Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO berupa Hibah Aset Tetap dari Universitas Islam Al-Azhar	29.000.000,00	
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO berupa Hibah Aset Tetap dari PT Teco	73.020.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**8.384.033.460,02**

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN – LO	115.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
Jumlah	**115.000.0000,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Kenaikan nilai Pengembalian Hibah pada BUMN - LO berupa Bantuan Program Dana Pensiun Taspen Mandiri sebesar Rp25.000.000,00;
   b. Kenaikan nilai Pengembalian Hibah pada BUMN - LO berupa Asuransi Jiwa Taspen Sponsorship Rp75.000.000,00; dan
   c. Kenaikan nilai Pengembalian Hibah pada BUMN - LO berupa CSR Bank BPD Bali untuk pembanguan ruang terbuka hijau sebesar Rp15.000.000,00.
2. Pengakuan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LO Tahun 2023 ini ***sama dengan*** saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LRA TA 2023.

5.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan perasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Operasi	1.094.379.404.556,06	937.591.585.503,11
Beban Transfer	105.910.932.010,00	85.546.224.268,00
Jumlah	**1.200.290.336.566,06**	**1.023.137.809.771,11**

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	559.382.406.026,00	516.014.432.127,00
Beban Barang dan Jasa	313.709.357.924,33	279.439.427.417,05
Beban Bunga	4.504.678.363,00	3.672.260.844,57
Beban Hibah	76.223.559.922,00	8.067.691.302,07
Beban Bantuan Sosial	193.621.000,00	253.030.998,00
Beban Penyisihan Piutang	1.304.748.088,93	2.532.893.519,88
Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.061.033.231,80	126.736.069.106,70
Beban Lain-Lain	00,0	875.780.187,84
Jumlah	**1.094.379.404.556,06**	**937.591.585.503,11**

Rincian Beban Operasi pada masing-masing PD TA 2023 dapat dilihat pada ***Lampiran 47***.

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Operasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangli digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.

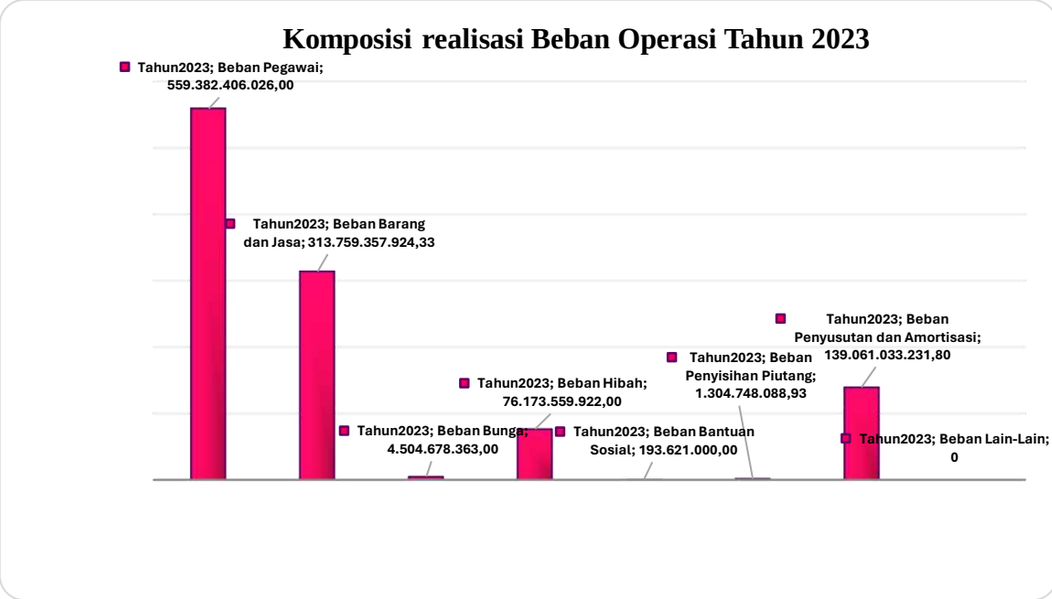

Gambar 4.1 Komposisi Realisasi Beban Operasi TA 2023

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	320.496.987.285,00	308.542.243.553,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	113.290.927.449,00	96.121.118.855,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.546.193.839,00	50.208.741.600,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.853.887.206,00	19.916.521.806,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	490.859.165,00	292.692.188,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	510.480.000,00
Belanja Pegawai BOS	00,0	6.844.758.467,00
Belanja Pegawai BOSP	7.872.231.400,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	42.120.439.682,00	33.577.875.658,00
Jumlah	**559.382.406.026,00**	**516.014.432.127,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Perubahan nilai Beban Pegawai secara umum disebabkan karena adanya penambahan PPPK di beberapa SKPD;
   b. Perubahan nilai Beban Pegawai di masing-masing PD dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Rincian Beban Pegawai

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga	214.217.085.269,00	198.452.820.997,00

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	44.621.442.559,00	41.978.086.944,00
3	Puskesmas Bangli	869.111.477,00	641.397.813,00
4	Puskesmas Bangli Utara	851.941.099,20	612.274.607,00
5	Puskesmas Susut I	886.746.186,00	771.404.854,00
6	Puskesmas Susut II	974.665.063,00	829.621.247,00
7	Puskesmas Tembuku I	972.652.810,00	709.970.587,00
8	Puskesmas Tembuku II	1.008.530.228,80	829.733.366,00
9	Puskesmas Kintamani 1	1.093.884.759,00	845.318.215,00
10	Puskesmas Kintamani 2	856.650.216,00	641.680.841,00
11	Puskesmas Kintamani 3	676.608.902,00	572.834.842,00
12	Puskesmas Kintamani 4	608.655.710,00	459.559.576,00
13	Puskesmas Kintamani 5	999.828.060,00	824.729.088,00
14	Puskesmas Kintamani 6	687.047.966,00	579.360.898,00
15	RSUD	75.555.511.641,00	64.457.065.149,00
16	Dinas PUPR Perkim	11.702.136.537,00	11.516.710.786,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	10.508.324.104,00	9.181.226.315,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	6.183.580.218,00	5.495.251.398,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.248.227.254,00	4.197.654.977,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	25.088.840.714,00	24.541.766.708,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.375.013.768,00	4.300.374.832,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.730.569.632,00	4.271.423.242,00
23	Dinas Perhubungan	4.401.696.309,00	4.400.186.320,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.968.279.333,00	3.712.117.543,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	4.807.093.641,00	4.577.522.479,00
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.497.515.228,00	5.524.723.323,00
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.164.730.763,00	4.898.995.263,00
28	Dinas Pertanian,Ketahanan Pangan dan Perikanan	24.707.123.432,00	23.830.526.673,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.661.196.889,00	4.245.647.577,00
30	Sekretariat Daerah	23.606.181.789,00	21.984.702.987,00
31	Sekretariat DPRD	23.780.989.265,00	23.550.636.713,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.413.284.031,00	3.932.920.794,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	125.045.333,00	-
34	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10.666.908.631,00	9.292.559.293,00
35	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.966.518.511,00	4.405.822.735,00
36	Inspektorat	7.377.166.918,00	6.159.269.608,00
37	Kecamatan Bangli	6.310.342.591,00	6.206.591.757,00
38	Kecamatan Kintamani	3.372.146.096,00	3.207.865.732,00
39	Kecamatan Susut	2.693.435.073,00	2.602.603.156,00
40	Kecamatan Tembuku	3.704.443.320,00	3.579.261.831,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.441.254.700,00	3.192.211.061,00
Jumlah		**559.382.406.026,00**	**516.014.432.127,00**

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp15.879.621.267,00 (Rp559.382.406.026,00 - Rp543.502.784.759,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**15.879.621.267,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) pada OPD Non-BLUD TA 2023	1.122.672.981,00	
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (TPP) pada OPD Non-BLUD TA 2023	8.580.402.409,00	
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (TPG) pada OPD Non-BLUD TA 2023	12.031.876.700,00	
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Gaji dan Tunjangan WKDH TA 2023	31.301.562,00	
✓ Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai BLUD TA 2023	7.598.480.017,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2023 pada OPD Non-BLUD	(444.213.586,00)	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai (TPP) yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2023 pada OPD Non-BLUD	(7.662.355.846,00)	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2023	(5.378.542.970,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**15.879.621.267,00**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	114.454.405.766,69	100.442.779.491,21
Beban Jasa	159.276.931.266,18	143.156.845.214,34
Beban Pemeliharaan	9.016.397.264,46	10.379.662.986,50
Beban Perjalanan Dinas	30.617.593.627,00	23.586.681.725,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	394.030.000,00	1.873.458.000,00
Jumlah	**313.759.357.924,33**	**279.439.427.417,05**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Perubahan nilai Beban Barang Jasa secara umum merupakan perubahan beban untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli; dan
   b. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa di masing-masing PD dapat dirici pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga	48.741.240.245,36	50.815.600.359,46
2	Dinas Kesehatan	50.613.660.396,39	49.308.849.525,38
3	Puskesmas Bangli	1.089.825.160,60	919.514.634,37
4	Puskesmas Bangli Utara	671.297.601,65	766.205.446,48
5	Puskesmas Susut I	1.030.550.347,96	962.382.833,96
6	Puskesmas Susut II	843.294.864,57	841.175.093,02
7	Puskesmas Tembuku I	833.707.931,04	818.573.717,36
8	Puskesmas Tembuku II	1.204.819.686,96	951.895.699,76
9	Puskesmas Kintamani 1	1.349.641.915,07	796.014.049,73
10	Puskesmas Kintamani 2	821.960.395,37	711.041.919,58
11	Puskesmas Kintamani 3	841.407.375,18	904.186.258,91
12	Puskesmas Kintamani 4	606.387.415,09	734.832.642,35
13	Puskesmas Kintamani 5	1.047.617.146,10	930.477.700,86
14	Puskesmas Kintamani 6	727.046.393,80	755.758.402,43
15	RSUD	49.070.421.614,97	32.011.163.074,04
16	Dinas Pekerjaan Umum,PR Perkim	12.463.596.845,17	20.549.940.427,68
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.942.205.487,00	1.724.045.535,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	1.728.012.493,00	1.315.171.285,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.379.395.011,00	2.790.354.597,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	7.387.370.220,20	7.617.182.264,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.622.824.109,77	1.863.164.927,42
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.128.723.727,00	4.006.102.680,00
23	Dinas Perhubungan	3.633.038.588,40	3.984.531.704,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.368.620.195,37	3.341.783.593,85
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	1.392.392.772,00	1.467.220.612,00
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	931.133.845,00	712.120.243,00
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23.935.680.610,79	14.557.012.695,61
28	Dinas Pertanian,Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.706.007.359,50	3.958.455.289,50
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.909.822.683,00	1.726.722.409,00
30	Sekretariat Daerah	44.418.660.810,00	33.628.593.931,00
31	Sekretariat DPRD	18.996.057.265,00	15.716.146.439,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.648.217.860,12	1.538.183.929,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	439.295.060,00	0,00
34	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.028.571.634,90	4.050.553.160,30
35	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.132.895.666,00	5.324.503.587,00
36	Inspektorat	1.655.850.424,00	1.259.356.510,00
37	Kecamatan Bangli	3.814.156.936,00	3.891.380.362,00
38	Kecamatan Kintamani	697.063.772,00	705.067.800,00
39	Kecamatan Susut	422.651.260,00	423.060.911,00
40	Kecamatan Tembuku	344.927.415,00	318.706.471,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.139.307.384,00	742.394.696,00
Jumlah		**313.759.357.924,33**	**279.439.427.417,05**

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp22.751.624.368,42 (Rp313.759.357.924,33 - Rp291.007.733.555,91). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**22.751.624.368,42**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Penambahan Beban LO karena Penggunanan Persediaan TA 2022 dalam pelaksanaaan kegiatan Operasional	13.022.608.805,53	
✓ Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Utang Belanja Barang Tahun 2023	12.314.069.708,54	
✓ Penambahan Beban LO karena adanya Penambahan Utang Belanja Jasa Tahun 2023	7.704.388.159,00	
✓ Penambahan Beban atas Pengakuan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2023	554.624.133,00	
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Reklas Belanja Modal	942.347.895,00	
✓ Reklas dari belanja Modal Kajian ke beban barang dan jasa karena merupakan kajian pemanfaatan lintasan drage race berupa sewa	47.577.000,00	
✓ Penambahan Beban atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	493.031.049,00	
✓ Penambahan Beban atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	2.497.500,00	
✓ Penambahan Beban atas Belanja Modal JJI untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	388.344.625,00	
✓ Pengakuan Beban LO yang berasal dari Reklasifikasi Beban Extracompatable Asset Tetap	1.885.647.441,00	
✓ Pengakuan Beban LO atas Pemakaian Obat *Buffer* Dinas Kesehatan dan RSUD	3.974.887.651,08	
✓ Penambahan Beban LO atas Pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran Kas	86.951.257,66	
✓ Penambahan Beban LO atas Pemakaian Obat Dinkes di Puskesmas dan RSU	855.213.866,48	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Pengurangan Beban LO atas Pengakuan Persediaan yang berasal dari barang TA 2023	(10.183.416.049,55)	
✓ Pengurangan Beban LO atas Persediaan Obat Kedaluwarsa Tahun 2023	(111.513.717,86)	
✓ Pengurangan Beban LO atas Persediaan Kuasi Kedaluwarsa Tahun 2023	(107.470.242,92)	
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya Pembayaran Utang Belanja Jasa yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2023	(1.772.907.932,00)	

Uraian	Nilai
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya Pembayaran Utang Belanja yang bebannya diakui sebelum TA 2022	(6.958.109.958,77)
✓ Pengurangan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasiken ke Aset Tetap	(198.161.000,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas Pengakuan Beban Persediaan Obat yang di hibahkan ke BMC, LAPAS, BAWASLU	(95.330.698,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar dimuka sehingga pengakuan Beban dialokasikan secara bertahap	(43.065.573,77)
✓ Penambahan Beban LO atas Reklas Belanja Barang Pakai Habis Ke Aset Tetap	(50.589.550,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**22.751.624.368,42**

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.504.678.363,00	3.672.260.844,57
Jumlah	**4.504.678.363,00**	**3.672.260.844,57**

Penjelasan:

1. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat merupakan pembayaran atas bunga pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan perjanjian Nomor PERJ-145A/SMI/0921 Tahun 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp75.000.000.000,00 dengan masa pinjaman 8 tahun dikenakan bunga sebesar 6,19%, di tahun 2023 mengalami kenaikan karena pemotongan bunga tersebut didasarkan pada KMK Nomor 45/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Dearah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023 dan dipotong langsung pada saat penyaluran DAU Tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp4.504.678.363,00

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	134.711.788,00	175.000.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	224.466.401,00	491.956.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.630.001.256,00	6.628.268.064,07
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772.467.238,00	772.467.238,00

Uraian	Tahun2023	Tahun 2022
Beban Hibah Dana BOSP	2.411.913.239,00	0,00
Jumlah	**76.173.559.922,00**	**8.067.691.302,07**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2023 merupakan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli kepada:
      1. Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bangli;
      2. Beban Hibah atas Tanah Kantor Kejari Bangli dengan berita acara serah terima nomor 032/85/2023 tanggal 25 Desember 2023;
      3. Beban Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Ke Lapas Bangli;
   b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2023 merupakan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli Kepada:
      1. Beban Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli kepada RSJ Provinsi Bali;
      2. Beban Hibah Tanah dan Bangunan Gedung Koni dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli kepada Pemerintah Provinsi Bali;
   c. Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
      1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
      2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
      3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
      4. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   d. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/46/2023 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Bangli TA 2023; dan
   e. Beban Hibah Dana BOSP merupakan pemeberian Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah kepada Sekelah Swasta di Kabupaten Bangli sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp733.713.883,00 (Rp76.173.559.922,00 - Rp75.439.846.039,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(733.713.883,00)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban atas Hibah Tanah untuk Bangunan Kantor PKP ke Kejari Bangli 2023	73.000.000,00
✓ Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Beban Hibah Tanah untuk Bangunan Kantor Sekretariat daerah kepada KONI Bangli 2023	183.210.000,00
✓ Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Beban Hibah Gedung dan Bangunan Sekretariat Dearah kepada BAWASLU Tahun 2023	40.080.507,00

Uraian	Nilai
✓ Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Beban Hibah Tanah Banguanan Poskesdes Dinas Kesehatan (Puskesmas Bangli Utara) kepada Desa Adat Sidembunut 2023	15.418.000,00
✓ Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Hibah Obat Dinas Kesehatan Kepada BMC, Lapas dan RSJ Tahun 2023	53.042.137,00
✓ Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Hibah BOSP untuk sekolah swasta TA 2023	368.963.239,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(733.713.883,00)**

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	183.661.000,00	246.096.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	9.960.000,00	6.934.998,00
Jumlah	**193.621.000,00**	**253.030.998,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023 mengalami penurunan yang disebabkan karena pemberian BSM sesuai dengan SK Bupati Bangli Nomor 420/507/2023 tentang Nama-nama Penerima Bantuan Siswa Miskin untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2023; dan
   b. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu di Dinas Sosial yang berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, di Tahun 2023 mengalami kenaikan yang disebabkan karena bertambahnya penerima bantuan kursi roda sesuai dengan yang tercantum pada SK Bupati Bangli Nomor 461/48/2023 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 sebesar Rp193.621.000,00.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	926.071.990,31	2.370.937.364,54
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	9.695.194,37	18.141.070,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	366.538.557,38	84.303.169,93
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.442.346,87	39.552.219,16

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	19.959.696,25
Jumlah	**1.304.748.088,93**	**2.532.893.519,88**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Penurunan nilai Beban Penyisihan Piutang disebabkan karena menurunnya Piutang Pajak Daerah, Pajak Retribusi dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah; dan
   b. Kenaikan nilai Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang disebabkan karena adanya pengakuan Piutang Laba pada Perumda Tirta Danu Arta Bangli (PDAM) Tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp242.674.293,21 [Rp 1.304.748.088,93 - (Rp28.916.300.643,63 - Rp27.854.226.847,91)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca		**242.674.293,21**
Penjelasan Selisih:		
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang pajak hotel	50.538.945,65	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang pajak restoran	82.510.944,47	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang pajak hiburan	33.615,00	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang pajak air tanah	68.005.060,22	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang bea Perelehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	3.000.000,00	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi	4.657.450,00	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah	6.232.775,00	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang bunga remunerasi	2.663,95	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang BLUD RSU	27.561.682,35	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang FKTP/Kapitasi JKN	101.421,58	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang kelebihan DBH Pajak kepada Desa	29.735,00	
✓ Koreksi Ekuitas pembulatan atas penyisihan piutang Dana Bergulir	(0,01)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**242.674.293,21**

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.271.014.789,00	29.012.449.455,79
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.890.869.229,00	17.102.897.052,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	78.564.924.385,80	76.043.468.805,27
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.164.699.612,00	3.049.418.905,97
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	1.025.610.704,00	1.527.834.887,67
Beban Penyusutan Properti Investasi	143.914.512,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah	**139.061.033.231,80**	**126.736.069.106,70**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya penambahan belanja modal dan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap yang menyebabkan penambahan Beban Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7, Poin 5.3.1.5.5, Poin 5.3.1.5.5, dan Poin 5.3.1.6.2***.
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing PD dapat dilihat pada ***Lampiran 35***, ***Lampiran 37, Lampiran 40, Lampiran 41,*** dan ***Lampiran 42.***

5.4.2.1.8 Beban Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Lain-lain	0,00	875.780.187,84
Jumlah	**0,00**	**875.780.187,84**

Beban Lain-lain Tahun 2022 merupakan beban atas penurunan nilai investasi pada PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp875.780.187,84 atas pembebanan dana kesejahteraan dan jasa produksi. Sedangkan penurunan nilai investasi pada Tahun 2023 diakui pada Defisit dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya-LO.

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.017.359.100,00	6.711.196.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	93.893.572.910,00	78.835.028.268,00
Jumlah	**105.910.932.010,00**	**85.546.224.268,00**

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.923.858.500,00	2.186.235.000,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.093.500.600,00	4.524.961.000,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah	**12.017.359.100,00**	**6.711.196.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut. Beban Transfer Bagi Hasil merupakan Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2023 dibadingkan tahun 2022 karena adanya kenaikan Anggaran Pajak Daearah dan Retribusi Daerah sehingga Beban Transfer Bagi Hasil juga mengalami peningkatan karena Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan Beban Transfer Bagi hasil adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Reribusi Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp43.000,00 (Rp12.017.359.100,00-Rp12.017.402.100,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, dalam hal ini yaitu Utang Belanja Transfer DBH Pajak kepada Desa Undisan TA 2022 sebesar Rp43.000,00.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	85.000.000.050,00	72.318.056.470,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa	8.893.572.860,00	6.516.971.798,00
Jumlah	**93.893.572.910,00**	**78.835.028.268,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan disebabkan karena:
      1) Peningkatan nilai Alokasi Dana Desa sebesar Rp12.681.943.580,00;
      2) Peningkatan nilai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) BPJS Kesehatan Perangkat Desa sebesar Rp81.601.062,00;
      3) Peningkatan nilai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Insentif Bendesa Adat sebesar Rp9.000000,00;
      4) Peningkatan nilai Bantuan Keuangan Khusus Insentif (BKK) Kelian Adat sebesar Rp.6.000.000,00; dan
      5) Peningkatan nilai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Samsara sebesar Rp.2.280.000.000,00.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp60.074.132.000,00 (Rp93.893.572.910,00 - Rp153.967.704.910,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(60.074.132.000,00)**
Penjelasan Selisih:	

Uraian	Nilai	
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Pengakuan Utang penghasilan Tetap pada Desa Batukaang dan ADD Desa Bunutin Kintamani tahun 2023	9.120.000,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	(60.083.252.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(60.074.132.000,00)**

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Surplus Penjualan BMB yang Tidak Dipisahkan - LO	149.172.500,00	0,00
• Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	66.642.290.115,50
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operaional Lainnya - LO	1.621.423.375,00	0,00
Jumlah	**1.770.595.875,00**	**66.642.290.115,50**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Kenaikan nilai Surplus Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan karena adanya keuntungan atas penjualan aset tetap;
   b. Penurunan nilai Surplus Pertukaran BMB yang Tidak Dipisahkan karena di tahun 2023 Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut dieleminasi dan tidak dicantumkan dalam LKPD karena merupakan pertukaran aset tetap antar SKPD; dan
   c. Penurunan nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya karena di tahun 2023 dieleminasi dan tidak dicantumkan dalam LKPD karna merupakan pertukaran aset lancar antar SKPD.
2. Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakanpenjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh

Pemerintah Kabupaten Bangli selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	7.181.719.478,00	6.322.160.000,00
• Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	58.249.159.049,96
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	3.100.652.842,49	887.849.009,53
Jumlah	**10.282.372.320,49**	**65.459.168.059,49**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Kenaikan nilai Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang merupakan defiist penjulaan atas aset tetap tahun 2023;
   b. Penurunan nilai Defisit Pertukaran BMB yang Tidak Dipisahkan karena di tahun 2023 Defisit Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut dieleminasi dan tidak dicantumkan dalam LKPD karena merupakan pertukaran aset tetap antar SKPD; dan
   c. Kenaikan nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya karena adanya pengakuan atas beban obat kedaluwarsa, beban atas pemakaian obat buffer provinsi, pengembalian dana bencana ke rekening kasda, penghapusan penyertaan modal, inventarisasi aset tetap.
2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Bangli merupakan defisit atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.5 Pendapatan Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak terdapat pengakuan atas Pendapatan Luar Biasa, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.4.6 Beban Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	0,00	41.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**41.000.000,00**

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli pada Tahun 2023 tidak ada Beban Luar Biasa yang berupa Beban Tak Terduga, hal tersebut disebabkan karena Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Oleh karena Tahun 2023 kondisi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam keadaan kondusif atau tidak terjadi bencana, maka tidak ada Beban tidak terduga.
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.7 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan Daerah – LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	224.538.377.625,81	162.362.768.249,39
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.037.260.227.601,00	916.646.787.691,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	11.208.163.766,41	16.615.233.323,97
➢ **Beban Daerah**		
✓ Beban Operasional	(1.199.921.373.327,06)	(1.023.137.809.771,11)
✓ Beban Transfer	(105.910.932.010,00)	(85.546.224.268,00)
Kegiatan Non-Operasional		
➢ **Surplus Non-Operasional**		
✓ Surplus Non - Operasional – LO	1.770.595.875,00	66.642.290.115,50
➢ **Defisit Non-Operasional**		
✓ Defisit Non Operasional – LO	(10.282.372.320,49)	(65.459.168.059,49)
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	0,00	(41.000.000,00)
Jumlah	**64.573.619.220,67**	**73.629.101.549,26**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) – LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2***.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasionalpemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.264.265.043.709,20	1.105.212.188.569,50
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.080.633.770.726,91	945.923.121.850,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**183.631.272.982,29**	**159.289.066.718,71**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Pajak Daerah**	**52.316.682.159,00**	**36.707.060.479,07**
✓ Pajak Hotel	4.915.909.588,00	1.765.288.243,00
✓ Pajak Restoran	12.072.467.337,00	5.654.717.702,00
✓ Pajak Hiburan	159.561.830,00	103.949.194,57
✓ Pajak Reklame	933.965.547,00	1.380.934.821,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	11.665.491.716,00	10.145.156.104,00
✓ Pajak Parkir	1.251.000,00	2.610.000,00
✓ Pajak Air Tanah	829.888.516,00	323.259.895,50
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.373.468.693,00	2.869.152.783,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.364.677.932,00	14.461.991.736,00
➢ **Penerimaan Retribusi Daerah**	**57.401.453.950,00**	**36.328.299.166,20**
✓ **Retribusi Jasa Umum**		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.874.000,00	63.687.500,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	109.761.000,00	88.953.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	436.651.000,00	380.464.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	165.004.000,00	152.037.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.558.000,00	302.131.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	13.883.050,00	15.903.300,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	266.315.000,00	100.599.371,20
✓ **Retribusi Jasa Usaha**		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	27.784.900,00	63.954.880,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.355.353.000,00	2.071.428.000,00
• Retribusi Terminal	7.061.500,00	7.046.500,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	52.936.886.000,00	32.575.707.115,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	62.525.000,00	62.850.500,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	92.668.500,00	118.185.000,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	651.129.000,00	323.974.500,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	1.377.500,00
➢ **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.887.399.995,08**	**5.597.430.541,18**
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.881.633.148,08	5.493.321.297,18
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.766.847,00	4.109.244,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	100.000.000,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**	**103.909.560.249,73**	**65.144.751.773,05**
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.391.769.025,00	81.000.000,00
✓ Jasa Giro	961.877.362,95	1.220.271.422,84
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.851.038,30	7.876.985,00
✓ Pendapatan Bunga	2.432.087,00	1.020.833.333,38
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	26.400.079,00	164.799.086,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	204.857.059,00	764.084.308,60
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	35.233.680,00	46.478.538,80
✓ Pendapatan dari Pengembalian	1.328.828.254,74	523.602.012,17
✓ Pendapatan BLUD	99.953.311.663,74	61.297.460.785,26
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.500.000,00
✓ Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	16.845.301,00
➢ **Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat**	**900.285.215.914,00**	**805.596.452.637,00**
✓ Dana Perimbangan	809.317.417.914,00	739.520.734.637,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	30.884.546.000,00	10.515.789.000,00
✓ Dana Desa	60.083.252.000,00	55.559.929.000,00
➢ **Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah**	**141.640.601.135,00**	**155.135.576.263,00**
✓ **Pendapatan Bagi Hasil**		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.651.554.736,00	38.045.430.667,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.119.564.380,00	16.321.594.428,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.277.244.072,00	18.295.622.291,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	128.882.727,00	116.045.810,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.822.063.040,00	20.131.612.015,00
✓ **Bantuan Keuangan**		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	26.621.840.180,00	62.225.271.052,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	8.019.452.000,00	0,00
➢ **Penerimaan Hibah**	**2.709.130.306,39**	**702.617.710,00**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.709.130.306,39	702.617.710,00
➢ **Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**115.000.000,00**	**0,00**
✓ **Lain-Lain Pendapatan**		
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	115.000.000,00	0,00
Jumlah	**1.264.265.043.709,20**	**1.105.212.188.569,50**

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp159.052.855.139,70 yang antara lain dipengaruhi peningkatan pada Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp94.688.753.277,00 sedangkan penurunan signifikan pada Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp35.603.430.872,00 yang disebabkan karena adanya penundaan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pembayaran Belanja Pegawai**	**543.502.784.759,00**	**515.867.247.541,00**
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	319.818.527.890,00	308.846.806.933,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.372.880.886,00	96.137.888.574,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.514.317.139,00	50.208.741.600,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.853.887.206,00	19.916.521.806,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	459.557.603,00	292.692.188,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	510.480.000,00
✓ Belanja Pegawai BOS	7.872.231.400,00	6.844.758.467,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	39.900.502.635,00	33.109.357.973,00
➢ **Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**	**290.957.733.555,91**	**273.728.730.016,95**
✓ Belanja Barang	51.119.887.495,00	62.534.463.320,80
✓ Belanja Jasa	137.875.528.967,62	131.340.338.138,00
✓ Belanja Pemeliharaan	2.175.495.075,00	4.655.361.716,89
✓ Belanja Perjalanan Dinas	30.125.400.235,00	23.044.295.375,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	393.150.000,00	125.050.000,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	25.911.618.571,95	22.783.265.312,96
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.356.653.211,34	29.245.956.153,30
➢ **Pembayaran Belanja Bunga**	**4.504.678.363,00**	**3.297.009.892,57**
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.504.678.363,00	3.297.009.892,57
➢ **Pembayaran Belanja Hibah**	**75.489.846.039,00**	**9.234.589.134,27**
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	59.360.000,00	175.000.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.658.018.801,00	8.287.121.896,27
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772.467.238,00	772.467.238,00
➢ **Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**	**193.621.000,00**	**253.030.998,00**
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	193.621.000,00	253.030.998,00
➢ **Pembayaran Belanja Tak Terduga**	**0,00**	**2.430.457.000,00**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Tak Terduga	0,00	2.430.457.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil**	**12.017.402.100,00**	**6.717.100.000,00**
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.923.901.500,00	2.192.139.000,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.093.500.600,00	4.524.961.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**153.967.704.910,00**	**134.394.957.268,00**
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.967.704.910,00	134.394.957.268,00
Jumlah	**1.080.633.770.726,91**	**945.923.121.850,79**

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp134.710.638.876,12 yang antara lain dipengaruhi peningkatan pada Belanja Hibah sebesar Rp66.255.256.904,73 sedangkan penurunan signifikan pada Pembayaran Belanja Tak Terduga Rp2.430.457.000,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	403.545.000,00	227.662.899,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	211.649.206.855,31	296.929.282.841,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(211.245.661.855,31)**	**(293.701.619.942,81)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasiyang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**403.545.000,00**	**227.662.899,00**
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	65.195.000,00	217.575.899,00
✓ Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	331.650.000,00	10.087.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.700.000,00	0,00
Jumlah	**403.545.000,00**	**227.662.899,00**

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp175.882.101,00 dari tahun sebelumnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dipengaruhi oleh Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Perolehan Tanah**	**7.778.752.574,00**	**14.134.423.669,00**
✓ Belanja Modal Tanah Persil	7.778.752.574,00	14.134.423.669,00
➢ **Perolehan Peralatan dan Mesin**	**24.351.077.732,00**	**60.358.662.837,00**
✓ Belanja Modal Alat Besar	9.311.670,00	2.259.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	2.227.997.500,00	302.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.430.985.900,00	146.736.640,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	165.680.000,00	136.974.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.618.115.562,00	3.684.740.327,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.438.879.110,00	2.962.003.299,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.349.268.187,00	23.898.363.582,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.599.760.447,00	2.634.784.397,00
✓ Belanja Modal Komputer	6.014.925.726,00	26.295.297.301,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	3.413.250,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.850.000,00	186.904.999,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.342.000.795,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	56.274.225,00	105.186.042,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	95.028.610,00	0,00
➢ **Perolehan Gedung dan Bangunan**	**133.121.744.861,03**	**180.104.496.229,81**
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	131.528.470.488,94	179.392.422.519,81
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.593.274.372,09	712.073.710,00
➢ **Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**45.773.863.865,78**	**37.746.357.806,00**
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.153.546.884,00	37.013.080.394,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	49.500.000,00	321.342.750,00
✓ Belanja Modal Instalasi	445.758.081,00	207.910.662,00
✓ Belanja Modal Jaringan	5.125.058.900,78	204.024.000,00
➢ **Perolehan Aset Tetap Lainnya**	**85.109.295,00**	**1.585.342.300,00**
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	85.109.295,00	64.346.700,00
✓ Belanja Modal Biota Perairan	0,00	43.800.000,00
✓ Belanja Modal Tanaman	0,00	595.914.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	0,00	881.281.600,00
➢ **Perolehan Aset Lainnya**	**538.658.527,50**	**0,00**
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	158.114.743,50	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	306.043.784,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	74.500.000,00	0,00
➢ **Penyertaan Modal Daerah**	**0,00**	**3.000.000.000,00**
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	3.000.000.000,00
➢ **Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Investasi BLUD	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah	**211.649.206.855,31**	**296.929.282.841,81**

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp85.280.075.986,50 dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penurunan Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp46.982.751.368,78 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.007.585.105,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	61.092.652.557,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**61.092.652.557,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Pinjaman Daerah**	**0,00**	**61.092.562.557,00**
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	61.092.652.557,00
Jumlah	**0,00**	**61.092.652.557,00**

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menganggarkan dan merealisasikan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sehingga terdapat penurunan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp61.092.652.557,00.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	**0,00**	**0,00**
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➢ **Pemberian Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
➢ **Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	84.232.012.370,00	88.185.699.305,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	84.232.757.824,00	88.186.036.886,00
Arus Kas Bersih dari AktivitasTransitoris	**(745.454,00)**	**(337.581,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**84.232.012.370,00**	**88.185.699.305,00**
✓ Iuran Wajib Pegawai	20.412.956.314,00	19.352.495.108,00
✓ Pajak Penghasilan	22.762.760.518,00	22.112.474.349,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	20.232.874.170,00	24.253.652.851,00
✓ Asuransi Kesehatan	18.616.759.083,00	20.146.455.532,00
✓ JKK dan JKM	2.183.874.041,00	2.160.105.155,00
✓ PFK Lainnya	22.788.244,00	160.516.310,00
Jumlah	**84.232.012.370,00**	**88.185.699.305,00**

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD

dan Puskesmas, dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada ***Lampiran 48.1*** dan ***Lampiran 48.2***.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pengeluaran Perhitungan FIhak Ketiga (PFK)**	**84.232.757.824,00**	**88.186.036.886,00**
✓ Iuran Wajib Pegawai	20.412.956.314,00	19.352.495.108,00
✓ Pajak Penghasilan	22.762.760.518,00	22.112.474.349,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	20.232.874.170,00	24.253.652.851,00
✓ Asuransi Kesehatan	18.616.759.083,00	20.146.455.532,00
✓ JKK dan JKM	2.183.874.041,00	2.160.105.155,00
✓ PFK Lainnya	22.788.244,00	160.516.310,00
✓ Koreksi PFK BOS	745.454,00	337.581,00
Jumlah	**84.232.757.824,00**	**88.186.036.886,00**

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakuka noleh BLUD RSUD dan Puskesmas, dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada ***Lampiran 48.1*** dan ***Lampiran 48.2***.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	183.631.272.982,29	159.289.066.718,71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(211.245.661.855,31)	(296.701.619.942,81)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	61.092.652.557,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(745.454,00)	(337.581,00)
Jumlah	**(27.615.134.327,02)**	**(76.320.238.248,10)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33
Kas di Bendahara Penerimaan	398.411.000,00	51.528.600,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.916.900,00	0,00
Kas di BLUD	4.621.882.096,23	58.233.673.614,89
Kas Dana BOS	722.912.155,88	711.610.259,29
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah	**40.883.452.335,96**	**117.209.643.226,51**

Saldo awal kas Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli tidak sama dengan saldo akhir kas Tahun 2022 sebesar Rp1.587.451.478,39 karena merupakan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) berupa sumbangan dari pihak ketiga yang teridiri dari sumbangan untuk bencana alam longsor di Desa Songan B dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.483.341.978,39, untuk percepatan penanganan COVID-19 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.000.000,00, dan untuk penanganan darurat bencana gempa bumi dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.109.500,00. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebesar Rp1.587.451.478,39 baru diakui sebagai pendapatan pada tahun 2023.

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi SiLPA atas Pendapatan Bunga BOS Tahun 2020	0,00	(41.352,02)
Koreksi SiLPA atas Pendapatan Bunga Kas BOS TA 2022	0,00	(37.399,75)
Koreksi SiLPA atas Kas BOS karena sekolah tutup (SDN 3 Dausa)	0,00	(6.211.471,68)
Koreksi SiLPA atas saldo awal dana BOS karena kesalahan catat pada SMP 4 Tembuku TA 2023	(0,25)	0,00
Koreksi SiLPA karena utang pajak PPN SDN 5 Yang Api sudah dibayarkan tahun 2021	0,00	337.581,00
Koreksi SiLPA karena utang pajak PPN TA 2020 pada SDN 1 Belantih	745.454,00	0,00
Jumlah	**745.453,75**	**(5.952.642,45)**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.4***.

5.5.8 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya	0,00	1.587.451.478,39
Jumlah	**0,00**	**1.587.451.478,39**

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	5.872.675.115,43	35.085.330.183,85
Kas di Bendahara Penerimaan	745.647.866,00	398.411.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	54.916.900,00
Kas di BLUD	2.575.866.509,58	4.621.882.096,23
Kas Dana BOS	0,00	722.912.155,88
Kas Dana BOSP	246.105.211,68	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Dana BOK Puskesmas	3.828.768.760,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	1.587.451.478,39
Jumlah	**13.269.063.462,69**	**42.470.903.814,35**

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo awal kas. Sedangkan di Tahun 2023 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK tidak disajikan di LAK sebagai saldo akhir kas. Jumlah tersebut tidak termasuk Kas Lainnya sebesar Rp4.041.000,00 yang merupakan sisa dana Jampersal yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Maret 2024 (baru diakui sebagai pendapatan tahun 2024).

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.4***.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	1.417.352.886.340,64	1.336.079.836.287,24

Pemerintah Kabupaten Bangli menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bangli yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) -LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) – LO	64.573.619.220,67	73.629.101.549,26

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***Poin 5.4.7***.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas – Kas	4.040.999,75	1.596.447.184,83
Koreksi Ekuitas – Piutang	(99.331.712,75)	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	243.274.293,22	58.202.704,18
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	-	-
Koreksi Ekuitas – Persediaan	0,40	145.411.110,40
Koreksi Ekuitas – Investasi	(300.292.486,13)	21.775.103,84
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(828.102.925,56)	5.672.464.728,89
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(18.103.333,33)	(56.515.416,00)
Koreksi Ekuitas – Kewajiban	(1.595.567.975,00)	206.163.088,00
Koreksi Ekuitas – Lainnya	-	-
Koreksi Nilai Pendapatan LO	-	-
Lain-Lain	-	-
Jumlah Dampak Kumulatif	**(2.594.083.139,40)**	**7.643.948.504,14**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan penyesuaian.

Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **siginifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar yang disebabkan adanya:
   a. Koreksi atas lebih catat Saldo Awal Kas Bos sebesar Rp0,25;
   b. Koreksi atas pengakuan Jampersal sebesar Rp4.041.000,00 pada Puskesmas Kintamani III;
   c. Koreksi atas lebih catat Piutang atas Laba pada Perumda Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli TA 2022 sebesar Rp99.331.712,66;
   d. Koreksi atas Saldo Awal Piutang atas Bunga CTKI sebesar Rp0,09;
   e. Koreksi atas penurunan nilai penyisihan piutang TA 2023 sebesar Rp243.274.293,22
   f. Koreksi atas kurang catat saldo awal persediaan obat-obatan lainnya sebesar 0,4
2. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Nilai Investasi yang disebabkan adanya;
   a. Penurunan nilai Investasi Dana Bergulir Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp600.000,00;
   b. Penurunan nilai Laba atas Penyertaan Modal Perumda Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli TA 2023 sebesar 180.603.113,92;
   c. Penurunan nilai Laba atas Penyertaan Modal PT BPR Bank Daearh Bangli Bangli TA 2022 sebesar Rp136.783.332,00
   d. Penurunan nilai Investasi Dana Bergulir CTKI TA 2023 sebesar Rp17.693.959,79.
3. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Nilai Aset Tetap yang disebabkan adanya:
   a. Kenaikan dan Penurunan nilai Aset Tetap karena Koreksi atas Saldo Awal TA 2022 sebesar Rp461.397.211,00;
   b. Kenaikan dan Penurunan nilai Akumulasi Penyusutan karena Koreksi Saldo Awal TA 2022 sebesar Rp1.289.500.136,56.
4. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya yang disebabkan karena:
   a. Adanya kurang catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software akibat inventarisasi Aset Lainya TA 2023 sebesar Rp 23.942.746,33 pada Dinas Perhubungan;
   b. Adanya lebih catat Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp.5.839.413,00 pada Sekretariat Daerah.
5. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Nilai Kewajiban yang disebabkan adanya:
   a. Penurunan nilai Utang PPN Pusat pada SDN Belantih yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya sebesar Rp745.454,00;
   b. Kenaikan nilai Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH atas lebih salur Pendapatan Bagi Hasil (DBH) TA 2023 sebesar Rp1.596.314.188,00.
6. Rincian atas Koreksi Ekuitas TA 2023 dapat dilihat pada ***Lampiran 49***.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

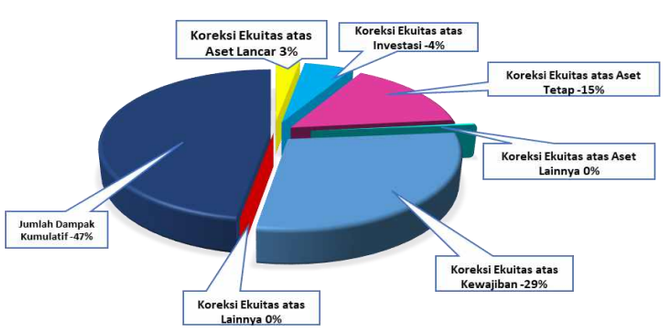

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	**1.479.332.422.421,91**	**1.417.352.886.340,64**

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.3.***

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Letak Geografis

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yang tidak memiliki laut atau berbatasan langsung dengan laut sehingga Kabupaten Bangli tidak memiliki pantai di tepi laut. Memiliki wilayah seluas 520,81 kilometer persegi atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Sebagian besar wilayah Bangli berupa dataran tinggi.

Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar di sebelah Barat dan Selatan, Kabupaten Singaraja di sebelah Utara, Kabupaten Karangasem dan Klungkung di sebelah Timur serta Kabupaten Badung sebelah Barat.

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Kabupaten Bangli dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bangli terletak di Kota Bangli sekaligus sebagai ibu kota kabupaten.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bangli merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangli dibagi dalam 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kintamani, Tembuku dan Susut, dengan 68 (enam puluh delapan) desa, 4 (empat) kelurahan, 336 (tiga ratus tiga puluh enam) dusun dan 28 (dua puluh delapan) lingkungan.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, dibentuk Pemerintah Daerah meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Infomasi dan Persandian;

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
18. Sekretariat Daerah;
19. Sekretariat DPRD;
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
22. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
24. Inspektorat;
25. Kantor Camat Bangli;
26. Kantor Camat Tembuku;
27. Kantor Camat Susut;
28. Kantor Camat Kintamani; dan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

6.4 Informasi Penting Lainnya

1. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

   Selama tahun 2023 terjadi pergantian manajemen baru dalam kepemerintahan yaitu pada pejabat eksekutif, pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Keputusan Bupati Bangli Nomor 821.2/746/2023 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

   Pergantian manajemen baru dalam kepemerintahaan tidak mempengaruhi perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli.

2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru

   Selama tahun 2023, walaupun terjadi pergantian manajemen baru, namun tidak terdapat adanya kesalahan dari manajemen terdahulu yang perlu dikoreksi oleh manajemen baru.

3. Pemisahan entitas tahun berjalan

   Pada tahun 2023 terjadi pemisahan entitas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, terdapat 1 (satu) entitas yang dipisah menjadi 2 entitas.

   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) dipisah menjadi 2 (dua) entitas yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

4. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

   Selama tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangli, tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial.

5. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan 2 (dua) aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPD dan SIMDA FMIS digunakan pada tahap penganggaran, untuk penatausahaan dan akuntansi pelaporan hanya menggunakan SIMDA FMIS.

   Penggunaan 2 (dua) aplikasi ini karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan dan akuntansi pada aplikasi SIPD. Selain itu, sebelum menggunakan SIMDA FMIS Kabupaten Bangli telah menggunakan SIMDA sehingga dalam penatausahaan sudah fasih dalam pengenalan menu-menu pada aplikasi SIMDA FMIS. Koordinasi dan penyelesaian masalah pada aplikasi SIMDA FMIS juga lebih mudah dikarenakan terdapat perwakilan BPKP di Provinsi Bali, sedangkan jika menggunakan SIPD koordinasi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian masalah karena harus melalui Kementerian Dalam Negeri.

   Namun, dengan menggunakan 2 (dua) aplikasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli, yaitu:

   a. Terdapat perbedaan terjemahan rekening belanja terutama pada Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS;
   b. Terjadi 2 (dua) kali proses input sehingga menambah pekerjaan serta menghabiskan lebih banyak waktu; dan
   c. Adanya risiko kesalahan dalam mengutip anggaran pada rincian objek/subrincian objek belanja.

BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Bangli menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut di mulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang dibidang keuangan.

BUPATI BANGLI

I GUSTI NYOMAN SEDANA ARTA, SE

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SKPD	URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1		**Piutang Pajak**	**38.817.107.320,78**	**34.958.797.066,00**	**34.976.147.815,00**	**38.799.756.571,78**
	BKPAD	Piutang PHR	1.680.310.760,85	16.639.510.605,00	16.988.228.711,00	1.331.592.654,85
	BKPAD	Piutang Reklame	2.649.880,00	934.903.047,00	933.965.547,00	3.587.380,00
	BKPAD	Piutang Pajak Penerangan Jalan	876.496.630,00	11.818.205.032,00	11.665.491.716,00	1.029.209.946,00
	BKPAD	Piutang Pajak Air Tanah	793.973.820,50	888.988.337,00	829.861.081,00	853.101.076,50
	BKPAD	Piutang Pajak PBB	35.359.716.655,00	4.524.242.237,00	4.392.929.952,00	35.491.028.940,00
	BKPAD	Piutang Pajak BPHTB	90.000.000,00	-	6.000.000,00	84.000.000,00
	BKPAD	Piutang Pajak Hiburan	13.959.574,43	152.947.808,00	159.670.808,00	7.236.574,43
			-			
2		**Piutang Retribusi**	**422.021.095,81**	**312.297.174,86**	**384.708.775,00**	**349.609.495,67**
	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Disperindag	Piutang Retribusi Jasa Umum Pemakaian Kekayaan Daerah	56.011.728,00	0,00	6.232.775,00	49.778.953,00
	BKPAD	Piutang Retribusi Jasa Umum Pemakaian Kekayaan Daerah	139.969.701,00	12.091.174,86	2.400.000,00	149.660.875,86
	Dinas Pendidikan	Piutang Retribusi Jasa Umum Pemakaian Kekayaan Daerah	55.466.666,81	0,00	0,00	55.466.666,81
	Diskominfo	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	142.135.000,00	194.390.000,00	266.315.000,00	70.210.000,00
	DLH	Retribusi Kebersihan/Persampahan	28.324.000,00	105.816.000,00	109.761.000,00	24.379.000,00
3		**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.625.614.352,71**	**4.661.241.576,54**	**2.821.192.017,00**	**5.465.663.912,25**
	BKPAD	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.625.614.352,71	4.661.241.576,54	2.821.192.017,00	5.465.663.912,25
4		**Piutang lain-lain PAD**	**12.370.489.737,46**	**6.093.886.505,30**	**11.609.805.281,88**	**6.854.570.960,88**
	BKPAD	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	15.220.000,00	4.592.404,00	4.592.404,00	15.220.000,00
	BKPAD	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	5.499.720,20	0,00	0,00	5.499.720,20
	BKPAD	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	532.789,58	-	532.789,58	0,00
	RSUD	Piutang Pendapatan BLUD	11.567.567.150,00	6.055.230.680,00	11.567.567.150,00	6.055.230.680,00
	Dinas Kesehatan	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.314.900,00	14.034.316,00	26.314.900,00	14.034.316,00
	BKPAD	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	151.158.177,68	20.029.105,30	4.851.038,30	166.336.244,68
	BKPAD	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	604.197.000,00	0,00	5.947.000,00	598.250.000,00

NO.	SKPD	URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
5		**Piutang Transfer**	**17.540.579.457,00**	**73.177.294.980,00**	**17.540.579.457,00**	**73.177.294.980,00**
	BKPAD	PKB	8.991.956.798,00	10.796.256.394,00	8.991.956.798,00	10.796.256.394,00
	BKPAD	PBBNKB	4.368.985.244,00	9.102.613.864,00	4.368.985.244,00	9.102.613.864,00
	BKPAD	PBBKB	4.156.075.694,00	6.952.254.835,00	4.156.075.694,00	6.952.254.835,00
	BKPAD	Pajak Air Permukaan	23.561.721,00	38.817.657,00	23.561.721,00	38.817.657,00
	BKPAD	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi	0,00	46.287.352.230,00	0,00	46.287.352.230,00
6		**Piutang Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BKPAD	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**72.775.811.963,76**	**119.203.517.302,70**	**67.332.433.345,88**	**124.646.895.920,58**

BUPATI BANGLI

I GUSTI NGURAH SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian/Nama	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
A	**Piutang Pajak**	**38.799.756.571,78**	**27.403.003.748,44**	**11.396.752.823,34**
1	Piutang Pajak Hotel	62.974.494,55	28.128.763,65	34.845.730,90
2	Piutang Pajak Restoran	1.268.618.160,30	1.131.861.733,11	136.756.427,19
3	Piutang Pajak Reklame	3.587.380,00	2.654.567,50	932.812,50
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.029.209.946,00	5.146.049,73	1.024.063.896,27
5	Piutang Pajak Air Tanah	853.101.076,50	268.654.476,38	584.446.600,12
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	35.491.028.940,00	25.923.834.500,63	9.567.194.439,37
7	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	84.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
8	Piutang Pajak Hiburan	7.236.574,43	723.657,44	6.512.916,99
			-	-
B	**Piutang Retribusi**	**349.609.495,67**	**303.768.381,68**	**45.841.113,99**
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	114.000,00	-
2	Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan	24.379.000,00	16.301.830,00	8.077.170,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.210.000,00	44.476.775,00	25.733.225,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	254.906.495,67	242.875.776,68	12.030.718,99
			-	-
C	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.465.663.912,25**	**468.958.659,66**	**4.996.705.252,59**
			-	-
D	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**6.854.570.960,88**	**740.569.853,85**	**6.114.001.107,03**
1	Piutang Denda Pajak	15.220.000,00	15.220.000,00	-
2	Piutang Denda Retribusi	5.499.720,20	5.499.720,20	-
3	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	-	
4	Piutang BLUD RSUD	6.055.230.680,00	30.276.153,40	6.024.954.526,60
5	Piutang BLUD Puskesmas	14.034.316,00	70.171,58	13.964.144,42

No	Uraian/Nama	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.336.244,68	91.253.808,67	75.082.436,01
7	Piutang Penguatan Modal Gabah, Kopi dan UP3HP	598.250.000,00	598.250.000,00	-
8	Piutang kelebihan DBH Pajak kepada Desa	-	-	-
		-	-	-
	Jumlah	**51.469.600.940,58**	**28.916.300.643,63**	**22.553.300.296,95**

(75.216.248,04)

-

BUPATI BANGLI

I GUSTI NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	576.000.000,00	348.101.872,53	227.898.127,47
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	37.548.525,00	37.548.525,00	-
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	19.200.000,00	19.200.000,00	-
	Jumlah	**613.548.525,00**	**385.650.397,53**	**227.898.127,47**

BUPATI BANGLI

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVENSTASI) PEMERINTAH DAERAH

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi daerah)	Jumlah penyertaan modal daerah	Jml modal yg telah disertakan sampai dgn awal tahun	Penyertaan modal tahun Ini	Jml modal yg telah disertakan sampai akhir tahun ini	Sisa modal yg belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) Tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yg diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yg disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2017	BPD Bali	Perda No. 9 Tahun 2015	saham	13.577.726.125,83	13.577.726.125,83	-	13.577.726.125,83		3.280.868.962,08	-	13.577.726.125,83
2	2016	PDAM Bangli	Perda No. 4 Tahun 2017	kepemilikan 100%	45.111.049.851,68	27.897.786.252,96	-	27.897.786.252,96		-	-	27.897.786.252,96
3	2006	PD BPR Bank Pasar	Perda No. 5 Tahun 2017	kepemilikan 100%	13.000.000.000,00	28.629.095.055,26	-	28.629.095.055,26		2.600.764.186,00	-	28.629.095.055,26
4	2016	PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali	Perda No.10 Tahun 2015	saham	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00		5.766.847,00	-	600.000.000,00
5	2015	PD Bhukti Mukti Bhakti	Perda No. 5 Tahun 2015	kepemilikan 100%	1.000.000.000,00	(15.458.207,00)	-	(15.458.207,00)		-	-	(15.458.207,00)
		Jumlah			73.288.775.977,51	70.689.149.227,05	-	70.689.149.227,05	-	5.887.399.995,08		70.689.149.227,05

BUPATI BANGLI

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	101.814.002.137,35	8.530.472.692,00	4.452.836.219,00	105.891.638.610,35
2	Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	9.660.600.698,00	22.800.000,00	3.194.131.821,66	6.489.268.876,34
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.811.812.518,00	496.092.480,00	420.354.180,00	26.887.550.818,00
4	Inspektorat	2.530.593.390,00	283.382.000,00	-	2.813.975.390,00
5	Dinas Kesehatan	139.135.735.536,50	8.530.444.813,00	7.894.913.671,00	139.771.266.678,50
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.368.508.638.220,33	104.744.601.550,00	33.930.743.427,00	1.439.322.496.343,33
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	378.394.436.958,17	29.802.270.588,00	3.506.333.629,00	404.690.373.917,17
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.211.781.107,00	1.238.243.047,36	815.189.770,00	1.634.834.384,36
9	Dinas Perhubungan	18.741.687.719,15	6.551.071.950,78	134.465.640,00	25.158.294.029,93
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5.197.851.229,00	31.790.000,00	-	5.229.641.229,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	-	-	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.749.014.777,00	77.410.000,00	-	6.826.424.777,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.960.155.542,00	41.400.000,00	2.600.000,00	10.998.955.542,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.205.179.322,02	11.061.176.121,00	593.760.320,00	17.672.595.123,02
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.874.028.036,21	91.382.067.552,00	13.245.462.009,00	152.010.633.579,21
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.046.071.671,00	2.550.000,00	-	3.048.621.671,00
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	40.719.785.043,11	801.401.900,00	73.000.000,00	41.448.186.943,11
18	Dinas Lingkungan Hidup	51.170.195.377,98	7.486.710.194,89	1.164.268.229,00	57.492.637.343,87
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.747.166.763,02	13.394.439.984,75	4.794.198.400,09	49.347.408.347,68
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	424.447.344,00	-	424.447.344,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah	280.680.934.069,32	48.910.243.953,05	16.769.098.582,00	312.822.079.440,37
22	Satuan Polisi Pamong Praja	2.068.562.800,00	-	-	2.068.562.800,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.301.069.801,00	140.050.000,00	411.431.400,00	1.029.688.401,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	6.870.550.492,00	2.179.954.950,00	1.115.291.925,00	7.935.213.517,00

NO.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.207.906.822,00	23.350.000,00	382.217.712,44	1.849.039.109,56
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.076.386.851,75	148.413.000,00	-	2.224.799.851,75
27	Kecamatan Bangli	4.985.402.712,88	199.330.510,00	-	5.184.733.222,88
28	Kecamatan Kintamani	3.871.081.891,00	-	-	3.871.081.891,00
29	Kecamatan Susut	2.541.771.455,50	7.400.000,00	-	2.549.171.455,50
30	Kecamatan Tembuku	3.215.150.804,00	2.769.798.000,00	54.000,00	5.984.894.804,00
JUMLAH		**2.596.297.553.745,29**	**339.281.312.630,83**	**92.900.350.935,19**	**2.842.678.515.440,93**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Belanja Tanah	182.690.383.171,00	12.339.311.351,36	2.024.224.500,00	193.005.470.022,36
2	Belanja Peralatan dan Mesin	438.946.426.286,18	34.350.828.469,00	9.968.264.451,44	463.328.990.303,74
3	Belanja Gedung dan Bangunan	643.314.788.999,19	194.458.177.197,69	58.305.864.870,75	779.467.101.326,13
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.255.416.002.811,16	96.052.622.758,78	11.129.007.860,00	1.340.339.617.709,94
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	75.929.952.477,76	2.080.372.854,00	11.472.989.253,00	66.537.336.078,76
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.901.638.883,11	3.221.309.023,09	2.204.567.208,00	6.918.380.698,20
7	Akumulasi Penyusutan	(1.279.896.955.975,55)	(162.252.981.784,36)	(23.465.451.137,00)	(1.418.684.486.622,91)
JUMLAH		**1.322.302.236.652,85**	**180.249.639.869,56**	**71.639.467.006,19**	**1.430.912.409.516,22**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sekretariat Daerah	-										0,00
2	Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	44.670.000,00									-	44.670.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-									-	0,00
4	Inspektorat Daerah	-										0,00
5	Dinas Kesehatan	100.017.700,00										100.017.700,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.607.428.641,28		1.669.232.900,00				609.294.650,00			-	4.667.366.891,28
7	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-		294.998.426,00							-	294.998.426,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-		389.133.550,00								389.133.550,00
9	Dinas Perhubungan	224.719.000,00										224.719.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	-										0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-										0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-										0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-										0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	198.835.485,00		-				198.835.485,00			-	0,00
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	284.953.383,83		134.230.047,00							-	419.183.430,83
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-										0,00
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	-										0,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	736.738.473,00						736.738.473,00			-	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	219.792.200,00		733.714.100,09				175.214.600,00			-	778.291.700,09
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-										0,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah	484.484.000,00					-	484.484.000,00			-	0,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	-										0,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-										0,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	-										0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	-										0,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-										0,00
27	Kecamatan Bangli	-										0,00
28	Kecamatan Tembuku	-										0,00
29	Kecamatan Susut	-										0,00
30	Kecamatan Kintamani	-										0,00
JUMLAH		**5.901.638.883,11**	**-**	**3.221.309.023,09**	**-**	**-**	**-**	**2.204.567.208,00**	**-**	**-**	**-**	**6.918.380.698,20**

BUPATI BANGLI,

I WAYAN SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	813.881.040,00	-	-	813.881.040,00
2	Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	0,00	545.553.937,00	-	545.553.937,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	320.445.674,00	-	-	320.445.674,00
4	Inspektorat	207.568.700,00	-	-	207.568.700,00
5	Dinas Kesehatan	1.073.330.535,50	935.126.500,00	-	2.008.457.035,50
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	540.146.050,00	-	-	540.146.050,00
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.931.420.875,00	55.000.000,00	47.000.000,00	2.939.420.875,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.808.958.131,00	-	-	2.808.958.131,00
9	Dinas Perhubungan	35.605.000,00	-	-	35.605.000,00
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	162.000.000,00	-	-	162.000.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	184.022.623,00	-	-	184.022.623,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46.098.500,00	-	-	46.098.500,00
13	Dinas Perhubungan	185.545.500,00	-	-	185.545.500,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	348.900.000,00	-	-	348.900.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	-	-	0,00
16	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	121.222.533,00	-	-	121.222.533,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	1.123.896.243,00	-	-	1.123.896.243,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	-	-	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17.750.000,00	-	-	17.750.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	189.271.153,00	-	-	189.271.153,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	-	-	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47.233.000,00	426.056.220,00	426.056.220,00	47.233.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	32.235.000,00	-	-	32.235.000,00
24	Kecamatan Bangli	244.659.866,33	-	-	244.659.866,33
25	Kecamatan Susut	23.718.500,00	-	-	23.718.500,00
26	Kecamatan Kintamani	161.878.338,00	-	-	161.878.338,00
27	Kecamatan Tembuku	0,00	-	-	0,00
28	Rumah Sakit Umum Daerah	15.923.866.995,00	6.538.936.071,00	-	22.462.803.066,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	122.490.368,44	-	122.490.368,44
30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00
JUMLAH		**27.567.654.256,83**	**8.623.163.096,44**	**473.056.220,00**	**35.717.761.133,27**

BUPATI BANGLI,

I SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRNASFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					
JUMLAH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga PPN Pusat	745.454,00	0,00	745.454,00	0,00
	Utang Bunga	382.589.121,00	382.589.121,00	382.589.121,00	382.589.121,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	996.897.055,00	10.965.867.605,00	0,00	11.962.764.660,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	197.958.598,50	1.135.941.209,78	197.958.598,50	1.135.941.209,78
3	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	630.973.428,00	13.667.050.980,00	630.973.428,00	13.667.050.980,00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.590.783.538,00	8.503.562.409,00	7.590.783.538,00	8.503.562.409,00
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	5.263.356.195,00	7.194.120.280,00	5.263.356.195,00	7.194.120.280,00
6	Utang Belanja Jasa	1.038.958.927,00	6.166.125.766,00	976.558.989,00	6.228.525.704,00
7	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.754.458.901,77	15.566.207.234,54	7.754.458.901,77	15.566.207.234,54
	Utang Belanja Modal	0,00	43.934.580.800,00	0,00	43.934.580.800,00
	Utang Belanja Transfer	43.000,00	9.120.000,00	43.000,00	9.120.000,00
8	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	157.000,00	175.649,00	0,00	332.649,00
9	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	6.786.037,87		0,00	6.786.037,87
	Utang Kelebihan Hasil Pengelolaan CTKI	228.057,56		0,00	228.057,56
10	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	1.596.314.188,00	0,00	1.596.314.188,00
11	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.964.348.331,00	46.212.827,00	5.953.094.131,00	57.467.027,00
		29.828.283.644,70	**109.167.868.069,32**	**28.750.561.356,27**	**110.245.590.357,75**

BUPATI BANGLI,

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang atas Pinjaman Dalam Negeri	70.779.685.202,00	0,00	10.965.867.605,00	59.813.817.597,00
Jumlah			**0,00**	**10.965.867.605,00**	**59.813.817.597,00**

BUPATI BANGLI,

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2023
DAN DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN BERIKUTNYA

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Master Plan Pusat Olahraga (Pengalihan Status Penggunaan tahun 2023 dari PU)	98.655.150,00	98.655.150,00	-	100		
2		Belanja Jasa Review Master Plan Penataan Pusat Olahraga Sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olaharaga Rekreasi	100.000.000,00	99.196.276,00	803.724,00	99		
3		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Belanja Barang Jasa Perencanaan Pematangan Lahan dan Fasilitas Penunjang Tahap 1 Pusat Olahraga) Sub. Kegiatan Penyedian Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	98.000.000,00	97.147.000,00	853.000,00	99		
4		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sub. Kegiatan Penyedian Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi					29.623.445.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
5	Dinas Kesehatan	Belanja Desain Kintamani I	1.431.300,00	1.431.300,00	-	100		
		BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN-JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BANGLI	98.586.400,00	98.586.400,00	-	100		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	43.422.000,00	43.422.000,00	0,00	100		
7		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	48.873.000,00	48.873.000,00	0,00	100		
8		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	47.870.000,00	47.870.000,00	0,00	100		
9		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	34.419.621,73	34.419.621,73	0,00	100		
10		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.823.000,00	20.823.000,00	0,00	100		
11		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	89.545.762,10	89.545.762,10	0,00	100		
12		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	100		
13		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	89.530.047,00	89.530.047,00	0,00	100		
14		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Pembangunan gedung Sentra IKM					4.595.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.560.486.000,00	389.133.550,00	8.171.352.450,00	5	8.171.352.450,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
16	Dinas Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	175.340.000	175.340.000	-	100		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Dinas Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	49.379.000	49.379.000	-	100		
18		Pembangunan Dermaga Kedisan Danau Batur Tahap V					13.799.968.000,00	- Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kedisan Didanau Batur Tahap V Nomor: PL.107/6/15/BPTD-BALI/2024 TANGGAL 15 MARET 2024
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.	44.577.600,00	44.577.600,00	-	100		
20		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	999.996.769,37	649.997.900,09	349.998.869,28	65	350.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	83.716.200,00	83.716.200,00	-	100		
22	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan Meteran Air	44.670.000,00	44.670.000,00	-	100		
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Rekonstruksi Jalan						
24		Peningkatan Jalan Bangun Lemah Kawan Dalem Setra Agung di Kec. Susut	17.676.521,76	17.676.521,76	-	100		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25		Peningkatan Jalan Bangun Lemah Kawan Bangun Lemah Kangin di Kec. Susut	12.078.956,52	12.078.956,52	-	100		
26		Belanja jasa konsultasi perencanaan	29.303.000,00	29.303.000,00	-	100		
27		Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Penelokan di Kecamatan Kintamani	180.620.000,00	180.620.000,00	-	100		
28		Jasa Konsultansi Pembuatan DED Pembangunan Jembatan Pura Tirta Yeh Mampeh di Kecamatan Kintamani	41.606.000,00	41.606.000,00	-	100		
29		DED Jalan Bebalang - Tamanbali	26.143.660,00	26.143.660,00	-	100	1.315.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
30		DED Jalan beluhu-kubakal	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
31		DED Jalan Awan - Subak Mertasari	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
32		DED Jalan Batu Meyeh - Batu Meyeh	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
33		DED Jalan Belong Danginan - Pemuteran	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
34		DED Jalan Bonyoh- Abuan	16.567.000,00	16.567.000,00	-	100		
35		DED Jalan Bubung Kelambu - Pura Prapen	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
36		DED jalan Bugbugan Telemba	16.567.000,00	16.567.000,00	-	100		
37		DED Jalan Bunutin - Pujung	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
38		DED Jalan Demulih - Serokadan	19.482.000,00	19.482.000,00	-	100		
39		DED Jalan Gelagah Linggah - Bukih	19.482.000,00	19.482.000,00	-	100		
40		DED Jalan Kuta Dalem - Awan	16.567.000,00	16.567.000,00	-	100		
41		DED Jalan Lateng - Batih	19.482.000,00	19.482.000,00	-	100		
42		DED Jalan Manuk - Manuk	26.143.680,00	26.143.680,00	-	100		
43		DED Jalan Pengotan - Plangkian	26.143.660,00	26.143.660,00	-	100	370.800.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
44		DED Jalan Sanda - Muncung Sari	19.575.000,00	19.575.000,00	-	100	310.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45		DED Jalan Subak Bayung - Sukawana	16.567.000,00	16.567.000,00	-	100		
46		DED Jalan Subaya tirta pemujan - Tirta Dedari	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
47		DED Jalan Tiangan - Pengejaran	19.607.750,00	19.607.750,00	-	100		
48		DED Jalan Yangapi -Tingas	19.482.000,00	19.482.000,00	-	100		
49		DED Jembatan Awan- Sabang	74.828.000,00	74.828.000,00	-	100		
50		DED Jembatan Batur - Tandang Buana Sari	74.828.000,00	74.828.000,00	-	100		
51		DED Jembatan Kayuambua - Malet	75.074.000,00	75.074.000,00	-	100		
52		DED Jembatan Penglipuran - Buungan Tiga	75.074.000,00	75.074.000,00	-	100		
53		Jasa Konsultan Perencanaan Landih - Penaga	34.494.500,00	34.494.500,00	-	100	833.693.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
54		Jasa Konsultan Perencanaan Kubu - Samania	22.108.000,00	22.108.000,00	-	100		
55		Jasa Konsultan Perencanaan Peludu - Abuan	29.602.500,00	29.602.500,00	-	100		
56		Jasa Konsultan DED Peningkatan Batur - Wanagiri	22.583.000,00	22.583.000,00	-	100		
57		Jasa Konsultan DED Peningkatan Kayu Selem - Pelemek	22.583.000,00	22.583.000,00	-	100		
58		DED Perencanaan Jalan Penaga - Kalanganyar	36.487.800,00	36.487.800,00	-	100	1.000.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
59		DED Pengiangan Kawan - Selat Nyuhan	19.707.000,00	19.707.000,00	-	100	275.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
60		Review DED Jalan Lembean - Langgahan	28.601.000,00	28.601.000,00	-	100		
61		Review DED Jalan Peludu - Abuan	28.601.000,00	28.601.000,00	-	100		
62		DED Jalan Kedisan - Trunyan	95.657.000,00	95.657.000,00	-	100		
63		DED Jalan Belantih - Kembang Sari	24.749.000,00	24.749.000,00	-	100		
64		DED Jalan Belanga - Sabang	24.749.500,00	24.749.500,00	-	100		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65		DED Jalan Sabang 1	24.749.500,00	24.749.500,00	-	100		
66		DED Jalan Demulih - Bangun Lemah	36.901.500,00	36.901.500,00	-	100		
67		DEDJalan Bunutin - Selati	36.901.500,00	36.901.500,00	-	100		
68		DED Jalan Lumbuan - Selat Peken	23.120.000,00	23.120.000,00	-	100		
69		DED Jalan Petak - Jelekungkang	23.120.000,00	23.120.000,00	-	100		
70		DED Jalan Tiga - Linjong - Penyebeh	23.120.000,00	23.120.000,00	-	100		
71		DED Jalan Songan - Kayu Selem	37.346.500,00	37.346.500,00	-	100		
72		DED Jalan Penglipuran - Buungan Tiga	37.346.500,00	37.346.500,00	-	100		
73		DED Jalan Tembuku - Kelempung	37.093.425,00	37.093.425,00	-	100		
74		DED Jalan Landih - Langkan	37.093.425,00	37.093.425,00	-	100		
75		DED Jalan Undisan - Metra Kaja	36.999.075,00	36.999.075,00	-	100		
76		DED Jalan Beluhu - Gluwung	36.999.075,00	36.999.075,00	-	100		
77		Rehabilitasi saluran drainase kewenangan Kabupaten di kawasan perkotaan Bangli	2.868.677.000,00	860.603.100,00	2.008.073.900,00	30	2.008.073.900,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Trategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
78		Penyusunan kajian dan DED optimalisasi sarana air bersih	85.299.000,00	85.299.000,00	-	100		
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Trategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						
79		Penyusunan DED drainase di kota Kec.Bangli	46.871.000,00	46.871.000,00	-	100		
80		Penyusunan DED drainase di kota Kec.Kintamani	33.396.000,00	33.396.000,00	-	100		
81		Penyusunan DED drainase di kota Kec.Susut	33.396.000,00	33.396.000,00	-	100		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya						
82		Pengawasan Penataan Sasana Budaya di Kabupaten Bangli	99.512.000,00	99.512.000,00	-	100		
83		DED Penataan Sasana Budaya	99.191.000,00	99.191.000,00	-	100	4.860.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbud Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024
84		Master Plan Sasana Budaya	99.292.000,00	99.292.000,00	-	100		
85		Master Plan Bencingah Dan Kantor BRI	99.320.100,00	99.320.100,00	-	100		
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	isi sub kegiatan terkait bangunan dan lingkungannya						
86		DED Lanjutan Penataan Pasar Loka Srana	59.775.000,00	59.775.000,00	-	100		
87		DED Kota Kecamatan Susut	49.595.500,00	49.595.500,00	-	100		
88		DED Kota Kecamatan Tembuku	49.595.500,00	49.595.500,00	-	100		
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
89		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mandi	164.337.936,00	164.337.936,00	-	100		
90		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sala	388.684.953,00	388.684.953,00	-	100		
91		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Yangapi	327.291.945,00	327.291.945,00	-	100		
92		Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA.2021 (D.I Empelan)	8.413.111,00	8.413.111,00	-	100		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93		Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA.2021 (D.I Sidembunut Kiri)	6.730.489,00	6.730.489,00	-	100		
94		Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA.2021 (D.I Tingkad Batu)	6.730.489,00	6.730.489,00	-	100		
95		Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA.2021 (D.I Sidembunut Kanan)	67.948.490,00	67.948.490,00	-	100		
96		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tamanbali	221.143.000,00	221.143.000,00	-	100		
97		Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi TA 2022	99.374.000,00	99.374.000,00	-	100		
Jumlah			**17.449.462.641,48**	**6.918.380.698,20**	**10.531.081.943,28**		**67.512.332.350,00**	**-**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2023	Sumber a)	Status b)	Aset lancar	Aset Tidak Lancar	Aset lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Sahan Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	**Bidang Perbankan**																	
	PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	APBD	BUMD	316.863.777.391,00	4.179.052.555,00	618.139.934,00	321.660.969.880,00	292.696.222.563,00	-	292.696.222.563,00	13.000.000.000,00	-	-	-	11.078.963.626,00	28.964.747.318,00	100%	100%
	PT Bank BPD Bali	APBD	BUMD	-	-	-	-	-	-	-	13.577.726.125,83	-	-	-	-	-	0.73%	0.73%
2	**Bidang Pemanfaatan Air Minum**																	
	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	APBD	BUMD	7.298.674.369,00	25.965.355.994,00	0,00	33.264.030.363,00	4.039.783.326,00	537.726.184,00	4.577.509.510,00	45.111.049.851,68	-	-	-	(16.424.528.999,00)	28.686.520.853,00	100%	100%
3	**Bidang Sumber Daya**																	
	Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti	APBD	BUMD	303.955.373,00	75.468.124,00	-	379.423.497,00	394.881.703,00		394.881.703,00	1.000.000.000,00	-	-	-	(1.015.458.207,00)	(15.458.207,00)	100%	100%
4	**Bidang Asuransi**																	
	PT Jamkrida Bali Mandara	APBD	BUMD	-	-	-	-		-	-	600.000.000,00	-	-	-	-	-	0.40%	0.40%
	Total Seluruh Bidang Industri			324.466.407.133,00	30.219.876.673,00	618.139.934,00	355.304.423.740,00	297.130.887.592,00	537.726.184,00	297.668.613.776,00	73.288.775.977,51	-	-	-	(6.361.023.580,00)	57.635.809.964,00		

BUPATI BANGLI,

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2023	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Bidang Perbankan**								
	PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	APBD	BUMD	31.637.525.474,00	25.300.806.879,00	6.336.718.595,00	-	134.600.750,00	6.202.117.845,00
2	**Bidang Pemanfaatan Air Minum**								
	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	APBD	BUMD	43.230.456.190,00	38.726.215.609,00	4.504.240.581,00	62.470.640,00	6.766.221,00	4.559.945.000,00
3	**Bidang Sumber Daya**								
	Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti	APBD	BUMD	260.104.424,00	279.343.506,00	(19.239.082,00)	-	124.874,00	(19.363.956,00)
	Total Seluruh Bidang Industri			**75.128.086.088,00**	**64.306.365.994,00**	**10.821.720.094,00**	**62.470.640,00**	**141.491.845,00**	**10.742.698.889,00**

BUPATI BANGLI,

I WAYAN NYOMAN SEDANA ARTA